



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari :
 - a. Visi, Misi dan Program Bupati terpilih tahun 2016; dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
 - a. RPJMD Provinsi;
 - b. RTRW;
 - c. KLHS; dan
 - d. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 6

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
- d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
- i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
- k. BAB XI : Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 7

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 8

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 13

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 14

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat RPJMD Tahun 2021 – 2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 10

WARDOYO WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016 - 2021

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran mulai Tahun 2017-2021. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016-2021	1
BAB I PENDAHULUAN.....	I- 1
1.1 Latar Belakang.....	I- 1
1.2 Landasan Hukum.....	I- 3
1.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016- 2021 dengan Dokumen Perencanaan Lain	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
1.5 Maksud dan Tujuan	I - 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-26
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-59
2.4Aspek Daya Saing Daerah.....	II-129
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-25
3.3 Kerangka Pendanaan	III - 33
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2 Lingkungan Strategis	IV-14
4.3Kajian Isu-isu Strategis	IV - 18
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1 Visi.....	V-1
5.2 Misi	V-2
5.3 Keterkaitan Visi-Misi Bupati Tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	V-3
5.4 Tujuan dan Sasaran.....	V-12
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII - 1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	X - 1
9.1 Kaidah Indikator Pengukur	X - 1
9.2 Indikator Capaian Kinerja Daerah	X - 2

BAB X	PEDOMAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	X - 1
	10.1 Pedoman Transisi	X - 1
	10.2 Kaidah Pelaksanaan	X - 3
BAB XI	PENUTUP	VIII - 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Hubungan Keterkaitan Antardokumen Perencanaan	I-6
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo.....	II-3
Gambar 2.2	Rata-rata Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Sukoharjo (mm) Tahun 2014	II-5
Gambar 2.3	Fluktuasi Hari Hujan Per Bulan Per Tahun (2007-2013)	II-7
Gambar 2.4	Fluktuasi Curah Hujan (mm) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007-2013.....	II-7
Gambar 2.5	Peta Kelerengan dan Peta Tanah Kabupaten Sukoharjo.....	II-9
Gambar 2.6	Peta Hidrogeologi dan Intensitas Curah Hujan	II-10
Gambar 2.7	Peta Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo.....	II-11
Gambar 2.8	Potensi Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah	II-14
Gambar 2.9	Peta Pola Ruang Kabupaten Sukoharjo	II-19
Gambar 2.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 (Dihitung dengan Tahun Dasar 2010)	II-27
Gambar 2.11	Perkembangan PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014 (Juta Rp).....	II-28
Gambar 2.12	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2014 (%)	II-28
Gambar 2.13	PDRB Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014.....	II-38
Gambar 2.14	Sebaran Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015.....	II-40
Gambar 2.15	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Sukoharjo dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2015	II-41
Gambar 2.16	Garis Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014	II-43
Gambar 2.17	Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014.....	II-43
Gambar 2.18	Sebaran Penduduk Miskin per Kecamatan Tahun 2015.....	II-44
Gambar 2.19	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014.....	II-45
Gambar 2.20	Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014	II-46
Gambar 2.21	Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014	II-134
Gambar 3.1	Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%).....	III-5
Gambar 3.2	Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah (%).....	III-25

Gambar 3.3	Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah (%).....	III-26
Gambar 4.1	Skema keterkaitan Isu-Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2014-2019 dengan Isu-Isu Kabupaten Sukoharjo dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2016-2021.....	IV-28
Gambar 4.2	keterkaitan Isu-Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2019 dengan Isu-Isu Kabupaten Sukoharjo dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2016-2021	IV-29
Gambar 5.1	Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021	V-4
Gambar 5.2	Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 denganRPJMDKabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021	V-7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.....	II-2
Tabel 2.2	Rata-rata Curah Hujan Menurut Bulan dan Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo (mm) Tahun 2014.....	II-5
Tabel 2.3	Karakteristik Kawasan di Kabupaten Sukoharjo	II-12
Tabel 2.4	Hirarki dan Rencana Status Perkotaan Kabupaten Sukoharjo.....	II-15
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014.....	II-17
Tabel 2.6	Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 ..	II-20
Tabel 2.7	Angka Migrasi Netto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015.....	II-22
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-24
Tabel 2.9	Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 (jiwa/km ²)	II-26
Tabel 2.10	PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Harga Berlaku Tahun 2010-2015 (dalam Juta Rupiah)	II-29
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 (%)	II-31
Tabel 2.12	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014 (%)	II-35
Tabel 2.13	PDRB Per Kapita Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014 (Rupiah)	II-37
Tabel 2.14	Tingkat Inflasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-41
Tabel 2.15	Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014..	II-42
Tabel 2.16	Capaian IPM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-47
Tabel 2.17	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-47
Tabel 2.18	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-48
Tabel 2.19	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 (Tahun).....	II-48
Tabel 2.20	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-49
Tabel 2.21	APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-49
Tabel 2.22	CapaianAPM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-50

Tabel 2.23	Capaian APS SD Sederajat, SMP Sederajat dan SMA/SMK/MA Sederajat di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-51
Tabel 2.24	Capaian Angka Kelulusan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-52
Tabel 2.25	Capaian Angka Melanjutkan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-52
Tabel 2.26	AKI Per 100.000 KH di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-53
Tabel 2.27	AKB dan AKABA di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-54
Tabel 2.28	Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-55
Tabel 2.29	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-56
Tabel 2.30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-57
Tabel 2.31	IPG dan IDG di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-58
Tabel 2.32	Perkembangan Klub Olahraga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-59
Tabel 2.33	Rasio Ketersediaan Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014	II-60
Tabel 2.34	Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-60
Tabel 2.35	Prosentase Pendidik dengan Kualifikasi D4/S1 Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-61
Tabel 2.36	Jumlah Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-63
Tabel 2.37	Jumlah Tenaga Paramedis di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-64
Tabel 2.38	Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo 2010-2015	II-65
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-77
Tabel 2.40	Capaian Pembangunan Bidang Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-78
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-81
Tabel 2.42	Jumlah PMKS di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2015.....	II-84
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Bidang Sosial di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-86

Tabel 2.44	Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-87
Tabel 2.45	Jumlah Kasus Kekerasan dan Prosentase KDRT yang Terselesaikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015.....	II-90
Tabel 2.46	Capaian Kinerja SPM Bidang Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-90
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2010-2015	II-92
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-94
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-95
Tabel 2.50	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2015	II-97
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-98
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-100
Tabel 2.53	Jumlah Peserta KB dan KK Sejahtera di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015.....	II-101
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-102
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-103
Tabel 2.56	Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015.....	II-104
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-105
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-106
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-108
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-111
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-111
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2010-2015.....	II-113
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-114
Tabel 2.64	Data Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-115
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-116
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-117

Tabel 2.67	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015	II-120
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-121
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-122
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminisrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015	II-123
Tabel 2.71	Data Pegawai (PNS) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	II-127
Tabel 2.72	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikannya di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-128
Tabel 2.73	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-128
Tabel 2.74	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Fungsional di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-129
Tabel 2.75	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 (Ribu Rp)	II-130
Tabel 2.76	Tindak Kejahatan yang Tertangani di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015	II-132
Tabel 2.77	Izin yang Dikeluarkan Tahun 2011-2015.....	II-132
Tabel 2.78	Rincian Data Perizinan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2014	II-133
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 – 2015.....	III-3
Tabel 3.2	Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	III-8
Tabel 3.3	Alokasi Belanja Langsung Per Urusan/Bidang Tahun 2010-2015.....	III-10
Tabel 3.4	Prosentase Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014	III-14
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	III-15
Tabel 3.6	Neraca Daerah Kabupaten Sukoharjo	III-16
Tabel 3.7	Perhitungan Neraca Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	III-22
Tabel 3.8	Kapasitas Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	III-28
Tabel 3.9	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	III-29
Tabel 3.10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.....	III-30
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sukoharjo	III-31
Tabel 3.12	Rasio Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah	III-32

Tabel 3.13	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Tidak Langsung Tahun 2010-2015..	III-33
Tabel 3.14	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Belanja Langsung Tahun 2010-2015	III-33
Tabel 3.15	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2010-2015	III-33
Tabel 3.16	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.....	III-36
Tabel 3.17	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.....	III-39
Tabel 3.18	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.....	III-42
Tabel 3.19	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021	III-43
Tabel 3.20	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Ril Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Skoharjo Tahun 2016-2021	III-44
Tabel 3.21	Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021	III-46
Tabel 3.22	Proyeksi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021	III-47
Tabel 5.1	Sinkronisasi RPJMN 2014-2019 dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021	V-5
Tabel 5.2	Sinkronisasi RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031,RPJPKabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.....	V-8
Tabel 5.3	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator dalam Mencapai Visi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 .	V-16
Tabel 5.4	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Per Tahun dalam Mencapai Visi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.....	V-30
Tabel 6.1	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator dalam Mencapai Visi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 .	VI-2
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Sukoharjo	VII-3
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Sukoharjo.....	VIII-3
Tabel 8.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.....	VIII-16
Tabel 9.1	Indikator Capaian Kinerja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021	IX-2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden. *Nawa Cita ke 2 Kami akan membuat Pemerintah tidak absen Dengan membangun Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya*, Dimana target pertama yaitu Memulihkan kepercayaan Publik melalui reformasi Sistem kepartaian, Pemilu, dan Lembaga perwakilan dengan indikator keberhasilan yaitu 100% Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan Anggaran dan rencana pembangunan Daerah pada tahun 2016. Konsep pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah inilah yang perlu diterapkan oleh pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana perwujudan amanat regulasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, serta Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD ialah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Implementasi RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2005–2025, telah memasuki tahapan Pembangunan Lima Tahun Ketiga. Tahapan Pembangunan Lima Tahun ketiga ini menjadi bagian yang integral dengan visi dan misi dalam pemerintahan Bupati Sukoharjo periode 2016–2021 sebagai RPJMD Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yaitu H. Wardoyo Wijaya, SH.,MH dan Purwadi, SE.,MM. Selain itu penyusunannya RPJMD Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Sukoharjo memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sukoharjo, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Dalam Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 ini tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 diarahkan pada penguatan jalannya Pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang, terutama yang menekankan pada keterwujudan kualitas sumber daya manusia, pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah, pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, yang didukung dengan tata pemerintahan yang baik dan aparat yang

profesional serta dalam rangka penguatan kondisi daerah yang aman,damai, tertib dan tentram melalui penegakan supremasi hukum.

Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai sebelumnya dapat terjamin keberlanjutannya dan permasalahan serta tantangan yang sedang dihadapi daerah dapat diatasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu dipertimbangkan program pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat.

Sebagai pijakan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun kedepan, maka pada RPJMD Tahun 2016-2021 tercantum indikasi rencana program prioritas tahunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun. Oleh karenanya RPJMD Tahun 2016-2021 menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan daerah dalam RKPD pada kurun waktu 2016-2021. RPJMD memuat tolok ukur kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

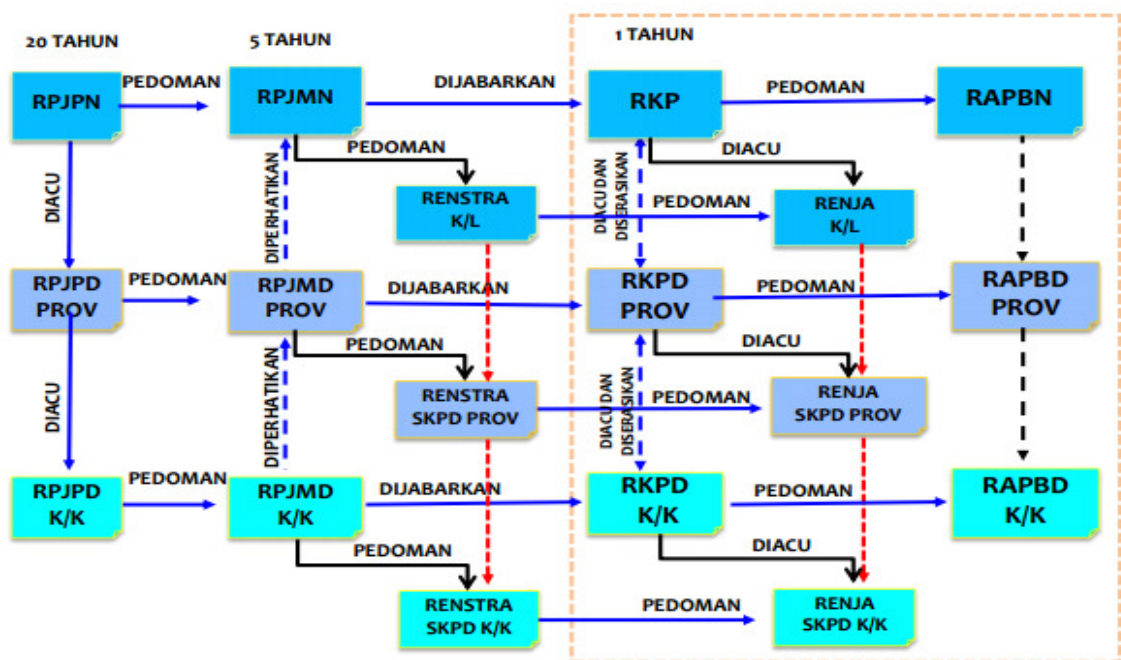
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah.
30. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan Lain.

Penyusunan	RPJMD
memperhatikan pembangunannasional khususnya	yang
berkaitandenganpembangunandaerah	yang
mempengaruhipembangunannasional.Penyusunan	RPJMD
memperhatikanjuga RPJMD ProvinsiJawa Tengah, dan RPJMD Daerah	
sekitardengantujuanuntukmendukungkoordinasiantarpelakupembanguna	
ndanharusselarasdansinergiantardaerah, antarwaktu, antarruang,	
danantarfungsiipemerintah,	

sertamenjaminketerkaitandankonsistensiantaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJP Nasional dan RPJP Provinsi yang juga telah diacudalam RPJP Kabupaten Sukoharjo akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, RPJMN yang telah diperhatikan dalam RPJMD Provinsi akan diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. RPJMD ini akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja PD. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat di atas gambar berikut :



Gambar 1.1

Diagram Hubungan Keterkaitan Antardokumen Perencanaan

1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019)

Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 selaras dengan Visi, Misi dan Sembilan agenda Prioritas yang disebut Program Nawacita yang dijabarkan dalam RPJMN yang berlaku saat ini.

2. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014)

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018)

VisidanMisidalam RPJMD KabupatenSukoharjoTahun 2016-2021 selarasdenganVisidanMisi yang dijabarkandalam RPJMD ProvinsiJawa Tengah yang berlaku saat ini.

3. Hubungan RPJMD Kabupaten Sukoharjo dengan RPJPD Kabupaten Sukoharjo (Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025)

RPJMD berpedomanpada RPJPD KabupatenSukoharjo. RPJMD KabupatenSukoharjoTahun 2016-2021 menjabarkanprioritaspembangunanTahap III pada RPJPD KabupatenSukoharjo (Tahun 2015-2019).

4. Hubungan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Sukoharjo (PeraturanDaerah Nomor 14Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031)

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (*spasial*)menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatberpedomanpadakebijakanpengembanganstrukturuangdanpol aruang yang ditetapkandalam RTRW KabupatenSukoharjoTahun 2011-2031.

5. Hubungan RPJMD dengan RKPD

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Rancangan kerangka

ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RPKD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)

RPJMD menjadipedomandalampenyusunanRenstra-PD dalamrentangwaktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakanpenjabaranteknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijaksanaan dan program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukoharjo.

Perangkat Daerah (PD) merupakan nomenklatur pengganti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digunakan setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Renstra-PD atau sebelumnya disebut dengan Renstra SKPD sebagaimana tersebut dalam Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, memuat antara

lain: pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Ketentuan dalam BAB IX RPJMD, yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan BAB VI Renstra-SKPD, yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 serta Rekomendasi Musrenbang RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah antara lain: Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, keterkaitan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis,

demografis, ekonomis, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan daerah.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan analisis isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam kurun 5 (lima) tahun.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun rencana.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan hubungan kebijakan umum dan program pembangunan sesuai dengan target capaian indikator kinerja.

BABVIII.INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja daerah.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

BAB XI PENUTUP

1.5. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 adalah untuk menyediakan data gambaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun yang lalu dan menetapkan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah pada kurun 5 tahun kedepan (2016-2021). Secara khusus, maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021;
- b. Menjadi landasan dalam penyusunan dokumen Renstra-PD;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. Sebagai panduan tolak ukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2016-2021;
- e. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021; dan
- f. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan visi dan misi kedalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
- b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2016-2021;
- c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
- d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; serta
- f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak diantara Bagian ujung timur 110.57° LS, Bagian Ujung Sebelah Barat 110.42° LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7.32° BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7.49° 32.00° BT. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi Sebelah utara KotaSurakarta dan Kabupaten Karanganyar, Sebelah SelatanKabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri, Sebelah Timur Kabupaten Karanganyar, dan Sebelah BaratKabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 167 Desa/Kelurahan yang meliputi 17 Kelurahan dan 150 Desa, dengan luas wilayah 46.666 Ha. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 6.218 Ha (13% dari luas Kabupaten), dan Kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura dengan luas 1.923 Ha (4% dari luas Kabupaten). Secara lebih lengkap, luas per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1**Luas Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo**

Kecamatan	Luas	Kecamatan	Luas
Kecamatan Weru	4.198 Ha	Kecamatan Bulu	4.386 Ha
Kecamatan Tawang Sari	3.998 Ha	Kecamatan Sukoharjo	4.458 Ha
Kecamatan Nguter	5.88 Ha	Kecamatan Bendosari	5.299 Ha
Kecamatan Polokarto	6.218 Ha	Kecamatan Mojobalan	6.554 Ha
Kecamatan Grogol	3.000 Ha	Kecamatan Baki	2.197 Ha
Kecamatan Gatak	1.947 Ha	Kecamatan Kartasura	1.923 Ha

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

Sedangkan mengenai letak masing-masing kecamatan dan perbatasan wilayah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

2.1.2. Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki kondisi kelerengan yang relatif datar antara 0-8%. Sedangkan kelerengan yang cukup curam hanya terdapat pada sedikit wilayah di bagian selatan kabupaten, yaitu pada Kecamatan Weru yang terdapat daerah dengan kelerengan 8-15%, dan pada Kecamatan Bulu yang terdapat daerah dengan kelerengan 8-15%, 15-25% dan 25-40%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Sukoharjo memiliki kelerengan yang relatif datar.

Ditinjau dari segi geologi, terdapat tiga jenis geologi yang menyusun wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pada bagian utara, yaitu pada Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Mojolaban, dan Polokarto banyak disusun oleh breksi gunung api. Hal ini terjadi karena masih berdekatan dengan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terdapat pada Kabupaten Boyolali. Pada bagian tengah, yaitu pada Kecamatan Sukoharjo, Polokarto, Bendosari, Tawang Sari, Bulu, dan sebagian Kecamatan Weru banyak didominasi oleh lempung, lanau, dan pasir. Sedangkan lava andesit hanya terdapat sedikit pada bagian selatan, yaitu pada Kecamatan Weru dan Bulu.

Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki enam jenis tanah yang berbeda. Jenis tanah yang paling banyak ditemui adalah jenis gromosol yang tersebar di bagian tengah, yaitu pada Kecamatan Mojolaban, Polokarto, Bendosari, Nguter, Tawang Sari, dan Bulu. Kemudian jenis aluvium pada Kecamatan Baki, Grogol, Sukoharjo dan Nguter. Jenis Latosol pada Kecamatan Polokarto, Bendosari, dan Nguter. Jenis regosol pada ujung bagian barat, yaitu Kecamatan Kartasura, Gatak, Weru dan Tawang Sari. Lalu, jenis litosol banyak ditemukan di Kecamatan Tawang Sari dan Bulu. Sedangkan yang paling sedikit ditemukan adalah jenis mediteran yang banyak ditemui di Kecamatan Mojolaban.

Kabupaten Sukoharjo memiliki curah hujan yang hampir merata pada semua wilayahnya. Berdasarkan data banyaknya curah hujan menurut bulan dan kecamatan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2014, diketahui siklus hujan di Kabupaten

Sukoharjo dalam satu tahun dengan rata-rata curah hujan terendah pada Bulan Agustus dan Bulan September sebesar 0 mm, sedangkan yang tertinggi pada bulan Januari sebesar 28 mm. Tinggi maupun rendahnya curah hujan menunjukkan adanya perubahan musim dari musim penghujan dan musim kemarau.

Tabel 2.2

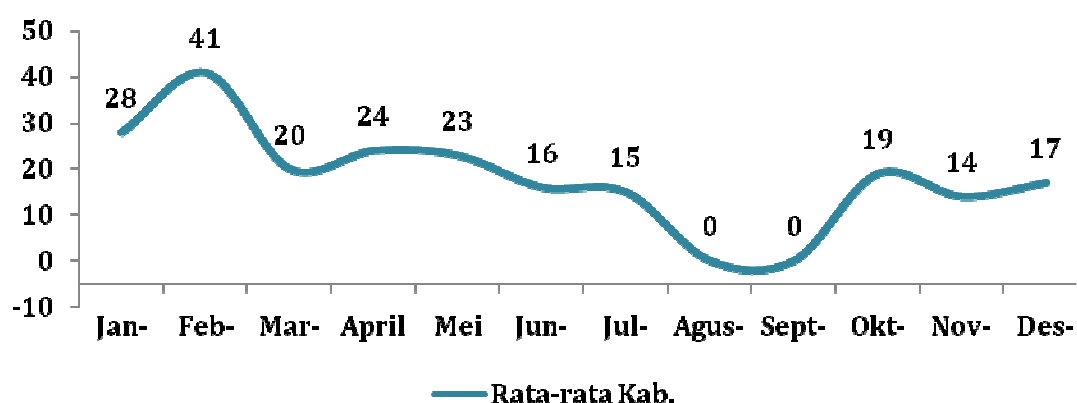
Rata-rata Curah Hujan Menurut Bulan dan Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo (mm) Tahun 2014

Kecamatan	Bulan											
	Jan-	Feb-	Mar-	April	Mei	Jun-	Jul-	Agus-	Sept-	Okt-	Nov-	Des-
Weru	32	34	18	29	20	0	10	0	0	7	19	24
Bulu	ts	ts	ts	ts	ts	ts	ts	ts	ts	ts	ts	ts
Tawangsari	41	32	34	27	23	15	10	0	0	11	11	17
Sukoharjo	38	20	18	17	18	10	8	0	0	16	13	14
Nguter	27	18	17	30	23	17	19	0	0	25	22	14
Bendosari	34	17	13	29	19	22	12	0	0	16	15	11
Polokarto	15	58	24	21	29	19	25	0	0	10	20	16
Mojolaban	16	28	11	22	30	13	21	0	0	27	14	20
Grogol	24	24	35	20	22	15	0	0	0	87	103	161
Baki	57	36	18	21	41	21	0	0	0	60	137	117
Gatak	17	44	12	21	0	21	13	0	0	26	9	17
Kartasura	21	33	13	19	18	17	7	0	0	11	11	30
Rata-rata Kab.	28	41	20	24	23	16	15	0	0	19	14	17

Sumber BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.2

Rata-rata Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Sukoharjo (mm) Tahun 2014



Sumber: Sukoharjo Dalam Angka 2014

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan analisis indeks resiko bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBD) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana (urutan ketigabelas dari tigapuluh lima kabupaten dan kota) (Bappenas, 2014). Jika dilihat dari data kebencanaan yang ada, Kabupaten Sukoharjo mempunyai beberapa ancaman bencana, antara lain banjir, misalnya Banjir di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban akhir April 2015); longsor misalnya di Kecamatan Nguter bulan Februari 2015; angin ribut misalnya di Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bendosari bulan Februari 2015. Selain tiga ancaman bahaya utama tersebut, terdapat pula ancaman bahaya kekeringan, kebakaran hutan/lahan, serta gempa bumi (*Data BPBD Sukoharjo, 2012*).

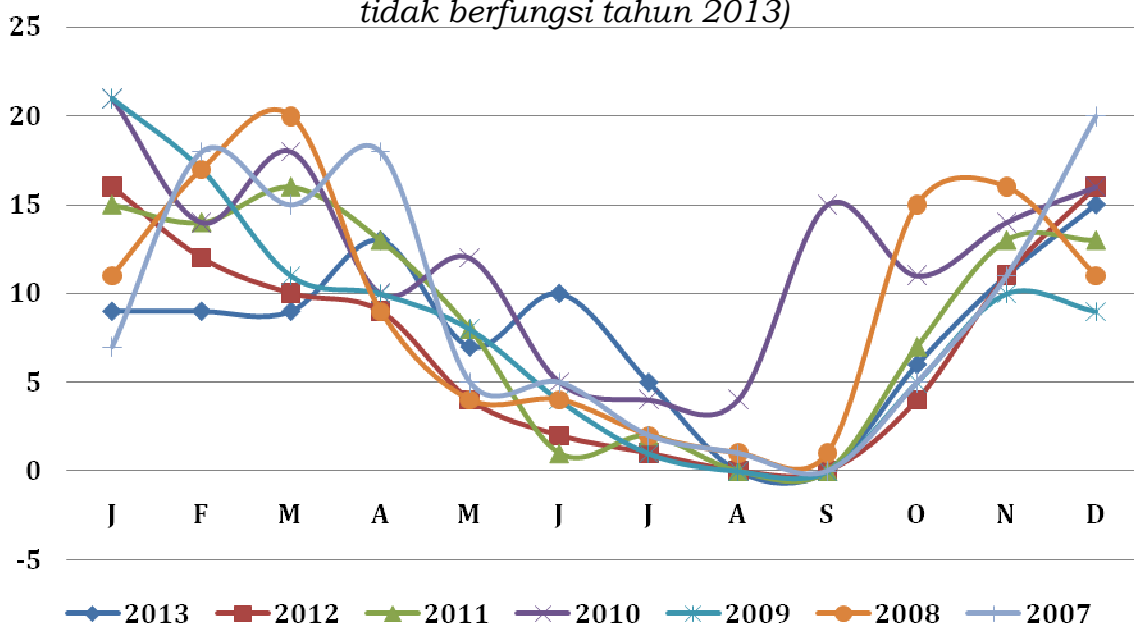
a. Kerawanan Bencana Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kabupaten Sukoharjo memiliki paling tidak sebelas sungai, yang meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Jlantah, Sungai Brambang, Sungai Samin, Sungai Ranjing, Sungai Walikan, Sungai Langsur, Sungai Palur, Sungai Premulung dan Sungai Tanggul. Keberadaan sungai-sungai tersebut di satu sisi memberikan keuntungan ketersediaan air di Kabupaten Sukoharjo, namun di sisi lain pada musim-musim penghujan misalnya pada bulan desember hingga bulan maret dapat memberikan ancaman banjir pada wilayah yang datar dan tidak memiliki kawasan resapan.

Gambar 2.3

Fluktuasi Hari Hujan Per Bulan Per Tahun (2007-2013)

(Keterangan: salah satu stasiun meteorologi di Kecamatan Bulu tidak berfungsi tahun 2013)

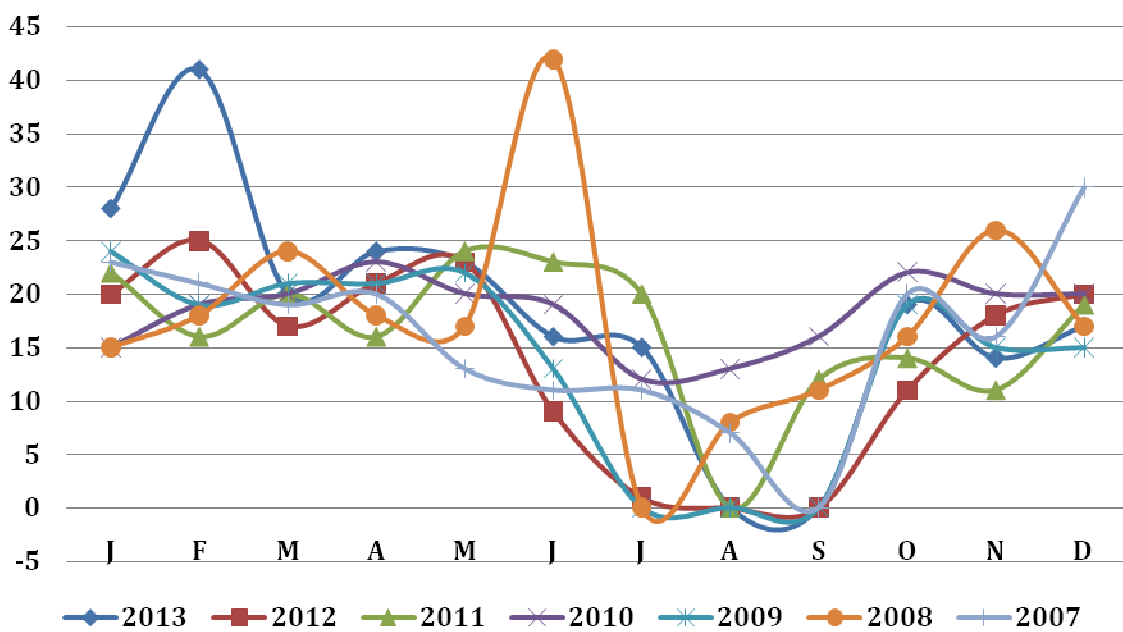


Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.4

Fluktuasi Curah Hujan (mm) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 - 2013

(Keterangan: salah satu stasiun meteorologi di Kecamatan Bulu tidak berfungsi tahun 2013)



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

Secara topografi, wilayah yang rentan akan bahaya banjir meliputi Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban. Hal ini dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah yang datar dan merupakan kawasan bertemunya beberapa sungai, misalnya Kecamatan Nguter (pertemuan antara Kali Jlantah dan Sungai Bengawan Solo), Kecamatan Tawang Sari (pertemuan antara Kali Brambang dan Sungai Bengawan Solo), Kecamatan Grogol (aliran Sungai Bengawan Solo). Hal ini dikuatkan oleh data BPDAS Solo (2008), sebagian besar wilayah Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah yang rawan terhadap banjir. Sedangkan menurut data BPBD Kabupaten Sukoharjo (2012) terdapat sembilan kecamatan yang memiliki wilayah yang rawan terhadap ancaman banjir, yakni Kecamatan Sukoharjo, Tawang Sari, Grogol, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Weru, Gatak dan Baki. Karakteristik banjir di Kabupaten Sukoharjo adalah berupa genangan akibat meluapnya sungai. Secara umum, banjir berlangsung selama dua hingga tiga hari. Beberapa kejadian banjir yang menimbulkan kerugian diantaranya adalah banjir pada Desember 2007 hingga Januari 2008, Januari 2012, Februari dan April 2015.

b. Kerawanan Bencana Longsor

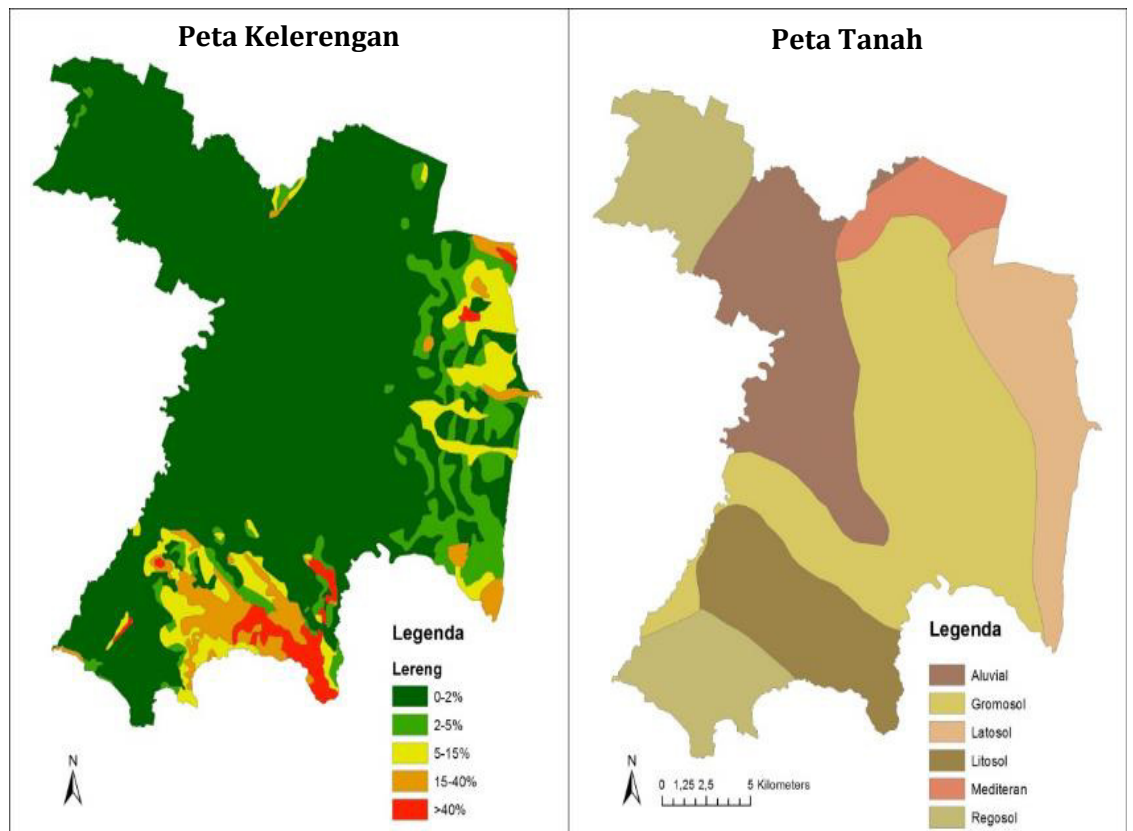
Kabupaten Sukoharjo, terdapat tiga kecamatan yang memiliki ancaman terhadap longsor, yakni Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari. Berdasarkan kemiringan lahan, ketiga kecamatan tersebut memiliki wilayah yang bergelombang (5-15%), curam (15-40%) hingga sangat curam (40%) (a). Selain itu, apabila dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar tanah yang berada di wilayah yang curam dan cukup curam merupakan tanah litosol (b). Tanah litosol merupakan jenis tanah berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Penampangnya besar dan berbentuk kerikil, pasir atau batu-batuan kecil, karena sedikit sekali mengalami perubahan struktur atau profil dari batuan asal. Tanah litosol miskin unsur hara. Jenis tanah ini

banyak ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia yang mengalami proses erosi parah.

Jika suatu wilayah yang memiliki kriteria lereng dan jenis tanah yang rentan terhadap longsor tergujur oleh hujan dengan intensitas yang tinggi, maka bukan tidak mungkin di wilayah tersebut akan terjadi bencana longsor. Jika kita amati, wilayah Kabupaten Sukoharjo bagian selatan, terutama di Kecamatan Bulu, Weru serta Tawang Sari, merupakan wilayah yang memiliki ancaman bencana longsor. Hal ini bahkan terbukti dengan beberapa kejadian longsor, misalnya pada akhir Desember 2014, terdapat enam desa yang dinyatakan zona merah rawan longsor oleh BPBD Kabupaten Sukoharjo yakni Desa Gentan, Pundunrejo dan Kamal (Kecamatan Bulu), serta Desa Alas Ombo, Karangmojo dan Grogol (Kecamatan Weru).

Gambar 2.5

Peta Kelerengan dan Peta Tanah Kabupaten Sukoharjo



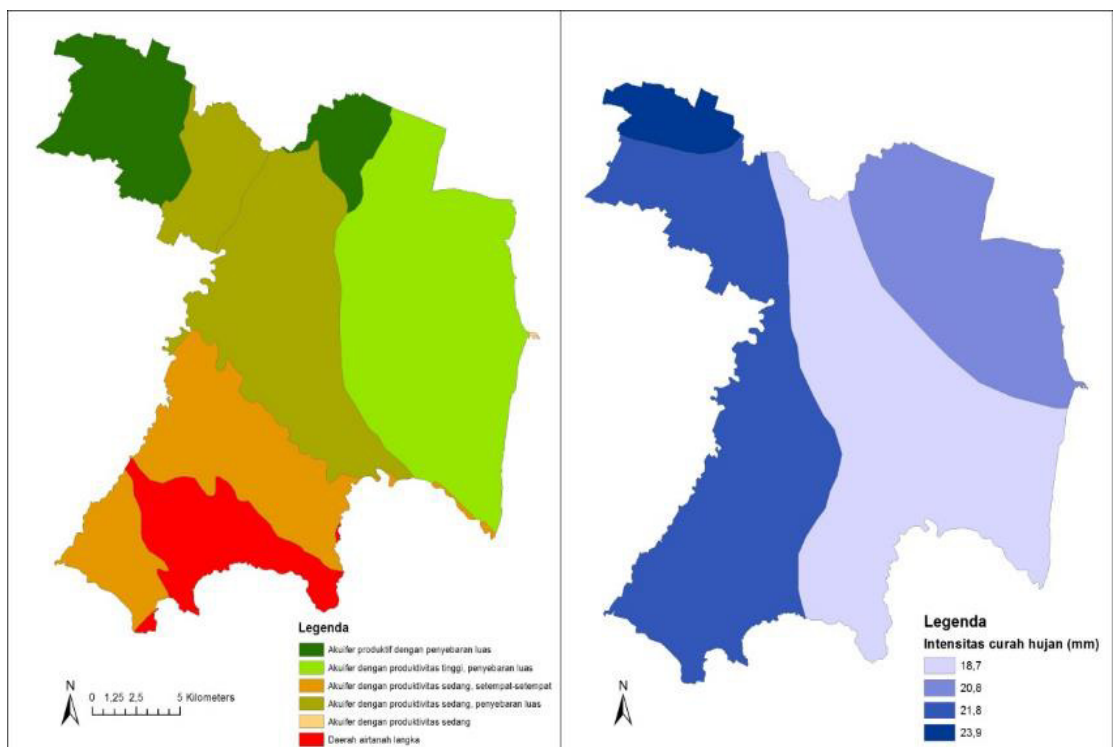
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

c. Kerawanan Bencana Kekeringan

Apabila dikaji dari aspek akuifer air tanah, wilayah Kabupaten Sukoharjo dapat dibagi menjadi enam wilayah, yakni wilayah dengan akuifer produktif dengan penyebaran luas, akuifer produktivitas tinggi penyebaran luas, akuifer produktivitas sedang penyebaran luas, akuifer produktivitas sedang setempat, akuifer produktivitas sedang dan daerah airtanah langka. Sedangkan jika dilihat dari intensitas curah hujan, wilayah barat Kabupaten Sukoharjo memiliki intensitas yang lebih tinggi dibanding di wilayah tengah dan timur. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa wilayah yang mempunyai ancaman kekeringan di musim kemarau, khususnya di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Weru, Tawang Sari dan Bulu. Beberapa data bencana menyebutkan bahwa kekeringan pernah melanda Kecamatan Bulu (Agustus 2009) dan Kecamatan Tawang Sari dan Weru (Agustus 2013). Sedangkan kekeringan pertanian, melanda sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang mengandalkan Dam Colo sebagai sumber pasokan irigasi.

Gambar 2.6

Peta Hidrogeologi dan Intensitas Curah Hujan



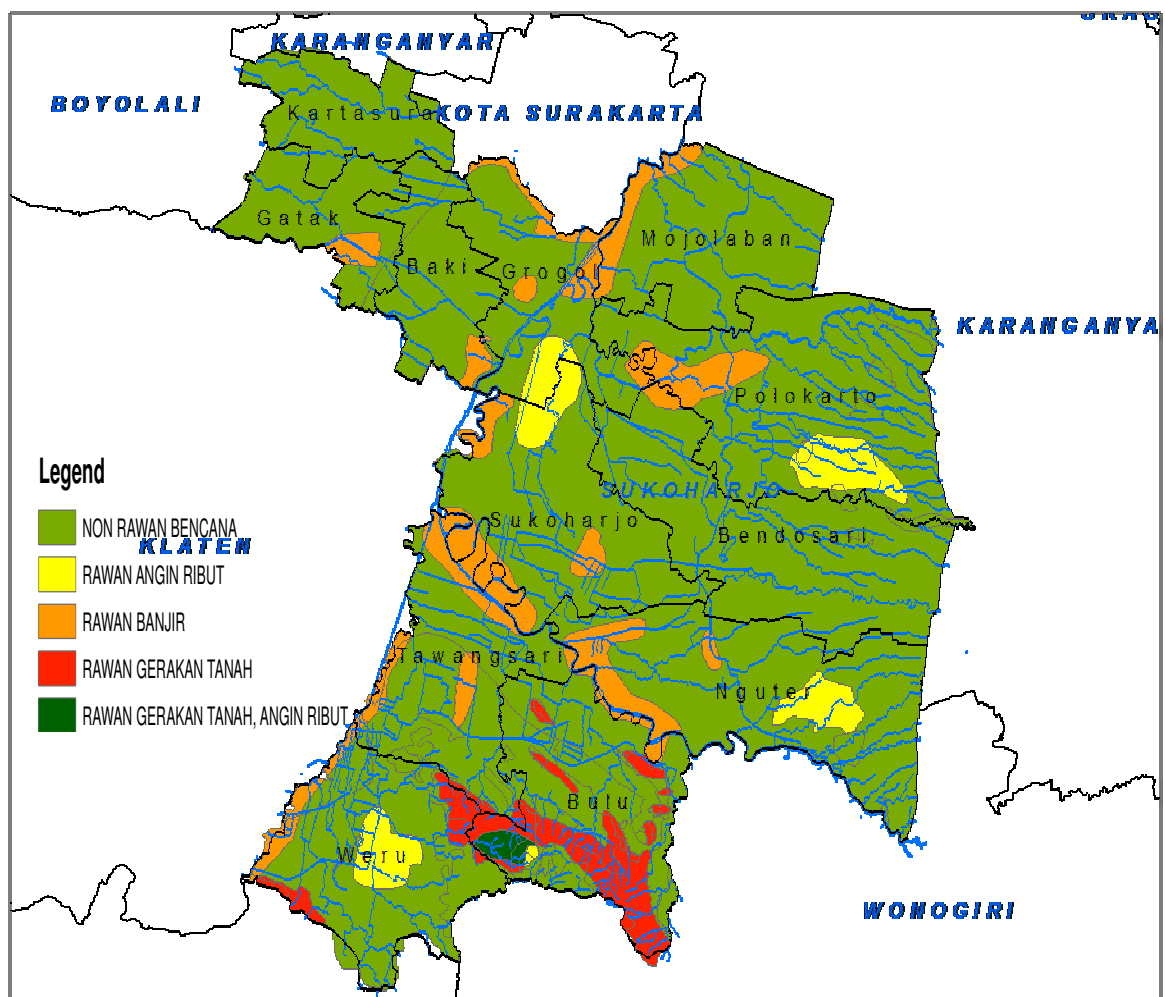
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

d. Kerawanan Bencana Angin Ribut/Puting Beliung

Di Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa wilayah yang pernah atau bahkan beberapa kali terkena angin ribut maupun puting beliung, misalnya Kecamatan Baki (Februari 2015), Kecamatan Polokarto (Februari 2015), Kecamatan Weru (Oktober 2013) Kecamatan Nguter (Januari 2014) dan Kecamatan Kartasura (Januari 2014). Wilayah yang terlanda angin puting beliung biasanya wilayah yang terbuka. Menurut beberapa penelitian, wilayah yang pernah terlanda angin ribut maupun puting beliung secara umum memiliki ancaman terhadap angin ribut atau puting beliung di masa datang. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki ancaman terhadap bencana ini yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Baki, Polokarto, Weru, Nguter dan Kartasura.

Gambar 2.7

Peta Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik perkembangan kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi tiga kawasan yaitu kawasan bagian utara, kawasan bagian tengah dan kawasan bagian selatan.

Tabel 2.3
Karakteristik Kawasan di Kabupaten Sukoharjo

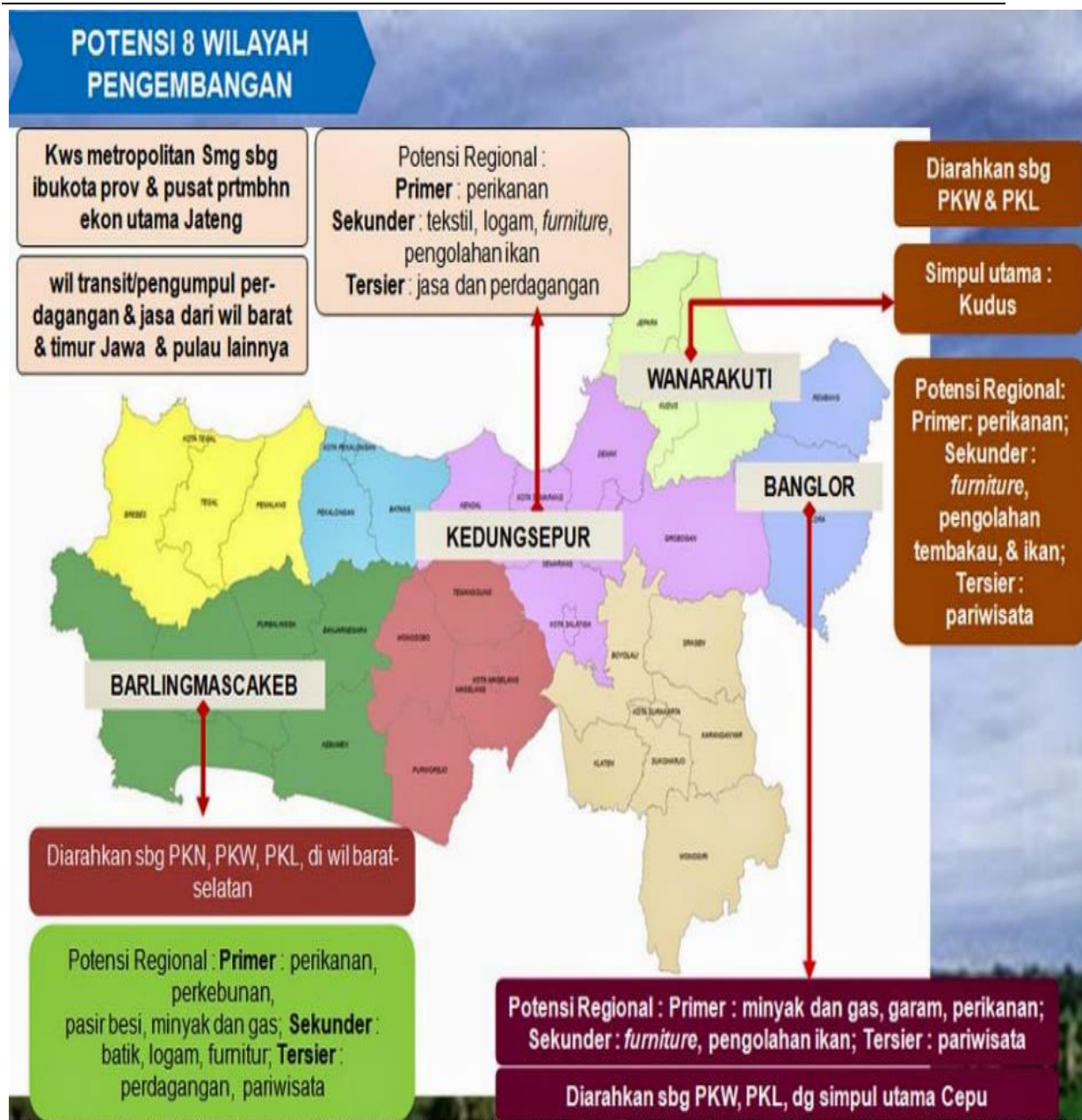
KAWASAN	KARAKTERISTIK
KAWASAN BAGIAN UTARA	
Kawasan SUROGOLBANTAKI	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan ini meliputi Kecamatan Kartasura, Grogol, Mojolaban, Gatak dan Baki.• Perkembangan dipengaruhi oleh limpasan perkembangan dari Kota Surakarta. Karakteristik merupakan permukiman perkotaan, dan pusat perdagangan jasa dengan kepadatan bangunan yang berkembang dari padat menjadi sangat padat
KAWASAN BAGIAN TENGAH	
Kawasan SUKOSARIKARTO	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan ini meliputi Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, dan Polokarto• Perkembangan kawasan dipengaruhi oleh perkembangan Kecamatan Sukoharjo sebagai pusat pelayanan kabupaten. Kepadatan bangunan berkembang dari sedang menjadi padat. Ciri perkotaan terlihat terutama pada permukiman-permukiman baru, sedangkan perkampungan umumnya masih bercampur antara ciri perkotaan dan pedesaan. Muncul aktivitas perdagangan pada koridor jalan utama, dan terdapat aktivitas industri

KAWASAN	KARAKTERISTIK
KAWASAN BAGIAN SELATAN	
Kawasan NGULURUSARI	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan ini meliputi Kecamatan Nguter, Bulu, Weru, dan Tawang Sari • Merupakan kawasan penyangga perkotaan, dengan perkembangan kepadatan yang masih rendah. Perkembangan kawasan sebagian besar masih bercirikan pedesaan, kawasan perkampungan berkembang sporadis dan mengelompok yang dipisahkan oleh kawasan pertanian. Kegiatan perdagangan dan jasa, serta industri berkembang linier terhadap jaringan jalan.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sukoharjo mengingat posisinya yang strategis dekat dengan dua kutub pusat pertumbuhan yaitu D.I. Yogyakarta dan Solo dan merupakan wilayah yang diakses oleh transportasi dari Surabaya yang akan menuju ke arah barat seperti Yogyakarta menjadikan Kabupaten Sukoharjo akan terus meningkatkan jalur transportasi. Hal ini didukung oleh pembuatan Terminal tipe A di Kecamatan Nguter akibat terminal di Kabupaten Wonogiri yang luasan area terminal sudah tidak dapat berkembang lagi sementara ketersediaan armada bus maupun transportasi antar provinsi semakin bertambah dari tahun ke tahun. Selain itu adanya Solo Baru yang merupakan perluasan area perkotaan dari Kota Solo menjadikan potensi ekonomi di bidang perdagangan dan jasa semakin intens sehingga pantas apabila Kecamatan Grogol yang pada Perda no. 14 tahun 2011 ditetapkan status sistem perkotaannya menjadi PKLp berpotensi meningkat menjadi PKWp pada evaluasi RTRW terbaru. Potensi pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah secara umum dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.8

Potensi Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Kajian dan Evaluasi RTRW, 2015

Perubahan rencana status sistem perkotaan yang ada di kabupaten Sukoharjo dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4**Hirarki dan Rencana Status Perkotaan Kabupaten Sukoharjo**

No	Kecamatan	Perda no.14 tahun 2011		Hasil Analisis	
		Hirarki	Status	Hirarki	Status
1	Weru	III	PPK	III	PPK
2	Bulu	III	PPK	III	PPK
3	Tawang Sari	III	PPK	III	PPK
4	Nguter	III	PPK	II	PKL
5	Sukoharjo	I	PKL	III	PPK
6	Bendosari	III	PPK	II	PPK
7	Polokarto	III	PPK	III	PPK
8	Grogol	II	PKLp	I	PKWp
9	Mojolaban	III	PPK	II	PKL
10	Baki	III	PPK	II	PPK
11	Gatak	III	PPK	III	PPK
12	Kartasura	I	PKL	I	PKL

Sumber: Kajian dan Evaluasi RTRW, 2015

Kecamatan Grogol menurut perda no. 14 tahun 2011 berstatus PKLp namun pada hasil analisis scalogram dan indeks sentralitas di ketahui bahwa jumlah dan jenis fasilitas sosial, ekonomi yang ada di Kecamatan Grogol cukup variatif dan banyak sehingga ada potensi untuk peningkatan status tidak hanya PKL namun dapat menjadi PKWp. Sementara Kecamatan yang termasuk dalam PKL ada tiga yaitu Kecamatan Kartasura, Mojolaban dan Nguter. Kecamatan Kartasura merupakan kecamatan dengan jumlah fasilitas yang cukup banyak yaitu sebanyak 1.934 unit. Kondisi ini dapat diasumsikan bahwa Kecamatan Kartasura merupakan pusat perdagangan dan kegiatan pendidikan kesehatan yang dapat menarik penduduk kecamatan lain untuk migrasi menuju lokasi ini. Kecamatan Nguter merupakan pusat industri sehingga pemerintah perlu memberikan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk investor agar mau menanamkan modal untuk pengembangan kawasan

industri Nguter. Sedangkan Kecamatan Mojolaban akan menjadi lokasi perluasan permukiman di Karanganyar yang sudah mendesak menuju Kabupaten Sukoharjo karena arah laju perkembangan kota terus menuju ke selatan.

2.1.5 Penggunaan Lahan

Kabupaten Sukoharjo memiliki luasan wilayah mencapai 466,66 km². Wilayahnya secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan. Kondisi fisiografis wilayahnya cukup bervariasi, mulai dari datar hingga berbukit sehingga penggunaan lahannya pun juga bervariasi. Penggunaan lahan pertanian dan perkebunan secara umum cukup dominan yang juga menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi wilayahnya. Kegiatan pertanian dan perkebunan masih dominan sehingga luasan lahan ini menjadi yang cukup dominan diantara penggunaan lahan lainnya.

Kondisi penggunaan lahan menunjukkan kecenderungan kegiatan ekonomi penduduk suatu wilayah. Dominasi penggunaan lahan memberikan gambaran struktur ekonomi wilayahnya. Data penggunaan lahan tahun 2014 di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam angka tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Luas lahan Sawah : 20.814 Hektar
- Luas Lahan Non Sawah : 25.852 Hektar
 - Pekarangan : 16.473 Hektar
 - Tegal/ kebun : 4.254 Hektar
 - Hutan Rakyat : 1.337 Hektar
 - Hutan Negara : 390 Hektar
 - Tambak/ kolam : 51 Hektar
 - PBS/ PBN : 708 Hektar
 - Lain-lain : 2.639 Hektar

Penggunaan lahan sawah berdasarkan data tersebut mencapai 20.814 hektar. Penggunaan lahan non sawah terutama untuk perumahan, pertokoan, industri, dan pendudukan. Luas lahan tegal dan kebun pada umumnya terletak di sebelah selatan wilayah Kabupaten Sukoharjo, yakni di Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Weru, dan Kecamatan

Bulu. Kondisi fisiografis wilayahnya cenderung bergelombang hingga berbukit, disamping tanahnya tidak terlalu subur sehingga lebih cocok untuk kegiatan perkebunan dan hutan rakyat. Budidaya tanaman keras menjadi salah satu pilihan untuk dapat mengelola lahan yang berkelanjutan. Lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 15% cenderung lebih mudah tererosi hingga longsor. Penggunaan lahan kebun dan hutan rakyat yang ditanami tanaman keras menjadi pilihan tanaman yang dapat menahan partikel tanah sehingga menjadi salah satu tindakan konservasi lahan dan air.

Tabel 2.5

Penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2014

Kecamatan	Luasan (Ha)		
	Lahan Sawah	Lahan Non Sawah	Luas Total
1	2	3	4
W e r u	1.989	2.209	4.198
B u l u	1.123	3.263	4.386
Tawang Sari	1.656	2.342	3.998
Sukoharjo	2.363	2.095	4.458
Nguter	2.569	2.919	5.488
Bendosari	2.569	2.730	5.299
Polokarto	2.453	3.765	6.218
Mojolaban	2.169	1.385	3.554
Grogol	991	2.009	3.000
B a k i	1.254	943	2.197
G a t a k	1.251	696	1.947
Kartasura	471	1.452	1.923
2014	20.814	25.852	46.666
2013	20.858	25.808	46.666
2012	21.010	25.656	46.666
2011	21.054	25.612	46.666
2012	21.287	25.379	46.666

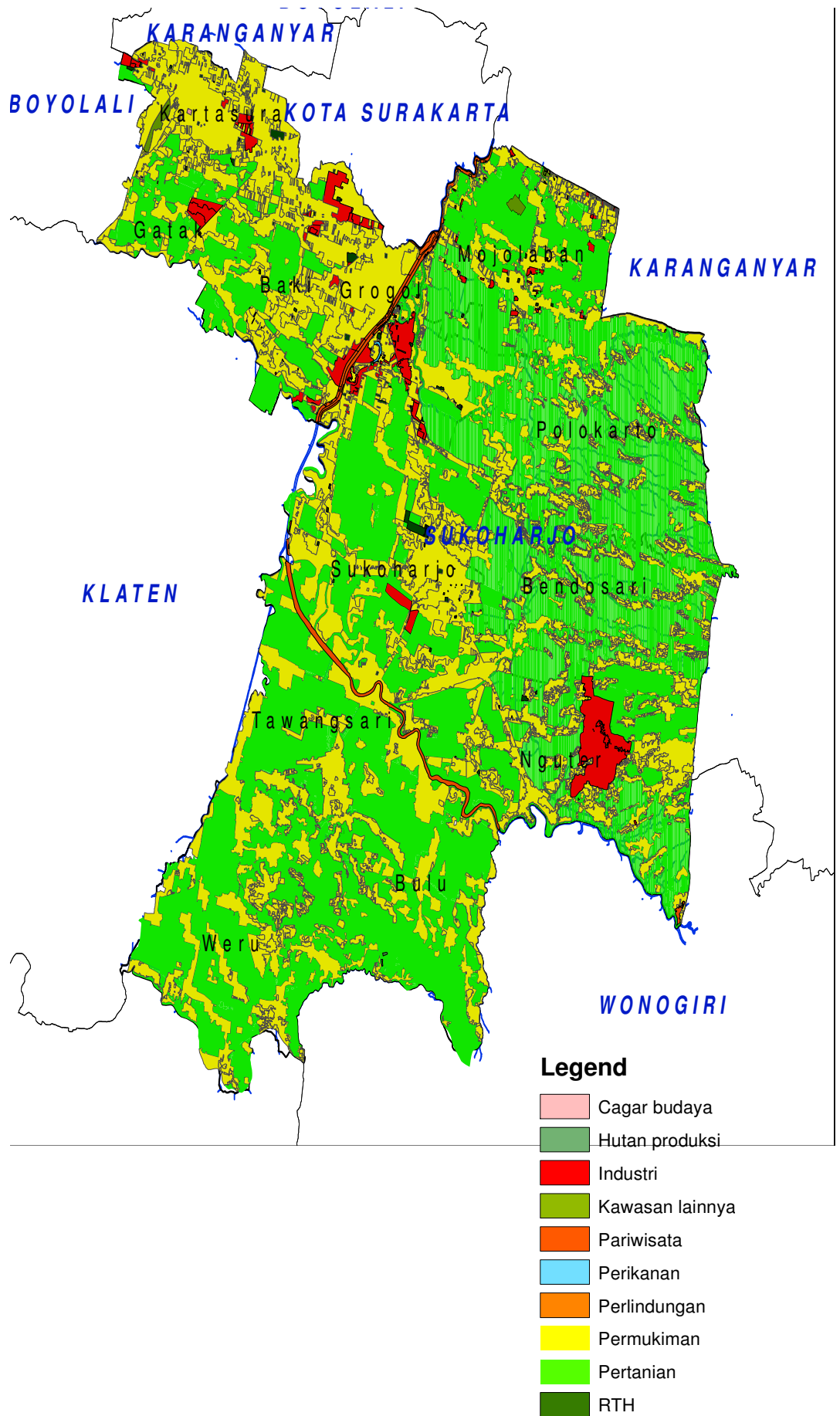
Sumber: Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan juga bahwa terjadi perubahan lahan khususnya lahan sawah walaupun

luasannya tidak terlalu besar. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan lahan sawah menjadi lahan bukan sawah, dimana dari tahun 2003 lahan sawah yang berjumlah 21.184 Ha berkurang seluas 63 hektar menjadi 21.121 Ha pada tahun 2008. Luas tersebut kembali berkurang menjadi 20.858 pada tahun 2013. Konversi lahan sawah menjadi non sawah dalam kurun waktu 2008 hingga 2013 cukup besar, yakni mencapai 263 hektar atau sekitar 52 hektar setiap tahunnya. Laju perubahan penggunaan lahan dari lahan sawah menjadi non sawah ini menunjukkan adanya proses perubahan kondisi wilayah, baik yang berupa perubahan fisik maupun sosial ekonomi masyarakat. Pengurangan luas lahan sawah menunjukkan adanya perkembangan perkotaan dengan semakin banyaknya lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Dilihat dari segi sosial ekonomi, berkurangnya lahan pertanian menunjukkan adanya perubahan struktur kegiatan penduduk dari pertanian menjadi non pertanian. Salah satu ciri perkembangan perkotaan adalah berkurangnya lahan pertanian. Berkurangnya intensitas kegiatan pertanian menunjukkan adanya perubahan struktur mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke non pertanian.

Gambar 2.9

Peta Pola Ruang Kabupaten Sukoharjo



2.1.6 Kondisi Demografi

Di Kabupaten Sukoharjo penduduk usia produktif yaitu kelompok umur antara 15-64 berjumlah 621.436 jiwa (69,83%), sedangkan kelompok umur terbesar pada penduduk yang berumur antara 35 - 39 tahun. Untuk komposisi yang berdasarkan jenis kelamin terbesar pada kelompok umur 35 - 39 tahun

Tabel 2.6

Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan JenisKelamin di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
		N	N	N	
1	0 - 4	27,033	25,597	52,630	5.91
2	05 - 09	34,372	32,024	66,396	7.46
3	10 - 14	34,532	32,583	67,115	7.54
4	15 - 19	34,352	32,717	67,069	7.54
5	20 - 24	34,257	32,969	67,226	7.55
6	25 - 29	32,374	31,060	63,434	7.13
7	30 - 34	37,332	36,738	74,070	8.32
8	35 - 39	37,451	37,664	75,115	8.44
9	40 - 44	33,677	33,856	67,533	7.59
10	45 - 49	31,842	32,397	64,239	7.22
11	50 - 54	28,107	29,288	57,395	6.45
12	55 - 59	25,030	24,609	49,639	5.58
13	60 - 64	18,825	16,891	35,716	4.01

14	65 – 69	12,582	13,553	26,135	2.94
15	70 – 74	9,781	10,552	20,333	2.28
16	≥ 75	17,146	18,775	35,921	4.04
Jumlah		448,693	441,273	889,966	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

Dari tabel 2.3 penduduk usia kerja (produktif) umur 15-64 tahun berjumlah 621.436 jiwa (69,83%), sedangkan penduduk usia dibawah 15 tahun atau penduduk usia muda berjumlah 186.141 (20,92%), untuk penduduk usia dengan umur diatas 65 tahun berjumlah 82.389 jiwa (9,26%). Posisi jumlah kelompok umur pada tabel di atas, untuk usia muda dengan umur kurang dari 15 tahun dengan waktu 5 tahun yang akan datang disamping pemerintah daerah harus memperhatikan pendidikan dan pelatihan yang cukup dan pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja. Sedangkan penduduk balita sebanyak 5,91 %, hal ini oleh pemerintah daerah bisa sebagai perhatian pada segi kesehatan dan pendidikan.

Jika dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015 mengalami kenaikan cukup besar (4,6%) dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena meningkat dan tumbuh kembangnya sektor industri di Kabupaten Sukoharjo sehingga mengakibatkan tingginya angka migrasi dari daerah sekitar. Angka migrasi netto yang merupakan angka migrasi masuk dikurangi migrasi keluar per 1000 penduduk Kabupaten. Berikut adalah gambaran tentang angka migrasi netto Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015.

Tabel 2.7

Angka Migrasi Netto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

Kabupaten/Kabupaten : 33.11 SUKOHARJO							
No	Kecamatan		Jumlah Migrasi			Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	Angka Migrasi Netto
	Kode	Nama	Masuk	Keluar	Selisih		
1	33.11.01	WERU	1.369	3.085	-1.716	61.072	-28,10
2	33.11.02	BULU	1.072	2.353	-1.281	42.206	-30,35
3	33.11.03	TAWANGSARI	1.068	3.060	-1.992	56.935	-34,99
4	33.11.04	SUKOHARJO	2.887	3.358	-471	91.577	-5,14
5	33.11.05	NGUTER	1.675	3.441	-1.766	58.209	-30,34
6	33.11.06	BENDOSARI	1.626	2.497	-871	63.095	-13,80
7	33.11.07	POLOKARTO	1.776	4.038	-2.262	83.356	-27,14
8	33.11.08	MOJOLABAN	3.201	5.163	-1.962	87.573	-22,40
9	33.11.09	GROGOL	4.778	8.601	-3.823	118.170	-32,35
10	33.11.10	BAKI	2.492	3.615	-1.123	68.478	-16,40
11	33.11.11	GATAK	1.624	2.966	-1.342	51.339	-26,14

12	33.11.1 2	KARTASU RA	5.627	8.798	-3.171	104.194	-30,43
Jumlah			29.195	50.975	-21.780	886.204	-24,58

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kab.Sukoharjo Tahun 2015

Angka migrasi netto di Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 adalah -25 Dari angka hasil pendaftaran penduduk, hal ini dinamakan migrasi netto negative, dimana yang masuk lebih sedikit dari yang keluar. Di Kabupaten Sukoharjo data angka migrasi netto di masing-masing Kecamatan menunjukkan angka migrasi netto negative, artinya daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitar masih rendah.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015**

Kecamatan	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Weru	31,828	31,648	63,476	32,291	32,125	64,416	34,895	34,851	69,746	30,499	30,282	60,781	30,843	30,601	61,444	30,656	30,374	61,030
Bulu	25,606	24,062	49,668	25,247	24,194	49,441	22,074	25,984	48,058	21,949	20,328	42,277	21,984	20,462	42,446	21,841	20,412	42,253
Tawang Sari	31,477	30,722	62,199	3,125	30,769	33,894	33,331	32,975	66,306	29,407	28,322	57,729	29,258	28,180	57,438	29,064	28,082	57,146
Sukoharjo	27,458	25,923	53,381	29,408	26,989	56,397	49,523	49,405	98,928	45,836	45,050	90,886	45,862	45,068	90,930	46,585	45,758	92,343
Nguter	46,676	47,668	94,344	45,265	44,878	90,143	35,361	34,613	69,974	29,545	28,147	57,692	29,974	28,740	58,714	29,810	28,538	58,348
Bendosari	32,525	31,627	64,152	33,317	32,927	66,244	36,748	36,565	73,313	31,419	30,927	62,346	31,553	31,659	63,212	32,112	31,467	63,579
Polokarto	33,488	32,871	66,359	35,797	35,787	71,584	45,583	45,399	90,982	41,815	41,064	82,879	42,364	41,819	84,183	42,268	41,611	83,879
Mojolaban	3,808	38,225	42,033	38,563	38,708	77,271	46,862	47,023	93,885	43,406	43,245	86,651	43,394	43,266	86,660	44,056	43,882	87,938
Grogol	65,651	64,778	130,429	59,872	59,554	119,426	65,367	65,149	130,516	59,802	59,021	118,823	59,403	58,362	117,765	59,714	58,718	118,432
Baki	34,498	35,083	69,581	33,661	33,933	67,594	36,647	36,955	73,602	33,966	33,765	67,731	34,124	33,865	67,989	34,570	34,203	68,773
Gatak	25,476	26,003	51,479	25,137	25,343	50,480	26,986	27,368	54,354	25,541	25,617	51,158	25,805	25,844	51,649	25,755	25,728	51,483
Kartasura	56,158	57,579	113,737	51,285	51,393	102,678	55,858	56,434	112,292	52,073	52,337	104,410	51,887	52,106	103,993	52,262	52,500	104,762
Kabupaten Sukoharjo	414,649	446,189	860,838	412,968	436,600	849,568	489,235	492,721	981,956	445,258	438,105	883,363	446,451	439,972	886,423	448,693	441,273	889,966

Mengenai Tingkat Kepadatan Penduduk tahun 2015, Kecamatan Kartasura merupakan kecamatan terpadat dengan 5448 jiwa/km² dan kecamatan dengan kepadatan paling rendah yaitu kecamatan Bulu dengan 963 jiwa/km². Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 (jiwa/km²)

Kecamatan	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km)
Weru	1454
Bulu	963
Tawang Sari	1429
Sukoharjo	2071
Nguter	1063
Bendosari	1200
Polokarto	1349
Mojolaban	2474
Grogol	3948
Baki	3130
Gatak	2644
Kartasura	5448

Sumber : Dispendukcapil

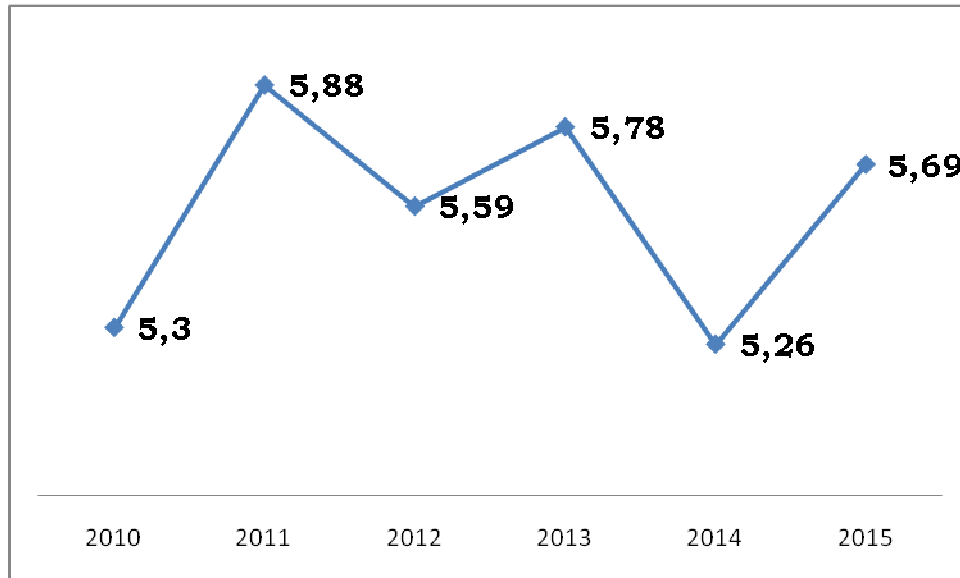
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara/ daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Gambar 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015
(Dihitung dengan Tahun Dasar 2010)

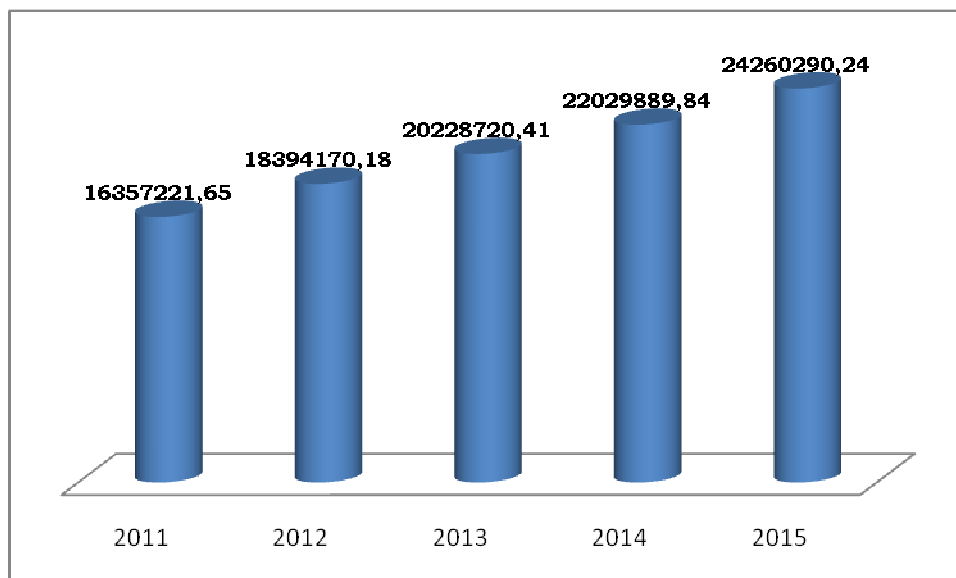


Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2010 angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo sebesar 5,3. Angka ini berhasil dinaikkan menjadi 5,69 di tahun 2015.

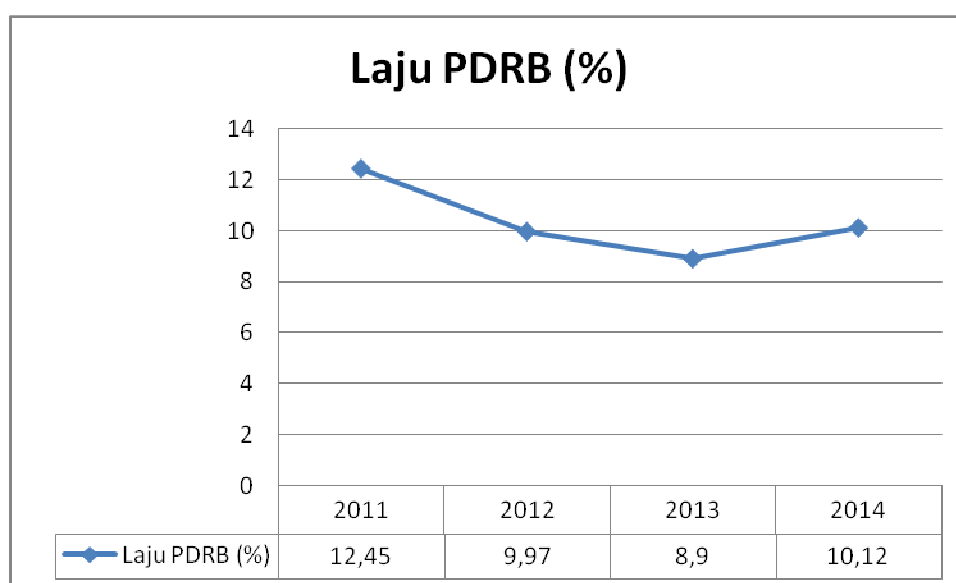
Secara Umum PDRB Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan tetapi laju pertumbuhan PDRB mengalami penurunan hingga tahun 2013 dan naik Kembali Pada Tahun 2014. Secara rinci laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan pada tahun 2012 dari 12,45 % pada tahun 2011 turun menjadi 9,97 % pada tahun 2012 dan terus menurun pada tahun 2013 menjadi 8,90% dan pada tahun 2014 naik menjadi 10,12 % . PDRB pada Tahun 2014 Mencapai Rp. 24,26 Trilyun. Untuk lebih jelasnya gambar berikut akan menjelaskan Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 2.11
Perkembangan PDRB Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2014 (Juta Rp)



Sumber: Bappeda Kab. Sukoharjo Tahun 2015

Gambar 2.12
laju Pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun
2011-2014 (%)



Perkembangan laju pertumbuhan PDRB menurut Harga yang Berlaku Konstan di kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun, terinci sebagai berikut :

Tabel. 2.10PDRB Kabupaten**Sukoharjo Menurut Harga Berlaku Tahun 2010 -2015(dalam Juta Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian	1.701.403,76	1.778.838,44	2.158.932,39	2.338.414,27	2.281.302,24	2.624.438,81
B	Pertambangan&	81,453,44	87.815,27	89.411,61	94.344,32		138.919,07
	Penggalian					117.218,81	
C	Industri Pengolahan	5.976.807,99	7.098.779,46	7.886.513,88	8.619.764,15	9.663.586,73	10.368.908,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22.897,92	25.106,17	26.558,71	28.914,96	29.117,22	28.402,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Dan Limbah Dan Daur Ulang	7.681,56	7.942,21	7.830,73	8.155,73	8.614,02	9.100,99
F	Konstruksi	1.122.558,97	1.195.177,51	1.291.343,53	1.400.213,29	1.560.510,58	1.756.017,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Repaari Mobil dan Sepeda Motor	3.342.021,47	3.641.219,94	3.754.753,39	4.000.213,78	4.315.030,98	4.721.567,22
H	Transportasi dan Perdagangan	537.491,95	559.339,86	583.876,43	647.697,56	755.298,98	854.256,76
I	Penyediaan Akomodasi dan	625.512,93	682.950,13	709.326,69	772.410,53	880.857,68	996.537,57

	Makan Minum						
J	Informasi dan Komunikasi	653.973,60	720.748,50	779.428,43	846.567,02	999.241,31	1.112.024,35
K	Jasa keuangan dan Asuransi	649.927,94	715.971,60	783.696,88	836.687,60	895.928,11	1.020.392,91
L	Real Estate	392.518,98	416.654,66	432.584,25	469.835,99	535.272,15	597.272,99
M,N	Jasa Perusahaan	52.105,98	60.022,12	66.150,68	78.469,92	87.511,82	100.274,18
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	445.445,00	463.395,92	514.673,75	550.175,42	584.381,73	639.113,44
P	Jasa Pendidikan	380.321,97	538.578,53	718.441,62	857.750,95	982.734,87	1.086.759,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117.245,58	141.298,31	168.271,37	187.521,60	223.683,03	256.071,41
R,R,T,U	Jasa lainnya	247.852,62	260.271,53	256.926,06	292.672,73	340.000,24	364.232,93

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB tahun dasar 2010 menurut Lapangan Usaha tergambar sebagai berikut :

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun Dasar 2010**Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo****Tahun 2010 – 2015(%)**

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian	-	-218	13,14	1,60	-561	7,15
B	Pertambangan dan Pengecilian	-	1,30	1,33	2,93	4,75	1,91
C	Industri Pengolahan	-	9,04	7,40	8,12	6,35	2,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-	8,84	7,45	10,52	0,56	3,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Dan Limbah Dan Daur Ulang	-	2,52	-189	1,26	2,26	1,96
F	Konstruksi	-	0,85	3,67	4,41	3,36	7,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	-	4,32	1,25	3,22	4,83	5,60

	Motor						
H	Transportasi dan Perdagangan	-	3,88	4,05	9,81	8,90	9,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	5,99	2,45	2,82	6,76	6,97
J	Informasi dan Komunikasi	-	8,75	8,37	8,93	39,98	14,48
K	Jasa keuangan danAsuransi	-	3,04	1,33	2,22	1,20	8,71
L	Real Estate	-	4,52	3,00	7,33	7,02	7,87
M,N	Jasa Perusahaan	-	7,65	6,16	13,45	7,70	8,91
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	2,04	0,18	1,97	-46	5,11
P	Jasa Pendidikan	-	25,46	21,58	8,42	10,77	8,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	12,44	9,05	6,28	14,50	9,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	-	1,76	-214	10,19	8,77	3,34

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-	5,88	5,90	5,78	5,26	5,69
--------------------------------	---	------	------	------	------	------

Sumber Data : BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel 2.11. rata rata laju pertumbuhan PDRB tahun dasar menurut lapangan usaha sebesar 5,7%. Jika dilihat dari perkembangannya laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha untuk 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan, Pada tahun 2012 laju pertumbuhannya sebesar 5.90 %, tahun berikutnya (1913) laju pertumbuhan PDRB menurun menjadi 5,78 % dan terus menurun pada tahun 2014 menjadi 5,26 % dan kembali naik pada 2014 menjadi 5,69%. Pertumbuhan negatif terjadi karena ada penurunan di beberapa bidang antara lain : lapangan usaha listrik dan gas turun dari 10.52% menjadi 5,60%, lapangan usaha perusahaan turun dari 13,45% menjadi 7,70%. Bahkan ada yang laju pertumbuhannya negatif, yaitu lapangan usaha pertanian turun sampai -5,61% dan bidang Administrasi Pemerintahan dan jaminan sosial turun menjadi -4.60%. pada tahun 2014.

Gambaran mengenai Distribusi Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo paling besar dari bidang Industri Pengelolaan tiap tahunnya meningkat dari 36,54% pada tahun 2010 menjadi 39,83 % . Prosentase terbesar berikutnya adalah lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran sebesar 17,79 %. Secara rinci bisa dilihat pada tabel 2.12 dibawah ini.

Tabel 2.12. Distribusi Persentase PDRB ADHB						
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 – 2014						
(%)						
Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian	10,40	9,67	10,67	10,61	9,40
B	Pertambangan&	0,50	0,48	0,44	0,43	0,48
C	Industri Pengolahan	36,54	38,59	38,99	39,13	39,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Dan Limbah Dan Daur Ulang	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	5,86	5,50	6,38	6,36	6,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,43	19,80	18,56	18,16	17,79

H	Transportasi dan Perdagangan	3,29	3,04	2,89	2,94	3,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,82	3,71	3,51	3,51	3,63
J	Informasi dan Komunikasi	4,00	3,92	3,85	3,84	4,12
K	Jasa keuangan danAsuransi	3,97	3,89	3,87	3,80	3,69
L	Real Estate	2,40	2,27	2,14	2,13	2,21
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,33	0,36	0,36
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,72	2,52	2,54	2,50	2,41
P	Jasa Pendidikan	2,33	2,93	3,55	3,89	4,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,77	0,83	0,85	0,92
R,R,T,U	Jasa lainnya	1,52	1,41	1,37	1,33	1,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber :BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

Tabel 2.13. PDRB Per Kapita Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2010 - 2014 (Rupiah)

Uarian	2010	2011	2012	2013	2014
1. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	19.805.641,27	22.057.131,90	24.031.144,35	25.932.588,87	28.310.471,47
2. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan	19.805.641,27	20.768.621,24	21.790.067,92	22.840.496,64	23.833.154,36

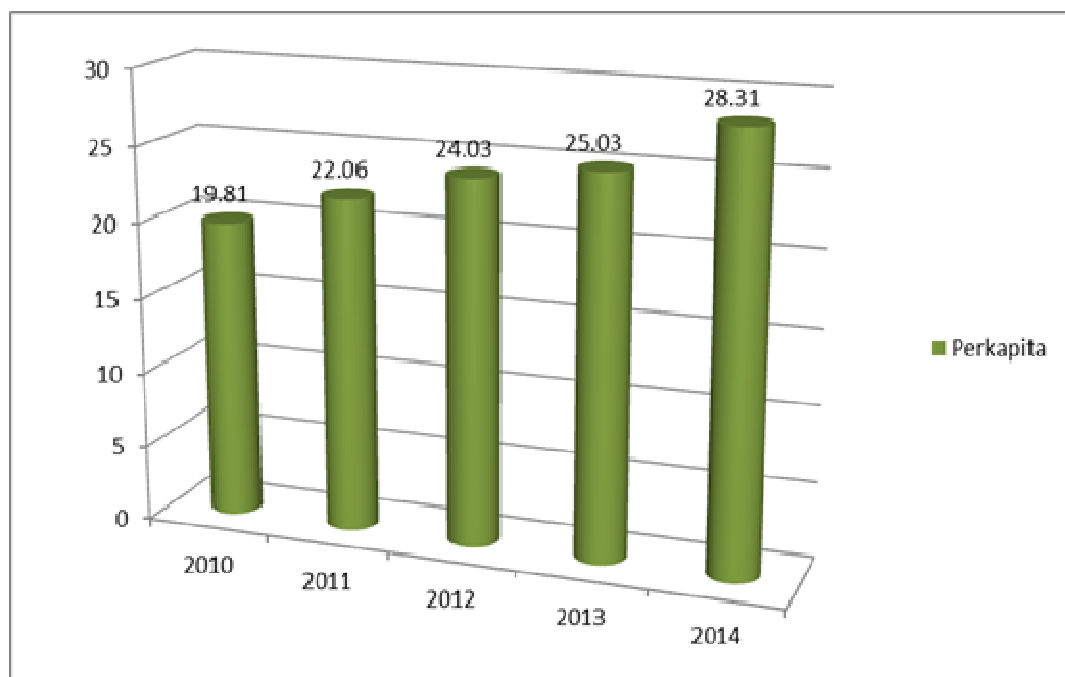
Sumber : Bappeda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

Sementara yang dimaksud dengan PDRB perkapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan menghasilkan suatu PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berikut rincian PDRB perkapita Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2010-2014

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB perkapita Atas Dasar Harga Yang Berlaku. PDRB Perkapita Kabupaen Sukoharjo mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan 2014, yaitu dari Rp. 19,806 Juta menjadi Rp. 28,310 Juta. atau mengalami kenaikan sebesar 42,94% atau rata-rata 8,95% per tahun. Berikut perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Sukoharjo hingga tahun 2014 :

Gambar : 2.13. PDRB Per Kapita Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2010-2014



Sumber : Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

Sementara berdasarkan persebaran pendapatan Perkapita Di kabupaten Sukoharjo per kecamatan, dapat diketahui bahwa pendapatan perkapita paling tinggi dikecamatan Grogol yaitu

sebesar 7,2 juta, sedangkan Pendapatan perkapita paling rendah di Kecamatan Bulu hanya sebesar 713 ribu. Berikut gambaran persebaran pendapatan perkapita di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

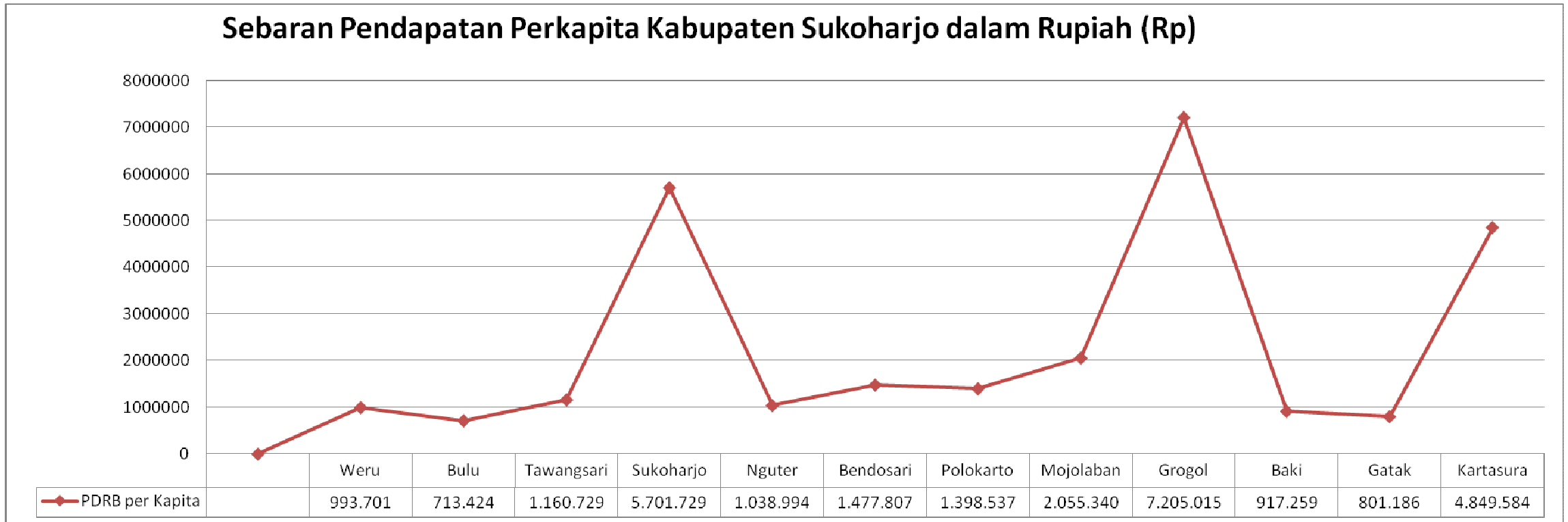
b. Laju Inflasi

Inflasi menurut Bank Indonesia adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi ini salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Angka inflasi di Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir (2010-2015) fluktuatif dengan tren meningkat. Pada tahun 2010 inflasi di Kabupaten Sukoharjo 6,50%, pada tahun 2011 menurun drastis menjadi 2,63%. Pada tahun 2012 dan 2013, angka tersebut naik menjadi 4,22% dan 8,42%. Angka tersebut mulai turun pada tahun 2014, menjadi 7,93% dan turun sangat drastis menjadi 2,69% pada 2015.

Gambar 2.14

Sebaran Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015



Tabel 2.14

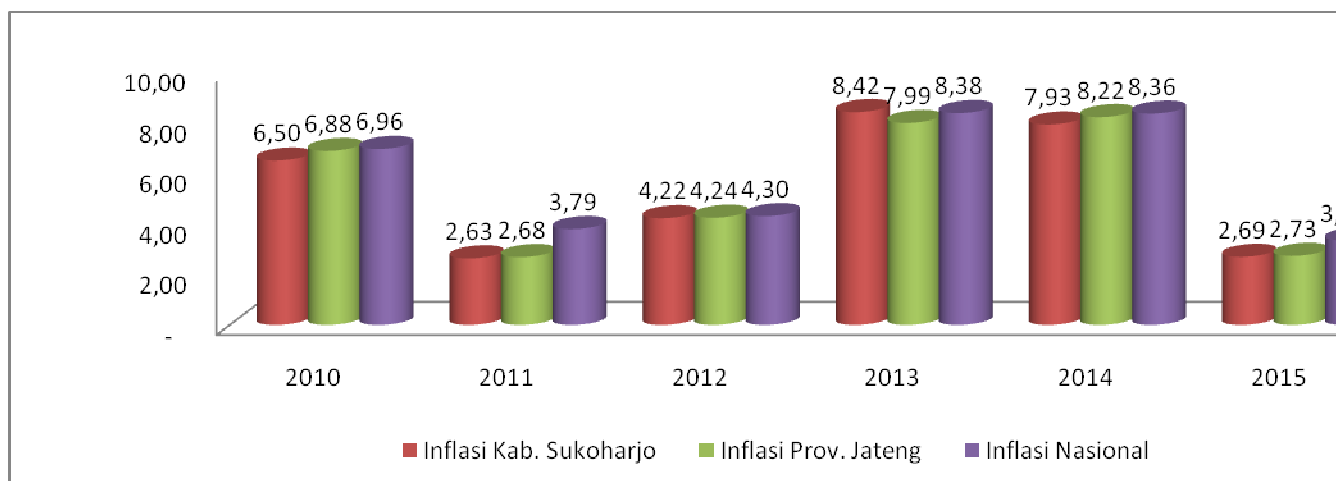
Tingkat Inflasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

Tahun	Tingkat Inflasi
2010	6,50
2011	2,63
2012	4,22
2013	8,42
2014	7,93
2015	2,69

Sumber: BAPPEDA Kab. Sukoharjo

Gambar 2.15

Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Sukoharjodengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2015



Sumber: BAPPEDA Kab. Sukoharjo

Dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah dan inflasi nasional, tingkat inflasi Kabupaten Sukoharjo cenderung lebih rendah setiap tahunnya. Hanya saja pada tahun 2013, tingkat inflasi Kabupaten Sukoharjo paling tinggi diantara Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yaitu sebesar 8,42%.

c. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Tahun 2011 sebesar 0,33. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan pada tahun 2013 namun berhasil naik kembali tahun

2014 menjadi 0,35. Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014

Tahun	Gini Rasio
2010	0,30
2011	0,33
2012	0,35
2013	0,34
2014	0,35

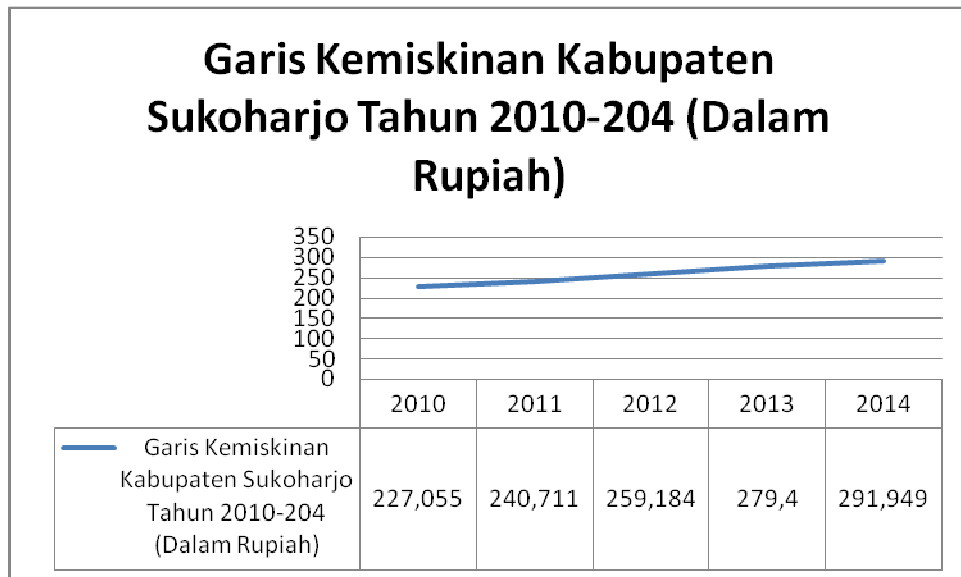
Sumber: BPS Sukoharjo

d. Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2014 garis kemiskinan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 291.949/kapita/bulan mengalami kenaikan dari tahun 2013, yaitu Rp 279.400/kapita/bulan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.16

Garis Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014

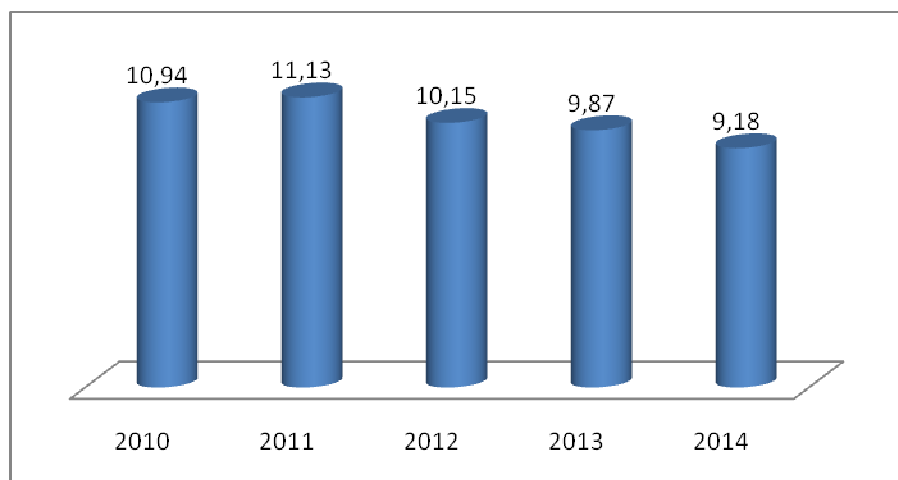


Sumber: Bappeda Kabupaten Sukoharjo

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo kondisinya selalu menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2010 persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo mencapai 10,94%, pada tahun 2015 persentase penduduk miskin berhasil diturunkan hingga 9,18%. Hal tersebut berarti berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil.

Gambar 2.17

Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014

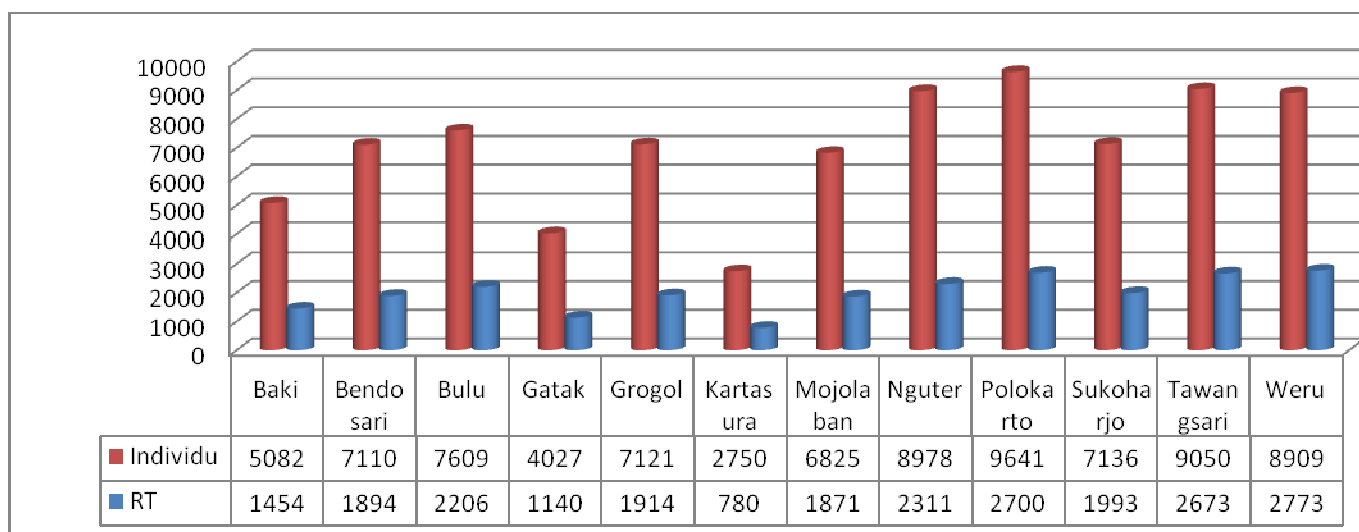


Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo per kecamatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini..

Gambar 2.18

Sebaran Penduduk Miskin per Kecamatan Tahun 2015



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

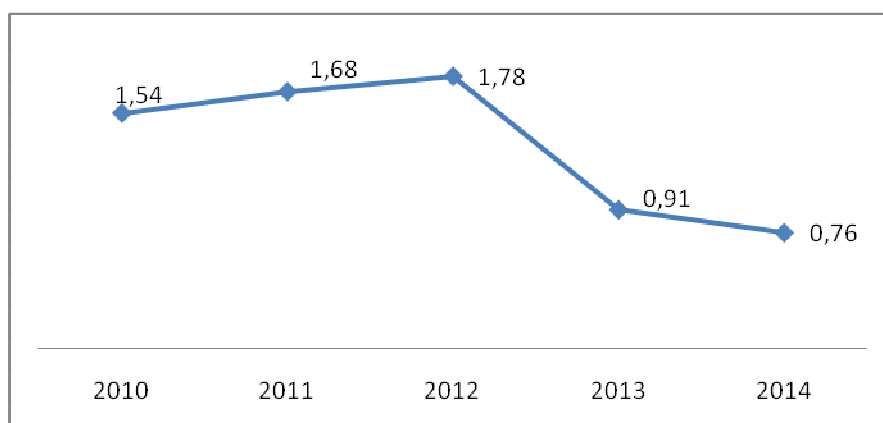
Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa penduduk miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Polokarto, yaitu sebanyak 9641 individu dan 2700 RT. Sedangkan kecamatan dengan penduduk miskin terendah yaitu Kecamatan Kartasura dengan jumlah 2750 individu dan 780 RT.

1) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan P1 di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2010 sebesar 1,54 menjadi 1,68 pada tahun 2011 dan naik lagi pada tahun 2012 menjadi 1,78. Namun pada tahun 2013 dan 2014, angka tersebut dapat diturunkan menjadi 0,91 dan 0,76.

Gambar 2.19

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010-2014**



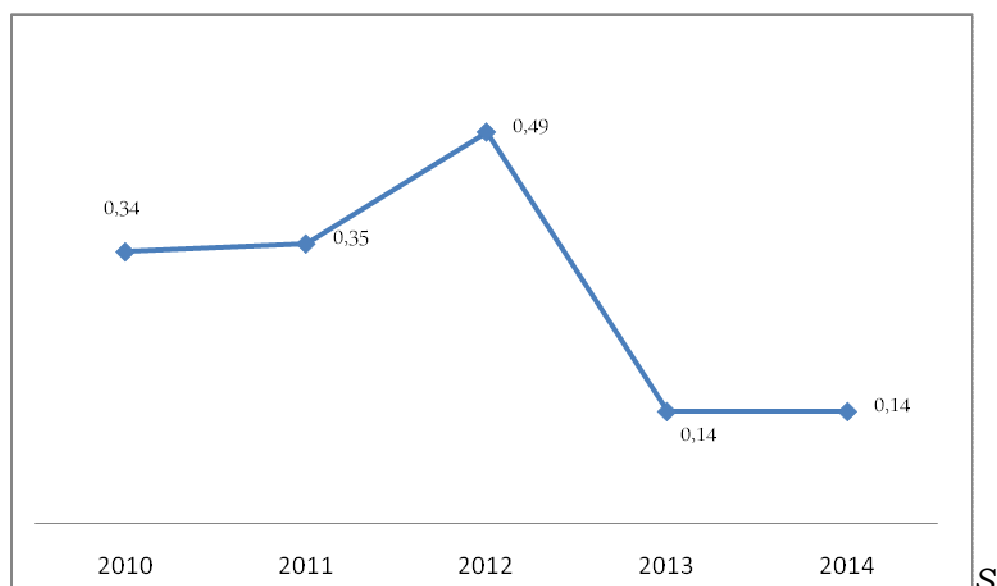
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

Meskipun indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sukoharjomulai menunjukkan tren menurun pada tahun 2013 tetapi masih perlu menjadi perhatian agar P1 akan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya.

2) Indeks Keparahan Kemiskinan

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2014) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan tren naik turun. Pada tahun 2010 sebesar 0,34 naik menjadi 0,35 pada tahun 2011 dan naik lagi pada tahun 2012 menjadi 0,49. Namun pada tahun 2013, angka tersebut mulai menurun menjadi 0,14 dan tetap hingga tahun 2014.

Gambar 2.20
Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014



umber : BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo

Meskipun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan tren penurunan mulai tahun 2013 tapi tetap perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kenaikan P2. Ke depan diharapkan nilai P2 lebih kecil lagi sehingga ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin menjadi lebih kecil.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: meliputi Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 73,57, meningkat menjadi 73,76 pada tahun 2014; dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 74,53 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Capaian IPM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IPM	73,57	73,97	74,21	74,91	73,76	74,53

Sumber: BPS Sukoharjo

Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Sukoharjo secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2010 – 2015 capaian angka harapan hidup meningkat dari 77,37 tahun menjadi 77,46 tahun.

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka harapan hidup (Tahun)	77,37	77,40	77,42	77,44	77,45	77,46

Sumber: BPS Prov. Jateng

2) Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan harapan lama sekolah di Kabupaten Sukoharjo cenderung meningkat dari

sebesar 12,43 (tahun 2010) menjadi 13,42 (tahun 2015). Perkembangan harapan lama sekolah di Kabupaten Sukoharjo selama 2010 -2015 dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Harapan lama sekolah (tahun)	12,43	12,55	12,61	12,66	12,96	13,42

Sumber: BPS Prov. Jateng

3) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan fluktuasi. Dalam kurun waktu 2010 – 2015 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,36 tahun menjadi 8,50 tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukoharjo tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 (Tahun)

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	8,36	8,52	8,53	8,82	8,50	8,50

Sumber: BPS Prov. Jateng

4) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran perkapita di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan dari Rp646,94ribu (tahun 2010) menjadi Rp10,416 ribu (tahun 2015). Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo mengalami

peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengeluaran per kapita (ribu Rp)	646,94	649,96	652,39	654,95	10.264	10.416

Sumber: BPS Prov. Jateng

b. Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 2.21
APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	APK SD/MI	115.39	115.72	114.11	113.70	112.85	112.84
2	APK SMP/MTs	101.60	102.22	99.32	101.44	105.14	106.90
3	APK SMA/SMK/MA	64.79	70.94	71.27	76.51	81.22	83.38

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut.

Capaian APM pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) selama kurun waktu 2010-2015 fluktuatif. Capaian APM SMP sederajat selama kurun waktu sama menunjukkan fluktuatif. Secara rinci capaian APM SD sederajat dan SMP sederajat terlihat pada Tabel 2.22 berikut:

Tabel 2.22
Capaian APMSD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
diKabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Partisipasi Murni SD sederajat	99.09	96.80	99.86	99.10	98.20	97.99
2.	Angka Partisipasi Murni SMP sederajat	76.96	75.80	71.33	70.61	76.65	82.16
3.	APM SMA/SMK/ MA	44.53	47.91	53.09	52.59	54.47	56.46

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

d. Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah (APS). APS menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah biasanya adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

APS pendidikan dasar di Kabupaten Sukoharjomenunjukkan kondisi yang relatif baik. Perkembangan APS jenjang pendidikan SD sederajat selama kurun waktu 2010-2015 cenderung fluktuatif. Pada target nasional, APS SD sederajat pada tahun 2015 adalah 0,15 sehingga APS Kabupaten Sukoharjo sudah di bawah APS Nasional. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat. Perkembangan APS SMP selama kurun waktu 2010-2015 mengalami fluktuasi, pada tahun 2010 sebesar 0,17 dan pada tahun 2015 menjadi 0.03 atau sudah mendekati sebesar 0. Sedangkan untuk APS SMA/MA juga mengalami fluktuasi. Pada periode 2010-2012 menunjukkan penurunan dari 0,83 menjadi 0,52 pada 2012. Pada periode 2013-2014 angka tersebut naik 0,5 menjadi 0,57 pada tahun 2013 dan naik lagi menjadi 1,33 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 berhasil diturunkan kembali menjadi 0.88. Secara rinci perkembangan APS di Kabupaten Sukoharjo terlihat pada Tabel 2.23 berikut:

Tabel 2.23
Capaian APS SD Sederajat, SMP Sederajat dan SMA/SMK/MA
Sederajat
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APS SD Sederajat	0.04	0.08	0.04	0.05	0.02	0.04
2.	APS SMP Sederajat	0.17	0.09	0.12	0.09	0.03	0.03
3.	APS SMA/SMK/MA Sederajat	0.83	0.58	0.52	0.57	1.33	0.88

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

e. Angka Kelulusan

Keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur melalui indikator angka kelulusan. Angka kelulusan membandingkan antara jumlah peserta yang lulus ujian dengan jumlah peserta ujian. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD sederajatselama tahun 2010-2015 menunjukkan kecenderungan meningkat. Demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, angka kelulusannya juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Capaian Angka Kelulusan SD sederajat dan SMP sederajat termasuk dalam kategori sedang.

Angka Kelulusan di Kabpaten Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2010-2015 menunjukkan fluktuatif. Angka Kelulusan SD sederajat sudah mencapai 100 pada tahun 2010. Namun pada periode 2011-2012 angka ini mengalami penurunan menjadi 95,30 pada tahun 2012. Pada periode 2013-2014 menunjukkan kenaikan menjadi 97,86 pada tahun 2014 dan kembali menurun menjadi 96,75 pada 2015. Angka Kelulusan SMP Sederajat juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sudah hampir mencapai 100 yaitu sebesar 98,15 namun kembali turun pada 2015 menjadi 94,74. Demikian juga dengan Angka Kelulusan SMA/SMK/MA yang mengalami fluktuasi. Namun rata-ratanya sudah melebihi 90. Perkembangan Angka Kelulusan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24**Capaian Angka Kelulusan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kelulusan SD Sederajat	100	96,17	95,30	95,83	97,86	96,75
2	Angka Kelulusan SMP Sederajat	85,58	94,74	86,94	84,02	98,15	94,74
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Sederajat	99,11	89,95	95,30	94,35	85,29	83,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

f. Angka Melanjutkan (AM)

Indikator Angka Melanjutkan merupakan indikator strategis untuk mengukur apakah semua lulusan SD sederajat melanjutkan ke SMP sederajat dan lulusan SMP sederajat melanjutkan ke Sekolah Menengah (SM). Diharapkan semua lulusan SD sederajat melanjutkan ke SMP sederajat, dan semua lulusan SMP sederajat melanjutkan ke SM. Capaian AM ke SMP sederajat dan ke SM terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25**Capaian Angka Melanjutkan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat	102.69	105.67	106.91	108.61	106.26	105.65
2	Angka Melanjutkan Ke Sekolah menengah (SMA/SMK)	101.86	101.18	98.95	122.51	1.03.37	112.41

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat sudah melampaui 100%, dan angka tersebut cenderung naik dari mulai tahun 2010 hingga 2013.

Padatahun 2014 dan 2015, angkanya sedikit menurun menjadi 106,26% dan 105,65%. Sedangkan untuk angka melanjutkan dari SMP sederajat ke SMA/SMK pada tahun 2010 sebesar 101,86%, angka ini sedikit menurun pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 101,18% dan 98,95%. Namun, pada tahun 2013 angkanya naik cukup banyak menjadi 122,51%. Pada tahun 2014 turun kembali menjadi 103,37 dan naik lagi menjadi 112,41% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan kategori baik yaitu dengan rata rata sudah melampaui 100% per tahunnya.

g. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk *abortus mola*), dan masa dalam kurun 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 AKI sebesar 152,34 per 100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 21 kasus, mengalami penurunan tajam pada tahun 2011 menjadi 64,62 per 100.000 kelahiran atau sebanyak 9 kasus. Pada periode 2013-2015 menunjukkan kenaikan hingga 159,05 per kelahiran hidup pada tahun 2015 atau sebanyak 20 kasus. Salah satu penyebab AKI di Sukoharjo belum bisa mencapai angka nol karena masih adanya ibu hamil resti dengan penyakit penyerta yang terdeteksi setelah ibu dalam kondisi hamil dan ibu hamil ditemukan resiko tinggi pada trimester 3.

Tabel 2.26

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

Tahun	AKI per 100.000 KH/ Kasus
2010	152,34 /21 Kasus
2011	92,55 / 13 kasus
2012	64,62 / 9 Kasus
2013	98,86 / 13 Kasus

2014	102,47 / 13 Kasus
2015	159,05/ 20 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Salah satu upaya penurunan kasus kematian ibu adalah melalui pemberian pelayanan yang optimal kepada ibu hamil dan ibu melahirkan. Pelayanan kepada ibu hamil antara lain melalui pemeriksaan rutin selama proses kehamilan. Selain pemeriksaan kepada ibu hamil, upaya lain dalam rangka mengurangi AKI adalah melalui pertolongan pada persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

h. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kasus kematian bayi 0-12 bulan dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2010-2015 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2010 AKB Kabupaten Sukoharjo sebesar 10 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 138 kasus, pada tahun 2011 angkanya menurun menjadi 9,11 per 1000 kelahiran hidup atau sebanyak 128 kasus, pada tahun 2012 angkanya naik menjadi 9,69 atau sebanyak 135 kasus,

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah kasus kematian bayi umur 0-12 bulan ditambah anak umur 1-5 tahun dalam kurun waktu satu tahun. AKABA di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2010-2015 juga fluktuatif cenderung menurun, pada tahun 2010 sebesar 11,39 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 138 kasus, menurun menjadi 10,39 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 146 kasus pada tahun 2012. AKABA tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu 12,47 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 164 kasus.

Tabel 2.27

AKB dan AKABAdi Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	AKB (per 1.000 Kelahiran Hidup)/ kasus	10 (138 Kasus)	9,11 (128 kasus)	9,69 (135 Kasus)	10,79 (142 kasus)	10,43 (135 kasus)	9,94 (125 kasus)
2	AKABA (per	11,39	10,39	10,77	12,47 (11,98	11,92

	1.000 Kelahiran Hidup)/kasus	(157 Kasus)	(146 Kasus)	(150 Kasus)	164 Kasus)	(155 Kasus)	(125 Kasus)
3	Prevalensi balita gizi kurang (%)	3,9	4,07	3,92	4,8	4,21	4.96

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo,

i. Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PKMS) bertujuan untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo terutama masyarakat miskin. Kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28
Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	KEPESERTAAN	kep	100.019	100.019	160.020	160.020	159.255
1	JAMKESMAS	275.262	275.262	275.262	305.952	-	-
2	JKN (PBI Pusat)	-	-	-	-	305.952	305.952
3	JKN NON PBI	-	-	-	-	47.476	222.548
4	JKN (PBI APBD I)	-	-	-	-	-	3.753
5	JKN (PBI APBD II)	-	-	-	-	-	6963
	KEUANGAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	JAMKESMAS	556.181.650	354.875.500	834.987.412	1.279.212.092	-	-
	JAMPERSAL	-	364.660.000	2.619.050.000	2.483.970.000	-	-
2	JKN (PBI Pusat)	-	-	-	-	22.010.022.000	22.484.516.000
3	JKN NON PBI	-	-	-	-	3.051.966.000	4.185.354.000
4	JKN (PBI APBD I)	-	-	-	-	-	1.038.828.000
5	JKN (PBI APBD II)	-	-	-	-	-	1.070.870.950
6	KLAIM PBI & Non PBI	-	-	-	-	-	1.877.931.626
	TOTAL	556.181.650	400.147.500	3.454.037.412	3.763.182.092	26.370.570.000	30.091.689.601

Sumber: DKK Kabupaten Sukoharjo, 2016

Mulai tahun 2014, jaminan kesehatan masyarakat JAMKESMAS sudah beralih menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dengan jumlah peserta yang stabil sampai tahun 2015 yaitu sebanyak 305.952 peserta.

j. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang berkerja adalah perbandingan penduduk usia diatas 15 tahun yang bekerja dengan total jumlah penduduk usia diatas 15 tahun keatas. Rasio penduduk yang bekerja mengalami fluktuasi sejak tahun 2010 hingga dengan 2015. Berdasarkan data yang ada, rasio penduduk bekerja pada tahun 2010 sebesar 95,40. Hal tersebut berarti di setiap 100 penduduk angkatan kerja terdapat 95 orang yang bekerja. Pada tahun 2015, angka tersebut berhasil dinaikkan menjadi 94,16. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	432526	435414	428077	431087	458046	457744
Jumlah Penduduk Bekerja (orang)	400526	411536	402487	405276	436987	431021
Rasio Penduduk yang Bekerja	95,40	94,01	94,02	94,52	92,60	94,16

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Sukoharjo

k. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi tenaga kerja (*labor force participation rate*) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), dua variabel utama bidang ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang membaik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2010 angka TPAK sebesar 69,38%. Angka tersebut mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun pada tahun 2015 berhasil naik menjadi 69,52%. Sedangkan angka TPT pada tahun 2010 sebesar 7,40% dan berhasil diturunkan menjadi 4,60% pada tahun 2015.

Tabel 2.30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran
Terbukadi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	69,38	68,41	68,63	70,08	69,13	69,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	7,40	5,48	5,98	5,99	4,60	4,60

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Sukoharjo

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Pada tahun 2014-2015, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 4,60%, lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2013 sebesar 5,99%. Dengan kondisi tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,60%, menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun dengan kondisi tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 4 orang merupakan pengangguran.

1. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dengan melihat beberapa indikator, yaitu hidup yang lama dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kabupaten Sukoharjoselalu menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2010-2014, dari sebesar 94,85 pada tahun 2010 menjadi 96,34 pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Sukoharjo semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Indeks Pemberdayaan Gender(IDG)mengalami kenaikan dari sebesar 67,78 pada tahun 2010menjadi 71,94 pada tahun 2014.Perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut:

Tabel 2.31

IPG dan IDGdi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014
IPG	94,85	95,16	95,34	95,53	96,34
IDG	67,78	67,46	68,73	67,02	71,94

Sumber: BPS Sukoharjo

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Sukoharjopada tahun 2014tercatat sebanyak 426 organisasi,terdiri atas kelompok seni tari, kelompok reog/jathilan, kelompok seni kethoprak/teater, kelompok Pewayangan/Pedalangan, kelompok karawitan, kelompok campursari, kelompok music modern, kelompok religi (laras madya/hadrah) dan kelompok seni rupa.

Berdasarkan data Dikpora Kabupaten Sukoharjo, jumlah olahraga yang berkembang di masyarakat 14 cabang olahraga, dengan sarana prasarana olahraga yang cukup memadai, yaitu sejumlah 79 gedung bulu tangkis, 2 stadion sepak bola, 35 lapangan tenis, 119 lapangan sepak bola, 20 lapangan futsal, 115 lapangan bola voli, 20 lapangan basket dan 6 kolam renang. Berikut data perkembangan klub olahraga yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.32

**Perkembangan Klub Olahraga di Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010-2015**

Indikator		Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jenis Olahraga (KLUB)							
1	Cabor Aeromodeling	1	1	1	1	1	1
2	Cabor Bola Voli/Voli Pantai	12	12	12	12	12	12
3	Cabor Balap Sepeda	2	2	2	2	2	2
4	Cabor Bulu Tangkis	65	65	65	65	65	75
5	Cabor Gantole	1	1	1	1	1	1
6	Cabor Paralayang	2	2	2	2	2	2
7	Cabor Panjat Tebing	2	2	2	2	2	2
8	Cabor Pencak Silat	6	6	6	6	6	7
9	Cabor Renang/Loncat Indah	0	0	0	0	0	6
10	Cabor Sepak Bola/Futsal	47	47	47	47	47	61
11	Cabor Senam	0	0	0	0	0	10
12	Cabor Tenis Meja	2	2	2	2	2	2
13	Cabor Tenis Lapangan	10	10	10	10	10	17
14	Cabor Tinju	1	1	1	1	1	4
JUMLAH		151	151	151	151	151	202

Sumber: Dinas POPK Kab. Sukoharjo

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak Indonesia, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan anak sejak dini sejak usia sangat muda sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional

dan juga psikomotorik anak menjadi tarpantau dan terbina. PAUD mendidik anak menjadi insan yang berkualitas di kemudian hari.

Tabel 2.33

Rasio Ketersediaan Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1 : 27,62	1 : 26,74	1 : 27,04	1 : 27,88	1 : 25,55

Sumber: Bappeda Kab. Sukoharjo

2) Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pendidikan dasar 9 tahun, merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sejak tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Melalui pendidikan dasar 9 tahun diharapkan di masa mendatang, pendidikan minimal penduduk Indonesia adalah lulus SMP/MTs.

Untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar 9 tahun, dibutuhkan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang mendukung proses pembelajaran. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah yang tersedia dibandingkan dengan penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah tahun 2010-2015 terlihat pada Tabel 2.34 berikut:

Tabel 2.34

Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014

No	Indikator	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	1 : 138,02	1 : 138,49	1 : 135,87	1 : 137,83	1 : 114,32

2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS	1 : 449,42	1 : 1376,35	1 : 437,52	1 : 431,07	1 : 122,39
---	--	------------	-------------	------------	------------	------------

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

Rasio ketersediaan sekolah pendidikan per 100 penduduk usia pendidikan dasar menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah baik SD/MI maupun SMP/MTs relatif memadai. Sedangkan ketersediaan guru/murid pendidikan dasar cukup memadai.

3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah guru memenuhi kualifikasi D4/S1 selama kurun waktu 2010-2015 menunjukkan peningkatan. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada tahun 2015 sebesar 83%. Guru SD yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 80%. Sedangkan Guru SMP yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 85%. Guru SMA yang memenuhi kualifikasi D4/S1 sebesar 88%. Secara rinci perkembangan guru yang memiliki kualifikasi D4/S1 terlihat pada Tabel 2.35 berikut:

Tabel 2.35

Persentase Pendidik dengan Kualifikasi D4/S1 Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	48.51	56	62.89	71.24	74.24	79.38
2	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	84.89	86.30	87.52	88.55	89.82	91.56
3	Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	66.14	71.03	75.03	79.55	82.35	85.95

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4	Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	91.99	92.88	90.83	91.25	93.71	95.21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2.35 menggambarkan bahwa secara keseluruhan kualifikasi guru di Kabupaten Sukoharjo cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama Guru SD/MI.

b. Kesehatan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Capaian pembangunan kesehatan dari 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini.

1) Rasio Puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo tersebar dalam 12 kecamatan yang masing-masing memiliki 1 puskesmas. Sedangkan untuk puskesmas pembantu, pada periode 2010-2013 jumlahnya tetap sebanyak 49 puskesmas pembantu. Pada 2014, jumlahnya bertambah menjadi 57 puskesmas pembantu dan tidak bertambah sampai tahun 2015. Puskesmas keliling dari tahun ke tahun juga tidak berubah sebanyak 28 puskesmas keliling. Dengan bertambahnya jumlah puskesmas, maka rasio puskesmas dengan jumlah penduduk juga dapat diturunkan yang semula 1,46 pada tahun 2010 menjadi 1,35 pada tahun 2015.

Tabel 2.36**Jumlah Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015**

Tahun	Jumlah Puskesmas			
	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Rasio Puskesmas dg jumlah penduduk
2010	12	49	28	1,46
2011	12	49	28	1,41
2012	12	49	28	1,40
2013	12	49	28	1,39
2014	12	57	28	1,38
2015	12	57	28	1,35

2) Rasio Tenaga Kesehatan

Keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh rasio tenaga kesehatan yang ada. Ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo per Desember 2015, sebagai berikut: dokter umum sebanyak 56 orang, dokter gigi 22 orang, perawat 179 orang, bidan 400 orang, tenaga teknis Kefarmasian 29 orang, tenaga gizi 19 orang.

Jika dilihat dari rasio tenaga kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/Menkes/SK/I/2014 tentang pedoman penyusunan dan perencanaan SDM di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit, ketenagaan yang ada saat ini masih sangat kurang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 2.37**Jumlah Tenaga Paramedis di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015**

Tahun	Jumlah Dokter		Tenaga Paramedis			
	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Tenaga Gizi
2010	57	23	175	309	22	21
2011	55	22	177	392	28	18
2012	55	22	193	400	28	18
2013	51	21	162	441	27	20
2014	57	22	173	401	24	20
2015	56	22	179	400	29	19

3) Penyakit Menular

Prosentase penderita TB Paru di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2010 adalah 29,5%, berhasil diturunkan menjadi 25,9% pada tahun 2014.

Jumlah penduduk terkena HIV pada tahun 2010 masih 0 sampai tahun 2011, meningkat menjadi 30 penderita pada tahun 2014. Sementara itu penderita AIDS awalnya tidak ada dari tahun 2010 hingga 2010, mulai muncul pada tahun 2012 sebanyak 19 penderita dan terus meningkat sampai 34 penderita pada tahun 2014.

Incident Rate (IR) DBD pada tahun 2010-2014 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 IR DBD sebesar 2,29 per 10.000 penduduk naik tahun 2014 menjadi 36,47 per 10.000 penduduk.

4) Lingkungan yang Sehat

Pembangunan kesehatan lingkungan dilihat dari presentase rumah sehat, tempat-tempat umum yang sehat. Cakupan rumah sehat di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 cakupan rumah yang memiliki SPAL sebesar 69% turun menjadi 57% pada tahun 2015.

5) Gizi Masyarakat

Di wilayah Kabupaten Sukoharjo tidak ditemukan prevalensi gizi buruk. Kasus yang masih ditemukan adalah

prosentase gizi kurang, yang kasusnya cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 prosentase gizi kurang sebesar 5,7% menjadi 4,11% pada tahun 2015.

6) Rasio Sarana Kesehatan per Satuan Penduduk

Sarana kesehatan di Kabupaten Sukoharjo meliputi sarana kesehatan dasar dan sarana kesehatan rujukan. Sarana Kesehatan dasar meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, dokter praktik swasta.

Sarana kesehatan dasar di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 12 puskesmas kecamatan, sedangkan puskesmas pembantu sebanyak 57 puskesmas pembantu, 51 balai pengobatan umum, 215 bidan praktik swasta dan 181 apotek. Jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Sukoharjo sampai dengan 2015 sebanyak 9 rumah sakit.. Indikator pelayanan rumah sakit ditunjukkan dengan pemanfaatan tempat tidur (BOR = *Bed Ocupansi Rate*). Rata-rata BOR Tahun 2010 sebesar 70% mengalami peningkatan menjadi 71,43% pada tahun 2015. Pencapaian kinerja urusan kesehatan dengan mendasarkan beberapa indikator yang diatur dengan beberapa peraturan perundangan yang berlaku dapat diidentifikasi pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Berobat Gratis	%	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH.	83	92,5 4	64,6 2	98,86	102,4 7	159,0 5
3	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	10	9,11	9,69	10,79	10,43	9,94
4	Status Gizi	%	8,6	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	Buruk							
5	Status Gizi kurang	%	5,7	3,38	4,06	4.69	4,21	4,11
6	Desa Siaga Aktif	%	18	27	49	58.08	100	100
7	Incident Rate /Angka kesakitan DBD	/100.000 pddk	< 20	0,94	5	31	26,7	29,7
8	CFR / Angka kematian DBD	%	< 1	98,8	1	1,9	4,5	3,8
9	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	95	30,1	98	100	98,2	99,5
10	Penemuan pasien baru TB BTA positif	%	70	100	72,14	39	36	40
11	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	100	75	100	100	100	100
12	Peserta Pelayanan KB	%	70	100	72,14	74.18	76,2	77,25
13	Peserta aktif KB	%	81	100	79,54	74.18	76,2	77,25
14	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100
15	Pengadaan	%	100	100	100	90	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	obat esensial							
16	Pengadaan obat generik	%	100	100	100	90	100	100
17	Ketersediaan narkotika, psikotropika sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan	%	-	27	100	100	100	100
18	Penulisan resep obat generik	%	100	95	100	96	96	96
19	Rumah yang mempunyai SPAL	%	69	26.68	54	56	55,58	57
20	Jumlah tempat tidur rawat inap	buah	180	200	200	252	302	354
21	Rata-rata hunian tempat tidur (BOR)	%	70	81	72	85	81	71.43
22	Jumlah kunjungan rawat jalan	orang	64.000	75303	68566	90451	95267	96287
23	Jumlah kunjungan IGD	orang	15.500	17104	17803	20151	21643	22009
24	Jumlah kunjungan Instalasi	orang	28.500	38822	38057	48179	51985	52048

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	Laborat							
25	Jumlah kunjungan Instalasi Radiologi	orang	7.000	9644	1093 8	1563 7	1513 7	1574 8
26	Jumlah kunjungan Konsultasi Gizi	orang	1.800	2003	1553	1953	2038	2148
27	Jml kunjungan Insta-lasi Rehab Medik	orang	5.700	1018 5	1243 5	1563 7	1707 1	1728 7
28	Terpenuhinya pelayanan obat pasien	%	100	100	100	98	99	99
29	Prevalensi HIV/AIDS	per 100.000	2	-	3	0	7	6
30	Kesembuhan TB Paru	%	>85	-	90,5 3	89	90	90
31	Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah thd warga miskin	%	100	-	100	100	100	100
32	Capaian Strata 3 Desa Siaga	%	30	27	40	58,08	30,54	32,46
33	Capaian strata posyandu		30	55,3 6	>50	28,7		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	- Purnama						59,97	59,97
	- Mandiri						25,45	25,45
34	Usia Harapan Hidup	%	70,17	77,4 0	77,4 2	77,44	77,45	77,45

Sumber Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2019. Melihat kondisi tersebut perlu dilakukan penyusunan target SPM per tahun yang diintegrasikan dengan RPJMD.

Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan pada suatu daerah yang perlu mendapatkan perhatian.

Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, Perkotaan dan Perdesaan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi.

1) Jalan dan Jembatan

Sistem jaringan transportasi Kabupaten Sukoharjo ini saling terkait baik dalam koridor jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Jaringan transportasi di Kabupaten Sukoharjo ini membentuk pola grid sistem yang merupakan ciri khas

transportasi jenis perkotaan. Ruas Jalan Nasional yang berada di Kabupaten Sukoharjo meliputi: Batas Kabupaten Boyolali (Bangak)-Kartasura- Sukoharjo, dan Kartasura – Tegalgondo. Sedangkan ruas Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Sukoharjo meliputi: Sukoharjo– Sukoharjo – Nguter dan Sukoharjo – Weru – Watukelir. Selain jalan tersebut diatas merupakan kewenangan kabupaten.

Apabila ditinjau secara skala regional Kabupaten Sukoharjo juga dilewati oleh jaringan jalan sistem primer yaitu jalan arteri primer Sukoharjo-Semarang yang melalui Kecamatan Kartasura, jalan kolektor primer menghubungkan Kabupaten Sukoharjo dengan Wonogiri/ Pacitan serta jalan lokal primer yang menghubungkan Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten dan Karanganyar.

Panjang jalan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014 secara keseluruhan sepanjang 673,12 km terbagi menjadi 14,59 km jalan negara, 53,41 km jalan provinsi, dan 605,12 km jalan kabupaten.

Kondisi jalan di Kabupaten Sukoharjo dalam kondisi baik sepanjang 285,90 km, sedangkan selebihnya dalam kondisi rusak 104,20 km, kondisi sedang 142,72 km serta kondisi rusak berat sepanjang 72,30 km.

2) Sumberdaya air

Sumber daya air yang ada di Kabupaten Sukoharjo meliputi sungai, mata air, waduk dan embung. Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Daerah Pengembangan Sungai (DPS) Sukoharjo Hulu, Samin, dan Dengkeng yang meliputi Sungai Bengawan Sukoharjo, Sungai Dengkeng, Sungai Brambang, Sungai Jlantah, Sungai Samin, Sungai Ranjing, dan Sungai Walikan. Sungai-sungai tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa anak sungai lainnya, sehingga di Kabupaten Sukoharjo terdapat kurang lebih 31 sungai yang mengalir di daerah ini, dengan panjang keseluruhan sungai tersebut sepanjang 292,05 km.

Pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai meliputi:

- a. Pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Bengawan Sukoharjo dan cekungan air tanah Karanganyar – Boyolali.

- b. Jaringan sumber daya air lintas provinsi Wilayah Sungai Bengawan Sukoharjo berupa DAS Bengawan Sukoharjo.
- c. Pengembangan Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari.
- d. Pengembangan Dam Colo di Kecamatan Nguter.
- e. Pengembangan Embung meliputi: Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Baki, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Sukoharjo.

Kondisi daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 92 Daerah Irigasi (DI) terdiri dari 1 DI kewenangan pusat, 21 DI kewenangan propinsi dan 70 DI kewenangan Kabupaten Sukoharjo dimana 82,81 % dalam kondisi baik dan 17,19% mengalami kerusakan. Sedang luas layanan total sebesar 20.446 hektar. Sebagai sumber utama yang dimanfaatkan untuk irigasi adalah dengan memanfaatkan sungai sebanyak 31 sungai, dengan panjang mencapai 292,05 kilometer. Untuk memanfaatkan sumber air yang ada dibuat bendung sebanyak 86 bendung berikut jaringan irigasi primer sepanjang 20.960 meter, sekunder sepanjang 250.350 dan tersier 633.800 meter. Daerah irigasi tersebut memiliki pintu air sebanyak 608 buah serta bangunan bagi/sadap sebanyak 557 buah, bangunan lainnya 579 buah.

Kewenangan daerah irigasi yang berada di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan Pusat seluas 10.577 hektar yang terdiri dari DI Colo Timur 7.547 hektar dan Barat 3.030 hektar. Daerah irigasi Colo Timur memiliki area layanan yang meliputi enam Kecamatan, yaitu Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Sukoharjo, Grogol. Daerah irigasi Colo Barat memiliki area pelayanan meliputi tiga kecamatan yaitu Tawang Sari, Bulu, Weru.
- b. Kewenangan Propinsi, daerah irigasi yang ada seluas 1.026 hektar yaitu Daerah Irigasi Trani. Daerah Irigasi ini melayani dua kecamatan yaitu Polokarto (307 hektar) dan Mojolaban (899 hektar).

3) Air Limbah

Sumber penghasil air limbah di Kabupaten Sukoharjo berasal dari kegiatan domestik untuk mencuci, memasak, mandi dsb, dan kegiatan non domestik untuk fasilitas umum seperti pasar, rumah sakit, fasilitas komersial seperti rumah makan, hotel, industri, dan sebagainya.

Dengan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah air limbah yang dibuang ke lingkungan sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan pada tingkat yang lebih ekstrim dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

Untuk menghindari terjadinya dampak pencemaran akibat pembuangan air limbah domestik diperlukan pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah domestik dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu secara *on site system*, *off site system* dan dengan sistem *small bore sewer*. Untuk *off site system* di Kabupaten Sukoharjo belum pernah diterapkan, sedangkan untuk *small bore sewer* tidak ada data. Sistem yang selama ini ada adalah berupa *on site system* yaitu melalui program SLBM, USRI dan Jamban Pribadi.

Kabupaten Sukoharjo terdapat 3 cara pembuangan limbah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu:

- Kelompok yang membuang air limbah domestiknya langsung ke badan air tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu.
- Kelompok yang membuang air limbah domestiknya ke alam bebas setelah mengalami pengolahan awal yang sangat sederhana berupa tangki septik.
- Kelompok yang membuang air limbah domestiknya ke badan air setelah diolah secara tuntas pada sistem pengolahan air limbah yang memadai (SANIMAS).

Sedangkan cara yang telah ada dan diterapkan untuk pengolahan limbah cair domestik di Kabupaten Sukoharjo adalah dengan sistem *on site* yang dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu secara individual dan komunal dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Secara Individual (tangki septic/cubluk), yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- Air limbah dari WC (*black water*) dan air limbah bekas cucian, mandi, dsb (*grey water*) disalurkan ke dalam tangki septic yang dilengkapi dengan peresapan.
- Air limbah dari WC (*black water*) disalurkan ke dalam tangki septic yang dilengkapi dengan peresapan sedangkan air limbah bekas cucian, mandi, dsb (*grey water*) langsung dibuang ke badan air/lingkungan atau saluran drainase.

- Secara Komunal (IPAL Komunal)

Sistem ini diaplikasikan dalam bentuk program SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo mempunyai akses sanitasi layak pada Tahun 2013 sebanyak 719.451 jiwa atau 83,30%, yang terdiri dari penyediaan IPAL Komunal sejumlah 2.586 SR mencakup layanan sebanyak 12.930 jiwa atau 1,50%, dan penduduk memiliki fasilitas pembuangan akhir tinja sebanyak 235.507 Rumah Tangga dengan cakupan sebanyak 706.521 jiwa atau 81,80% dari total penduduk.

Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) berupa IPAL Komunal diselenggarakan melalui SLBM (DAK-APBN) sampai dengan Tahun 2013 mencakup di 18 Desa/Kelurahan di 6 Kecamatan (Kartasura, Grogol, Mojolaban, Baki, Sukoharjo, dan Weru) sebanyak 3.645 KK, sedangkan program USRI dimulai pada Tahun 2012 sejumlah 8 Desa di 4 Kecamatan (Kartasura, Mojolaban, Grogol dan Baki) sebanyak 552 KK.

4) Drainase

Jaringan drainase yang terdapat pada Kabupaten Sukoharjo berupa jaringan primer, sekunder, dan tersier.

- a. Jaringan primer berupa sungai atau jaringan yang menampung air dari jaringan sekunder.
- b. Jaringan sekunder berupa jaringan drainase yang terdapat dan mengikuti pola jalan raya di kanan atau kirinya yang menampung air dari jaringan tersier(perumahan).

c. Jaringan tersier berupa jaringan drainase yang terdapat di dalam lokasi jalan dalam permukiman penduduk.

Pada saat ini kondisi jaringan drainase di Kabupaten Sukoharjo terutama saluran kota telah banyak mengalami sedimentasi, sedangkan saluran alam mengalami pendangkalan yang disebabkan oleh terjadinya erosi, dan sedimentasi baik oleh kejadian alam maupun pembuangan sampah.

Daerah yang rawan banjir adalah di wilayah Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Weru, Tawang Sari, Gatak, Grogol, Mojolaban dan Polokarto. Sempitnya jaringan drainase dan tidak berfungsinya beberapa sarana saluran mengakibatkan beberapa ruas jalan menjadi daerah genangan dan sebagian air mengalir melintasi jalan raya. Selain itu juga masih ada saluran drainase yang menjadi satu dengan saluran irigasi seperti di Kota Sukoharjo dan wilayah Sukoharjo Baru.

Sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir, antara lain meliputi:

1. Penyusunan masterplan drainase Kabupaten Sukoharjo.
2. Pengembangan konsep ekodrainase guna menanggulangi bahaya banjir akibat luapan Sungai Bengawan Sukoharjo.
3. pengembangan drainase primer kawasan perkotaan meliputi:
 - a. Kecamatan Sukoharjo.
 - b. Kecamatan Kartasura.
 - c. Kecamatan Grogol.

Saluran drainase yang berada di jalan-jalan protokol pada umumnya sudah ada, berupa saluran tertutup dengan mainhole-mainhole untuk pemeliharaan. Selain itu ada saluran-saluran alami ataupun buatan, baik terbuka maupun tertutup. Pada saat ini di Kabupaten Sukoharjo telah mulai diterapkan teknologi biopori yang berfungsi sebagai resapan air hujan. Lokasi pembangunan perumahan baru sudah mulai diterapkan sistem biopori ini.

5) Penataan bangunan

Berkembangnya pusat aktivitas perkotaan, seringkali membawa masalah kompleks yang tidak mudah untuk diuraikan dan dipecahkan. Permasalahan yang muncul banyak berhubungan

dengan penurunan kualitas ruang dan fisik perkotaan, selain itu hilangnya orientasi sebuah kawasan / bagian kota. Sehingga diperlukan penanganan yang mendesak sebagai langkah antisipasi maupun solusi.

Maka antisipasi terhadap perubahan dan perkembangan kawasan perkotaan sangat mendesak untuk dilakukan dengan harapan terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman dan aman serta terkendali. Guna memberikan arah perkembangan perkotaan maka dilakukan Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan menyusun dokumen perencanaan, adapun dokumen yang telah tersusun meliputi:

- a. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Kecamatan Grogol Tahun 2013.
- b. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo Tahun 2013.
- c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Banaran Kecamatan Grogol Tahun 2014.

Adapun Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah tersusun meliputi :

- a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Slamet Riyadi Sukoharjo.
- b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Slamet Riyadi Kartasura.
- c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Ir. Soekarno dan Jalan Palem Raya Kecamatan Grogol.

Sedangkan upaya untuk mewujudkan Penataan Bangunan dan Lingkungan, pembangunan fisik yang telah dilakukan meliputi:

- a. Penataan Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Ir. Soekarno Kecamatan Grogol pada Tahun 2014 dan Tahun 2015.
- b. Penataan Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman Sukoharjo pada Tahun 2015.

6) Persampahan

Kegiatan yang menghasilkan sumber sampah adalah permukiman, rumah tangga, niaga (pasar, swalayan, pertokoan),

fasilitas umum (rumah sakit, perkantoran, pendidikan), fasilitas komersial(hotel, restoran), dan industri. Sedangkan menurut jenisnya sampah yang dihasilkan pada Kabupaten Sukoharjo berupa sampah organik (kertas, sisa makanan, kotoran) sampah anorganik (plastik, logam, kaca, karet, tekstil (kain), dan kayu).

Daerah yang terlayani sistem persampahan di Kabupaten Sukoharjo saat ini terdiri dari 12 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 150 Desa 2.026 Dukuh 1.438 Rw dan 4.428 Rt dalam pelayanan sampah belum seluruhnya maksimal baru melayani 7 Kecamatan, 17 Kelurahan, 6 Desa, 5 Perumahan dan 1 Brigif Palur. Masing-masing kecamatan dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Kecamatan Sukoharjo	=	6	
	Kelurahan,			
2.	Kecamatan Bendosari	=	1	
	Kelurahan,			
3.	Kecamatan Grogol	=	5	
	Kelurahan dan 2 Perumahan,			
4.	Kecamatan Baki	=	1	
	Kelurahan,			
5.	Kecamatan Kartasura	=	8	Kelurahan,
6.	Kecamatan Mojolaban	=	1	Perumahan
	dan 1 Brigif Palur dan			
7.	Kecamatan Polokarto	=	2	
	Kelurahan.			

Adapun Rasio daya angkut dengan produksi sampah rata – rata setiap hari :

- produksi sampah = ± 176,70 m³
- sampah terangkut = ± 105 m³
- sampah yang yang tidak terangkut = 71,70 m³.

Secara rinci capaian kinerja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	23,43	33,16	31,20	31,23	35,32	48,52
2	Terbangunnya saluran drainase	Km	3	2,75	3	3,54	3,54	4,75
3	Rasio jaringan irigasi	%	63,70	70,00	72	70	75	88,56

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

7) Penataan Ruang

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo selama dua puluh tahun, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan

penjabaran RTRW ke dalam rencana distribusi penataan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan kota. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menindaklanjuti RTRW dengan penyusunan Draft Raperda beserta lampiran Dokumen Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) yang disusun untuk 11 (sebelas) RDTRK meliputi:

- RDTRK Kecamatan Kartasura.
- RDTRK Kecamatan Baki.
- RDTRK Kecamatan Gatak.
- RDTRK Kecamatan Grogol.
- RDTRK Kecamatan Mojolaban.
- RDTRK Kecamatan Bendosari.
- RDTRK Kecamatan Sukoharjo.
- RDTRK Kecamatan Nguter.
- RDTRK Kecamatan Tawang Sari.
- RDTRK Kecamatan Bulu.
- RDTRK Kecamatan Weru.

Namun dari 11 (sebelas) Draft Raperda RDTRK tersebut diatas masih belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal tersebut dikarenakan Draft Raperda RDTRK masih dalam proses untuk memperoleh Rekomendasi Gubernur serta Persetujuan Substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Capaian kinerja Urusan Penataan Ruang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.40 sebagai berikut:

Tabel 2.40
Capaian Pembangunan Bidang Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	prosentase kawasan hutan produksi terhadap luas wilayah Kab.	%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	Sukoharjo							
2	prosentase kawasan lahan pangan terhadap luas wilayah Kab. Sukoharjo	%	60.84	60,84	50,88	50,88	53,72	53,22
3	prosentase kawasan perkebunan terhadap luas wilayah Kab. Sukoharjo	%	1.52	1,52	1,52	1,52	5,22	4,97
4	prosentase kawasan pemukiman terhadap luas wilayah Kab. Sukoharjo	%	23.36	30,00	30	38,77	38,77	42,54
5	Persentase luas lahan bersertifikat	%	70	72	80	78,64	80,99	87,68

Sumber: DPU

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membangun RUSUNAWA, yang berada di Kecamatan Sukoharjo sebanyak 2 Twin Block dengan luas 2 Hektar.

Perkembangan rumah dengan status milik sendiri di Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami penurunan dengan rata-rata setiap tahun turun sebesar 4,31%,

pada tahun 2013 meningkat sebesar 6,36%;Penurunan jumlah rumah akibat dari pertumbuhan jumlah rumah tangga setiap tahunnya mencapai rata-rata 1,44%;Penurunan jumlah rumah tersebut berdampak pada jumlah kebutuhan rumah yang pada tahun 2010 sebanyak 32.287 unit menjadi 46.869 unit pada tahun 2012, hingga tahun 2013 menurun menjadi 36.766 unit;Jumlah RTLH di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2012 mengalami peningkatan mencapai 11,92% dari 20.946 unit pada tahun 2011 menjadi 23.782 unit pada tahun 2012, hingga pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 84,16 % dari tahun 2012 yaitu menjadi 12.914.

Namun apabila dilihat dari prosentase terhadap jumlah rumah tangga, jumlah rumah layak huni di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 88,40% menjadi 94,03% atau rata-rata setiap tahun 1,88%.

Pola perkembangan permukiman berdasarkan perkembangan aktivitas perkotaan terbagi menjadi dua,terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman kampung. Permukiman perkotaan merupakan kawasan yang berkembang yang dapat dilihat dari kepadatan bangunan yang mendominasi wilayah perkotaan, sedangkan permukiman kampung merupakan kawasan yang masih bercirikan perdesaan dan akan berkembang pada masa yang akan datang.

Karakteristik perkembangan permukiman terdiri dari permukiman tradisional, permukiman kumuh, permukiman rawan banjir, dan permukiman perbatasan.Permukiman kumuh yang diidentifikasi merupakan permukiman kumuh pada lahan yang diperuntukan sebagai permukiman (*slum*). Pemukiman ini terdapat diwilayah perkotaan atau dekat dengan pusat kotaKabupaten Sukoharjo.Kawasan permukiman kumuh Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan SK Bupati Sukoharjo Nomor 663/1003/2014 ditetapkan seluas 35.280 ha, adapun sampai dengan Tahun 2015 telah tertangani seluas 21,524 ha, yang meliputi:

- a. Kawasan Banaran 10,240 ha
- b. Kawasan Sonorejo 2,407 ha
- c. Kawasan Purwogondo 5,177 ha

d. Kawasan Klaseman 3,700 ha

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pengendalian keamanan lingkungan telah dilakukan selama 12 bulan dalam setahun dan terus dilakukan pada periode 2010-2015 demi menciptakan kenyamanan lingkungan di kabupaten Sukoharjo. Penertiban-penertiban dan razia yang dilakukan oleh Satpol PP juga dilakukan sebanyak 38 kali dalam 5 tahun. Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2010	Realisasi				
				2011	2012	2013	2014	2015
-	Tersedianya Tenaga kerja pengendali keamanan (Satpam)	bulan	12	12	12	12	12	12
-	Terlaksananya pemantauan situasi daerah, Terlaksananya Laporan cepat dan deteksi dini situasi daerah	orang	396	4.131	112	112	191	154
-	Terlaksananya Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	bulan/ kec	12	12	12	12	12	12
-	Terlaksananya pengadaan pakaian hansip dan kelengkapannya	Orang	0			5.970	347	475

No.	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2010	Realisasi				
				2011	2012	2013	2014	2015
-	Terpantaunya keberadaan dan kegiatan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kab.Sukoharjo	buku/ perush	0	21			21	21
-	Tersuluhnya masy. terhadap bahaya Miras dan Narkoba	orang	100	75	75	100	75	75
-	Razia / Penertiban dan Pembinaan PSK	kali	12	6	12	8	6	6
-	Terlaksananya koordinasi Organisasi Profesi, Ormas dan LSM	kali	2	1	1	1	1	1
-	Terjalannya hubungan yang baik antar Pemda dan LSM	kali	0	1	1	1	1	1
-	Laporan dan data pelanggaran Perda dan Perbup	laporan	12	12	12	12	12	12
-	Terlaksananya Kegiatan penyidikan/Tipiring	kali	4	9	18	16	16	18
-	Jadwal dan laporan kegiatan PPNS	laporan	12	1	1	1	1	1
-	Tertib dan terbinanya PKL seluruh Kab.	%/ kec	100	12	12	12	12	12

No.	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2010	Realisasi				
				2011	2012	2013	2014	2015
	Sukoharjo							
-	Tersusunnya laporan kegiatan POL PP	laporan	12	12	12	12	12	12
-	Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.	kec	0	12	12	12	12	12
-	Terlaksananya pelatihan PUG bagi aparat, lembaga-lembaga di 12 kecamatan.	orang/ kali	60		75	75	6	6
-	Tersedianya sarana dan prasarana pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2).	paket/ kec	0				12	12
-	Terselenggaranya koordinasi lintas pelaku pengarusutamaan gender.	kec	0				12	12
-	Terlaksananya pameran hasil	kali	0				2	2

No.	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2010	Realisasi				
				2011	2012	2013	2014	2015
	karya perempuan di bidang pembangunan.							
-	Terlaksananya pembinaan kepada organisasi perempuan se Kabupaten Sukoharjo	Kec	0	12	12	12	12	12
-	Terlaksananya penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anak.	orang/ kec	30	12	12	12	12	12

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, Kesbangpol dan BPBD, April 2016

f. Sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 jumlah PMKS sebanyak 13.913 orang. Jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan meningkatnya jumlah fakir miskin setiap tahunnya. Rincian PMKS yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42

Jumlah PMKS di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2015

No	Jenis PMKS	2013		2014		2015	
		L	P	L	P	L	P
1	Angka Balita Terlantar (ABT)	98	94	77	75	80	72
2	Anak Terlantar (AT)	454	429	420	401	408	418
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ANBDH)	24	16	15	6	0	0
4	Anak Jalanan (AJ)	40	3	24	2	0	0
5	Anak Dengan Kedisabilitas						
A	Anak Cacat Tubuh	151	90	125	71	116	117
B	Anak Cacat Netra	17	14	11	8	7	9
C	Anak Rungu Wicara (Bisu Tuli)	53	53	35	37	38	34
D	Anak Mental Eks Psikotik (Tuna	30	17	17	12	24	21

	Laras)						
E	Anak Mental Retardasi (Tuna Grahita)	107	67	8	52	12	20
F	Anak Cacat Ganda	60	43	40	30	84	72
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (AMKTK)	0	0	0	0	0	0
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	0	0	0	0	0	0
8	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	657	842	576	737	2025	1713
9	Penyandang Disabilitas (PDIS)						
A	Penyandang Cacat Tubuh	717	577	617	511		
B	Penyandang Cacat Netra	283	255	246	215	109	94
C	Penyandang Cacat Rungu Wicara (Bisu Tuli)	512	457	468	414	155	144
D	Penyandang Cacat Eks Psikotik (Tuna Laras)	24	18	13	11	97	44
E	Penyandang Cacat Mental Retardasi (Tuna Grahita)	17	18	11	10	152	103
F	Penyandang Cacat Ganda	34	33	21	19	331	238
G	Penyandang Cacat Bekas Penyakit Kronis (TBC, Stroke)	353	318	321	299	299	299
H	Penyandang Cacat Bekas Penderita Kronis (Kusta)	42	23	29	13	13	13
10	Tuna Susila (TS)	0	48	0	33	0	0
11	Gelandangan (GEL)	45	47	29	34	0	0
12	Pengemis (PENG)	37	36	29	34	0	0
13	Pemulung (PL)	37	46	24	32	0	0
14	Kelompok Minoritas (KPMIN)	0		0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	65	19	44	14	0	0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0	0
17	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	0	0	0	0	0	0
18	Korban Trafficking (KTRAF)	0	0	0	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan (KTKSAN)	0	0	0	0	0	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0		0	0	0	0
21	Korban Bencana Alam (KBM)	57	40	387	575	0	0
22	Korban Bencana Sosial (KBS)	0	0	0	0	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	2406	3707	2406	3707	27	2325
24	Fakir Miskin (FM)	0	0	64627	95121	76416	84190
25	Keluarga Bermasalah Sosial	122	161	97	128	0	0

	Psikologi (KBSP)						
26	Komunikasi Adat Terpencil (KAT)	0	0	0	0	0	0
	Total	6442	7471	70717	102601	80393	89926
	Total (L+P)	13913		173318		170319	

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Bidang Sosial di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kerja Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Peningkatan kualitas sarana prasarana tempat Ibadah	Unit	212	212	212	212	212
2.	Peningkatan kualitas sarana prasarana lembaga keagamaan	Unit	20	35	48	65	89
3.	Peningkatan jumlah lembaga dakwah (majelis taklim)	lembaga	21	21	21	21	21
4.	Tersusunnya data base bid. Keagamaan	Buah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Sukoharjo, April 2016

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo secara makro dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Data menunjukkan bahwa TPAK di Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2010 hingga 2015 menunjukkan bahwa angkanya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 sebesar 69,38% dapat dinaikkan menjadi 69,52% pada tahun 2015. TPT dari tahun 2010 mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2014. Angka partisipasi kerja pada tahun 2015 mencapai angka 4,60%. Adapun indikator-indikator lain dari urusan ketenaga kerjaan dapat dilihat dalam Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Jumlah Tenaga Kerja terdidik dibandingkan dengan Jumlah Angkatan Kerja	%	0	0.7	0,00 7	1	0,61	0,72
2	Rasio Jumlah Tenaga Kerja terdidik dengan jumlah permintaan tenaga kerja	%	0	0.59	0,29 9	96	89	89
3	Wira Usaha Baru	%	48	30	20	50	50	50
4	Jumlah Instruktur yang	%	2	3	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	mengikuti Upgridding							
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,38	68,41	68,63	70,08	69,13	69,52
6	Jumlah Kesempatan Kerja	Orang	4026	4892	9940	14797	3.392	3458
7	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Orang	1613	4155	4886	13045	2.213	1987
8	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	%	36	66	90	39	0	0
9	Jumlah ijin LPTKS dan sertifikasi lulusan LPTKS	Lembaga	21	25	15	15	10	10
10	Jumlah Kasus Mogok Kerja	Kasus	0	0	0	0	0	0
11	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus	7	15	13	18	0	0
12	Jumlah kasus PHK	Kasus	4	15	17	18	7	10
13	%	%	87	90	90	90	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	perusahaan yang telah menerapkan UMK							
14	% Perusahaan dengan "Zerro Accident"	%	67	75	75	75	92	92

Sumber : Dinakertrans Kabupaten Sukoharjo

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, pemerintah berupaya untuk memberikan hak yang sama dalam pembangunan melalui upaya kesetaraan gender. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 mengamanatkan pengintegrasian isu gender dalam berbagai bidang pembangunan, pembentukan kelembagaan PUG serta dukungan pembiayaan pembangunan yang *responsive gender*. Selain itu juga telah diamanatkan Standar Pelayanan Minimal urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaksanaan SPM tersebut merupakan konsekuensi pelaksanaan program pembangunan yang responsif gender dan responsif anak.

Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dalam kurun waktu 2011-2015 cenderung selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2011 sebanyak 34 kasus. Angka ini berhasil diturunkan menjadi 22 kasus pada tahun 2015. Sedangkan untuk kasus kekerasan pada anak cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebanyak 17 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2014 yaitu 26 kasus.

Tabel 2.45
Jumlah Kasus Kekerasan dan Prosentase KDRT yang terselesaikan di
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015

Tahun	Kasus Kekerasan pada Perempuan	Kasus Kekerasan pada Anak	Prosentase KDRT yang terselesaikan (%)
2011	34	17	100
2012	30	18	100
2013	28	17	100
2014	28	26	100
2015	22	18	100

Pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mendasarkan indikator yang diatur dalam beberapa peraturan dapat diidentifikasi pada Tabel 2.46 berikut:

Tabel 2.46
Pencapaian Kinerja SPM Bidang Layanan Penanganan
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2010	Realisasi				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio KDRT	%	22.5	30	30	45	45	48
2	Tersusunnya peraturan perundangan tentang gender dan	paket	0	1	1	1	1	1

	anak							
3	Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender	Kec.	1	-	12	12	12	12
4	Tertanganinya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di 12 kecamatan.	kec	12	12	12	12	12	12
5	Penyusunan PERDA tentang perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sukoharjo	dokumen	0	1	-	-	-	-

Sumber : Bapermas, PP, PA dan KB, April 2016

c. Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup

empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.47 berikut:

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2010-2015

No	URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ketersediaan pangan (beras dll)	Ton	207.306	189.182	208.471	230.518	226.222	253.092
2	Konsumsi pangan (beras dll)	Ton	88.343	148.854	80.794	104.518	112.205	135.639
3	Desa Rawan Pangan	Desa	41	40	39	39	35	35
4	Pola konsumsi pangan masyarakat	k.kal/kap/hari	1.459,2	1.908,5	1.924,3	1.960,8	2.039,8	2.027
5	Terbentuknya lembaga distribusi pangan masyarakat	lembaga	1	1	1	-	-	1
6	Pola pangan harapan	%	83,8	86,50	87,10	89,00	91,60	91,70
7	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	-	-	-	42,86	60,00	85,71
8	Persentase ketersediaan pangan utama	%	187	133	246	230	218	250
9	Persentase stabilitas harga pangan strategis	%	78,67	93,52	97,84	80,76	89,94	83,07

Sumber : BKP

d. Pertanian

Sesuai pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanian, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam bidang pertanian sebagai berikut:

- 1) Pemberian izin lokasi, yang meliputi: (a). izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan

dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal; (b). perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c). penanaman modal adalah yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas penanaman asing maupun penanaman modal dalam negeri.

- 2) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah baik dengan cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian (secara sukarela).
- 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan. Sengketa tanah garapan adalah pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan.
- 4) Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuk lain.
- 5) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* yang menjadi tanah *objek landreform*.
- 6) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
- 7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. Tanah kosong adalah tanah yang di kuasai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tanah, hak pengelolaan, atau tanah yang sudah diperoleh dasar

penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

- 8) Pemberian izin membuka tanah. Diartikan sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil manfaat dan mempergunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- 9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini diartikan merupakan pelaksanaan dan penetapan letak tepat rencana kegiatan yang telah jelas anggarannya baik dari pemerintah, swasta maupun perorangan yang akan membutuhkan tanah di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan data informasi pola penatagunaan tanah yang sesuai dengan kawasan rencana tata ruang wilayah. Adapun pola penatagunaan tanah adalah informasi mengenai keadaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kawasan yang disiapkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pembangunan dan penataan pertanahan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan menjadi lebih baik karena mempunyai peranan sosial dan ekonomi yang penting. Oleh karena itu, untuk dapat menguatkan dan membuktikan kepemilikan akan tanah perlu dibuatkan alat bukti berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah terdiri atas Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan, dan Wakaf.

Table 2.48

**Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase luas lahan	%	70	72	80	78,64	80,9 9	87,68

	bersertifikat							
2	Tersedianya peta penggunaan tanah dan peta administrasi	buah	0	4	4	4	4	4
3	Tersusunnya buku informasi tanah	buah	4	60	60	60	60	60

e. Lingkungan Hidup

Tabel 2.49

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah unit usaha yang ramah lingkungan (PROPER)	Unit	0	0	0	14	11	8
2	Penurunan kualitas polusi udara	perusahaan	0	0	23	50	104	182
3	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang LH	Peserta	0	0	100	80	120	130

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
4	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan lingkungan industri/sentra industri	Perusahaan	0	11	30	40	32	66
5	Terwujudnya Tong Sampah	Unit	118	67	166	154	215	198
6	Tempat Sampah Terpilah Indoor	km	0	50	60	75	977	0
7	Keranjang Kompos	Unit	0	-	0	80	300	171
8	Sumur resapan	Unit	0	6	14	99	31	99

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan termasuk tong sampah terpilah; tempat sampah terpilah indoor ; komposter serta sumur resapan yang capaian targetnya melebihi 100% . Hal ini disebabkan selain adanya dukungan dana dari Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK-LH) untuk pengadaan sarpras pengelolaan persampahan juga komitmen BLH untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengelola sampah domestik yang dihasilkan menjadi lebih bermanfaat dan mendukung penilaian program Adipura ataupun sekolah Adiwiyata di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu untuk pengawasan pengelolaan lingkungan industri/sentra industry juga melebihi target yang ditentukan , hal ini karena adanya komitmen dari Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan kepada perusahaan yang berpotensi menghasilkan limbah cair dan udara dengan harapan dapat mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik. Sedangkan untuk pencapaian indicator kinerja penurunan kualitas polusi udara

juga melebihi target yang ditentukan, hal ini disebabkan untuk indikator ini didukung dengan beberapa kegiatan yaitu Koordinasi Penilaian Langit Biru; Pembinaan Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan; Pengendalian dan Pengawasan BPO; Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri serta Penyuluhan dan Pengendalian Polusi.

Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerja belum maksimal, seperti pada terlaksananya sosialisasi peraturan per-UU-an bidang lingkungan, hal ini disebabkan kegiatan ini baru dimulai tahun 2012 dan kurangnya dukungan anggaran untuk menyelenggarakan sosialisasi.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. Berikut capaian masing-masing indikator bidang pemerintahan dalam negeri jenis pelayanan dokumen kependudukan:

Tabel 2.50
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2010-2015

No	Jenis Layanan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Akte Kelahiran	26,793	33,793	12,800	18,902	16,435	15,061
2	Akte Kematian	62	64	99	96	121	197
3	Perkawinan	264	255	271	210	198	248
4	Perceraian	15	26	25	22	37	38
5	Pengakuan Anak	6	2	4	7	1	6
6	KTP						

		895,107	879,183	986,927	883,363	885,823	889,966
--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sumber: Dispendukcapil

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Sukoharjo dalam jangka waktu 2010-2015 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari prosentase penduduk ber-KTP, rasio bayi berakte kelahiran, kepemilikan akta kelahiran. Hal ini menunjukkan kesadaran dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kependudukan sudah baik.

Akta kelahiran merupakan hak setiap anak yang dilahirkan, pemenuhannya harus dilakukan oleh orangtua. Dalam kurun waktu 2010-2015 prosentase bayi yang memiliki akte kelahiran sebesar 99,6%. Tahun 2010 baru sebesar 60% penduduk memiliki akte kelahiran, angka ini meningkat menjadi 92% pada tahun 2015. Walaupun terjadi peningkatan kepemilikan akte kelahiran tetapi masih banyak penduduk yang belum memilikinya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.51

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	68	92	88	98	92	97
2	Rasio bayi ber-akta kelahiran	%	98.25	99	99	99	99,5	99,6
3	Rasio keluarga ber-KK	%	98	98	100	100	90,09	92,4
4	Rasio penduduk berakte	%	60	90	72	80	88	92

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	kelahiran							
5	Rasio penduduk ber-NIK	%	98	98	100	100	100	100
6	Rasio penduduk meninggal ber-akta kematian	Akta	10	63	65	70	75	78
7	Termanfaat lainnya NIK sebagai data wajib	urusan	19	17	17	17	80	90

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usahanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian.

Persentase Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif di Kabupaten Sukoharjo selama periode 2010-2015 mencapai 100%. Prosentase keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga selalu 100% dalam kurun waktu 2010-2015.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi belum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Apabila dilihat dari kuantitas/keaktifan terlibat secara fisik cukup baik namun secara kapasitas belum menunjukkan kontribusi yang cukup baik.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berkualitas tidaknya penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari kapasitas SDM aparat kelurahan. Secara umum kapasitas aparat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal, pemahaman dan kemampuan aparat dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi atas hasil pembangunan belum menunjukkan hasil yang cukup baik.

Gambaran capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2010-2015 dapat disajikan dalam Tabel 2.52 berikut ini.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
Sukoharjo
Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase desa berstatus swasembada	%	3, 5	3,33	8	3,5	5	5
2	Jumlah produk hukum desa.	jenis	0	3	3	2	-	6
3	Meningkatnya pendapatan asli desa total desa 150 desa	%	0	8	7	7	-	40

Sumber : BPMD

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo salah satunya disebabkan oleh keberhasilan program Keluarga Berencana. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya dibawah 2 artinya masih dalam kondisi belum mengkhawatirkan dibawah rata-rata nasional dan provinsi. Walaupun terjadi peningkatan rata-rata jumlah anak per keluarga.

Sedangkan cakupan peserta KB aktif sampai dengan tahun 2015 mencapai 862871 peserta dengan penggunaan alat kontrasepsi terbanyak adalah suntik, dan pil.

Tabel 2.53
Jumlah Peserta KB dan KK Sejahtera di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2011-2015

Tahun	Peserta KB Baru	DO KB	Peserta KB Aktif	Laki-Laki ber-KB	Jumlah KK	Jumlah KK Pra Sejahtera	Jumlah KK Sejahtera I
2011	24235	19930	121872	686	231152	50441	46858
2012	23992	25580	123642	1128	236047	49549	47768
2013	24319	22465	124744	990	238971	48075	50223
2014	22504	22820	122355	1965	242714	47453	52798
2015	167596	158770	862871	7573	1655054	343583	342496

Sumber : KPPKB Kabupaten Sukoharjo

i. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan daerah dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah.

Terminal bus adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio ijin trayek	%	60	65	71	68	68	70
2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	9.547	9.630	6.121	10.960	1.021	985
3	Jumlah terminal bus	Buah	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang (ribu)	1.559,7	11.590,6	1.555,4	9.293,2	6.674,8	6.245
5	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	Orang (ribu)	756,7	2.941,9	756,9	9.679,8	6.674,8	6.245
6	Jumlah halte bis	Buah	2	5	4	4	4	4
7	Rasio juru parkir yang memahami Perda tentang Perparkiran	%	50	75	60	70	93,55	100
8	Pengadaan Traficlight dan Rambu-rambu	titik/persimpangan	20	21	21	22	22	22
9	Rasio kesadaran pengelola angkutan umum atas keselamatan penumpang	%	50	60	60	60	80	85

Sumber: Dishubinfokom

j. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan dalam urusan informasi dan komunikasi ditandai melalui indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa.

Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi dimaksudkan sebagai upaya mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Untuk mendukung sistem informasi dan komunikasi pembangunan, masing-masing PD didorong untuk membangun jaringan komunikasi online melalui website. Pembangunan website di Sukoharjo selama lima tahun terakhir (2010-2015) sudah 100% atau seluruh PD. Tujuan pembangunan web bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah mempermudah komunikasi dengan antarlembaga, dengan masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi. Komunikasi melalui website akan jauh lebih mudah karena tidak mengenal perbedaan lokasi baik jauh maupun dekat dan juga lebih efisien dalam hal biaya dan waktu. Kinerja pelaksanaan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.55 di bawah ini.

Tabel 2.55

Capaian Kinerja Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja				
				2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah SIM yang diterapkan	jenis	5	8	8	42	45	45
2	Jumlah pengumuman penyedia barang.jasa pemerintah melalui	kali	2	100	100	1163	1196	1204

	internet							
3	Banyaknya pegawai yang memiliki email	%	10	75	75	78	80	86
4	Jumlah PD yang berkorespondensi melalui internet	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase website PD yang aktif	%	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah surat kabar nasional	buah	2	-	3	3	3	3
7	Jumlah surat kabar regional	buah	14	-	6	16	16	16
8	Jumlah penyiaran radio lokal	buah	3	10	10	8	8	8
9	Jumlah penyiaran TV lokal	buah	3	-	1	6	6	6
10	Jumlah penyiaran TV Nasional	buah	10	10	10	11	11	11
11	Jumlah lembaga komunikasi	buah	2	2	3	2	4	4
12	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kelompok	5	12	14	0	12	16

Sumber: Dishubinfokom Kab. Sukoharjo

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penopang utama Sistem perekonomian daerah adalah : Usaha Mikro, UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Jumlah Koperasi di Sukoharjo yang sudah berbadan hukum sebanyak 826 unit, yang terdiri dari koperasi yang aktif sebanyak 681unit dan yang tidak aktif sebanyak 145 unit.

Tabel 2.56.

Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------

1	Koperasi		
		Jumlah Koperasi	826
		Koperasi Aktif	681
		Koperasi Tidak Aktif	145
2	UMKM		
		Jumlah UMKM	11.000
		UMKM Industri Non Pertanian	2.866
		UMKM Industri Pertanian	469
		UMKM Perdagangan	6.633
		UMKM Aneka Jasa	1.032

Sumber : Dinkop dan UMKM Kab. Sukoharjo

Peran Usaha Mikro, UMKM dan Koperasi di Kabupaten Sukoharjo memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian, harus mampu memberikan kontribusi terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Berkembangnya KUKM	Orang	30	30	30	60	100	100
2	Terwujudnya Peningkatan Akses Pemasaran bagi KUKM	Orang	30	40	40	57	20	28

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
3	Prosentase Koperasi aktif	%	70,34	76,84	76,84	77,72	77,65	82,59
4	Koperasi	Koperasi	596	609	643	651	656	833
5	UKM	UKM	10500	10600	10700	10936	11000	11125
6	Tertibnya kelembagaan koperasi	Koperasi	30	30	30	30	65	75
7	Lama proses perijinan	Hari	90	30	30	30	90	90

Sumber : Dinkop UMKM Kabupaten Sukoharjo, April 2016

1. Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus melaksanakan kewenangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut antara lain memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota. Capaian indikator penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.58 berikut:

Tabel 2.58

**Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi	Capaian Kinerja
-----	-----------	--------	---------	-----------------

	Kinerja		Awal 2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN / PMA) :							
	- PMA	Investor	10		2	4	4	2
	- PMDN	Investor	14		4	4	4	7
	- Non PMA/PMDN	Investor	22.892		525	433	333	297
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) :							
	- PMA	Ribu USD	174.422,9		1.111,1	7.000	11.800	1.600
	- PMDN	juta Rp	525.641		20,425	117.500	29.734	762.547
	- Non PMA/PMDN	juta Rp	1.959.296		426.800	2.264.000	1.469.603	377.508

Sumber: BPMPP

m. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada pemuda dan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya. Berikut capaian bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Data Potensi Kepemudaan	dokumen	1	1	0	1	0	0
2	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Organisasi	21	21	21	20	21	21
3	Jumlah Peserta Organisasi	orang	24	96	50	50	50	55

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	Kepemudaan yang terlatih							
4	Jumlah Bidang Kepeloporan Pemuda	Bidang	1	2	0	3	1	2
5	Jumlah Kejuaraan Lomba Kreasi di kalangan pemuda	Kejuaraan	6	6	6	6	6	6
6	Jumlah Kelompok Pemuda yang ber-wirausahaan baru	kelompok	6	6	6	6	6	6
7	Jumlah Kelompok Pemuda yang terlatih dan terampil	kelompok	0	0	0	6	6	6
8	Jumlah atlit/olahraga wan	orang	121	121	150	246	246	275
9	Jumlah Cabang Olahraga di Kab. Skh	cabang OR	20	20	30	30	30	30
10	Jumlah Atlit Berbakat yg terbina	orang	50	45	0	30	0	20

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
11	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi di Kabupaten Sukoharjo	cabang OR	5	6	6	20	20	15
12	Jumlah Atlit tiap Cabang OR Prestasi	orang	10	15	25	10	10	10
13	Jumlah Atlit yang mengikuti kompetisi OR	orang	0	50	10	208	55	60
14	Jumlah Atlit di tiap Cabang OR	orang	83	10	20	10	10	10
15	Jumlah Cabang OR yang siap tanding	cabang OR	0	5	6	20	10	10
16	Jumlah Atlit yang mengikuti Tri Lomba Juang	orang	0	20	0	12	0	0
17	Jumlah Sekolah Sepak Bola yang terbina	klub	10	8	15	15	15	15
18	Jumlah Pelatih Sepak Bola yang terbina	orang	4	10	45	45	45	45
19	Jumlah Penambahan Sarana dan Prasarana OR	item	0	0	0	0	1	1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
20	Jumlah Pelatih OR yang terbina	orang	0	50	32	15	15	15

Sumber: Dinas POPK

n. Statistik

Kumpulan data atau yang disebut dengan statistik dapat berupa angka atau bukan yang tersusun dalam bentuk tabel (daftar) atau dalam bentuk diagram yang merupakan gambaran dari suatu keadaan atau masalah tertentu. Dalam hal ini, kumpulan data yang sudah diolah akan dijabarkan sehingga dapat digunakan untuk menyusun suatu dokumen perencanaan. Data yang tersedia juga dapat digunakan untuk mengambil suatu kebijakan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat.

Tabel 2.60

Capaian Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
Tersusunnya Buku Profil Daerah	%	100	100	100	100	100	100
Tersusunnya Sukoharjo	%	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
Dalam Angka							
Tersusunnya Buku IPM	%	100	100	100	100	100	100
Tersusunnya Buku PDRB	%	100	100	100	100	100	100

o. Kebudayaan

Seni yang berkembang di daerah Kabupaten Sukoharjo cukup beragam. Pengetahuan seni yang dimiliki masyarakat perlu ditingkatkan mengingat perkembangan zaman yang semakin modern. Pengetahuan yang terlalu minim dapat menyebabkan seni-seni tradisional dapat luntur. Adapun cakupan kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo bisa dilihat pada Tabel 2.61 di bawah ini:

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pengetahuan tradisional yang teridentifikasi	jenis	2	2	2	2	2	2
2	Jumlah pengetahuan tradisional yang dikembangkan	jenis	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah Fasilitasi dalam melestarikan dan mengembangk	event	0	2	2	2	2	2

	an kekayaan budaya							
4	Jumlah Pementasan Kelompok Kesenian	kelompok	10	20	40	59	40	40
5	Jumlah Permainan Anak yang akan dikembangkan	jenis	5	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas POPK

p. Perpustakaan dan Arsip

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan perpustakaan per tahun, dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

Kabupaten Sukoharjo memiliki 1 (satu) perpustakaan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan tingkat kunjungan yang meningkat dari tahun 2010-2015. Capaian kinerja pembangunan urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.62 di bawah ini.

Tabel 2.62

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perpustakaan khusus (PD)	unit	8	3	3	4	4	4
2	Jumlah perpustakaan tempat ibadah	unit	3	3	3	5	7	9

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
3	Jumlah perpustakaan desa/kel	LP)	17	10	10	32	35	35
4	Jumlah perpustakaan keliling	unit	2	1	3	3	4	4
5	Jumlah perpustakaan sekolah	unit	227	70	475	444	444	444
6	Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	orang	4	2	5	4	4	5
7	Pustakawan	orang	3	3	3	3	3	3
8	Anggota Perpustakaan	orang	1495	4390	680	5653	6135	6548
9	Jumlah pengunjung perpustakaan per hari	orang	150	167	175	180	187	190
10	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling per hari	orang	200	150	-	222	250	237

Sumber : KPAD

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Produksi ikan dibagi menjadi 2 yaitu perikanan kolam dan perikanan karamba. Keduanya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 produksi perikanan kolam mencapai angka 4.786,5 ton sedangkan perikanan karamba sebanyak 1.758,3 ton. Perkembangan kinerja urusan perikanan dapat dilihat pada Tabel 2.63 berikut:

Tabel 2.63

Capaian Kinerja Urusan Perikanan di Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan :							
	- Kolam	ton	967,69	2367	3352,18	4.447,73	4.967,15	4.786,5
	- Karamba	ton	343,13	1090	1485,49	1.427,42	1.620,72	1.758,32
2	Jumlah unit perbenihan	unit	138	139	139	141	145	145

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo

b. Pariwisata

Beberapa Obyek wisata di wilayah Kabupaten Sukoharjo meliputi :

1. Objek wisata alam diantaranya Objek Wisata Batu Seribu, Gunung Sepikul, Dam Colo, Waduk Mulur, Alas Karet Polokarto dan Pandawa *Water World*.
2. Objek wisata ziarah diantaranya Makam Ki Ageng Balak, Pesangrahan Langenharjo, Makam Ki Ageng Sutowijoyo, Makam Ki Ageng Purwotosidik dan Candi Sonosewu.
3. Objek wisata sejarah diantaranya Petilasan Kraton Pajang dan Petilasan Kraton Kartasura. Selain itu Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai wisata Seni Budaya diantaranya Pulung Langse, Kebo Kinul dan Jurit Suropaten,
4. wisata kuliner yang terdiri dari Jenang Krasikan, Nasi Liwet dan Gempol Pleret serta wisata kerajinan yang berupa Tatah sungging, ukir kaca dan gamelan.

Sementara data tentang Kepariwisataan di Kabupaten sukoharjo, dapat dikalsifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.64

Data Kepariwisataan Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2010-2015

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Obyek Wisata	2	2	2	2	2	2

2	Jumlah Hotel	10	11	13	15	16	20
3	Jumlah Restoran	1	1	4	19	24	25
4	Jumlah Even Tahunan	7	7	7	7	7	3
5	Jumlah Pengusaha Pariwisata terbina	50	70	100	50	50	30

Sumber: Dinas POPK Kabupaten Sukoharjo

Jumlah Obyek wisata di Kabupaten Sukoharjo cenderung tidak bertambah sampai tahun 2015. Jumlah hotel dan restoran menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah hotel di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 20 hotel dan jumlah restoran sebanyak 25 restoran. Indikator-indikator di atas mempengaruhi jumlah pengunjung wisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Jumlah pengunjung wisata juga menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kenaikan Pengunjung Wisata	%	100	20	40	60	80	90
2	Jumlah Penyelenggaraan/Event se Sukoharjo Raya	Event	2	2	1	3	3	4
3	Jumlah Penyelenggaraan Kerjasama promosi pariwisata antar Kab/Kota	Paket	11	4	5	4	1	2
4	Jumlah Kenaikan Pengembangan dan	%	100	20	40	60	80	90

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	penataan tujuan wisata dan atraksi wisata							
5	Jumlah Penambahan Fasilitas di Obyek Wisata	Item	4	1	0	1	1	0
6	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Item	4	4	4	4	3	0
7	Data Kepariwisata yang up to date	Macam	7	7	7	7	7	7
8	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	Kelompok	4	4	4	4	4	4
9	Jumlah Kategori Juara Duta Wisata	Orang	8	8	8	8	8	8
10	Jumlah Kemitraan Pariwisata	Organisasi	9	9	9	9	9	9

Sumber: Dinas POPK Kab. Sukoharjo

c. Pertanian

Pada tahun 2015 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2015 hasil pertanian kurang menggemblakan. Penurunan yang cukup tinggi ini, disebabkan adanya kondisi iklim yang berubah-ubah dan hama penyakit. Pencapaian kinerja urusan Pertanian di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah sarana produksi yang disediakan dan diusahakan lembaga pembenihan :							
	- sarana produksi	unit	42	252	187	193	171	193
	- perbenihan padi di Balai benih	ton	62	5	83	77	78	77,2
	- perbenihan padi di kelompok penangkar	ton	130	157	330,4	405	403	405
2	- jumlah subsidi pupuk :							
	* urea	ton	21.872	12.038	12.686	13.331	11.223	13330,5
	* SP36		5.572	3.170	3.630	3.900	3.380	3900
	* ZA	ton	5.832	6.120	7.083	7.705	5.486	7704,95
	* NPK	ton	8.928	8.206	13.394	13.009	11.674	13009,3
3	Produksi :							
	- padi non hibrida	ton	213.713		346.039	327.182	317.510	237182
	- padi hibrida	ton	5.709	208.420	3.461			
	- Jagung	ton	17.460	25.963	23.939	21.424	17.599	21424
	- kedelai	ton	7.524	5.076	5.007	3.532	3.071	3532
	- kacang tanah	ton	13.072	12.769	12.990	12.841	9.030	1281
4	Produktivitas :							
	- padi non hibrida/sawah	ku/ha	60	59	66	68	65	68,47
	- padi hibrida	ku/ha	55	68	74			
	- Jagung	ku/ha	71	18	19	93	97	93,15
	- kedelai	ku/ha	23	14	18	19	19	19,42
	- kacang tanah	ku/ha	17		12.990	18	14	17,71
5	Luas Panen :							
	- padi non hibrida/sawah	ha	35.458	35.185	52.041	47.783	49.025	47783
	- padi hibrida	ha	1.040	3.834	3.237			
	- Jagung	ha	4.451	2.763	2.663	2.300	1.815	2300

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	- kedelai	ha	3.996	9.028	7.278	1.819	1.615	1819
	- kacang tanah	ha	6.333		7.278	7.251	6.338	7251
6	Jumlah areal yang terserang OPT :							
	- tanaman pangan	ha	4.511	6.992	6261	3.241	3.951	3241
	- tanaman hortikultura	ha	34	7	-		26	1,6
	- tanaman perkebunan	ha	5		5	2	5	
7	Populasi ternak :							
	- Sapi Potong	ekor	27.093	36.436	40.092	27.467	27.998	27467
	- Sapi perah	ekor	658	354	383	32	34	32
	- Kerbau	ekor	2.398	495	557	555	565	555
	- Kambing	ekor	38.611	41.275	41.959	42.796	43.838	42796
	- Domba	ekor	36.434	38.401	39.035	39.855	41.152	39855
	- Ayam Layer	ribu ekor	702,8	706,8	716,8	715,0	733,2	714950
	- Ayam Broiler	ribu ekor	2.165,0	2.198,8	2.256,2	2.262,1	2.347,1	2.262,13
	- Ayam Buras	ribu ekor	693,6	749,7	773,3	774,5	819,9	774,463
	- Itik	ribu ekor	127,6	200,1	209,5	213,7	218,8	213690
	- Puyuh	ribu ekor	90,2	91,0	92,8	93,6	94,7	93640
8	Produksi :							
	- Daging	ton	6.808,9	7.185,7	7.200,0	7.454,1	7.470,3	7454133
	- Telur	ton	8.557,7	8.821,2	9.033,9	9.083,1	9.219,1	9.083,1
	- Susu	ton	731,0	799,6	589,9	325,7	38,6	325746
9	Inseminasi Buatan (Sapi, Kambing, babi) :							
	- akseptor	ekor	19.148	15.603	14.180	13.375	13.360	13375
	- Inseminasi	dosis	21.563	21.027	18.996	15.183	15.551	15183
	- Kelahiran	ekor	11.634	12.873	10.206	9.206	8.575	9206
10	Vaksin dan pengobatan :							
	- Sapi	ekor	8.018	8.095	8.213	8.289	8.376	8289
	- kambing	ekor	6.021	6.046	6.127	6.273	6.469	6273

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	- Unggas	ekor	10.000	50.054	51.150	42.601	45.659	42601
11	Jumlah kelembagaan petani yang ditumbuhkembangkan dan diberdayakan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan pertanian	kelompok	634 163	634	634	634	631	634
12	Jumlah aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan apasitasnya melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan	orang	77	76	62	62	63	62

Sumber : Dinas Pertanian

d. Perdagangan

Pada tahun 2015 Lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran telah menyumbang pada perekonomian atau PDRB sebesar 17,70% . Kontribusi bidang ini dari tahun 2010-2014 nampaknya cenderung menurun, yaitu dari : 20,25%; 19,36%; 18,89%; 18,81% dan menjadi 17,79%. Nilai ekspor juga belum dapat dinaikkan lebih, nilai ekspor meningkat 1% per tahun. Pengawasan dan pemantauan peredaran barang/jasa dan harga juga akan terus dilakukan demi menekan angka inflasi. Capaian kinerja perdagangan tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67

**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2011-2015**

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kerja Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Terawasinya peredaran barang/jasa	Bulan	12	12	12	12	12

2.	Peningkatan nilai ekspor	%	1	1	1	1	1
3.	Pengawasan sistem distribusi bahan pokok/barang penting	Bulan	12	12	12	12	12
4.	Pemantauan harga bahan pokok	Bulan	12	12	12	12	12
5.	Terbangunnya/terpeliharanya pasar	buah	0	0	2	8	2

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

e. Perindustrian

Jumlah industri kecil yang berkembang di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015 sudah mencapai 16609 industri, sedangkan untuk jumlah industri menengah berjumlah 320 industri, dan 125 industri. Hal ini tak lepas dari fasilitasi industri yang dilakukan pemerintah. Pelatihan juga dilaksanakan agar dapat meningkatkan kualitas perindustrian di Kabupaten Sukoharjo. Capaian kinerja bidang perindustrian Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.68

**Capaian Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Fasilitasi industri kecil dan menengah	orang	380	510	510	170	80	80
2	Pelatihan usaha industri kecil dan menengah	orang	100	-	155	120	120	120
3	Jumlah klester	Unit	8	3	3	3	7	7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	industri kreatif							
4	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klester	orang	125	200	155	120	120	120

Sumber: Disperindag Kabupaten Sukoharjo

f. Transmigrasi

Kebijakan utama urusan transmigrasi diarahkan untuk fasilitasi kepada calon transmigran dalam penempatannya ke daerah tujuan transmigrasi. Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari jumlah transmigran yang diberangkatkan. Dalam kurun waktu lima tahun jumlah transmigran yang diberangkatkan mengalami fluktuasi, tertinggi tahun 2010 sebanyak 120 orang, meningkat pada tahun 2015 sebanyak 502 orang.

Pencapaian kinerja urusan Transmigrasi dapat diidentifikasi pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah calon transmigran yang siap	KK	10	16	10	10	0	36

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2010	Capaian Kinerja				
				2011	2012	2013	2014	2015
	dikerahkan							
2	Jumlah masyarakat tersosialisasi transmigasi	Orang	120	0	0	102	400	502
3	Jumlah calon transmigran terlatih dibidang peternakan, pertanian dan kewirausahaan	Orang	0	32	20	20	0	73

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Sukoharjo, 2015

2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Kantor Pelayanan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, 12 Kecamatan dan 17 Kelurahan.

Tabel 2.70

Capaian Kinerja Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Capaian Kerja Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Prosentase PD yang menyampaikan	%	80	85	80	85	85

Indikator	Satuan	Capaian Kerja Tahun				
LAKIP tepat waktu						
Prosentase PD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama	%	80	80	80	80	80
Terfasilitasinya kegiatan penilaian pelayanan publik.	Buah	1	1	1	1	1
Tersedianya sarana koordinasi antar pejabat pemerintah.	Buah	1	1	1	1	1
Penyusunan APBD meliputi 58 PD	%	100	100	100	100	100
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yg meliputi 58 PD	%	100	100	100	100	100
Target PAD meningkat	%	75	100	75	80	85
Pengelolaan Aset Milik Pemda. SKH	%	75	80	75	80	85
Penatausahaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	100
Transparansi data APBD	%	100	100	100	100	100
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Wajib Pajak	%	70	100	70	75	80
Prosentase PD yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan	%	100	94,64	100	94,64	100
Jumlah PD yang telah dievaluasi SOTK	PD	4	3	4	3	3
Jumlah peraturan tentang pedoman / standarisasi sarana dan prasarana yang diterbitkan.	buah	9	6	9	6	6
Prosentase PD yang melaksanakan	%	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Capaian Kerja Tahun				
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Melakat.						
Terselenggaranya pembahasan raperda sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	100
Terlaksananya fungsi DPRD secara optimal	%	100	100	100	100	100
Terselenggaranya rapat-rapat Badan Musrawarah,Komisi, Badan Anggaran,	%	108	100	108	103	179
Badan Legislasi Daerah,Badan Kehormatan dan rapat panitia khusus Terselenggaranya rapat-rapat paripurna dan paripurna istimewa	%	55	55	55	62	83
Terserapnya aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja ke daerah	kali	3	3	3	3	3
Jumlah SIM yang diterapkan	Buah	8	8	8	8	42
Jumlah pengumuman penyedia barang, jasa pemerintah melalui internet	Buah	100	100	100	100	116
Banyaknya pegawai yang memiliki email	%	10	12	25	38	42
Jumlah PD yang berkorespondensi melalui internet	%	20,83	20,38	20,83	20,38	75
Persentase website PD yang aktif	%	90	90	90	90	92
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	Kelompok	12	12	12	12	12

Indikator	Satuan	Capaian Kerja Tahun				
(KIM)						
Rasio partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik	%	75	75	75	75	75
Jumlah aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan	orang	76	76	76	62	62
Jumlah pejabat eselon II dan pejabat publik	orang	26	26	26	29	20
Tersedianya data monitoring LP2P	Dok	2	2	2	2	3
Tersedianya data monitoring LHKPN	Dok	2	4	2	4	3
Jumlah Obyek Pemeriksaan sesuai PKPT dan Non PKPT	Obrik	144	192	144	192	192
Jumlah LHP terbit/ keluar	Jenis	144	192	144	192	192
Jumlah aduan masyarakat	kasus	20	19	20	19	10
Jumlah Obyek Pemeriksaan	obrik	20	19	20	19	10
Jumlah LHP terbit	jenis	20	19	20	19	10
Jumlah obyek pemeriksaan	PD	144	211	144	192	50
Jumlah tindak lanjut temuan	PD	144	211	144	192	50
% Tingkat penyelesaian TLHP	%	100	100	100	100	70
Jumlah kasus pengaduan KKN	kasus	5	4	5	4	3
Penanganan KKN	kasus	5	4	5	4	3
Rasio kecenderungan tindak pidana KKN	%	45	30	45	30	25

Indikator	Satuan	Capaian Kerja Tahun				
Pelaksanaan monitoring KKN	bulan	12	12	12	12	12
Prosentase penanganan pengaduan masyarakat	%	45	50	45	50	100
Frekuensi dialog antar pemma	Kali	10	15	15	10	10
Frekuensi dialog dengan swasta	Kali	10	10	10	10	10
Jumlah program kolektif yang menjadi agenda berkala	buah	2	2	2	2	2
Jumlah perjanjian kerjasama	buah	13	0	13	10	0
Jumlah kesertaan dalam badan kerjasama	buah	1	1	1	1	1
Jumlah PD yang terhubung dalam jaringan intranet	buah	26	26	26	26	26
Jumlah Tower / menara telekomunikasi	buah	120	138	160	162	163
Rasio masyarakat yang mengakses internet di area publik	%	25	25	25	25	25
Jumlah PD yang memiliki alamat email	buah	56	56	56	56	56
Jumlah desa yang memiliki alamat email	buah	25	33	45	49	75
Jumlah website	buah	15	15	15	15	15
% Jumlah sekolah berakses internet	%	19,61	22,31	24,25	28,65	34,56
penggunaan SIM pendidikan (e-book)	buah	15,87	20,46	22,55	27,58	29,97

Beberapa capaian indikator yang perlu mendapatkan perhatian antara lain masih terdapat PNS yang dikenai hukuman disiplin dan maasih terlambatnya PD dalam menyampaikan LAKIP, Pengelolaan Aset milik Pemda dan masih adanya PD yang belum menerapkan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melekat.

Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo didukung oleh aparatur sebanyak 9.870 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun struktur pegawai menurut Golongan secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71.

Data Pegawai (PNS) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

DATA KEPEGAWAIAN	TAHUN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Data Jumlah Pegawai	9606	10616	10201	9818	10154	9870
Gol IV/a - IV/d	4294	4331	4366	4295	4251	4039
Gol III/a - III/d	3653	3905	3634	3496	3938	4079
Gol II/a - II/d	1527	2158	2003	1851	1748	1552
Gol I/a - I/d	132	222	198	176	217	200

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sukoharjo

Gambaran tentang unsur staf yang memiliki kualifikasi SDM yang relatif memadai, yang mampu mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72.

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikannya di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD	132	10.616	10.201	9.818	10.154	9.870

2	SLTP	329	4.331	4.366	4.295	4.251	4.039
3	SLTA	2.423	2.186	2.023	1.890	1.864	1.698
4	Diploma (D1, D2, dan D3)	2.634	2.381	2.196	2.059	1.924	1.550
5	S1	4.827	5.074	5.010	4.901	5.256	5.574
6	S2	467	562	596	623	756	754
7	S3	1	2	2	2	2	2

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

Dalam usaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, telah diberikan kesempatan yang luas kepada para pegawai untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal serta pelatihan-pelatihan. Sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.73.

**Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015**

No	Diklat	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Diklatpim Tk II	-	-	-	-	-	-
2	Diklatpim Tk III	1	1	1	11	14	14
3	Diklatpim Tk IV	-	5	-	80	22	16

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sukoharjo Tahun 2015

Berbagai macam jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan ketrampilan teknis jabatan-jabatan tertentu. Belum banyak jenis pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya

anggaran yang dimiliki. Selengkapnya jenis dan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.74.

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Fungsional di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Diklat	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Diklat Teknis Fungsional	45	248	157	314	334	365
2	Diklat Pra Jabatan Gol II	616	614	79	-	-	235
3	Diklat Pra Jabatan Gol III	333	332	105	-	-	306

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sukoharjo Tahun 2016

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjopada tahun 2015 mencapai angka 10.416ribu rupiah. Angka ini meningkat dari 646,94 ribu rupiah pada tahun 2010.

Tabel 2.75

Pengeluaran per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 (ribu Rp)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pengeluaran per kapita (ribu Rp)	646,94	649,96	652,39	654,95	10.264	10.416

Sumber: BPS Prov. Jateng

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

a. Perhubungan

Panjang jaringan jalan di Kabupaten Sukoharjo adalah 670,64 km. Dari panjang jaringan jalan tersebut 13,84 km merupakan jalan nasional; 51,68 km merupakan jalan provinsi; dan 605,12 km merupakan jalan kabupaten. Bila dilihat dari kondisinya, 115,10 km berada dalam kondisi baik; 264,83 km berada dalam kondisi sedang; dan 254,71 km berada dalam kondisi rusak.

b. Fasilitas Penunjang

Salah satu unsur penunjang pembangunan adalah adanya perbankan. Jasa perbankan di Kabupaten Sukoharjo dilayani oleh bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik pemerintah daerah. Bank milik pemerintah antara lain BRI, BNI, BTPN dan BTN. Bank milik swasta nasional antara lain Mandiri, BCA, Mega, CIMB Niaga. Bank milik pemerintah daerah antara lain Bank Jateng, BKK, BPR.

Fasilitas hotel juga menunjang perkembangan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Hotel ini akan memfasilitasi pengunjung dari luar kota yang akan melakukan kegiatan bisnis, wisata dan lain-lain. Berdasarkan Data Dinas POPK Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015, jumlah hotel di Kabupaten Sukoharjo saat ini adalah sebanyak 20 unit.

c. Penyediaan Air Minum

Akses pelayanan air minum di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2013 mencapai atau 800.678 jiwa 92,70% dibandingkan jumlah penduduk Tahun 2013. Dari jumlah cakupan pelayanan tersebut dilayani melalui SPAM dengan Jaringan Perpipaan (JP) sebanyak 175.985 jiwa atau sebesar 20,38% dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) sebanyak 624.693 jiwa atau sebesar 72,33%.

Penyediaan air minum dengan Jaringan Perpipaan (JP) di Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan oleh PDAM, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN, dan Keswadayaan Masyarakat melalui program PAMSIMAS.

Pada Tahun 2015 jumlah sambungan yang diselenggarakan oleh PDAM mencapai 26.508 SR dengan cakupan pelayanan sebanyak 135.900 Jiwa atau mencapai 16,01 % dari jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2015. Cakupan

pelayanan PDAM tersebut naik 2,31 % apabila dibandingkan dengan cakupan pelayanan pada Tahun 2014 yang baru mencapai 13,70 %. Wilayah pelayanan PDAM sampai dengan Tahun 2014 mencakup 11 Kecamatan yang terdiri dari 57 Desa/Kelurahan.

Sedangkan penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang diselenggarakan oleh DPU maupun dari keswadayaan masyarakat, rata-rata program tersebut diarahkan di wilayah perdesaan. Adapun penyediaan Air Minum melalui DPU dan program pemberdayaan masyarakat ini hampir seluruhnya bersumber dari air bawah tanah melalui sumur bor.

Jumlah sambungan rumah melalui DAK sampai dengan tahun 2015 mencapai 5.709 SR dengan cakupan pelayanan mencapai 25.966 jiwa atau 3,04 % apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 (2,61 %).

Sedangkan untuk PAMSIMAS jumlah sambungan pada Tahun 2015 mencapai 13.918 SR dengan cakupan pelayanan mencapai 65.252 jiwa atau 67,64% apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 (7,07 %).

Penyediaan air minum dengan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) merupakan penyediaan air minum yang dilakukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan jumlah sumur terlindungi. Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk yang mengakses air minum dari sumur terlindungi pada Tahun 2013 mencapai 624.693 jiwa atau 72,33%, dan sebesar 27,67% masyarakat di Kabupaten Sukoharjo masih mengakses air minum yang belum aman, seperti di sungai, sumur yang tidak terlindungi.

2.4.3 Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Salah satu permasalahan dari Kabupaten Sukoharjo yang harus diminimalisir adalah angka kejahatan. Jumlah Tindak Kejahatan di Kabupaten Sukoharjo yang terselesaikan dari mulai tahun 2010-20154 selalu mengalami penurunan, yaitu sebesar 437 kasus pada tahun 2010 menjadi 346 kasus pada tahun 2014.

Tabel 2.76

**Tindak Kejahatan yang Tertangani di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010-2014**

Tahun	Tindak kejahatan yang Tertangani
2010	437
2011	507
2012	384
2013	369
2014	346

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka 2014

b. Perizinan

Pelayanan perizinan dilayani oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Jenis izin yang dilayani, yaitu pendaftaran izin pendirian bangunan, izin gangguan, tanda daftar perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan.

Tabel 2.77

Izin yang Dikeluarkan Tahun 2011-2015

No	Jenis Izin	2011	2012	2013	2014	2015
1	IMB	1.189	1.354	1.069	1.216	1.581
2	HO	522	599	504	531	599
3	SIUP/TDP	830/913	980/1016	704/794	780/858	790/879

Sumber: BPMPP Kabupaten Sukoharjo 2016

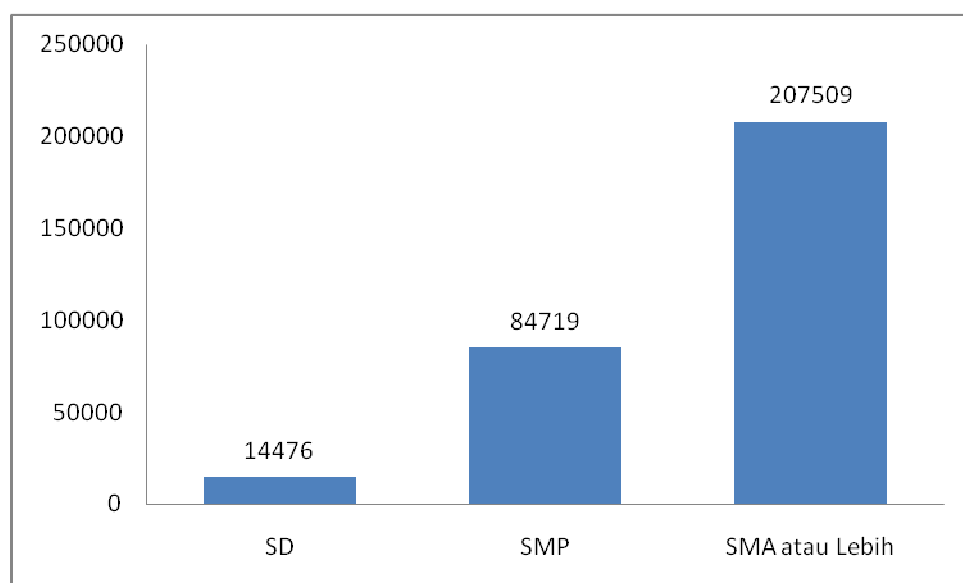
Tabel 2.78**Rincian Data Perizinan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015**

No.	Tahun	Jumlah Perijinan yang masuk	Jumlah Perijinan yang selesai	Rata-rata waktu Penyelesaian Perijinan	Rata-rata waktu Penyelesaian Perijinan terkait investasi	Jumlah Obyek Perijinan	Jumlah Pengaduan terkait Perijinan	Jumlah Pengaduan Perijinan yang ditangani	Jumlah Pengaduan Perijinan yang selesai ditangani
1	2015	4167	4167	± 7 Hari	3 Hari	21	5	5	5
2	2014	5348	5348	± 7 Hari	3 Hari	13	6	6	6
3	2013	4684	4684	± 7 Hari	3 Hari	13	4	4	4
4	2012	4643	4643	± 7 Hari	3 Hari	13	6	6	6
5	2011	3277	3277	± 7 Hari	3 Hari	13	4	4	4

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014 berjumlah 436.988. dari angka tersebut, 14.476 jiwa merupakan tamatan SD, 84.719 jiwa merupakan tamatan SMP, dan 207.509 jiwa merupakan tamatan SMA atau lebih.

Gambar 2.21
Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan
Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo
Tahun
2014



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2015

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. Analisis kinerja keuangan Tahun 2011-2016, dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah Kabupaten Sukoharjo. Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Selanjutnya Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah Daerah termasuk mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru dengan menganut prinsip (1) Potensial artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak. (2) Tidak memberatkan masyarakat, (3) Tidak merusak lingkungan (4) Mudah diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung); serta pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo 2010-2015, digambarkan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sebagai berikut;

a. Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2011 - 2015 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pendapatan Daerah	797.611.718.188	1.015.438.257.161	1.217.485.978.304	1.365.641.177.393	1.570.745.025.149	1.784.106.364.462
1	Pendapatan Asli Daerah	64.446.167.388	96.166.806.526	164.954.318.824	192.971.720.442	264.814.413.083	313.947.492.011
a	Pajak daerah	21.688.463.781	42.558.642.562	85.704.497.336	102.524.770.063	116.089.421.090	137.043.704.396
b	Retribusi	31.339.132.636	39.418.728.509	22.461.598.967	21.834.054.019	30.503.593.366	27.714.083.536
c	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.378.390.186	4.462.342.843	4.416.537.219	8.357.189.178	5.594.654.201	9.361.021.962
d	Lain-2 PAD yang sah	7.040.180.785	9.727.092.612	52.371.685.302	60.255.707.182	112.626.744.426	139.828.682.117
2	Dana Perimbangan	620.123.839.912	657.247.355.925	760.615.713.918	844.525.645.286	907.773.806.381	944.640.592.926
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	54.082.821.912	43.243.409.925	32.764.394.918	27.938.065.286	23.876.353.110	21.411.266.926
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	516.588.118.000	564.840.146.000	680.235.009.000	763.462.900.000	826.891.481.000	854.457.636.000
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	49.452.900.000	49.163.800.000	47.616.310.000	53.124.680.000	57.005.972.271	68.771.690.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	113.041.710.888	262.024.094.710	291.915.945.562	328.143.811.665	398.156.805.685	525.518.279.525
a	Pendapatan Hibah	-	2.517.650.000	338.428.800	2.018.826.747	1.410.962.300	4.804.656.450

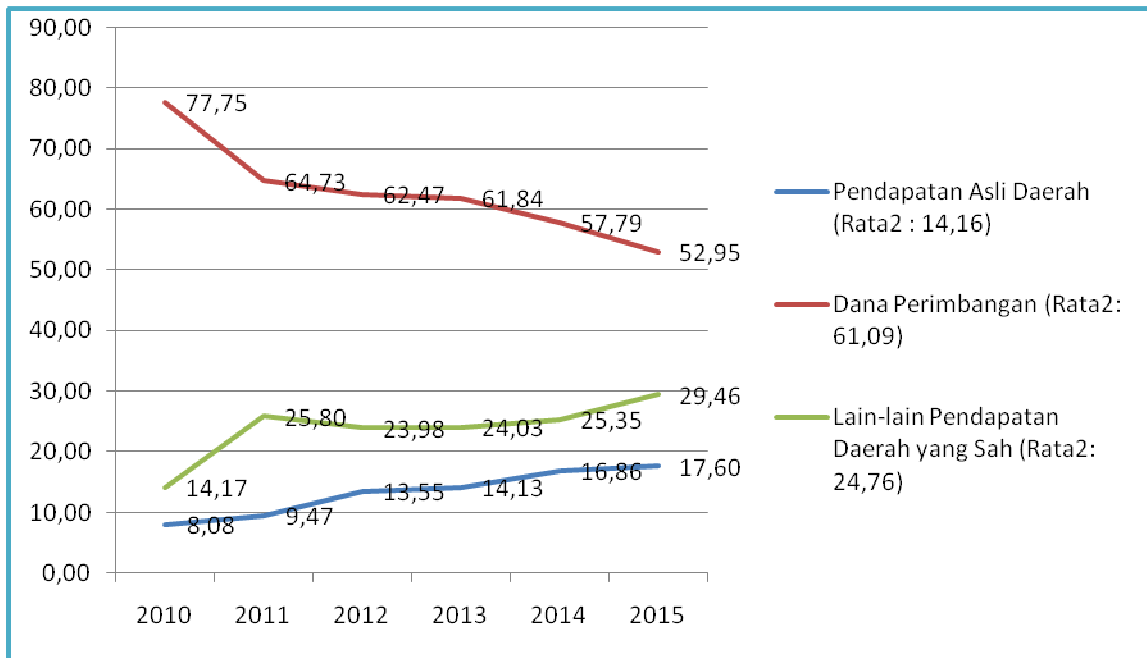
No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
b	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.064.281.088	56.911.129.430	76.283.760.762	86.359.097.111	109.882.656.219	129.241.052.324
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.801.032.800	131.811.605.280	121.525.711.000	180.694.171.000	206.958.151.000	332.176.067.000
d	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.176.397.000	70.783.710.000	93.768.045.000	59.071.716.807	79.905.036.166	59.296.503.751
e	Pendapatan lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah. Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu tahun 2010-2015 tergolong masih rendah, terlihat dari rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 14,16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Sukoharjo terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi.

Berikut ini disajikan proporsi PAD Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2010-2015.

Gambar 3.1
Proporsi PAD, Dana Perimbangan
dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
terhadap Total Pendapatan Daerah (%)



Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

Berdasarkan Gambar 3.1 diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2010-2015 proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan peningkatan, begitu pula dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan proporsi Dana Perimbangan menunjukkan penurunan. Rata-rata rasio Dana Perimbangan selama kurun waktu 2010-2015 memberi kontribusi pada Total Pendapatan Daerah sebesar 61,09%, sedangkan rata-rata rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 17,60%, dan rata-rata rasio Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah memberikan kontribusi sebesar 29,46%.

b. Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan pembelanjaan pada periode Tahun 2010–2015 dilakukan melalui analisis belanja daerah. Adapun kebijakan Belanja Daerah Tahun 2010–2015 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010–2015 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

- a) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- b) Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;
- c) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- d) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- e) Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik;
- f) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;

g) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- a) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
- b) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
- c) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Gambaran tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2010-2015 dan persebaran proporsinya dapat dilihat dalam Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Belanja Daerah						
A	Belanja Tidak Langsung						
1	Belanja pegawai	502.505.417.437	587.675.252.407	678.730.940.174	720.644.842.217	820.946.459.483	871.502.980.791
2	Belanja bunga	68.934.925	57.908.963	47.003.832	35.857.033	24.831.073	13.805.111
3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja hibah	10.021.848.235	8.579.227.507	49.361.389.560	48.520.253.000	49.945.130.000	33.123.853.500
5	Belanja bantuan sosial	22.977.103.050	32.967.500.000	7.565.132.000	16.297.614.000	14.903.500.000	19.474.373.000
6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa /kota, pemerintahan desa dan partai politik	1.057.830.000	1.057.830.000	-	-	-	-
7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ desa/partai politik	34.840.567.840	31.243.229.840	38.957.394.540	52.862.365.840	60.606.116.000	115.525.790.000
8	Belanja tidak terduga	61.500.000	2.499.150.000	597.282.000	2.962.638.750	284.500.000	135.550.000

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	571.533.201.487	664.080.098.717	775.259.142.106	841.323.570.840	946.710.536.556	1.039.776.352.402
B	Belanja langsung						
1	Belanja pegawai	45.626.985.267	56.833.837.962	59.112.392.796	69.426.530.979	93.903.647.068	99.631.966.423
2	Belanja barang dan jasa	101.993.517.862	151.231.045.031	128.703.837.558	161.206.644.586	288.065.310.626	229.945.433.473
3	Belanja modal	62.128.063.880	97.153.874.221	233.723.888.487	209.691.364.140	197.957.953.910	265.948.514.720
	Jumlah Belanja Langsung	209.748.567.009	305.218.757.214	421.540.118.841	440.324.539.705	579.926.911.604	595.525.914.616
	Total Jumlah Belanja	781.281.768.496	969.298.855.931	1.196.799.260.947	1.281.648.110.545	1.526.637.448.160	1.635.302.267.018

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015

Alokasi anggaran pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan menunjukkan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perkembangan alokasi anggaran pada setiap urusan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Alokasi Belanja Langsung Per Urusan/Bidang Tahun 2010-2015

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Belanja 2010	Belanja 2011	Belanja 2012	Belanja 2013	Belanja 2014	Belanja 2015
Urusan Wajib	755,522,640,571	939,901,166,664	1,137,520,884,957	1,225,248,776,388	1,434,417,246,693	1,594,505,419,639
Urusan WAJIB Bidang Pendidikan	418,494,022,399	503,996,969,936	613,823,512,810	619,070,987,956	683,127,199,878	724,807,764,949
Urusan WAJIB Bidang Kesehatan	85,708,362,488	98,069,552,032	111,191,907,055	134,857,222,049	185,107,205,847	210,306,121,965
Urusan WAJIB Bidang Pekerjaan Umum	42,716,490,139	106,107,153,790	142,839,392,091	126,299,399,798	202,684,632,840	206,006,319,962
Urusan WAJIB Bidang Perumahan	-	-	-	-	-	4,780,314,327
Urusan WAJIB Bidang Penataan Ruang	-	-	-	-	-	863,924,450
Urusan WAJIB Bidang Perencanaan Pembangunan	3,260,856,234	4,604,643,348	4,336,616,182	5,269,219,879	6,630,643,769	7,326,798,563
Urusan WAJIB Bidang Perhubungan	5,403,812,249	6,956,567,560	7,880,406,546	10,212,797,240	11,496,066,483	13,590,590,618
Urusan WAJIB Bidang Lingkungan Hidup	3,062,094,776	3,547,542,995	3,772,470,882	4,530,581,858	5,495,234,099	14,259,558,360
Urusan WAJIB Bidang Pertanahan	-	-	-	-	-	1,403,887,800

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Belanja 2010	Belanja 2011	Belanja 2012	Belanja 2013	Belanja 2014	Belanja 2015
Urusan WAJIB Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	4,611,561,936	5,172,000,024	7,928,998,467	7,034,189,360	7,905,741,487	7,662,868,726
Urusan WAJIB Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,388,089,214	4,530,566,899	6,002,104,154	6,506,034,952	6,671,233,886	6,601,097,783
Urusan WAJIB Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	-	-	-	-	2,229,323,300
Urusan WAJIB Bidang Sosial	2,663,924,285	2,962,987,878	3,481,064,050	6,315,889,013	4,510,520,345	8,352,581,811
Urusan WAJIB Bidang Ketanagakerjaan	3,520,405,953	3,938,259,696	4,408,498,030	5,994,617,973	6,957,590,728	7,735,692,297
Urusan WAJIB Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2,098,178,394	2,421,903,980	2,769,276,943	3,802,014,736	4,357,884,775	3,799,478,380
Urusan WAJIB Bidang Penanaman Modal Daerah	821,242,518	933,349,306	991,897,905	1,119,120,214	1,248,786,207	268,924,918
Urusan WAJIB Bidang Kebudayaan						1,054,388,605
Urusan WAJIB Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3,165,911,529	3,804,448,898	3,769,970,914	6,313,109,038	5,480,056,258	5,954,196,276
Urusan WAJIB Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	8,407,011,818	7,833,332,212	10,084,264,875	18,635,875,401	19,194,729,309	20,970,099,089

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Belanja 2010	Belanja 2011	Belanja 2012	Belanja 2013	Belanja 2014	Belanja 2015
Urusan WAJIB Bidang Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	161,395,878,295	180,178,285,259	209,069,033,410	262,697,029,191	274,960,672,116	311,723,265,101
Urusan WAJIB Bidang Ketahanan Pangan	1,543,163,121	1,752,455,199	1,916,797,732	2,391,263,719	3,258,051,182	14,563,141,290
Urusan WAJIB Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,261,635,223	3,091,147,652	3,254,672,911	4,199,424,011	5,330,997,484	11,986,207,744
Urusan WAJIB Bidang Statistik	-	-	-	-	-	96,779,000
Urusan WAJIB Bidang Kearsipan	-	-	-	-	-	218,808,000
Urusan WAJIB Bidang Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	5,518,552,000
Urusan WAJIB Bidang Perpustakaan	-	-	-	-	-	2,424,734,325
Urusan Pilihan	25,785,690,425	29,397,689,267	59,273,413,990	56,399,334,157	92,220,201,467	40,796,847,379
Urusan PILIHAN Bidang Pertanian	18,536,392,642	20,881,866,397	21,713,428,196	22,614,876,239	28,530,783,923	16,724,693,086
Urusan PILIHAN Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	1,620,673,000
Urusan PILIHAN Bidang Energi	-	-	-	-	-	974,853,600

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
	Belanja 2010	Belanja 2011	Belanja 2012	Belanja 2013	Belanja 2014	Belanja 2015
dan Sumberdaya Mineral						
Urusan PILIHAN Bidang Pariwisata	-	-	-	-	-	214,204,000
Urusan PILIHAN Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	3,198,899,350
Urusan PILIHAN Bidang Perdagangan	-	-	-	-	-	3,606,428,689
Urusan PILIHAN Bidang Industri	7,249,297,783	8,515,822,870	37,559,985,794	33,784,457,918	63,689,417,544	14,337,692,054
Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi	-	-	-	-	-	119,403,600
TOTAL	781,308,330,996	969,298,855,931	1,196,794,298,947	1,281,648,110,545	1,526,637,448,160	1,635,302,267,018

Tabel 3.4
Prosentase Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	(%)
2010	854.110.331.744	781.281.768.496	91,47
2011	1.069.434.968.904	969.298.855.931	90,64
2012	1.291.393.958.602	1.196.799.260.947	92,67
2013	1.465.782.091.000	1.281.648.110.545	87,44
2014	1.709.444.570.000	1.526.637.448.160	89,31

Sumber: DPPKAD Kab. Sukoharjo Tahun 2015

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan :

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- 2) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian;
- 3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan perencanaan anggaran;
- 4) Membentuk dana cadangan.

Kebijakan keuangan daerah, baik angka kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Sukoharjo maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2010 – 2015 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 – 2015**

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah						
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70.456.678.744	81.771.075.904	121.138.924.602	134.349.845.677	207.784.359.993	237.259.384.450
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.500.000.000	-	-	-	-	-
c.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.500.000.000	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	75.456.678.744	81.771.075.904	121.138.924.602	134.349.845.677	207.784.359.993	237.259.384.450
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah						
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.923.000.000	6.679.000.000	5.114.000.000	10.466.000.000	14.540.000.000	19.660.000.000
b.	Pembayaran Pokok Utang	2.592.552.532	92.552.532	2.361.796.282	92.552.532	92.552.532	92.552.532
c.	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	-	-	-	-	-
d.	Pengembalian Kepada Pihak Ketiga						
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.015.552.532	6.771.552.532	7.475.796.282	10.558.552.532	14.632.552.532	19.752.552.532
	Jumlah Pembiayaan Netto	65.441.126.212	74.999.523.372	113.663.128.320	123.791.293.145	193.151.807.461	217.506.831.918
	Surplus/Defisit	16.329.949.692	46.139.401.230	20.686.717.357	83.993.066.848	44.107.576.989	148.804.097.444

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	81.771.075.904	121.138.924.602	134.349.845.677	207.784.359.993	237.259.384.450	366.310.929.362

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Secara rinci perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6

Neraca Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	81,743,647,407.00	121,138,923,502.00	134,346,717,445.00	205,475,351,918.00	205,666,369,567.00	327,497,022,276.00

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	1,707,106.00	15,774,315.00	0.00	0.00	21,925,642.00
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	27,428,497.00	1,100.00	3,128,232.00	0.00	31,827,766.00	34,601.00
1.1.4	Kas di BLUD	0.00	0.00	0.00	2,309,008,075.00	23,649,679,501.00	21,516,986,777.00
1.1.5	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997,487,779.80	17,274,960,066.00
1.1.6	Kas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	30,083,340.00	776,123,496.00
1.1.7	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	Piutang Pendapatan	301,212,050.00	597,847,574.00	57,824,783,813.00	71,930,999,275.00	77,171,486,807.00	76,380,837,538.00
1.1.9	Penyisihan Piutang Pendapatan	0.00	0.00	0.00	0.00	(47,611,846,240.00)	(46,451,531,329.00)
1.1.10	Piutang Lainnya	0.00	0.00	0.00	1,848,762,000.00	1,701,522,000.00	1,678,167,000.00
1.1.11	Penyisihan Piutang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(587,358,450.00)
1.1.12	Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,445.00
1.1.13	Persediaan	11,790,030,812.50	12,919,078,415.00	13,868,499,994.50	11,228,832,779.00	14,265,697,409.00	106,619,817,088.50
	JUMLAH ASET LANCAR	93,862,318,766.50	134,657,557,697.00	206,058,903,799.50	292,792,954,047.00	282,902,307,929.80	504,731,429,150.50
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Pembangunan						
1.2.1.4	Dana Bergulir	0.00	0.00	1,848,762,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	1,848,762,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen						
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	66,865,489,358.00	78,016,175,847.49	97,310,836,873.70	96,448,509,981.66	114,643,484,553.37	147,009,176,111.90
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	66,865,489,358.00	78,016,175,847.49	97,310,836,873.70	96,448,509,981.66	114,643,484,553.37	147,009,176,111.90
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	66,865,489,358.00	78,016,175,847.49	99,159,598,873.70	96,448,509,981.66	114,643,484,553.37	147,009,176,111.90
1.3	ASET TETAP						
1.3.1	Tanah	256,078,603,729.00	256,078,603,729.00	258,639,885,729.00	258,840,385,729.00	376,678,491,729.00	1,973,597,551,905.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	165,817,971,574.00	174,346,893,414.00	205,496,417,433.00	239,456,169,813.00	271,410,998,354.00	322,739,777,267.14
1.3.3	Gedung dan Bangunan	324,314,870,302.00	332,892,551,752.00	372,241,197,516.00	438,036,104,532.00	618,096,498,343.00	722,112,631,342.07
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	239,914,154,636.00	299,220,307,736.00	373,287,427,824.00	452,794,630,200.00	529,863,535,009.00	525,122,680,670.93
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	37,727,248,043.00	39,917,678,588.00	52,368,353,812.00	53,340,608,622.00	57,394,142,193.00	62,653,519,989.61

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	104,811,900.00	26,826,752,050.00	40,489,147,400.00	262,981,000.00	366,664,600.00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(741,250,703,770.15)
	JUMLAH ASET TETAP	1,023,852,848,284.00	1,102,560,847,119.00	1,288,860,034,364.00	1,482,957,046,296.00	1,853,706,646,628.00	2,865,342,122,004.60
1.4	DANA CADANGAN						
1.4.1	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	ASET LAINNYA						
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	963,037,500.00	963,037,500.00	963,037,500.00	963,037,500.00	963,037,500.00	963,037,500.00
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	1,346,802,450.00	2,826,863,800.00	3,620,402,900.00	4,616,085,400.00	6,023,482,410.00	7,188,223,860.00
1.5.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,177,207,680.50)
1.5.5	Aset Lain-lain	6,600,000.00	0.00	92,223,000.00	0.00	0.00	41,965,031,543.00
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,879,470,911.04)
	JUMLAH ASET LAINNYA	2,316,439,950.00	3,789,901,300.00	4,675,663,400.00	5,579,122,900.00	6,986,519,910.00	34,059,614,311.46
	JUMLAH ASET	1,186,897,096,358.50	1,319,024,481,963.49	1,598,754,200,437.20	1,877,777,633,224.66	2,258,238,959,021.17	3,551,142,341,578.46
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	34,995,204,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	150,461,483.51	139,556,363.04	128,409,567.53	117,383,604.48	106,357,641.44	49,055,412.62
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,791,667.00
2.1.5	Utang Beban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,479,761.00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	150,461,483.51	35,134,760,563.04	128,409,567.53	117,383,604.48	106,357,641.44	4,121,326,840.62
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1	Utang Dalam Negeri	540,762,589.11	401,206,226.07	272,796,658.54	155,413,054.06	49,055,412.62	0.00
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	540,762,589.11	401,206,226.07	272,796,658.54	155,413,054.06	49,055,412.62	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	691,224,072.62	35,535,966,789.11	401,206,226.07	272,796,658.54	155,413,054.06	4,121,326,840.62
3	EKUITAS						
3.1	EKUITAS DANA LANCAR						
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SILPA)	81,771,075,904.00	121,138,924,602.00	134,349,845,677.00	207,784,359,993.00	237,259,384,450.00	
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan	0.00	1,707,106.00	15,774,315.00	0.00	116,063,503.80	
3.1.3	Cadangan Piutang	301,212,050.00	597,847,574.00	57,824,783,813.00	73,779,761,275.00	31,261,162,567.00	
3.1.4	Cadangan Persediaan	11,790,030,812.50	12,919,078,415.00	13,868,499,994.50	11,228,832,779.00	14,265,697,409.00	

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.1.5	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jk pendek	(150,461,483.51)	(35,134,760,563.04)	(128,409,567.53)	(117,383,604.48)	(106,357,641.44)	
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	93,711,857,282.99	99,522,797,133.96	205,930,494,231.97	292,675,570,442.52	282,795,950,288.36	0.00
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI						
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	66,865,489,358.00	78,016,175,847.49	99,159,598,873.70	96,448,509,981.66	114,643,484,553.37	
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1,023,852,848,284.00	1,102,560,847,119.00	1,288,860,034,364.00	1,482,957,046,296.00	1,853,706,646,628.00	
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	2,316,439,950.00	3,789,901,300.00	4,675,663,400.00	5,579,122,900.00	6,986,519,910.00	
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jk panjang	(540,762,589.11)	(401,206,226.07)	(272,796,658.54)	(155,413,054.06)	(49,055,412.62)	
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1,092,494,015,002.89	1,183,965,718,040.42	1,392,422,499,979.16	1,584,829,266,123.60	1,975,287,595,678.75	0.00
	JUMLAH EKUITAS	1,186,205,872,285.88	1,283,488,515,174.38	1,598,352,994,211.13	1,877,504,836,566.12	2,258,083,545,967.11	3,547,021,014,737.84
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,186,897,096,358.50	1,319,024,481,963.49	1,598,754,200,437.20	1,877,777,633,224.66	2,258,238,959,021.17	3,551,142,341,578.46

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Sedangkan untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Penghitungan Neraca Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Rasio Likuiditas						
Rasio Lancar (Kas/Hutang Jangka Pendek)	543.47	3.45	1,046.38	1,770.13	2,231.86	89.07
Rasio Cair (Aset Lancar-Persediaan)/Hutang Jangka Pendek)	545.47	3.46	1,496.70	2,398.67	2,525.79	122.47
Rasio Solvabilitas						
Rasio Hutang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>) (Total Kewajiban/Total Aset)	0.00058	0.02694	0.00025	0.00015	0.00007	0.00116
Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset (Total Ekuitas Dana/Total Aset)	0.99942	0.97306	0.99975	0.99985	0.99993	0.99884
Rasio Aktivitas :						
Rata-rata Umur Piutang	108,22	106,23	104,11	106,19	109,16	127,67
Rata-rata Umur Persediaan	354,18	395,01	550,36	335,62	361,79	329,69

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu :

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2015 adalah sebesar 89,07. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar 89 kali lebih.

2. Rasio Quick

Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasio *Quick* pada Tahun 2015 adalah sebesar 122,47. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas :

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2015 sebesar 0,00116. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada Tahun 2015 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,998. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo, semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang.

Rasio aktivitas merupakan perbandingan antara pendapatan daerah dengan pengeluaran pada satu periode tertentu untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan.

Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama (hari) yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah) menjadi kas. Sedangkan rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama (hari) dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunkan persediaan untuk memberi pelayanan publik).

Berdasarkan Tabel 3.7 rasio rata-rata umur piutang Tahun 2015 sebesar 329,69. Hal ini menunjukkan bahwa piutang yang dimiliki oleh Kabupaten Sukoharjo cenderung meningkat yang berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah.

Rata-rata umur persediaan Tahun 2015 sebesar 474,33 hari, hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mencukupi *input* berupa persediaan yang dimasukkan untuk menghasilkan *output* pelayanan publik dalam satu tahun relatif baik.

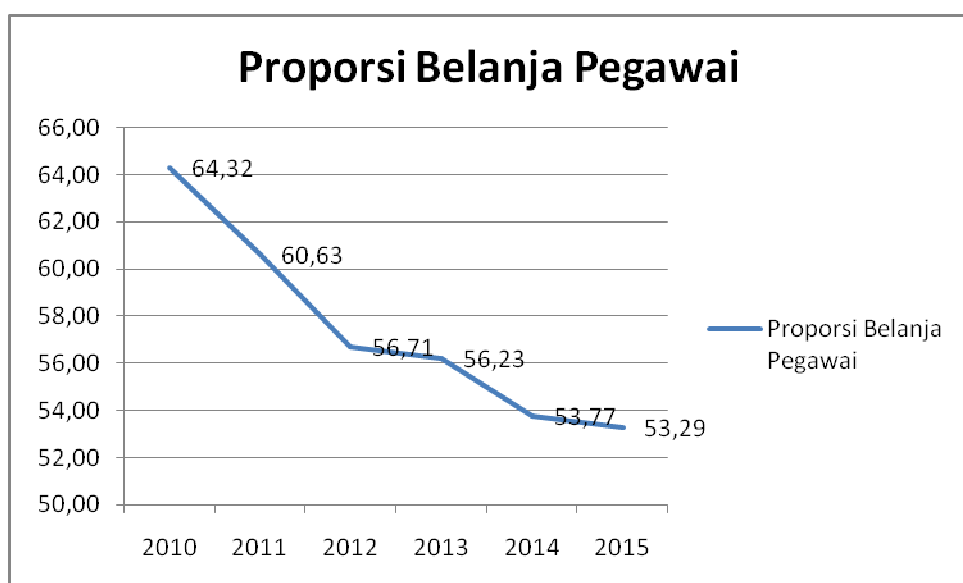
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Perkembangan proporsi belanja pegawai terhadap Total Belanja Daerah menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 64,32% pada tahun 2010 menjadi sebesar 53,29% pada tahun 2015. Perkembangan proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2
Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah (%)

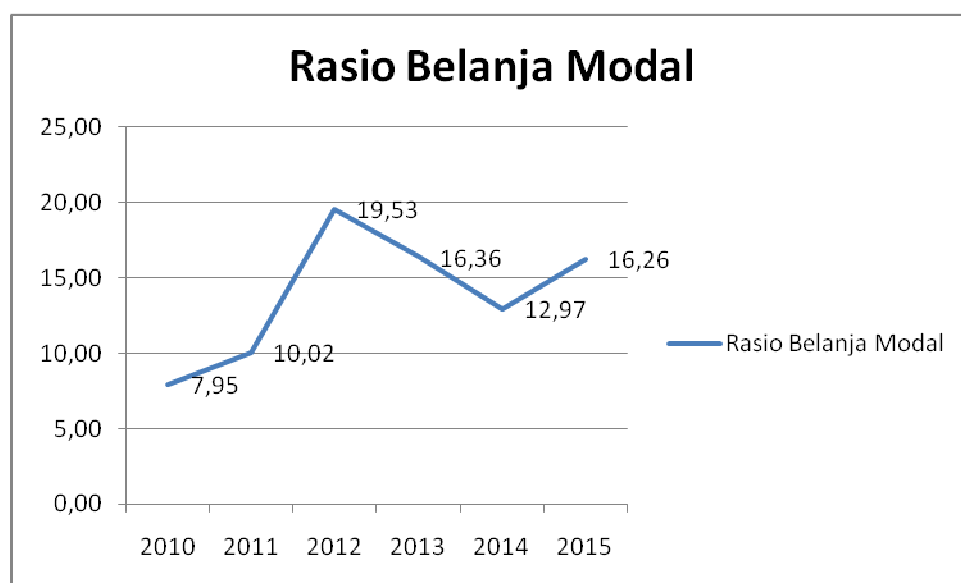


Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk

membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2010-2015, dari sebesar 9,66% pada tahun 2010 menjadi sebesar 15,33% pada tahun 2015. Perkembangan proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3
Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah (%)



Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu juga dapat dilihat dari ruang fiskal. Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas

yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah. Perhitungan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*), dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.

Dalam kurun waktu tahun 2010-2015, Kapasitas Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo cenderung meningkat dari sebesar Rp285.015.517.591 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp879.465.725.060 pada tahun 2015. Perkembangan kapasitas ruang fiskal daerah di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8**Kapasitas Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015**

No	Belanja	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pendapatan daerah	797.611.718.188	1.015.438.257.161	1.217.485.978.304	1.365.641.177.393	1.570.745.025.149	1.784.106.364.462
	Dikurangi:						
2	Belanja pegawai	502.505.417.437	587.675.252.407	678.730.940.174	720.644.842.217	820.946.459.483	871.502.980.791
3	Hibah	10.021.848.235	8.579.227.507	49.361.389.560	48.520.253.000	49.945.130.000	33.123.853.500
4	Belanja bunga	68.934.925	57.908.963	47.003.832	35.857.033	24.831.073	13.805.111
	Kapasitas fiskal	285.015.517.591	419.125.868.284	489.346.644.738	596.440.225.143	699.828.604.593	879.465.725.060

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ruang fiskal daerah Kabupaten Sukoharjo saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin (Belanja Pegawai). Kapasitas Fiskal yang besar, diharapkan akan mampu mendanai pos-pos Belanja Daerah dalam APBD, khususnya untuk pos Belanja Langsung (BL), karena idealnya porsi belanja rutin lebih kecil dari belanja modal. Memperbesar ruang fiskal daerah untuk Belanja Modal sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang mampu menciptakan

iklim perekonomian yang kondusif. Selain itu, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di daerah juga dapat mendukung terciptanya ruang fiskal.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Kondisi defisit riil APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 – 2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	797.611.718.188	1.015.438.257.161	1.217.485.978.304	1.365.641.177.393	1.570.745.025.149	1.784.106.364.462
	Dikurangi realisasi:						
2.	Belanja Daerah	781.281.768.496	969.298.855.931	1.196.799.260.947	1.281.648.110.545	1.526.637.448.160	1.635.302.267.018
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.015.552.532	6.771.552.532	7.475.796.282	10.558.552.532	14.632.552.532	19.752.552.532
3.	Defisit riil	6.314.397.160	39.367.848.698	13.210.921.075	73.434.514.316	29.475.024.457	129.051.544.912

Tabel 3.10**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 – 2015**

No	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	70.456.678.744	81.771.075.904	121.138.924.602	134.349.845.677	207.784.359.993	237.259.384.450
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Penerimaan dari Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.500.000.000	-	-	-	-	-
5	Penerimaan/Penarikan Deposito	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
7	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.500.000.000	-	-	-	-	-

Tabel 3.11**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sukoharjo**

No	Uraian	Tahun 2010 Rp	Tahun 2011 Rp	Tahun 2012 Rp	Tahun 2013 Rp	Tahun 2014 Rp	Tahun 2015 Rp
1	Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya	75,456,678,744	81,771,075,904	121,138,924,602	134,349,845,677	207,784,359,993	237,259,384,450
2	Pelampauan penerimaan PAD						
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan						
4	Pelampauan penerimaan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah						
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya						
6	Surplus/Defisit	16,329,949,692	46,139,401,230	20,686,717,357	83,993,066,848	44,107,576,989	148,804,097,444
7	Pembiayaan Netto	65,441,126,212	74,999,523,372	113,663,128,320	123,791,293,145	193,151,807,461	217,506,831,918
	SILPA TAB	81,771,075,904	121,138,924,602	134,349,845,677	207,784,359,993	237,259,384,450	366,310,929,362

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa

menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SiLPA terhadap total belanja di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 – 2015 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2015, dengan kontribusi sebesar 14,51%. Secara umum rasio dan kontribusi SILPA terhadap Total Belanja Daerah trendnya meningkat.

Tabel 3.12
Rasio Kontribusi SILPA terhadap Belanja Daerah

Tahun	SILPA	Total Belanja	Rasio SILPA terhadap Belanja Daerah
2010	70.456.678.744	781.281.768.496	9,02%
2011	81.771.075.904	969.298.855.931	8,44%
2012	121.138.924.602	1.196.799.260.947	10,12%
2013	134.349.845.677	1.281.648.110.545	10,48%
2014	207.784.359.993	1.526.637.448.160	13,61%
2015	237.259.384.450	1.635.302.267.018	14,51%

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, maka segala biaya pegawai dan biaya operasional SKPD menjadi pengeluaran wajib yang perlu dipenuhi. Dalam pemahaman umum pengeluaran periodik tersebut merupakan biaya tetap (*fixcost*) dalam pelaksanaan pemerintahan. Biaya tetap tersebut antara lain berupa belanja gaji dan tunjangan, tunjangan profesi guru, belanja bunga utang, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, belanja BLUD, belanja yang bersumber dana dari pemerintah dan pemerintah provinsi (*earmark*), dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.13
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat
Belanja Tidak Langsung Tahun 2010 – 2015

No.	Uraian	Pertumbuhan
1.	Belanja pegawai	11,74%
2.	Bunga utang	-26,74%
3.	Bantuan Keuangan	31,06%
4.	Belanja Tidak Terduga	828,17%

Sumber : DPPKADKabupatenSukoharjo, 2016 (data diolah)

Tabel 3.14
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat
Belanja Langsung Tahun 2010 – 2015

No.	Uraian	Pertumbuhan
1.	Belanja sumber dana <i>earmark</i> (Hibah, bantuan keuangan)	33,7%

Sumber : DPPKADKabupatenSukoharjo, 2016 (data diolah)

Tabel 3.15
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Periodik dan Mengikat
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	Pertumbuhan
1	Penyertaan modal	38,21%
2	Pembayaran Pokok Utang	0,04%
3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,01%

Sumber : DPPKADKabupatenSukoharjo, 2016 (data diolah)

3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2016 – 2021

3.3.2.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2016 – 2021

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2010 - 2015, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2016 - 2021, yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah juga mengembangkan kerjasama operasi/investasi.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misalnya penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
- 3) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- 4) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- 6) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah;
- 7) Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan.
- 8) Mendorong iklim investasi di Kabupaten Sukoharjo antara lain melalui penyederhanaan proses perijinan dan intensifikasi pemasaran daerah, yang diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
- 9) Untuk mendanai program-program prioritas unggulan melalui

usaha kerjasama atau pinjam pihak ketiga.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 disusun dengan asumsi :

- 1) Berdasarkan arah pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah 2010-2015, maka ditetapkan pertumbuhan pendapatan sebesar 16,98 % dari PAD.
- 2) Pertumbuhan untuk dana perimbangan adalah sebesar 11,03%.
- 3) Besar pertumbuhan untuk proyeksi kerangka pendanaan 2016-2021 adalah sebesar 12,41% dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Proyeksi sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah selama Tahun 2016 – 2021 diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Uraian	APBD	Proyeksi				
		2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
A	Pendapatan Daerah						
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	264,729,757,000	291,348,030,000	320,944,660,000	357,061,334,000	396,154,295,000	446,999,986,000
a.	Pajak daerah	108,600,000,000	122,718,000,000	137,444,160,000	158,060,784,000	178,608,685,000	205,399,986,000
b.	Retribusi	26,279,232,000	27,500,000,000	28,500,000,000	29,000,000,000	29,750,000,000	30,100,000,000
c.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8,973,000,000	9,960,030,000	10,000,000,000	10,500,000,000	10,750,000,000	11,000,000,000
d.	Lain-lain PAD yang sah	120,877,525,000	131,170,000,000	145,000,500,000	159,500,550,000	177,045,610,000	200,500,000,000
2	Dana Perimbangan	1,056,467,156,000	924,990,667,000	935,500,500,000	957,000,500,000	967,000,500,000	990,500,500,000
a.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30,990,667,000	30,990,667,000	29,500,500,000	29,500,500,000	29,500,500,000	30,000,500,000
b.	Dana Alokasi Umum	922,624,169,000	790,500,000,000	800,500,000,000	820,000,000,000	830,000,000,000	850,000,000,000

No	Uraian	APBD	Proyeksi				
		2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
c.	Dana Alokasi Khusus	102,852,320,000	103,500,000,000	105,500,000,000	107,500,000,000	107,500,000,000	110,500,000,000
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	479,747,509,000	542,766,757,000	554,466,757,000	560,636,757,000	560,680,157,000	568,894,425,000
a.	Pendapatan Hibah	966,757,000	966,757,000	966,757,000	966,757,000	966,757,000	966,757,000
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	92,190,884,000	105,500,000,000	108,500,000,000	110,670,000,000	110,713,400,000	112,927,668,000
c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	386,589,868,000	395,800,000,000	400,000,000,000	402,000,000,000	402,000,000,000	405,000,000,000
d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	40,500,000,000	45,000,000,000	47,000,000,000	47,000,000,000	50,000,000,000
	Jumlah	1,800,944,422,000	1,759,105,454,000	1,810,911,917,000	1,874,698,591,000	1,923,834,952,000	2,006,394,911,000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

3.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Tahun 2016 – 2021

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah akan diarahkan pada :

- 1) Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penyusunan standar harga;
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
- 5) Peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan.
- 6) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social, fasilitas umum dan infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 7) Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan UMKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur.

Bahwa arah pengelolaan pembiayaan daerah tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
A	Belanja Tidak Langsung	1.237.867.507.000	1.283.758.646.000	1.327.820.646.000	1.392.369.200.000	1.463.176.352.000	1.538.231.933.000
1	Belanja Pegawai	1.024.665.361.000	1.070.500.000.000	1.113.320.000.000	1.180.119.200.000	1.250.926.352.000	1.325.981.933.000
	Gaji Pegawai, KDH dan DPRD	680.658.450.000	719.075.529.000	754.502.694.000	813.590.600.000	873.601.938.000	937.897.693.000
	Tambahan Penghasilan Pegawai	42.708.937.000	49.115.278.000	55.500.264.000	62.160.295.000	71.484.340.000	80.777.303.000
	Tunjangan profesi Guru	287.860.263.000	287.860.263.000	287.860.263.000	287.860.263.000	287.860.263.000	287.860.263.000
	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.694.250.000	2.694.250.000	2.694.250.000	2.694.250.000	2.694.250.000	2.694.250.000
	Belanja penerimaan lainnya KDH dan DPRD	4.002.000.000	4.002.000.000	4.002.000.000	4.002.000.000	4.002.000.000	4.002.000.000
	Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi	6.741.461.000	7.752.680.000	8.760.529.000	9.811.792.000	11.283.561.000	12.750.424.000
2	Belanja Bunga	2.780.000	-	-	-	-	-
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	211.202.146.000	210.758.646.000	211.750.646.000	210.000.000.000	210.000.000.000	210.000.000.000

4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.500.000.000	2.750.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000
B	Belanja Langsung	161.976.159.000	172.495.783.000	179.153.374.000	179.916.591.000	178.186.795.000	178.186.795.000
1	Belanja Pegawai BLUD	33.296.106.000	39.955.327.000	41.774.561.000	41.774.561.000	40.044.765.000	40.044.765.000
2	Belanja Bahan Pakai Habis	13.304.298.000	13.703.427.000	14.203.667.000	14.282.577.000	14.282.577.000	14.282.577.000
3	Belanja Jasa Kantor	43.974.824.000	45.294.069.000	46.947.518.000	47.208.338.000	47.208.338.000	47.208.338.000
4	Belanja perawatan kendaraan	7.762.759.000	7.995.642.000	8.287.521.000	8.333.563.000	8.333.563.000	8.333.563.000
No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
5	Belanja Pemeliharaan	24.817.888.000	25.562.425.000	26.495.575.000	26.642.773.000	26.642.773.000	26.642.773.000
6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.820.284.000	39.984.893.000	41.444.532.000	41.674.779.000	41.674.779.000	41.674.779.000
C	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.738.277.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000
1	Penyertaan Modal	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000
2	Pembayaran hutang pokok	46.277.000	-	-	-	-	-
3	Pengembalian pihak ketiga	-	-	-	-	-	-
	Total (A + B + C)	1.410.581.943.000	1.466.946.429.000	1.517.666.020.000	1.582.977.791.000	1.652.055.147.000	1.727.110.728.000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

3.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2016 – 2021

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, maka asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan perkiraan pembiayaan adalah sebagai berikut;

- 1) Penerimaan pembiayaan terutama SILPA akan bersaldo positif yang memberikan indikasi adanya kesehatan fiscal dan kesinambungan fiscal daerah yang baik
- 2) Pengeluaran pembiayaan utamanya penyertaan modal memberikan manfaat ekonomi, sosial dan politik dari investasi atau penyertaan modal yang diperoleh.

Proyeksi pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.18.

Tabel 3.18

Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Penerimaan pembiayaan	122.665.349.000	261.345.192.000	262.100.729.000	256.512.609.000	248.183.400.000	249.679.022.000
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	122.665.349.000	261.345.192.000	262.100.729.000	256.512.609.000	248.183.400.000	249.679.022.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan						
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah						
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman/dana bergulir						
1.6	Penerimaan piutang daerah						
1.7	Penerimaan pihak ketiga						
2	Pengeluaran Pembiayaan	10.738.277.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
2.2	Penyertaan modal (investasi)	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000
2.3	Pembayaran hutang pokok	46.277.000	-	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah						
2.5	Pengembalian pihak ketiga						
	Pembiayaan Netto	111.927.072.000	250.653.192.000	251.408.729.000	245.820.609.000	237.491.400.000	238.987.022.000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

3.3.2.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19

**Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021**

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pendapatan Daerah	1.800.944.422.000	1.759.105.454.000	1.810.911.917.000	1.874.698.591.000	1.923.834.952.000	2.006.394.911.000
2	Penerimaan Pembiayaan	122.665.349.000	261.345.192.000	262.100.729.000	256.512.609.000	248.183.400.000	249.679.022.000
	Total Penerimaan	1.923.609.771.000	2.020.450.646.000	2.073.012.646.000	2.131.211.200.000	2.172.018.352.000	2.256.073.933.000
	Dikurangi :						
4	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat (Prioritas I)	1.410.581.943.000	1.466.946.429.000	1.517.666.020.000	1.582.977.791.000	1.652.055.147.000	1.727.110.728.000
5	Kapasitas riil kemampuan keuangan	513.027.828.000	553.504.217.000	555.346.626.000	548.233.409.000	519.963.205.000	528.963.205.000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang belum dialokasikan dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20

Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Kapasitas Keuangan Daerah	1.923.609.771.000	2.020.450.646.000	2.073.012.646.000	2.131.211.200.000	2.172.018.352.000	2.256.073.933.000
I	Prioritas I (Wajib dan Mengikat)	1.410.581.943.000	1.466.946.429.000	1.517.666.020.000	1.582.977.791.000	1.652.055.147.000	1.727.110.728.000
1.1	Belanja Tidak Langsung	1.237.867.507.000	1.283.758.646.000	1.327.820.646.000	1.392.369.200.000	1.463.176.352.000	1.538.231.933.000
1.2	Belanja Langsung	161.976.159.000	172.495.783.000	179.153.374.000	179.916.591.000	178.186.795.000	178.186.795.000
1.3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.738.277.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	513.027.828.000	553.504.217.000	555.346.626.000	548.233.409.000	519.963.205.000	528.963.205.000
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	463.911.601.000	503.504.217.000	505.346.626.000	497.833.409.000	469.563.205.000	478.563.205.000
2.1	Belanja program kegiatan yang bersumber dana DAK	98.002.320.000	99.962.366.000	100.591.848.000	102.535.652.000	104.479.455.000	104.479.455.000
2.2	Belanja program kegiatan yang bersumber dana hibah	-	-	-	-	-	-
2.3	Belanja program kegiatan yang bersumber dana Bantuan Keuangan Provinsi	-	40.500.000.000	45.000.000.000	47.000.000.000	47.000.000.000	50.000.000.000

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
2.4	Belanja program kegiatan yang bersumber dana pinjaman	-					
2.5	Pembayaran pokok hutang	46.277.000	-	-	-	-	-
2.6	Pembayaran bunga hutang	2.780.000	-	-	-	-	-
2.7	Belanja program prioritas dalam rangka pencapaian SPM dan pencapaian visi misi KDH	365.860.224.000	363.041.851.000	359.754.778.000	348.297.757.000	318.083.750.000	324.083.750.000
3	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	49.056.947.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.400.000.000	50.400.000.000	50.400.000.000
3.1	Belanja Hibah	20.865.145.000	20.500.000.000	21.500.000.000	21.250.000.000	21.250.000.000	21.250.000.000
3.2	Belanja Sosial	20.057.000.000	21.000.000.000	19.500.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
3.3	Belanja Bagi Hasil	8.134.802.000	8.500.000.000	9.000.000.000	9.150.000.000	9.150.000.000	9.150.000.000
4	Surplus Anggaran Riil/Berimbang						

Dengan demikian, diketahui kapasitas riil keuangan Daerah yang dialokasikan untuk memenuhi Belanja Prioritas I, II, dan III sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.21.

Tabel 3.21**Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021**

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	Prioritas I	1.410.581.943.000	73,33	1.466.946.429.000	72,60	1.517.666.020.000	73,21	1.582.977.791.000	74,28	1.652.055.147.000	76,06	1.727.110.728.000	76,55
2	Prioritas II	463.911.601.000	24,12	503.504.217.000	24,92	505.346.626.000	24,38	497.833.409.000	23,36	469.563.205.000	21,62	478.563.205.000	21,21
3	Prioritas III	49.056.947.000	2,55	50.000.000.000	2,47	50.000.000.000	2,41	50.400.000.000	2,36	50.400.000.000	2,32	50.400.000.000	2,23
		1.923.550.491.000	100,00	2.020.450.646.000	100,00	2.073.012.646.000	100,00	2.131.211.200.000	100,00	2.172.018.352.000	100,00	2.256.073.933.000	100,00

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besaran persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dirancang untuk menunjang prioritas dimaksud. Berdasarkan evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya relatif baik untuk peningkatan alokasi pendanaan secara bertahap. Dengan demikian, kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat ditampilkan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22
Proyeksi APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
A	Pendapatan Daerah	1.800.944.422.000	1.759.105.454.000	1.810.911.917.000	1.874.698.591.000	1.923.834.952.000	2.006.394.911.000
1	Pendapatan Asli Daerah	264.729.757.000	291.348.030.000	320.944.660.000	357.061.334.000	396.154.295.000	446.999.986.000
a	Pajak daerah	108.600.000.000	122.718.000.000	137.444.160.000	158.060.784.000	178.608.685.000	205.399.986.000
b	Retribusi daerah	26.279.232.000	27.500.000.000	28.500.000.000	29.000.000.000	29.750.000.000	30.100.000.000
c	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.973.000.000	9.960.030.000	10.000.000.000	10.500.000.000	10.750.000.000	11.000.000.000
d	Lain-2 PAD yang sah	120.877.525.000	131.170.000.000	145.000.500.000	159.500.550.000	177.045.610.000	200.500.000.000
2	Dana Perimbangan	1.056.467.156.000	924.990.667.000	935.500.500.000	957.000.500.000	967.000.500.000	990.500.500.000
a	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.990.667.000	30.990.667.000	29.500.500.000	29.500.500.000	29.500.500.000	30.000.500.000
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	922.624.169.000	790.500.000.000	800.500.000.000	820.000.000.000	830.000.000.000	850.000.000.000
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	102.852.320.000	103.500.000.000	105.500.000.000	107.500.000.000	107.500.000.000	110.500.000.000
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	479.747.509.000	542.766.757.000	554.466.757.000	560.636.757.000	560.680.157.000	568.894.425.000

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
B	Belanja Daerah	1.912.871.494.000	2.009.758.646.000	2.062.320.646.000	2.120.519.200.000	2.161.326.352.000	2.245.381.933.000
1	Belanja Tidak Langsung	1.286.927.234.000	1.333.758.646.000	1.377.820.646.000	1.442.769.200.000	1.513.576.352.000	1.588.631.933.000
a	Belanja Mengikat	1.237.867.507.000	1.283.758.646.000	1.327.820.646.000	1.392.369.200.000	1.463.176.352.000	1.538.231.933.000
b	Prioritas II	2.780.000	-	-	-	-	-
c	Prioritas III	49.056.947.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.400.000.000	50.400.000.000	50.400.000.000
2	Belanja Langsung	625.944.260.000	676.000.000.000	684.500.000.000	677.750.000.000	647.750.000.000	656.750.000.000
a	Belanja Mengikat (Prioritas I)	161.976.159.000	172.495.783.000	179.153.374.000	179.916.591.000	178.186.795.000	178.186.795.000
b	Prioritas II	463.968.101.000	503.504.217.000	505.346.626.000	497.833.409.000	469.563.205.000	478.563.205.000
	Surplus/Defisit	(111.927.072.000)	(250.653.192.000)	(251.408.729.000)	(245.820.609.000)	(237.491.400.000)	(238.987.022.000)
C	Pembiayaan Daerah	111.927.072.000	250.653.192.000	251.408.729.000	245.820.609.000	237.491.400.000	238.987.022.000
1	Penerimaan	122.665.349.000	261.345.192.000	262.100.729.000	256.512.609.000	248.183.400.000	249.679.022.000
2	Pengeluaran	10.738.277.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000	10.692.000.000

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Total APBD	1.923.609.771.000	2.020.450.646.000	2.073.012.646.000	2.131.211.200.000	2.172.018.352.000	2.256.073.933.000

3.3.2.4 Kerangka Regulasi

Keterbatasan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan daerah menyebabkan tidak semua rencana program/kegiatan dapat dibiayai dari kerangka pendanaan APBD. Guna mendukung pengelolaan keuangan daerah dan pendanaan pembangunan, maka perlu adanya kerangka regulasi yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, yaitu :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pendanaan program/kegiatan dari sumber dana APBN, dana dekonsentrasi dan APBD Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Melakukan penyesuaian atas Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai regulasi yang baru dan kebijakan nasional;
- 3) Melakukan evaluasi atas Perda tentang Pajak Daerah, Perda tentang Retribusi Daerah, Perda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan serta Perda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 4) Meningkatkan manajemen aset daerah dan mengoptimalkan pemakaian kekayaan daerah melalui inovasi-inovasi pengelolaan aset daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga/ investasi;
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 6) Kebijakan pembiayaan pembangunan melalui hutang kepada pemerintah, utamanya terhadap prioritas pembangunan yang membutuhkan dana besar, seperti bidang infrastruktur dan sarana prasarana layanan dasar kepada masyarakat;

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Ketimpangan Pendapatan Masyarakat dan Antar Wilayah

Indeks Gini merupakan indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2008 – 2013 cenderung memburuk yaitu sebesar 0,24 pada Tahun 2008, menjadi 0,34 pada Tahun 2013. Indeks tersebut menunjukkan pergeseran kelompok ketimpangan pendapatan masyarakat dari kelompok ketimpangan rendah menjadi ketimpangan sedang.

Ditinjau dari sudut pandang produktivitas ekonomi riil, hanya terdapat tiga kecamatan yang memiliki produktivitas ekonomi sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ketiga kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Kartasura. Lebih dari setengah (50%) PDRB Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2010 – 2015 dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang berpusat di tiga kecamatan tersebut.

Statistik ini relatif tidak berubah sepanjang tahun tersebut yang menandakan bahwa perekonomian Kabupaten Sukoharjo relatif terkonsentrasi di ketiga kecamatan tersebut. Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura sebagai kecamatan yang diindikasikan perekonomian Kabupaten Sukoharjo relatif terkonsentrasi di daerah tersebut mempunyai letak administratif

yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Kota Surakarta di bagian Barat dan Selatan mendorong kegiatan perekonomian di daerah perbatasan Kabupaten Sukoharjo secara signifikan. Hal ini menunjukkan fenomena urbanisasi dalam pengertian telah terjadi pergeseran karakteristik daerah perdesaan menjadi perkotaan, khususnya di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura.

Dari hasil analisis klasifikasi Tipologi Klaasen yang perlu mendapat perhatian adalah kecamatan-kecamatan yang masuk dalam kategori daerah berkembang dan daerah tertinggal. Ada pola distribusi ruang yang sangat jelas tergambar dari hasil analisis ini. Kecamatan yang dikategorikan sebagai daerah berkembang berada secara berdampingan dengan kecamatan-kecamatan yang masuk kategori daerah maju.

Sedangkan kecamatan-kecamatan yang masuk dalam kategori daerah tertinggal berada jauh atau tidak berdampingan langsung dengan daerah maju. Hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi kegiatan perekonomian yang berada di sekitar daerah maju saja sebagaimana teori pusat pertumbuhan. Namun demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan performa perekonomian yang lebih berkonsentrasi di bagian Utara dibandingkan Selatan Kabupaten Sukoharjo.

2. Kemiskinan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi.

Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini

dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

3. Ketenagakerjaan

Permasalahan dalam ketenagakerjaan antara lain terkait dengan kesejahteraan di Kabupaten Sukoharjo Tingkat Upah Minimum belum sepenuhnya memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja utamanya pada akses layanan kesehatan dan kepemilikan rumah layak huni; dan belum optimalnya perlindungan tenaga kerja. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka akibat rendahnya tingkat pendidikan/ketrampilan/keahlian calon tenaga kerja menjadikan sebuah tantangan untuk mengupayakan bagaimana angka pengangguran tersebut dapat diturunkan. Salah satunya adalah dengan cara memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Penyediaan tenaga terampil menjadi isu yang perlu ditangani sesuai tuntutan kebutuhan global, sehingga dapat meningkatkan nilai jual tenaga kerja. Dengan demikian diharapkan Kabupaten Sukoharjo dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang siap bersaing di bursa tenaga kerja regional, nasional, dan internasional. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja perlu dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Sukoharjo.

Pengangguran dapat diartikan sebagai tidak terserapnya sebagian angkatan kerja ke dalam kesempatan kerja yang diciptakan oleh pencapaian tingkat pertumbuhan. Tingkat pengangguran selama periode lima tahun yang lalu mengalami fluktuasi yang cenderung sedikit penurunannya yakni pada tahun 2015 tingkat pengangguran 4,4% dari total angkatan kerja. Masih terjadi kesenjangan yang cukup tajam dalam tingkat pengangguran terbuka antar Kecamatan yakni 6 Kecamatan yang mempunyai tingkat pengangguran terbuka diatas angka rata-rata Kabupaten maupun Provinsi. Kondisi ini akan berdampak kurang baik bagi pembangunan daerah, maka dari itu sasaran pengangguran terbuka selama periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu dari tahun 2016-2021 harus mampu ditekan. Sementara itu, peningkatan

angkatan kerja juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini timbul akibat tidak berjalannya program keluarga berencana dengan baik sebagai alat kontrol laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya memberikan beban kepada penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

4. Pendidikan

Permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Terkait dengan aspek ketersediaan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator antara lain APM SD/MI/SDLB 98,20 APM SMP/MTs/SMPLB mencapai 76,55.

Pencapaian indeks pendidikan merupakan gabungan dari Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pembangunan bidang pendidikan perlu diprioritaskan pada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun melalui pendidikan formal maupun nonformal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Tantangan yang dihadapi di bidang pendidikan adalah bagaimana meningkatkan APM/APK SMA untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi antara APM/APK SMP dan SMA. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan menumbuhkan kesadaran diri untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan kesempatan yang luas untuk dapat mengakses pelayanan pendidikan menengah disertai dengan sistem pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Sebagaimana menjadi program pendidikan nasional, pengembangan pendidikan kejuruan perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini terkait dengan kebutuhan tenaga kerja terampil untuk menyongsong era pasar bebas.

Aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, termasuk penyerapan lulusannya di dunia kerja. Seiring dengan hal tersebut perlu upaya mengedepankan sekolah kejuruan dengan fokus pembelajaran pada pendidikan vokasional (*life skill*) yang mengutamakan kompetensi daerah.

5. Kesehatan

Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat

perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Penyelenggaraan kesehatan dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta khususnya keluarga miskin, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

6. Pertumbuhan dan Pergerakan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,518%. Pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi di Kecamatan Kartasura (0,846 %) dan paling rendah di Kecamatan Bulu (0.027 %). Apabila dilihat dari perkembangan penduduk, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol mempunyai pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan dengan perkembangan penduduk di desa lainnya. Dalam rentang waktu tahun 2010-2015 pertumbuhan penduduk kedua kecamatan tersebut relatif tinggi, masing-masing sebesar 0,846 % dan 0,834 %.

Jumlah penduduk yang bertambah secara signifikan terlihat pada jumlah penduduk Kecamatan Grogol pada tahun 2009-2014 dengan jumlah penduduk 102.307 jiwa menjadi 107.555 jiwa. Angka pertumbuhan ini sangat besar dibandingkan dengan kecamatan lain. Pertambahan penduduk tersebut menunjukkan adanya daya tarik lokasi yang mampu mendorong penduduk di sekitar wilayah tersebut masuk, dengan Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol yang merupakan pusat pelayanan dan dilewati jalur utama transportasi darat, serta pusat kegiatan-kegiatan sosial ekonomi lainnya seperti: pendidikan, perdagangan, jasa, kesehatan

dan kegiatan lainnya. Dengan memperhatikan hal tersebut serta kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk, maka diprediksikan Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol akan terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang paling tinggi dibandingkan kecamatan yang lain di tahun-tahun mendatang.

Pusat perdagangan yang meliputi pertokoan, pasar swalayan, pasar tradisional dan kegiatan jasa terkonsentrasi di pusat kota yaitu di Ibukota Kabupaten Sukoharjo maupun di Kecamatan Kartasura. Hampir semua fasilitas perdagangan terdapat wilayah-wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan pergerakan penduduk ke arah pusat-pusat perdagangan dan fasilitas pelayanan yang lain. Permasalahan yang timbul dari pemusatan fasilitas perdagangan dan jasa adalah terjadi pembebanan terhadap beberapa kapasitas jalan arteri dan kolektor di wilayah Kecamatan Kartasura yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Grogol yang dilewati jalan utama Kota Surakarta dengan Kabupaten Wonogiri. Hal ini juga berdampak pada kecenderungan perkembangan wilayah di Kabupaten Sukoharjo mengikuti pola jalan atau linear. Dengan demikian perlu dikembangkan alternatif fasilitas perdagangan di luar jalan utama (arteri dan kolektor) yang ada.

7. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru. Perhitungan kekurangan kebutuhan rumah (*backlog*) mencapai 36.766 rumah dalam kurun waktu empat tahun terakhir atau sekitar 3.000 rumah setiap tahunnya.

Permasalahan lainnya terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah permukiman yang kurang sehat dan tertata. Meskipun luas permukiman kumuh cenderung menurun dan menjadi 21,524 hektar pada tahun 2015, namun peningkatan kualitas lingkungan permukiman perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh baru. Selain itu masih banyak kawasan

permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong.

8. Pengelolaan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, meliputi: i) masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih; ii) terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah; iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.

Penyediaan air bersih yang berasal dari sumber air tanah perlu dikendalikan secara ketat dengan memperhatikan prinsip keseimbangan lingkungan. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali menimbulkan dampak terhadap penurunan muka tanah (*land subsidence*). Penurunan muka tanah juga disebabkan oleh adanya beban bangunan (*settlement*), konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah dan gaya gaya tektonik.

Meskipun penyediaan air bersih sudah mencakup lebih dari 76 persen rumah tangga, namun secara kualitas penyediaan air bersih masih menggunakan sumber air tanah (sumur) dan cakupan pelayanan dari sistem perpipaan masih rendah. Ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perpipaan, karena selama ini sumber air baku masih mengandalkan pengolahan air sungai dan pasokan air baku dari Waduk Mulur.

9. Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Terdapat 3 (tiga) kelompok permasalahan pencemaran lingkungan yaitu persampahan, pengelolaan air limbah dan penanganan polusi udara.

Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat

pemrosesan akhir. Peningkatan produksi sampah kota merupakan konsekuensi logis dari penambahan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan paradigma “membuang sampah” belum pada “mengolah sampah dari sumbernya”. Dengan kata lain masyarakat belum didorong sepenuhnya untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Pengelolaan kualitas air permukaan masih dihadapkan pada terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah padat. Cakupan pelayanan sistem pengelolaan air limbah terpusat belum memadai dan melayani seluruh wilayah kota. Selain itu pengelolaan limbah setempat belum banyak digunakan terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak terencana.

Pencemaran air tanah disebabkan terutama oleh penggunaan septic tank yang belum memenuhi standar lingkungan. Saat ini pada kawasan perumahan baru terencana penggunaan septic tank sebagai penampungan limbah domestik sudah banyak dilakukan, meski masih perlu disosialisasikan tentang penggunaan septic tank yang memenuhi standar lingkungan. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) belum banyak diterapkan pada skala kota, tetapi masih terbatas pada lokasi industri logam berat dan pengolahan limbah rumah sakit.

Sedangkan sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor. Polusi udara berpengaruh pada penurunan kualitas kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas daerah.

10. Iklim Investasi

Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo diantaranya adalah kurang maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin selanjutnya akan diproses oleh PD terkait. Melihat tujuan dibentuknya pelayanan

terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini belum menunjukkan proses yang ideal.

Selanjutnya, selain permasalahan perizinan dan kepastian investasi dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem ketenagakerjaan. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan, dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.

11. Koperasi dan UMKM

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional harus mampu berperan sebagai penopang utama sistem perekonomian daerah. Dengan demikian koperasi di Kabupaten Sukoharjo harus mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja, memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Jumlah Koperasi di Sukoharjo yang sudah berbadan hukum sebanyak 825 unit, yang terdiri dari koperasi yang aktif sebanyak 680 unit dan yang tidak aktif sebanyak 145 unit. Pengembangan UMKM-Koperasi dihadapkan pada masalah internal maupun eksternal, untuk masalah internal yaitu; rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, belum terbangunnya sistem informasi yang handal dalam mendukung pemasaran produk UMKM-Koperasi, rendahnya kemampuan UMKM-Koperasi dalam memanfaatkan Teknologi Informasi.

Masalah eksternal antara lain yang dihadapi UMKM-Koperasi adalah belum optimalnya pemberdayaan kerjasama antara instansi pemerintah dan dunia usaha serta kemitraan usaha antara UMKM-Koperasi dengan BUMN/BUMD dan perusahaan besar, pola sinergi pemberdayaan UMKM-Koperasi yang belum optimal.

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan

dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan bisnis pariwisata guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan.

12. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi.

Upaya peningkatan ketersediaan pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, ketatnya persaingan pasar antara produk domestik dengan produk impor diduga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo yang berkelanjutan.

13. Reformasi Birokrasi

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi. Penataan struktur kelembagaan dilakukan secara parsial karena masih menunggu regulasi yang mengatur organisasi perangkat daerah. Hal lain yang perlu lebih ditingkatkan yaitu berkaitan dengan pengembangan etos dan budaya kerja.

Aspek-aspek lain yang belum dikembangkan secara baik adalah belum efektifnya manajemen SDM dalam peningkatan profesionalitas aparatur, transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur, masih terjadi inefisiensi pengelolaan keuangan daerah,

masih lemahnya sistem pengawasan internal, serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan dinamika masyarakat.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan gender masih belum optimal dan program-program berkaitan dengan pemenuhan hak anak masih belum berjalan dengan baik, serta kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender masih belum optimal. Keberpihakan terhadap peningkatan peran perempuan di seluruh sektor pembangunan perlu dilakukan. Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender. Indeks pemberdayaan gender meliputi keanggotaan perempuan dalam parlemen (10%), perempuan dalam angkatan kerja dan upah pekerja non pertanian, sedangkan indeks pembangunan gender meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki dan perempuan dan persentasi angkatan kerja. Upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan.

Anak adalah amanah dan merupakan sumber daya pembangunan, juga potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan, yang harus kita jaga, kita bina dan kita penuhi hak-haknya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang cerdas-ceria, inovatif dan kreatif, bermartabat dan berakhlak mulia. Keberhasilan program perlindungan anak terlihat dari terpenuhinya seluruh hak anak (31 hak anak). Empat hak dasar anak yang harus dapat terpenuhi adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dari segala perlakuan yang salah serta hak untuk berpartisipasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

15. Politik

Pembangunan politik merupakan bagian dari gerak

pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terwujud ketertiban politik. Permasalahan dalam pembangunan politik yaitu masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, serta masih belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula.

Hal ini tercermin dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang baru mencapai 63,95% atau 428.429 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 669.993 pemilih. Selain itu keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan publik dan penentuan arah pembangunan yang bersifat strategis dirasakan masih belum optimal.

16. Transportasi

Kondisi transportasi di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan permasalahan signifikan pada lokasi-lokasi tata guna lahan tertentu. Diantaranya adalah pada koridor Ruas Jalan Raya Solo-Wonogiri mengalami beberapa tundaan sampai dengan kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena permasalahan-permasalahan bangkitan dan tarikan perjalanan, serta hambatan lalu lintas akibat perilaku pengguna kendaraan, parkir tepi jalan, serta aktivitas pasar tumpah, maupun penyeberangan orang.

Beberapa permasalahan gangguan lalu lintas banyak terjadi pada beberapa lokasi :

- Koridor Solo-Wonogiri menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 1.946,60 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 1.329,30 smp/jam.
- Koridor Solo Baru-Sukoharjo menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 2821,40 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 1.283,20 smp/jam.
- Koridor Surakarta-Solo Baru menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 1.453,00 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 775,30 smp/jam.
- Koridor Weru-Sukoharjo menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 972,50 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 578,60 smp/jam.
- Koridor Telukan-Cuplikan menunjukkan kondisi angka

maksimum adalah 1.404,70 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 561,60 smp/jam.

- Koridor Cuplik-Sukoharjo menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 856,10 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 508,10 smp/jam.
- Koridor Baki-Klaten menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 1.882,70 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 1.189,10 smp/jam.
- Koridor Solo-Jogja menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 2.597,50 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 2006,10 smp/jam.
- Koridor Gatak-Klaten menunjukkan kondisi angka maksimum adalah 2.597,50 smp/jam, sedangkan angka lalu lintas minimum sebesar 2006,10 smp/jam.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah Pembangunan jalan lingkar yang diharapkan dapat menjamin perkembangan ekonomi, kelancaran lalu lintas barang, jasa dan manusia, serta menjadi tertib dan aman. Untuk mendukung ini perlu disusun mengenai “Prosedur Operasi Standar” pembangunan maupun operasi jalan lingkar.

17. Kerawanan Bencana

Berdasarkan analisis indeks risiko bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBD) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana (urutan ketigabelas dari tigapuluh lima kabupaten dan kota) (Bappenas, 2014). Jika dilihat dari data kebencanaan yang ada, Kabupaten Sukoharjo mempunyai beberapa ancaman bencana, antara lain banjir, misalnya Banjir di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban akhir April 2015); longsor misalnya di Kecamatan Nguter bulan Februari 2015; angin ribut misalnya di Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bendosari bulan Februari 2015. Selain tiga ancaman bahaya utama tersebut, terdapat pula ancaman bahaya kekeringan, kebakaran hutan/lahan, serta gempabumi.

4.2. Lingkungan Strategis

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan berkelanjutan, serta memperhatikan dinamika yang berkembang maka kondisi lingkungan strategis perlu mendapat perhatian sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan ke depan.

1. Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

1) Letak Geografis

Kabupaten Sukoharjo mempunyai posisi yang strategis, yakni terletak di persimpangan jurusan Semarang, Yogyakarta, Solo dan termasuk di dalam kawasan strategis SUBOSUKA WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) yang dapat mendukung perkembangan pembangunan, khususnya bidang-bidang potensial di Kabupaten Sukoharjo.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sukoharjo mengingat posisinya dekat dengan dua kutub pusat pertumbuhan yaitu D.I. Yogyakarta dan Solo dan merupakan wilayah yang diakses oleh transportasi dari Surabaya yang akan menuju ke arah barat seperti Yogyakarta menjadikan Kabupaten Sukoharjo akan terus meningkatkan jalur transportasi.

Selain itu adanya Solo Baru yang merupakan perluasan area perkotaan dari Kota Solo menjadikan potensi ekonomi di bidang perdagangan dan jasa semakin intens sehingga pantas apabila Kecamatan Grogol yang pada Perda no. 14 tahun 2011 ditetapkan status sistem perkotaanya menjadi PKLp berpotensi meningkat menjadi PKW pada evaluasi RTRW terbaru.

2) Investasi

Di Kabupaten Sukoharjo sampai akhir bulan juni tahun 2015 telah terdapat 8 perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi sebesar US \$

163.065.735 dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 21.299 orang dan 14 perusahaan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai investasi sebesar Rp 524.445.000.000,- dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 18.803 orang

Seperti Pemerintah Kabupaten / Kota yang lainnya , Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di tahun 2009 juga telah memberikan peluang Investasi kepada Calon Investor. Peluang investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah:

Zona Industri Nguter , yang berada di wilayah Kecamatan Nguter di sebelah selatan kota Sukoharjo. Kawasan tersebut berupa lahan seluas 354 ha yang diperuntukan bagi kegiatan industri, baik industri besar dan menengah yang kegiatannya diutamakan yang berupa padat karya / mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Industri yang diharapkan seperti Industri Sepatu dan Peralatan Olahraga , Industri Karoseri , Industri Pengolahan Kayu , Industri Plastik , Industri Tekstil dan Garmen, Industri Kertas dan Karton. Diharapkan dengan penyediaan Kawasan Industri tersebut akan mampu menyerap tenaga kerja sekita 50.000 orang. Fasilitas yang telah tersedia adalah berupa jalan beraspal menuju lokasi kawasan tersebut.

Perkembangan industri di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan, untuk aspek unit usaha, dapat dilihat bahwa ada kenaikan sebesar 0,4 % dari 16.785 unit pada tahun 2011 menjadi 16.852 unit di tahun 2012. Selanjutnya dari aspek tenaga kerja, terdapat kenaikan sebesar 1,4% dari 142.773 orang di tahun 2011 menjadi 144.702 orang pada tahun 2012. Untuk aspek nilai investasi, pada tahun 2011 mencapai Rp 2.113.420,48 dan pada tahun 2012 mencapai Rp 2.159.773,00 dengan kenaikan sebesar 2,2 %. Untuk nilai produksi pada tahun 2011 sebesar Rp 7.255.808,00 dan di tahun 2012 meningkat menjadi Rp 7.518.364,66 dengan perubahan sebesar 3,6 %.

Sektor industri di Kabupaten Sukoharjo memegang

peranan yang sangat penting dan merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi. Sumbangan sektor industri terhadap PDRB dan jumlah pekerja di Kabupaten Sukoharjo cukup besar, yaitu masing masing 30 % dan 83%. Sektor industri menempati urutan pertama dalam kontribusinya terhadap PDRB di Kabupaten Sukoharjo.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1) Ketimpangan

Ditinjau dari sudut pandang produktivitas ekonomi riil, hanya terdapat tiga kecamatan yang memiliki produktivitas ekonomi sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ketiga kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Kartasura. Lebih dari setengah (50%) PDRB Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2009 – 2013 dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang berpusat di ketiga kecamatan tersebut.

Dari hasil analisis klasifikasi Tipologi Klaasen yang perlu mendapat perhatian adalah kecamatan-kecamatan yang masuk dalam kategori daerah berkembang dan daerah tertinggal. Ada pola distribusi ruang yang sangat jelas tergambar dari hasil analisis ini. Kecamatan yang dikategorikan sebagai daerah berkembang berada secara berdampingan dengan kecamatan-kecamatan yang masuk kategori daerah maju. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang masuk dalam kategori daerah tertinggal berada jauh atau tidak berdampingan langsung dengan daerah maju. Hal ini menunjukkan terjadinya konsentrasi kegiatan perekonomian yang berada di sekitar daerah maju saja sebagaimana teori pusat pertumbuhan. Namun demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan performa perekonomian yang lebih berkonsentrasi di bagian Utara dibandingkan Selatan Kabupaten Sukoharjo.

2) Alih Fungsi Lahan

Perubahan lahan khususnya lahan sawah walaupun luasannya tidak terlalu besar. Hal tersebut dapat dilihat dari

perubahan lahan sawah menjadi lahan bukan sawah, dimana dari tahun 2003 lahan sawah yang berjumlah 21.184 Ha berkurang seluas 63 hektar menjadi 21.121 Ha pada tahun 2008. Luas tersebut kembali berkurang menjadi 20.858 pada tahun 2013. Konversi lahan sawah menjadi non sawah dalam kurun waktu 2008 hingga 2013 cukup besar, yakni mencapai 263 hektar atau sekitar 52 hektar setiap tahunnya. Laju perubahan penggunaan lahan dari lahan sawah menjadi non sawah ini menunjukkan adanya proses perubahan kondisi wilayah, baik yang berupa perubahan fisik maupun sosial ekonomi masyarakat. Pengurangan luas lahan sawah menunjukkan adanya perkembangan perkotaan dengan semakin banyaknya lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Dilihat dari segi sosial ekonomi, berkurangnya lahan pertanian menunjukkan adanya perubahan struktur kegiatan penduduk dari pertanian menjadi non pertanian. Salah satu ciri perkembangan perkotaan adalah berkurangnya lahan pertanian. Berkurangnya intensitas kegiatan pertanian menunjukkan adanya perubahan struktur mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke non pertanian.

Perkembangan lahan non sawah sedangkan untuk bukan lahan sawah bertambah dari tahun 2003 seluas 25.482 Ha sedangkan pada tahun 2008 25.545 Ha. Lahan non sawah ini kembali bertambah pada tahun 2013 yakni mencapai 25.808 Hektar. Perkembangan lahan non sawah merupakan indikator semakin berkembangnya wilayah Kabupaten Sukoharjo ke arah perkotaan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari semakin berkembangnya kawasan industri dan perdagangan-jasa di beberapa lokasi.

2. Eksternal

a. Peluang(*Opportunity*)

1. Semakin terintegrasinya pasar baik regional maupun internasional, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN China Free Trade Area(ACFTA), merupakan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah.

Peluang akses pasar untuk produk-produk Sukoharjo akan semakin terbuka luas.

2. Dukungan kebijakan otonomi daerah dari pusat baik dukungan kebijakan maupun pendanaan.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat mendukung untuk pengembangan sistem birokrasi yang lebih efisien dan akuntabel.
4. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik pada tingkat regional maupun internasional sangat terbuka luas untuk menanamkan investasi di Kabupaten Sukoharjo.

4.2.2.2. Ancaman (*Threat*)

1. Serbuan produk-produk impor yang semakin gencar dengan seiring semakin terbukanya pasar bebas yang akan mengancam keberadaan produk-produk lokal.
2. Meningkatnya persaingan produk maupun tenaga kerja antar daerah maupun antar negara yang akan mengancam kesempatan kerja masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
3. Kondisi perekonomian global yang belum stabil sehingga akan mengganggu proses investasi yang akan dilakukan di Kabupaten Sukoharjo.
4. Semakin tingginya tuntutan kualitas produk untuk pasar ekspor yang dikaitkan dengan isu-isu lingkungan akan semakin menyulitkan produk-produk ekspor dari Kabupaten Sukoharjo.
5. Perubahan iklim yang akan sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktifitas pertanian yang akan mengancam ketersediaan pangan di Kabupaten Sukoharjo.

4.3. Kajian Isu-isu Strategis

Bertolak dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk miskin secara nasional pada bulan maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22%), meningkat sebesar 860.000 orang dibandingkan september 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96%). Indeks keparahan dan indeks kedalaman juga semakin meningkat. Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 adalah 0,535 meningkat dibandingkan dengan Maret 2014 yang ada di level 0,435, Maret 2013 (0,432), Maret 2012 (0,473). Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2015 adalah 1,971, meningkat dibandingkan dengan Maret 2014 (1,753), Maret 2013 (1,745) dan Maret 2012 (1,880).

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah serius dihadapi oleh pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan.

Isu pengangguran merupakan isu penting karena isu pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.

Pada sisi lain peningkatan angkatan kerja juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini timbul akibat tidak berjalannya program keluarga berencana dengan baik sebagai alat kontrol laju pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya memberikan beban kepada penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

4.3.2. Ketahanan Pangan

Isu ketahanan pangan merupakan isu strategis yang sangat penting mengingat Indonesia sebagai Negara agraris yang mempunyai potensi pangan yang sangat besar. Pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJPN 2005 – 2025, Pemerintah bertumpu pada kemandirian pangan yang diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal.

Isu ketahanan pangan mencakup produksi pangan, ketersediaan, keterjangkauan baik fisik maupun ekonomi, keamanan pangan, ketahanan pangan berbasis potensi lokal serta pengendalian harga pangan. Konsep ketahanan pangan tersebut belum cukup harus dikaitkan dengan isu kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan.

4.3.3. Ketahanan Energi

Semakin terbatasnya energi fosil dan kelangkaan energi terutama energi listrik di beberapa daerah di Indonesia. Isu ketahanan energy menjadi salah satu kunci kebijakan pemerintah, untuk menemukan terobosan baru dalam pengadaan energi, yang didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna sehingga secara berangsur-angsur ketergantungan terhadap

energi fosil terutama di Jawa Tengah dapat tereduksi dan menggeser paradigma pemanfaatan energi tak terbarukan menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan.

4.3.4. Peningkatan Daya Saing

Seiring dengan pemberlakuan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka isu peningkatan daya saing menjadi isu yang sangat strategis untuk diperhatikan. Isu yang berkaitan dengan peningkatan daya adalah isu penguatan sistem inovasi daerah (SIDA), kelembagaan koperasi UMKM dan FEDEP melalui peningkatan kualitas SDM dan kualitas dan kuantitas produksi, kemitraan bapak angkat, pengembangan klaster UMKM, peningkatan aksesibilitas UMKM terhadap lembaga perbankan, pengembangan jejaring kemitraan. Peningkatan daya saing juga perlu diaitkan dengan peningkatan produktivitas hasil pertanian, peternakan, perikanan dan pengolahan hasil pertanian berbasis teknologi tepat guna. Kebijakan investasi nyaman, aman dan ramah pasar yang berbasis pada keuangan daerah dan kebijakan investasi juga menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam peningkatan daya saing.

4.3.5. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan syarat untuk peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan konektivitas regional dan nasional yang mendukung penguatan posisi Kabupaten Sukoharjo. Infrastruktur tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dalam mendukung perwujudan desa berdikari, karena melalui teknologi informasi yang mampu

menjangkau hingga tingkat desa, maka komunikasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih terbuka dan intensif.

4.3.6. Tuntutan Pemerintah yang Baik

Tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bersih masih menjadi isu nasional yang mengemuka. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, baik pada skala nasional maupun regional.

a) Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah menjalin koordinasi lintas sektor terkait yaitu Kesbanglinmas, Kantor Polisi, dan pengaduan masyarakat penyebab gangguan dan ketertiban sebagai upaya mengantisipasi adanya gangguan ketertiban; dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk melembagakan rasa peduli keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga bisa mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini mengingat Kabupaten Sukoharjo dianggap sebagai “sarang” teroris dan karena penyebaran ideologi ekstrim tidak mengenal batas administratif, sehingga perlu diwaspadai adanya kehadiran entitas yang potensial menimbulkan keresahan masyarakat.

b) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi yang senantiasa mengadopsi perkembangan yang ada, dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang membutuhkan aplikasi teknologi informasi dibutuhkan untuk pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi ketenagakerjaan, publikasi dan informasi profil pelayanan dan karakteristik daerah. Kondisi penggunaan teknologi informasi menghadapi kendala dalam hal kurangnya perangkat keras, kurangnya tenaga operasional. Jadi tantangan yang dihadapi pemerintah

Sukoharjo adalah bagaimana mampu menyediakan perangkat teknologi informasi, dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu dari segi kecepatan pelayanan, kelengkapan dan kemudahan informasi diakses pihak pengguna informasi, dan efisiensi biaya. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang mengoperasikan dan sosialisasi kemanafaatannya pada semua *stakeholders* yang terkait dengan kebutuhan pelayanan yang disediakan. Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo terkait dengan teknologi informasi adalah penambahan perangkat keras yang diperlukan, pelatihan sumber daya manusia pengguna, sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait sistem layanan yang disediakan pemerintah berbasis teknologi informasi.

c) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang demokratis

Tertanamnya kesadaran masyarakat yang tinggi baik dari sisi pentingnya peran mereka dalam menentukan masa depan arah pembangunan maupun kesadaran untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam rangka mendukung penyelenggaraan kehidupan politik yang demokrasi. Tantangan yang dihadapi pemerintah bagaimana secara substantif memberi ruang partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang diambil pemerintah. Penyusunan regulasi yang memberi payung bagi keterlibatan masyarakat dalam mekanisme demokrasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo merupakan tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

d) Terwujudnya pelayanan informasi dan komunikasi pemerintah daerah yang optimal

Pemerintah dan masyarakat memerlukan mekanisme komunikasi yang tepat; tepat cara, tepat waktu, dan tepat isi atau tepat pesan informasi. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu bagaimana memfasilitasi mekanisme dan sarana untuk menciptakan budaya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Tantangan bagi pemerintah menyediakan media komunikasi yang

beragam sesuai karakteristik kelompok masyarakat yang ada. Media komunikasi dan informasi yang perlu dioptimalkan sebagai wahana informasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat antara lain melalui web/internet, media koran, radio, TV lokal, papan pengumuman, informasi terstruktur melalui lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan forum warga yang mungkin akan berkembang dalam kurun waktu kedepan.

Hasil yang diharapkan tidak hanya aparat pemerintah namun masyarakat pun juga mendapat kemudahan untuk memperoleh informasi dengan lengkap dan cepat terhadap kebutuhan mereka akan pelayanan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan peran media massa yang semakin bertambah dan semakin meningkat kualitasnya.

e) Terbangunnya perpustakaan daerah yang modern

Seiring dengan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan lengkap, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mampu mewujudkan sebuah perpustakaan yang representatif, baik secara fisik dalam bentuk pembangunan gedung dan penambahan bahan pustaka, maupun berupa dukungan sarana prasarana perangkat multimedia yang modern dengan memanfaatkan jaringan komunikasi yang telah terbangun.

f) Meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan HAM

Memberikan perlindungan HAM dan hak-hak dasar masyarakat merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah terkait dengan upaya membangun sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan bagi semua kelompok masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan penataan hukum, pemantapan pelaksanaan hukum dan budaya hukum yang pada akhirnya tertuju pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tantangan praktis yang perlu dijawab pemerintah adalah meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan disiplin aparatur pemerintah melalui penerapan peraturan dan perundangan-undangan yang menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran dengan menyiapkan peraturan daerah dan perangkat hukum daerah, yang pada gilirannya akan

berdampak pada perwujudan penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan aparatur hukum yang profesional.

4.3.7. Penurunan Kualitas Lingkungan, Emisi Gas Rumah Kaca serta frekuensi dan intensitas bencana alam

Penurunan kualitas lingkungan dan emisi rumah kaca akibat pengrusakan hutan, pencemaran lingkungan, aktivitas industri. Di samping meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana alam membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Ancaman terhadap meningkatnya degradasi lingkungan dapat terjadi karena kesalahan dalam memformulasikan pengertian otonomi daerah dengan melakukan pembangunan yang berdalih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apalagi tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Adanya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan, serta pelanggaran pemanfaatan ruang baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ancaman lainnya yang memperparah kerusakan lingkungan adalah aktivitas pembangunan yang dapat merusak sungai, air tanah, perambahan, dan pembakaran hutan. Alih fungsi lahan menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna sehingga dapat mengancam kelestarian sumberdaya keanekaragaman hayati.

Tantangan yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan lingkungan daerah bukit, dataran dan kawasan hutan menjadi satu kesatuan ekologis yang dapat dikelola secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. Kondisi topografis tersebut berpotensi terhadap permasalahan bahaya tanah longsor. Hal ini perlu diantisipasi sejak dini dan ditetapkan mekanisme pengelolaannya secara tepat. Pertumbuhan lahan kritis harus diupayakan seminimal mungkin.

Peluang pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam tahapan perencanaan bisa dimulai dengan upaya untuk

menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan kajian lingkungan hidup yang lebih terfokus pada kajian yang bersifat lebih strategis yakni di tingkat kebijakan, rencana dan program. Penerapan KLHS akan diarahkan pada pemberdayaan rencana pembangunan yang bersifat strategis (RPJP, RPJM, RTRW, dan sebagainya) yang menekankan pada proses kerjasama dan partisipatif dari seluruh komponen terkait/*stakeholder* secara tripartit (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha). Dengan diterapkannya KLHS ini, juga merupakan landasan didalam mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat sinergis dari proses perencanaan pembangunan. Potensi yang dimiliki kabupaten Sukoharjo adalah sumberdaya alam, budaya, adat istiadat/kearifan lokal yang cukup besar. Apabila potensi-potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik melalui implementasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsisten, maka akan menjadi peluang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo yang berwawasan lingkungan.

4.3.8. Pengembangan kawasan strategis melalui kerjasama antar wilayah

Dengan keterbatasan sumber daya alam masing-masing daerah, maka kerjasama sinergis pengelolaan potensi wilayah perlu ditingkatkan misalnya dengan pengembangan ekonomi wilayah. Oleh karena itu maka pengembangan kawasan strategis seperti SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten), merupakan isu strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

4.3.9. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Konsistensi dalam penegakan perda RTRW adalah sebuah komitmen bersama untuk mengendalikan alih fungsi lahan, disamping perlu adanya pemanfaatan lahan yang belum produktif menjadi lahan sawah dan perkebunan melalui

pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung. Masih rendahnya ketaatan pelaku pembangunan terhadap rencana tata ruang mengakibatkan konflik pemanfaatan fungsi lindung maupun budidaya sesuai dengan RTRW.

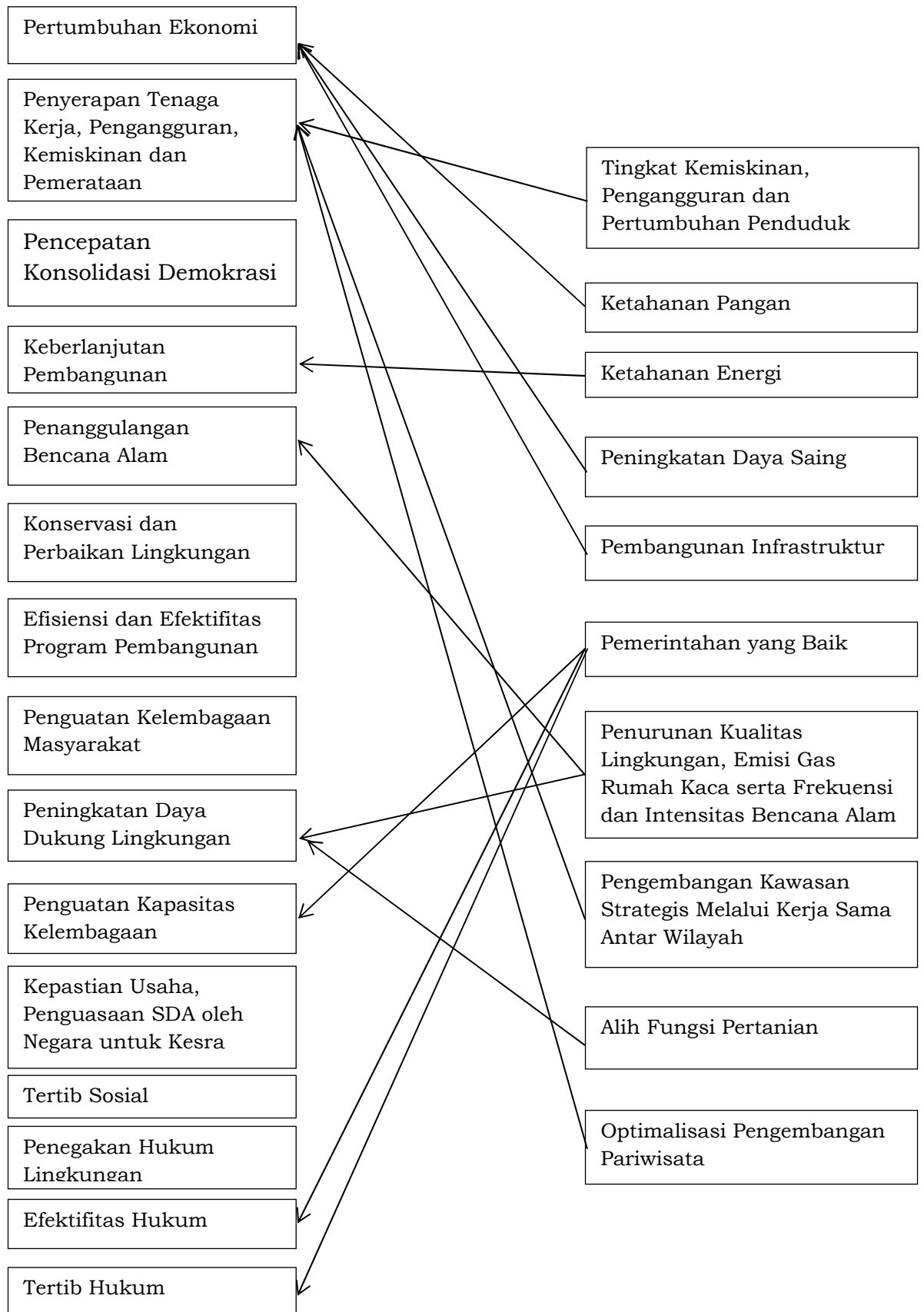
4.3.6. Optimalisasi Pengembangan Pariwisata

Potensi Pariwisata yang tidak begitu besar di Kabupaten Sukoharjo berupa obyek wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dan wisata kuliner belum dikembangkan secara maksimal untuk bisa menarik wisatawan dan peningkatan potensi pengembangan ekonomi wilayah.

Keterkaitan isu-isu strategis nasional dengan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada gambar berikut :

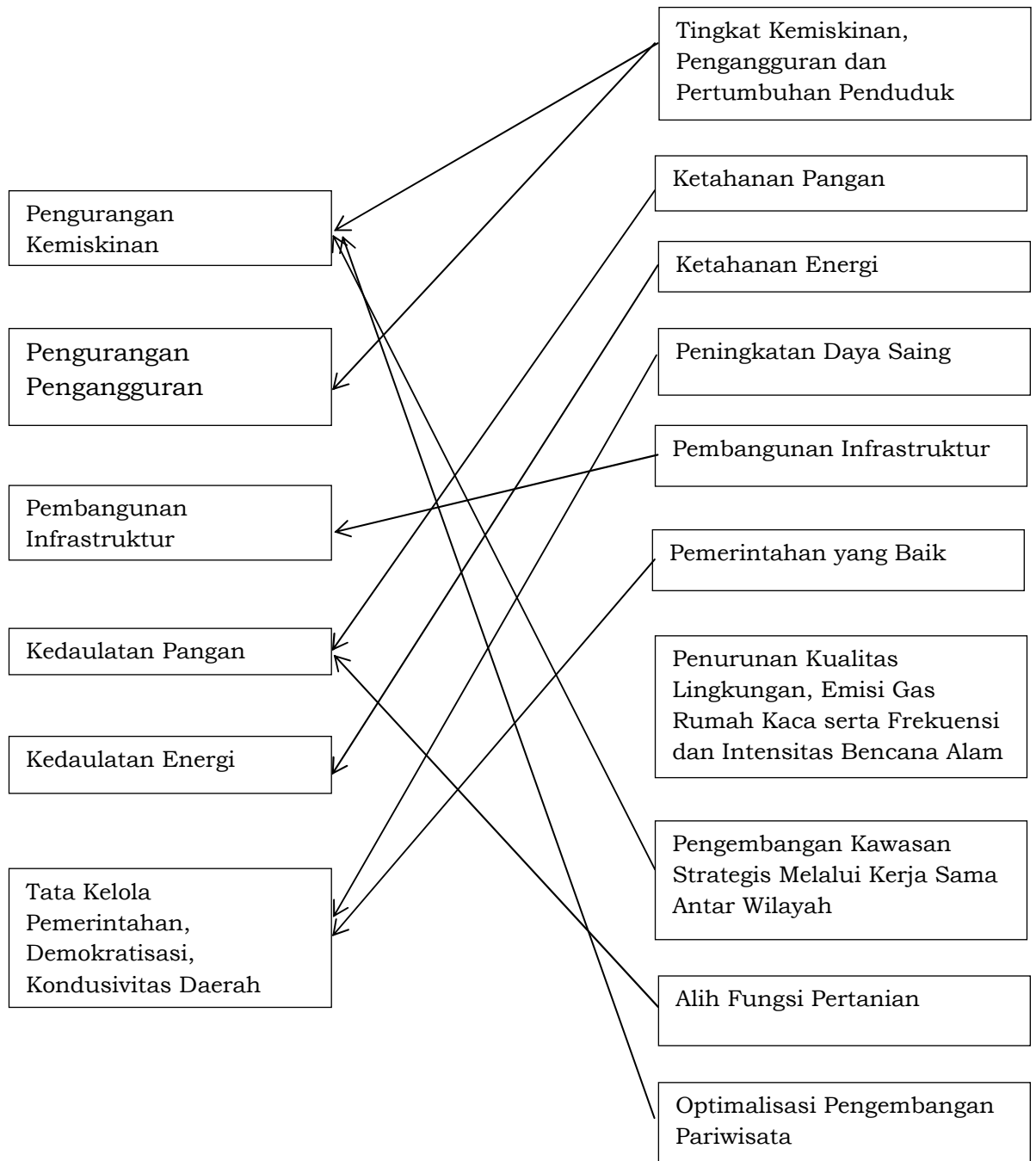
Gambar 4.1

**Keterkaitan Isu-Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2014-2019
dengan Isu-Isu Kabupaten Sukoharjo dalam RPJMD Kabupaten
Sukoharjo
2016-2021**



Gambar 4.2

**Keterkaitan Isu-Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD
Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dengan Isu-Isu Kabupaten
Sukoharjo dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2016-2021**



BAB V

VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pada aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum perencanaan yang diinginkan dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih untuk periode Tahun 2016-2021. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

5.1. VISI

“TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SEJAHTERA:

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta

peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

MAJU :

Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, ber peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

BERMARTABAT :

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat;

PROFESIONAL :

Mengandung Makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

5.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo 2016-2021 tersebut, maka dijabarkan dalam 5(lima) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan.

- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
- Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

- Meningkatkan kualitas layanan publik;
- Mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat;
- Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik.

3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah

- Mewujudkan Ketahanan Pangan
- Mewujudkan Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- Mewujudkan Penguatan Iklim Investasi;
- Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.

4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.

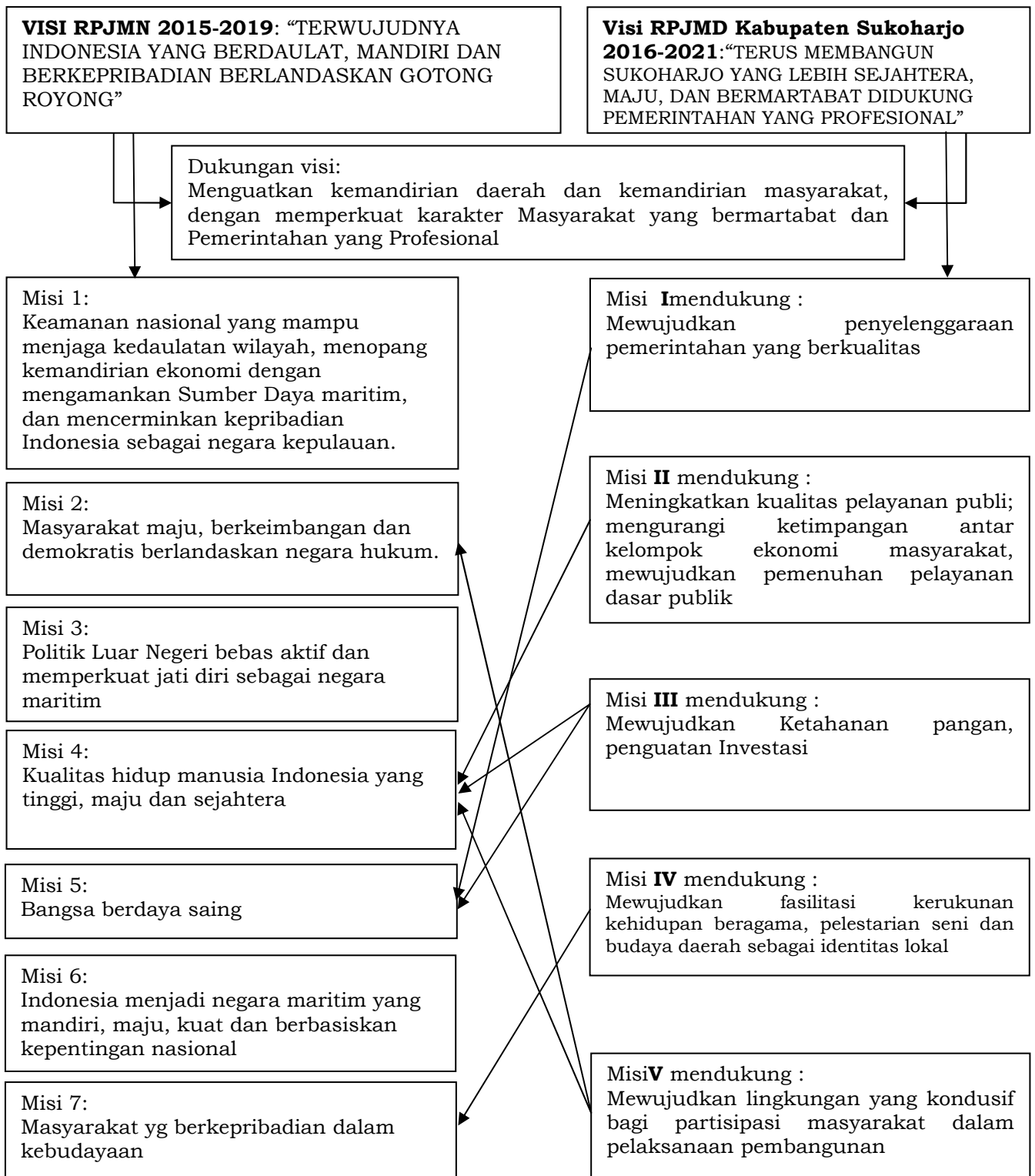
- Mewujudkan fasilitasi Kerukunan Kehidupan Beragama
- Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal.

5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis

- Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

5.3 Keterkaitan Visi-Misi Bupati Tahun 2016–2021 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjabaran visi misi Bupati Sukoharjo di atas sebagai dasar perumusan sasaran hasil pembangunan daerah yang akan diwujudkan kurun 2016-2021. Penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran strategis daerah didesain untuk mendukung pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2005-2025, prioritas RPJMN tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan melalui bagan berikut :



Gambar 5.1
Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

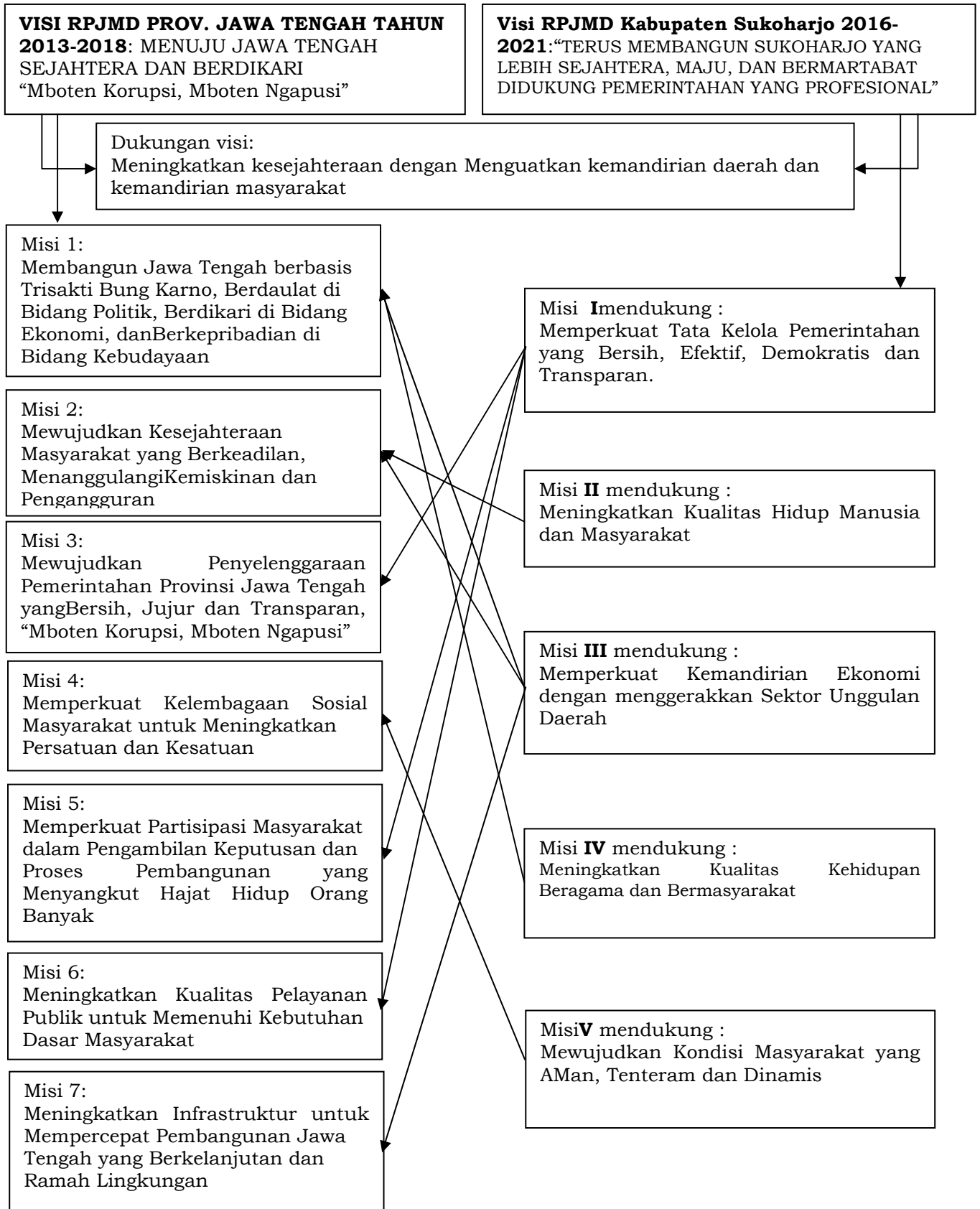
Sinkronisasi agenda prioritas nasional ke dalam penjabaran visi misi Kabupaten Sukoharjo dikembangkan dari kerangka persandingan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Sinkronisasi RPJMN 2014–2019 dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016–2021

9 Agenda Prioritas RPJMN	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021
<p>Agenda 1: Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.</p>	<p>Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi Vmelalui langkah strategis mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan</p>
<p>Agenda 2: Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.</p>	<p>Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari Misi I melalui langkah strategis mewujudkan pemerintahan yang berkualitas</p>
<p>Agenda 3: Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.</p>	<p>Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi II melalui langkah strategis mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat 2. Misi III melalui langkah strategis mewujudkan penguatan investasi dan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
<p>Agenda 4: Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.</p>	<p>Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi I melalui langkah strategis mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik 2. Misi IV melalui langkah strategis memfasilitasi kerukunan kehidupan beragama 3. Misi V melalui langkah strategis Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya bagi para penegak hukum

9 Agenda Prioritas RPJMN	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021
<p>Agenda 5: Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.</p>	<p>Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi II melalui langkah strategismeningkatkan kualitas layanan publik, dan mewujudkan pemenuhan layanan dasar publik 2. Misi IV melalui langkah strategispelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal.
<p>Agenda 6: Akanmeningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.</p>	<p>Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi I melalui langkah strategis mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas 2. Misi III melalui langkah strategis mewujudkan ketahanan pangan, penguatan investasi, akselerasi pertumbuhan ekonomi
<p>Agenda 7: Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.</p>	<p>Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi III melalui langkah strategispenguatan investasi akselerasi pertumbuhan ekonomi;
<p>Agenda 8: Akan melakukan revolusi karakter bangsa.</p>	<p>Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi II melalui langkah strategismeningkatkan kualitas layanan publik 2. Misi IV melalui langkah strategispelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal.
<p>Agenda 9: Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.</p>	<p>Diterjemahkan dalam sasaran daerah yang diturunkan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi IV melalui langkah strategismemfasilitasi kerukunan kehidupan beragama. 2. Misi V melalui langkah strategismewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Sinkronisasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ke dalam penjabaran Visi Misi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, dijelaskan melalui bagan berikut :



Gambar 5.2

Skema keterkaitan Visi-Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

Sinkronisasi RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ke dalam Visi Misi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

Tabel 5.2

Sinkronisasi RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ke dalam Visi Misi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

ARAH KEBIJAKAN	SASARAN		
	RTRW 2011 - 2031	RPJPD 2005-2025	RPJMD PROV JATENG 2013-2018
Kebijakan pengembangan struktur ruang : 1. Peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki 2. Pengembangan prasarana wilayah guna mendukung produksi pertanian, industri dan permukiman secara terpadu dan efisien 3. Pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta menunjang pariwisata,	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius	Sasaran dari tujuan 1: Meningkatnya demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno. Sasaran dari tujuan 6: Menurunnya angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka; Meningkatnya produktivitas masyarakat; Meningkatnya investasi; keadilan gender dan perlindungan perempuan dan anak; Penanganan PMKS. Sasaran dari tujuan 4: Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa; meningkatnya sikap dan perilaku	1. Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran: ○ Misi II ○ Misi IV

ARAH KEBIJAKAN	SASARAN		
	RTRW 2011 - 2031	RPJPD 2005-2025	RPJMD PROV JATENG 2013-2018
penelitian dan edukasi		<p>masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya jawa; meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya jawa dalam kehidupan masyarakat;</p> <p>Sasaran dari tujuan 6: Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan; meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan; meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya budaya baca masyarakat</p>	
<p>Kebijakan pengembangan struktur ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki 2. Pengembangan prasarana wilayah guna mendukung pengembangan produksi pertanian, industri dan permukiman secara terpadu dan efisien 3. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung 	<p>Terwujudnya pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan</p>	<p>Sasaran dari tujuan 2: Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM; meningkatnya kelembagaan perekonomian pedesaan; meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas; meningkatnya realisasi investasi</p> <p>Sasaran dari tujuan 5: Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah</p>	<p>Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran dari Misi III</p>

ARAH KEBIJAKAN	SASARAN			
	RTRW 2011 - 2031	RPJPD 2005-2025	RPJMD PROV JATENG 2013-2018	RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2016-2021
<p>produksi pertanian, industri dan permukiman serta pariwisata</p> <p>4. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan</p>				
<p>Kebijakan pengembangan struktur ruang :</p> <p>1. Pengembangan prasarana wilayah guna mendukung pengembangan produksi pertanian, industri dan permukiman secara terpadu dan efisien</p> <p>2. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai dengan fungsi utama kawasan</p>	<p>Terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat</p>	<p>Sasaran dari tujuan 2: Menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran;</p> <p>Sasaran dari tujuan 6: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni; meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku dan partisipasi masyarakat;</p> <p>Sasaran dari tujuan 7: Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan; meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat</p>	<p>Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran dari Misi II dan Misi III</p>	

ARAH KEBIJAKAN	SASARAN			
	RTRW 2011 - 2031	RPJPD 2005-2025	RPJMD PROV JATENG 2013-2018	RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2016-2021
			Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	
<p>Kebijakan pengembangan struktur ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang merata dan berhirarki 2. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan 3. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara 	<p>Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) didukung oleh aparatur pemerintah daerah yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme</p>	<p>Sasaran dari tujuan 3: Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas; meningkatnya cakupan layanan pengukuran indeks kepuasan masyarakat; terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;</p>	<p>Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran dari Misi I</p>	
<p>Kebijakan pengembangan struktur ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama 	<p>Terwujudnya kondisi daerah yang aman damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan</p>	<p>Sasaran dari tujuan 4: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat; meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik;</p>	<p>Diterjemahkan dalam penjabaran sasaran dari Misi IV dan Misi V</p>	

ARAH KEBIJAKAN	SASARAN			
	RTRW 2011 - 2031	RPJPD 2005-2025	RPJMD PROV JATENG 2013-2018	RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2016-2021
kawasan 2. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara				

5.4. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Misi I :

Tujuan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan;
 - 2) Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya;
 - 3) Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan dan politis yang kondusif.
- b. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik, dengan sasaran :
 - 1) Melaksanakan Keterbukaan Publik;
 - 2) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya
 - 3) Meningkatkan Peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan

2. MISI II :

Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana
 - 2) Terwujudnya pendidikan untuk semua
 - 3) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan

terjangkau

b. Mengurangi Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat dengan sasaran :

- 1) Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif,
- 2) Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin
- 3) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
- 4) Meningkatnya Kesempatan Kerja

c. Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik dengan sasaran :

Sasaran :

- 1) Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- 2) Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk;
- 3) Terwujudnya Peningkatan Akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan).

3. MISI III :

Tujuan :

a. Mewujudkan ketahanan pangan, dengan sasaran :

- 1) Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan;
- 2) Terwujudnya kualitas Konsumsi Pangan;
- 3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
- 4) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan

b. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, dengan sasaran :

- 1) Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup
- 2) Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

c. Mewujudkan Penguatan Investasi, dengan sasaran :

- 1) menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing
 - 2) mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil
- d. Peningkatan daya saing, dengan sasaran ;
- 1) Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing;
- e. Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran :
- 1) Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan;
 - 2) Peningkatan peran UMKM dan Koperasi;
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan;
- f. Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur, dengan sasaran :
- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi;

4. MISI IV :

Tujuan :

- a. Meningkatkan kerukunan umat beragama, dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan
 - b. Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama
- b. Mewujudkan pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal, dengan sasaran:
 - a. Terwujudnya peningkatan aktifitas sanggar seni dan budaya daerah
 - b. Terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah
 - c. Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

5. MISI V :

Tujuan :

- a. Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi

masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya bagi para penegak hukum

- b. Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

Tabel 5.3

Misi, Tujuan dan Sasarandan Indikator dalam Mencapai Visi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

**VISI :Terus membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat
Didukung Pemerintahan Yang Profesional**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,31	84	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	1	3 (level terkelola dan terukur)	PD Fungsi penunjang, PD Persandian
						Tingkat Kapabilitas APIP	1,5	3	PD fungsi Penunjang
						Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	PD Fungsi Penunjang
					2. Meningkatkan ketersediaan SDM yang sesuai dengan	Prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	100	100	PD fungsi penunjang

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
					kompetensinya				
					3. Meningkatkan peran pemerintah, masyarakat dan partaipolitik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	65	75	PD fungsi penunjang, PD urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah		65	75	1. Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Prosentase PD yang mempublikasikan data dan kinerja di internet	5	100	PD fungsi Penunjang
					2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya	Prosentase PD yg memanfaatkan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam	10	100	Seluruh PD

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
						interaksi pemerintah dan masyarakat;			
					3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Prosentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir.	2	10	PD fungsi penunjang, PD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pembangunan manusia	74,53	77,50	1. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran	1,47	1,42	PD Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
						Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru)	12,57	9,56	PD Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
						Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara (allmethods)	74,62	74,68	PD Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
						Rata-rata laju Pertumbuhan Penduduk	0,38	0,32	PD Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
						Rata-rata Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil	100	100	PD Kependudukan dan Catatan Sipil
					2. Terwujudnya pendidikan untuk semua	Angka Melek Huruf	99,00	99,50	PD Pendidikan, PD Statistik, PD Perpustakaan
						Angka Rata-Rata	8,50	9,00	PD Pendidikan, PD Statistik

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
						Lama Sekolah			
						Angka Putus sekolah SMA	0,15	0	PD Pendidikan, PD Statistik
						Angka Putus sekolah SMP	0,37	0,00	PD Pendidikan
					3. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Angka Usia Harapan Hidup	77,46	77,6	PD Statistik
						Angka Kematian Ibu	159,05	102	PD Kesehatan
						Angka Kematian Bayi	9,94	9,2	PD Kesehatan
						Angka Kematian Balita	11,92	9,92	PD Kesehatan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
	Mengurangi Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini			Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	Prosentase penanganan PMKS Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	2,02	10,08	PD Sosial PD Sosial,
					Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin	Prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial Prosentase Transmigran yang diberangkatkan	100 100	100 100	PD Sosial, PD fungsi penunjang PD Transmigrasi
					Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Prosentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	PD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
					Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,6	3,28	PD Tenaga Kerja
	Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Akses air minum layak, bebas kawasan kumuh (ha) dan akses sanitasi layak	76; 35; 68	100; 0; 100	Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0	33	PD Sosial, PD Perumahan Rakyat dan Permukiman
					Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk	Cakupan pelayanan air minum	75,46	100	PD Pekerjaan Umum dan penataan ruang, PD fungsi penunjang
					Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)	Cakupan Pelayanan sanitasi Cakupan Layanan Persampahan	72,38 20	100 40	PD Pekerjaan umum dan penataan ruang, PD fungsi penunjang PD Pekerjaan Umum dan penataan ruang, PD lingkungan hidup

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,7	93,7	Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan	Produktifitas - Padi Kw/ha	75,26	75,89	PD Pertanian;
						- Jagung Kw/ha	87,73	90,78	
						- Kedelai Kw/ha	22,17	23,25	
						Jumlah Produksi (ton)	374546	376452	PD Pertanian
						- Padi	22056	22215	
						- Jagung	3950	3996	
						- kedelai	6.637,52	6.918	PD Pertanian
						jumlah Produksi (ton) Daging Sapi			
					Terwujudnya kualitas Konsumsi Pangan	Konsumsi kalori (Kkal/Kap/Hari)	2.079,9	2.200	PD Pangan
						Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	17,1	18,2	PD Pangan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
					Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	Prosentase Kondisi Irigasi Baik	47	60	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PD Pertanian, PD Fungsi Penunjang
						Pembangunan Embung	11	12	PD Pertanian, PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47,75	50,75	Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,67	103,21	PD Pertanian
					Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Luas Lahan Kritis yang ditangani	30	100	PD Lingkungan hidup
				Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	93	92	PD Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
						rata-rata waktu respon tanggap bencana (mnt)	24	15	PD Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	Peningkatan Daya Saing	Prosentase Peningkatan Investasi	5,3	5,3	meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing	Realisasi investasi PMA/PMDN (Jutaan)	5.333.562	6.746.956	PD fungsi penunjang, PD Penanaman Modal
	Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi	Prosentase Pertumbuhan ekonomi	5,40	6,00	Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan	Kontribusi PDRB industri pengolahan, makanan dan minuman	38,87	39,34	PD Perindustrian
					Peningkatan peran UMKM dan koperasi	Prosentase peningkatan produksi UMKM	4,95	7,11	PD Koperasi dan UMKM
						Prosentase koperasi aktif	82	85	PD Koperasi dan UMKM
					Peningkatan sarana prasarana perdagangan	Revitalisasi pasar (%)	42,31	65,38	PD Perdagangan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
	Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur	Prosentase kualitas jalan baik	45,64	65	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	Prosentase Jembatan dalam kondisi baik Angka fatalitas korban kecelakaan (Kasus/Tahun)	94 80	97 140	PD Pekerjaan Umum dan penataan ruang PD Perhubungan
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Kasus konflik Antar Umat Beragama Jumlah aksi teror berlatar belakang agama	0	0	1. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Prosentase rehabilitasi sarana prasarana keagamaan Prosentase tempat ibadah yang dibina	0	30	PD Sosial PD Sosial

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
					2. Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengetahuan wawasan kebangsaan	1.100	6.600	PD yang menangani urusan Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial
	Mewujudkan Pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal				1. Tersedianya sarana seni dan budaya	Cakupan benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan			PD yang menangani urusan kebudayaan
					2. Terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah	<p>prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif</p> <p>Prosentase peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah</p> <p>Jumlah sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif</p>	5	5	<p>PD yang menangani urusan Kebudayaan</p> <p>PD yang menangani urusan Kebudayaan</p> <p>PD yang menangani urusan Kebudayaan</p>

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
					3. Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Rasio Atlit yang berprestasi Prosentase cabang olahraga yang berprestasi Prosentase Pemuda/orga nisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasiona/inter nasional	0	20	PD yang menangani urusan Pemuda dan Olahraga PD yang menangani urusan Pemuda dan Olahraga PD yang menangani urusan Pemuda dan Olahraga
5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram , Aman dan Dinamis	Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan				1. Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak	Jumlah kasus tindak pidana per tahun	450	400	PD yang menangani urusan Ketenteraman ketertiban dan Perlindungan Masyarakat PD yang menangani urusan Ketenteraman

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	Kondisi 2021	Perangkat Daerah
					hukum	Jumlah Kasus pelanggaran PERDA per tahun	367	200	ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
					2. Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat	Prosentase MOU pemerintah dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti	0	40	PD yang menangani fungsi penunjang

Tabel 5.4

Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Per Tahun dalam Mencapai Visi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2021
1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	1	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3	3
		Tingkat Kapabilitas APIP	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0	3
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya	Prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partaipolitik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	65	-	-	68	70	-	75	75

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2021
	Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Prosentase PD yang mempublikasikan data dan kinerja di internet	5	100	100	100	100	100	100	100
	Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya	Prosentase PD yg memanfaatkan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat;	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Prosentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir.	2	3	4	5	7	8	9	10
2.Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran	1,47	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42	1,42	1,42
		Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	12,57	12,06	11,56	11,06	10,56	10,06	9,56	9,56

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2021
		(unmet need dengan perhitungan baru)								
		Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara (allmethods)	74,62	74,63	74,64	74,65	74,66	74,67	74,68	74,68
		Rata-rata laju Pertumbuhan Penduduk	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
		Prosentase Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya pendidikan untuk semua	Angka Melek Huruf	99,00	99,00	99,25	99,25	99,50	99,50	99,50	99,50
		Angka Rata-Rata	8,50	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,0	9,00

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2021
		Lama Sekolah								
		Angka Putus sekolah SMA	0,15							0
		Angka Putus sekolah SMP	0,37	0,3	0,2	0,1	0	0	0	0,00
	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Angka Usia Harapan Hidup	77,46	77,5	77,52	77,54	77,56	77,58	77,60	77,6
		Angka Kematian Ibu	159,05	140	130	120	110	102	102	102
		Angka Kematian Bayi	9,94	9,8	9,6	9,4	9,2	9,2	9,2	9,2
		Angka Kematian Balita	11,92	11,5	11	10,5	10	9,92	9,92	9,92
	Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	Prosentase penanganan PMKS	2,02	2,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	10,08
		Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional								
	Terwujudnya pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin	Prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100
		Prosentase Transmigran yang	100	100	100	100	100	100	100	100

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2021
		diberangkatkan								
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Prosentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,28
	Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0	5	5	5	6	6	6	33
	Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk	Prosentase Cakupan pelayanan air minum	75,46	78	81	84	88	93	100	100

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2021	
	Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)	Cakupan Pelayanan sanitasi	72,38	77,90	83,43	88,95	94,48	100	100	100	
		Cakupan Layanan Persampahan	20	22	24	28	32	36	40	40	
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan	Produktifitas - Padi Kw/ha	75,26	75,36	75,46	75,56	75,66	75,76	75,89	75,89	
		- Jagung Kw/ha	87,73	87,13	88,53	88,93	90,13	90,43	90,78	90,78	
		- Kedelai Kw/ha	22,17	22,36	22,55	22,74	22,93	23,13	22,25	23,25	
		Jumlah Produksi (ton)									
		- Padi	374546	374863	375180	375497	375814	376131	376448	376452	
		- Jagung	22056	22082,5	22109	22135,5	22162	22188,5	22215	22215	
	- kedelai	3950	3957,6	3965,2	3972,8	3980,4	3988	3995,6	3996		
	jumlah Produksi (ton) Daging Sapi	6.637,52	6684,22	6730,92	6777,62	6824,32	6871,02	6917,72	6.918		
	Terwujudnya kualitas Konsumsi Pangan	Konsumsi kalori (Kkal/Kap/Hari)	2.079,9	2.099,92	2.119,94	2.139,96	2.159,98	2.180,00	2.200,00	2.200	
		Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	17,1	17,3	17,5	17,7	17,9	18,1	18,2	18,2	

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2021
	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	Prosentase Kondisi Irigasi Baik	47	50	52	54	56	58	60	60
		Pembangunan Embung	11	11	12	12	12	12	12	12
	Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,67	101	101	102	102	103	103	103,21
	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Prosentase Lahan Kritis yang ditangani	30	40	50	60	70	80	90	100
	Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	93	93	93	93	93	93	92	92
		rata-rata waktu respon tanggap bencana (mnt)	24	22,5	21	19,5	18	16,5	15	15
	meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing	Realisasi investasi PMA/PMDN (Jutaan)	5.333.562	5.569.128	5.804.693	6.040.259	6.275.825	6.511.390	6.746.956	6.746.956

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2021
	Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan	Kontribusi PDRB industri pengolahan, makanan dan minuman	38,87	38,95	39,03	39,11	39,18	39,26	39,34	39,34
	Peningkatan peran UMKM dan koperasi	Prosentase peningkatan produksi UMKM	4,95	5,31	5,67	6,03	6,39	6,75	7,11	7,11
		Prosentase koperasi aktif	82	82	82	83	83	84	85	85
	Peningkatan sarana prasarana perdagangan	Revitalisasi pasar (%)	42,31	46,15	50	53,83	57,67	61,51	65,35	65,38
	Meningkatkan sarana prasarana transportasi dan	Prosentase Jembatan dalam kondisi baik	94	94	95	96	97	97	97	97
		Angka fatalitas korban kecelakaan (Kasus/Tahun)	80	90	100	110	120	130	140	140

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2021
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Prosentase rehabilitasi sarana prasarana keagamaan Prosentase tempat ibadah yang dibina	0	30	0	0	0	0	0	30
	Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengetahuan wawasan kebangsaan	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	6.600
	Tersedianya sarana seni dan budaya	Cakupan benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan	193	193	193	193	193	193	193	193
	Terwujudnya peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah	prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif Prosentase peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah Jumlah sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif	30 5 0	35 5 0	40 5 0	45 5 0	50 5 0	55 5 0	60 5 0	60 5 0

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2021
	Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Rasio Atlit yang berprestasi	0	5	8	10	14	17	20	21
Prosentase cabang olahraga yang berprestasi		396	400	403	407	410	412	412	415	
Prosentase Pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional/internasional		45	45	46	47	48	49	50	50	
5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram , Aman dan Dinamis	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para penegak hukum	Jumlah kasus tindak pidana per tahun	450	450	450	425	425	400	400	400
		Jumlah Kasus pelanggaran PERDA per tahun	367	300	300	250	250	200	200	200

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi 2021
	Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat	Prosentase MOU pemerintah dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti	0	6	13	20	26	33	40	40

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna) agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misionis sebagai berikut :

Tabel 6.1

Misi, Tujuan dan Sasaran Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator dalam Mencapai Visi RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

**VISI :Terus membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat
Didukung Pemerintahan Yang Profesional**

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Lembaga minim struktur kaya fungsi	Peningkatan kualitas manajemen kinerja pembangunan
		Meningkatnya ketersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensinya	Peningkatan kualitas aparatur dan kesesuaian dengan bidang keahlian	Penguatan reformasi birokrasi
		Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politik yang kondusif	pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan daerah	pengambilan kebijakan publik Partisipatif
	Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah	Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi kinerja pembangunan	Menuju <i>e-government</i>

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya	mengaktifkan PD untuk melaksanakan keterbukaan informasi kinerja	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan
		Meningkatnyaperansert amasyarakatdanpeman gkukepentingandalam proses pembangunan	penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan secara terbuka	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.	Meningkatkan kualitas pelayan publik	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Peningkatan aksesibilitas dan peran aktif untuk pencapaian kualitas keluarga	Meningkatkan kesadaran akan kualitas keluarga berencana
		Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas yang berkarakter	mengoptimalkankemampuan pemerintah dalam pelayanan pendidikan
		Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Mengurangi Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	intervensi langsung kepada PMKS	meningkatkan kesadaran tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
		Terwujudnya pengembangan kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin	Melaksanakan intervensi langsung terhadap kebutuhan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin	Memberikan kesempatan untuk perubahan kondisi kesejahteraan
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan kapasitas perempuan	Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak
		Meningkatnya kesempatan kerja	Pemberian pelatihan yang cepat dan tersertifikasi	peningkatan kualitas Sumber Daya Menuasia sesuai kebutuhan pasar
	Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik	Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerataan pembangunan pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan
		Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk	Penyediaan air minum secara komunal	Peningkatan kuantitas air minum dengan akses umum

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)	Peningkatan pengelolaan sanitasi dan persampahan	Peningkatan tata kelola lingkungan pemukiman
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan	Terwujudnya Ketersediaan Pangan	Peningkatan produksi dan produktifitas	Pola Intensifikasi
		Terwujudnya kualitas Konsumsi pangan	menjaga ketersediaan bahanutama pangan yang terjangkau	Mengoptimalkan stabilitas ketahanan pangan daerah
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian	meningkatkan ketersediaan pada level kelompok tani	mempermudah akses pada sarana prasana penunjang pertanian
		Peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan	Intervensi langsung dalam proses di baik pra maupun pasca panen	Memberikan tingkat keuntungan yang optimal
	Pelestarian Sumber Daya Alam,	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Mengurangi penurunan kualitas lingkungan hidup	Mengembangkan tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana	Meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	Meningkatkan mitigasi dan tata kelola bencana
	Peningkatan Daya Saing	menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdayasaing	meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan informasi investasi	Memberikan kemudahan dan kepastian kepada investor dalam investasi
	Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi	Akselerasi Pertumbuhan Industri	Meningkatkan kinerja industri baik dalam kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan	peningkatan kualitas industri dan pengembangan industri kreatif
		Peningkatan peran UMKM dan Koperasi	Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan UMKM serta akses permodalan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM
		Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Peningkatan kualitas tradisional dengan standar tinggi	menciptakan akses yang berkualitas antara penjual dan pembeli
	Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur	meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	peningkatan kualitas dan kuantitas pada jalur utama dan penghubung strategis	meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan	meningkatkan kerukunan umat beragama	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	Peningkatan kualitas sarpras ibadah melalui stimulan keswadayaan masyarakat	Peningkatan kualitas sarpras ibadah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Bermasyarakat.		Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama	Komunikasi antar umat beragama dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan	Peningkatan kualitas hubungan antar umat beragama
	Mewujudkan Pelestarian seni dan budaya daerah sebagai identitas lokal	Tersedianya sarana seni dan budaya	Inventarisasi benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan	Meningkatkan kuantitas sarana seni dan budaya
		Terwujudnya peningkatan pertunjukan seni dan budaya daerah	Optimalisasi ruang publik untuk seni dan budaya; Pengembangan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur sosial dan budaya	Meningkatkan akses pelaksanaan pertunjukan seni dan budaya di masyarakat
		Terwujudnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas kelembagaan pemuda dalam rangka menuju kemandirian; Meningkatkan kualitas Sumber Daya dalam bidang keolahragaan	Meningkatkan kualitas pemuda dalam pelaksanaan pembangunan
5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tentram, Aman dan Dinamis	Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan khususnya para	Meningkatkan komunikasi diantara seluruh stakeholder; Mempercepat penyelesaian permasalahan dalam koridor kebijakan lokal dan hukum secara komprehensif	Menciptakan situasi yang kondusif diantara para penegak hukum dan masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pelaksanaan pembangunan	penegak hukum		
		Terwujudnya sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat	Optimalisasi kesepatakan-kesepatan yang ada dalam rangka penciptaan sinergitas dan peningkatan kualitas pembangunan daerah	meningkatkan peranserta akademisi, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Untuk mencapai tujuan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 -2021 perlu adanya kebijakan yang merupakan arah/tindakan yang diambil dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kebijakan tersebut lebih lanjut diimplementasikan melalui berbagai program pembangunan daerah yang merupakan instrumen kebijakan, yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Dalam rangka mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dibutuhkan strategi untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Di lain pihak, guna mendapatkan program prioritas yang melekat (*inherent*) di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum.

Kebijakan umum menjelaskan tentang (i) Strategi lebih spesifik, konkrit, operasional, dan fokus; (ii) Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan (iii) Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang inheren.

7.2. Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, yang dijabarkan pada setiap misi sebagai berikut:

1. MISI I : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**

Program Unggulan yang difokuskan dalam misi adalah sebagai berikut :

2. MISI II : **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**
3. MISI III : **Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah**
4. MISI IV : **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat**
5. MISI V : **Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis**

Dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Manusia Kabupaten Sukoharjo baik dari Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakatnya;
- b. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang semakin meningkat dan merata serta menurunkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo;
- c. Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo yang diikuti dengan menurunnya indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan;
- d. Menurunkan angka pengangguran dengan jalan meningkatkan investasi di Kabupaten Sukoharjo terutama yang berhubungan dengan Investasi Padat Karya;
- e. Menurunkan Rumah Tidak Layak Huni yang didasarkan kepada peningkatan kualitas rumah dan fasilitas sanitasi lingkungan;
- f. Peningkatan Kualitas Infrastruktur terutama kualitas jalan, dan irigasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- g. Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat yang diikuti dengan menahan laju inflasi daerah sehingga peningkatan PDRB memberikan pengaruh nyata kepada daya beli masyarakat.

Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Sukoharjo

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Transparan	Peningkatan kerangka regulasi daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase SK dan Peraturan Buoti menindaklanjuti peraturan yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang
			Jumlah Raperda yang diajukan	20	20	20	20	20	20	20	20	
	Penyusunan sistem manajemen organisasi yang efektif dan efisien	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase tersusunnya pedoman penataan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang, PD Persandian

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kualitas layanan perijinan	Program Pelayanan Perijinan Daerah	Rata-rata lama perijinan (hari)	7	7	3	3	3	2	2	2	PD Fungsi Penunjang, PD Penanaman Modal
	Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	seluruh PD
			Prosentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat pemerintah	100	100	100	100	100	100	100	100	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Prosentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kepada SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang
	Peningkatan ketercapaian sasaran pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Ketersediaan dokumen RKPD, RPJMD dan RPJPD serta LKPj	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang
	Peningkatan kualitas rencana pada setiap PD	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Tingkat pemahaman perencanaan aparatur perencana	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan ketercapaian sasaran pembangunan pd bidang Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Prosentase Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan bidang Ekonomi	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang
	Peningkatan ketercapaian sasaran pembangunan pd Bidang Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Prosentase Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan ketercapaian sasaran pembangunan pd Bidang Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Prosentase Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang
	Peningkatan ketersediaan data/informasi yang berkualitas untuk semua	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Tingkat ketersediaan data dalam penyusunan perencanaan	90	90	95	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang, PD Statistik,

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	menyediakan dokumen arsip untuk keperluan masa datang	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Prosentase arsip yang terpelihara	100	100	100	100	100	100	100	100	seluruh PD
	Menjaga dokumen arsip untuk keperluan masa datang	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Prosentase dokumen/ Arsip yang diselamatkan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD kearsipan
	Penguatan kualitas pengendalian internal	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Prosentase cakupan SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Penguatan kualitas pengendalian internal	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Prosentase kebijakan pengawan berjalan baik	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang
	menyediakan sistem pendaftaran tanah yang efektif	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Prosentase pemahaman masyarakat tentang sistem Pendaftaran	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Penunjang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Pengendalian penataan dan penggunaan aset daerah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Prosentase aset tanah yang tersertifikasi	74	74	76	80	82	84	85	85	PD Penunjang, PD Pertanahan
	Pengendalian kejelasan status aset pemerintah daerah	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Prosentase Terwujudnya penyelesaian konflik - konflik pertanahan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Penunjang, PD Pertanahan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kapasitas aparatur pd tingkat desa	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Prosentase aparatur pemerintah desa yg berkualitas dalam bidang manajemen pemerintah desa	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fasilitas Penunjang, PD Pemberdayaan masyarakat dan desa
	Peningkatan kualitas regulasi yang dihasilkan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Prosentase RAPERDA yang disetujui DPRD	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang
			Prosentase Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah	prosentase pemenuhan sarana pendukung pelayanan kedinasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang
			Prosentase pemenuhan pelayanan penatausahaan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan regulasi yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100	100	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Penyediaan aparatur yang berkualitas	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur	72	15	30	45	60	75	90	90	PD Fungsi Penunjang
			Prosentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi dan kompetensinya	50	16.67	33.34	50.01	66.68	83.35	100	100	
	Peningkatan kualitas aparatur pengawas	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase APIP yang memiliki kompetensi	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Penyediaan aparatur yang berkualitas	Program Pendidikan Kedinasan	Prosentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat perjenjangan struktural	50	16.67	33.34	50.01	66.68	83.35	100	100	PD Fungsi Penunjang
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik pembangunan	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan Partisipasi pemilih	65				65		75		PD Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik pembangunan	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan terwujudnya kondusifitas daerah	0	0	0	12	12	12	0	36	PD Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kualitas pelayanan di bidang komunikasi dan informasi	Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi dan Informasi	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang
	menuju e-gov	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpeliharanya fungsi website dan SMS gateway	100	100	100	100	100	100	100	100	Seluruh PD
	Tersedianya pelayanan informasi berkualitas	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah layanan informasi arsip/ dokumentasi	40	45	50	55	60	65	70	70	Seluruh PD
			Rasio SKPD/ Desa yang dibina	1.059028	24 : 205	26 : 205	28 : 205	30 : 205	32 : 205	34 : 205	34 : 205	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Tersedianya pelayanan informasi berkualitas	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Validitas data Informasi dan Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Fungsi Penunjang
	Tersedianya pelayanan informasi berkualitas	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Publikasi kebijakan dan hasil pembangunan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Peningkatan keterbukaan publik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Prosentase Web SKPD Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Komunikasi dan informasi
			Peningkatan Pemahaman Teknologi Informasi	80	80	80	80	90	95	100	100	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Pendataan data sarpras dan pengelolaan manajemen pendataan dan pelaksanaan PSB	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase Penanganan pengaduan masyarakat secara lebih intensif	100	100	100	100	100	100	100	100	PD fungsi penunjang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses partisipasi pembangunan	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	50	50	60	70	80	90	100	100	PD Pemberdayaan Masyarakat dan desa
	Peningkatan keluarga sejahtera berencana	Program Keluarga Berencana	Prosentase Meningkatnya peserta KB baru dan peserta KB aktif	80	85	85	85	85	90	95	95	PD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Peningkatan kualitas tenaga pendamping bina keluarga	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang berkualitas	167	167	167	167	167	167	167	167	PD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Penurunan jumlah remaja menikah muda	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Usia nikah pertama	19	19	19	20	20	21	21	21	PD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Peningkatan peserta KB mandiri	Program Pelayanan Kontrasepsi	Prosentase Pelayanan kontrasepsi bagi peserta KB	75	75	75	80	80	85	90	90	PD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Peningkatan peserta KB mandiri	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR Yang Mandiri	Prosentase peningkatan jumlah KB Mandiri	35	35	40	40	45	45	50	50	PD pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Pelayanan Administrasi kependudukan yang berkualitas	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk ber KTP	87.86	90	92	94	96	100	100	100	PD Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Prosentase penduduk ber akte kelahiran	61	63	66	69	72	75	78	80	
			Pengurusan KTP	3	3	3	3	3	3	3	3	
			Pengurusan Akta kelahiran	4	3	3	2	2	2	2	2	
			Pengurusan Akta Kematian	4	4	3	2	2	2	2	2	
	Peningkatan kualitas manajerial pelayanana pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah sekolah yang menerima BPP	16	16	16	16	16	16	16	96	PD Pendidikan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Penyediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas tinggi	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru SD/ MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	79.38	79.38	83.5	87.62	91.74	95.86	100	100	PD Pendidikan
			Prosentase Guru SMP/ MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	91.56	91.56	93.25	94.94	96.63	98.32	100	100	
	Terselenggaranya fasilitas membaca bagi masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Terpeliharanya sarana dan buku perpustakaan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pendidikan, PD Perpustakaan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan Kualitas pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka mengulang jenjang SMP/ MTs (AU SMP/ MTs/ Paket B	0.11	0.09	0.07	0.05	0.03	0.01	0	0	PD Pendidikan
Prosentase SMP/ MTs yang terakreditasi A			69.12	69.12	75.3	81.47	87.65	93.82	100	100		
Angka Kelulusan SMP/MTs			84.02	84.02	87.22	90.42	93.82	96.82	100	100		
APK SMP			106.9	106.9	105.52	104.14	102.76	101.38	100	100		

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Angka Melanjutkan Jenjang SMP/MTs/Paket B ke Jenjang SMA/MA/SMK/Paket C (AM SMP/MTs/Paket B)	112.41	112.41	109.93	107.45	104.97	102.49	100	100	
	Peningkatan Kualitas pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Pendidikan Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs	84.02	84.02	87.22	90.42	93.82	96.82	96.82	96.82	PD Pendidikan
	Penyediaan Pendidikan tingkat Menengah yang berkualitas	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pendidikan
			Angka Putus Sekolah (APS) SMA/ SMK/ MA	0.15	0.15	0.12	0.09	0.06	0.03	0	0	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	95	95	96	97	98	99	100	100	
	Penyediaan pendidikan karakter	Program Pendidikan Kesiswaan	Prosentase Pembinaan Kepramukaan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pendidikan
	Penyediaan Pendidikan berkualitas bagi anak dibawah 7 tahun	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	42.86	42.86	46.8	50.74	54.68	58.62	62.56	62.56	PD Pendidikan
	Penyediaan Pendidikan berkualitas bagi berkebutuhan khusus	Pendidikan Luar Biasa	APS anak berkebutuhan khusus	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0	0	Pd Pendidikan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Penyediaan Pendidikan di luar sekolah yang berkualitas	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A	97.99	97.99	98.39	98.89	99.39	99.89	100	100	PD Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B			82.16	82.16	85.72	89.28	92.84	96.4	100	100		
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA Paket C			56.46	56.46	59.26	62.06	64.86	67.66	70.46	70.46		
Angka Partisipasi Kasar jenjang SD/ MI/ Paket A			112.84	112.84	110.28	107.72	105.12	102.6	100	100		

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Angka Partisipasi Kasar jenjang SMP/ MTs/ Paket B	106.9	106.9	105.52	104.14	102.76	101.38	100	100	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I	Program Pengadaan/Perbaikan sarana & Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Prosentase Puskesmas/Pustu dan jaringannya yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	30	30	60	100	100	100	100	100	PD Kesehatan
	Penyediaan Kualitas layanan rujukan yang berstandar tinggi	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	BOR (Bed Occupancy Ratio	71.43	72.86	74.29	75.72	77.15	78.52	80	80	PD Kesehatan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Memberikan Kepastian pada masyarakat tentang kualitas obat dan makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Prosentase tempat pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat	20	20	21	22	23	24	25	25	PD Kesehatan
Cakupan pendampingan akreditasi faskes primer (faskes)			0	0	5	5	5	5	5	25		
Prosentase pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai			30	30	40	45	50	55	60	60		

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Puskesmas yang terakreditasi	30	30	60	100	100	100	100	100	PD Kesehatan
	Pemerataan layanan kesehatan bagi semua masyarakat	Program Pelayanan kesehatan masyarakat miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	11004	10890	10785	10677	10570	10464	10360	63746	PD Kesehatan
	Peningkatan kualitas Fasilitas Kesehatan TK I	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Puskesmas	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Kesehatan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Pembedayaan masyarakat untuk melaksanakan pola preventif dalam kesehatan diri	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase perilaku sehat (PHBS)	77	77	77.5	78	79	80	80	80	PD Kesehatan
	Menurunkan gangguan kesehatan akibat kurang gizi	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prosentase ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK)	15	15	14	13	12	11	10	10	PD Kesehatan
			Prosentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah	90	90	90	90	90	90	90	90	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Prosentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	30	30	32	33	34	35	35	35	
			Prosentase bayi baru lahir mendapat IMD	90	90	90	90	90	90	90	90	
			Prosentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	20	20	20	20	20	25	30	30	
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM	47	47	50	53	56	59	65	65	PD Kesehatan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Prosentase desa ODF	20	20	30	45	75	100	100	100	
			Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	73.8	73.8	73.9	74	74.1	74.2	74.3	74.3	
			Prosentase penduduk akses air minum	81.7	81.7	85	90	95	100	100	100	
	Menurunnya penderita penyakit TB dan DBD	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesakitan DBD <49/100.000 penduduk	<49 kasus /100.000 penduduk	<49 kasus /100.000 penduduk	<49 kasus /100.000 penduduk	<49 kasus /100.000 penduduk	<49 kasus /100.000 penduduk	<49 kasus /100.000 penduduk	<49 kasus /100.000 penduduk	<49 kasus /100.000 penduduk	PD Kesehatan
			Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif	>85 %	>85 %	>85 %	>85 %	>85 %	>85 %	>85 %	>85 %	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Angka penemuan pnemonia balita	10	10	12.5	15	20	25	30	30	
			Prosentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pelayanan terpadu (posbindu) PTM, Pemeriksaan Hipertensi, DM	25	25	30	35	40	45	50	50	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	85	85	85	85	85	85	85	85	
	Peningkatan kualitas kesehatan anak Balita	Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita	Prosentase kunjungan neonatal pertama (KN) Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Kesehatan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kualitas hidup Lansia	Program Peningkatan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	80	80	80	80	80	80	80	80	PD Kesehatan
	Memberikan Kepastian pada masyarakat tentang kualitas makanan	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Cakupan pemeriksaan sediaan makanan dan minuman siap saji produk restoran aman dikonsumsi oleh masyarakat	540 sampel	540 sampel	540 sampel	540 sampel	540 sampel	540 sampel	540 sampel	2700 sampel	PD Kesehatan
	Menurunkan angka kematian pada ibu melahirkan dan anak	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	Prosentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Kesehatan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Prosentase ibu hamil yang mendapatkan Antenatal minimal 4 kali (K4)	90	90	90	90	90	90	90	90	
	Peningkatan Kualitas layanan Rumah Sakit	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Proporsi RS PONEK	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Kesehatan
			Proporsi RS terakreditasi	0	100	100	100	100	100	100	100	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rs. Jiwa/ Rs. Paru- Paru										PD Kesehatan
	Peningkatan kemandirian PMKS dan peningkatan kualitas hidup fakir miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT, dan PMKS Lainnya	Prosentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Sosial

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Penyediaan fasilitas bagi orang terlantar dan Jompo	Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	Prosentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan kemandirian PMKS dan peningkatan kualitas hidup	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Prosentase Cakupan PMKS yang dibina	25	25	25	25	25	25	25	25	PD Sosial

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kemandirian PMKS dan peningkatan kualitas hidup	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial Mandiri/ orsosdes	0	1	2	2	2	2	2	2	PD Sosial

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kemandirian PMKS dan peningkatan kualitas hidup	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah) PMKS skala kab/ kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	136	150	150	150	150	150	150	150	PD Sosial

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kualitas hidup penyandang cacat dan trauma	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Prosentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	20	20	20	25	25	30	30	30	PD Sosial
	Meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat mandiri	Program Penanganan Penduduk Miskin	Prosentase Angka Kemiskinan	9,18	8,7	8,4	8,1	7,9	7,6	7,3	7,3	PD Sosial, PD Fungsi Penunjang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah	
	Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pemberdayaan masyarakat dan Desa	
			Posyandu aktif	100	100	100	100	1175	100	100	100		
			PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	100		100
			Prosentase Bintek Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	100	100	100	100	100	100	100	100		100
	Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengembangan kesejahteraan hidup	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Swadaya masyarakat terhadap total program pemberdayaan masyarakat	5	5	5	5	5	5	5	5	PD Pemberdayaan masyarakat dan Desa	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kapasitas kelembagaan tingkat desa dalam pengembangan perekonomian perdesaan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perdesaan	Meningkatnya peran serta Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pemberdayaan masyarakat dan Desa
	menyediakan pilihan daerah tujuan transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Transmigran diberangkatkan	4	15	15	15	15	15	15	90	PD Transmigrasi
	Penyediaan akses bagi seluruh penduduk	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Energi dan sumber daya mineral

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Pengembangan energi alternatif	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi	Energi dan Sumber Daya Mineral	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Energi dan sumber daya mineral
	Peningkatan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	Prosentase Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kualitas kerangka kebijakan regulasi dalam penanganan anak dan perempuan	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Prosentase kebijakan yang serasi.	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
	Peningkatan pelaksanaan pembangunan berspektif pengarusutamaan gender dan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah SKPD berspektif pengarusutamaan gender dan anak	40	40	40	45	45	45	49	49	PD Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan penanganan kasus yang dialami oleh Perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan KDRT pada perempuan dan anak (kasus)	27;38	27;38	24;35	21;34	17;31	14;28	13;24	10;20	PD Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Peningkatan peran serta dan kontribusi perempuan dalam proses pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Prosentase keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan	15	15	15	20	20	25	25	30	PD Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Peningkatan kesadaran kalangan remaja terhadap kesehatan reproduksi	Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatnya jumlah kelompok PIK remaja	35	35	35	40	40	45	45	50	PD Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Penyediaan sarana prasarana edukatif peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU	Integrasi operasional dan pelayanan BKB-POSYANDU-PADU	24	24	24	24	24	24	24	144	PD Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Penyediaan informasi tumbuh kembang anak	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Prosentase anak yang terpantau tumbuh kembangnya	90	90	90	90	90	95	95	100	PD Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Penyediaan informasi kesehatan ibu dan anak	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	Menurunnya jumlah angka kematian ibu dan balita (per 1000)	120	120	120	115	115	113	110	109	PD Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Cakupan PKK aktif kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Peningkatan kualitas hidup anak terlantar	Program Pembinaan Anak Terlantar	Cakupan anak terlantar yang dibina	20	25	25	30	30	40	50	50	PD Sosial, PD Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	112	320	320	320	320	320	320	1920	PD Tenaga Kerja
	Meningkatkan prosentase mendapatkan kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	50	50	50	60	60	70	70	70	PD Tenaga Kerja
	Memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun yang terselesaikan	9	20	20	20	20	20	20	60	PD Tenaga Kerja

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan bidang tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Ketersediaan Dokumen Ketenagakerjaan	100	100	100	100	100	100	100	6	PD Tenaga Kerja
	Peningkatan kualitas perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Perumahan yang telah standar	35	35	35	35	35	35	35	35	PD Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman, PD Sosial
	Intervensi terhadap RTLH untuk meningkat kualitasnya	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Jumlah Rumah yang telah memenuhi syarat layak	500	500	2000	2000	2000	2000	2000	10500	PD Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Penyediaan air minum secara komunal	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman, PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyediaan air minum berkualitas	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Prosentase rumah tangga pengguna air bersih	86	87	87	88	88	89	90	90	PD Pekerjaan umum dan penataan ruang
	Penyediaan air minum berkualitas	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Tingkat ketersediaan data penyediaan air minum drinase dan sanitasi	100	100	100	100	100	100	100	100	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kualitas sanitasi di lingkungan perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio permukiman layak huni	1	1	1	1	1	1	0	5	PD Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman, PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan layanan persampahan perkotaan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase timbulan sampah yang diproses sampai dengan TPA	20	20	25	30	35	35	40	40	PD Lingkungan Hidup, PD Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan pengolahan limbah domestik	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 5 tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Daerah dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah	Peningkatan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan cadangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Prosentase Ketersediaan pangan utama	250	190	192	193	196	198	200	200	PD Pertanian, PD Pangan
	Peningkatan produksi dengan jalan pemberdayaan kelompok	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Prosentase Cakupan bina kelompok perikanan	65	70	76	82	88	94	100	100	PD Kelautan dan perikanan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Produksi budidaya ikan (ton)	9904	10338	10793	11269	11769	12293	12843	12843	
	Peningkatan produksi dengan pola intensifikasi	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi tebu (ton)	4413,60	4400	4415	4415	4420	4420	4425	4425	PD Pertanian
Produksi kelapa (ton)			587.9	588	590	590	592	593	595	595		
Produksi lada (ton)			0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.28	0.3	0.3		
Produksi mete (ton)			63	63	64	65	65	68	71	71		
	Peningkatan kualitas kinerja Penyuluh	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Meningkatnya rata-rata nilai evaluasi kinerja penyuluh	80	80.5	81	81.5	82	82.5	83	83	PD Pertanian
	Peningkatan produksi daging sapi dan telur	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi hasil peternakan (Ton daging)	5253.75	6.634.00	6.688.45	6.751.36	6.833.72	6899.59	6.965.00	6.965.00	PD Pertanian

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Produksi hasil peternakan (ton telur)	8.331.70	8.415.02	8.499.17	8.584.16	8.670.00	8.756.70	8.843.00	8.843.00	
	Peningkatan nilai tambah dari pelaksanaan peternak	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk (kelompok)	0	2	4	6	8	10	12	12	PD Pertanian
			Pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak (kelompok)	0	0	2	4	6	8	10	10	
	Peningkatan kualitas kesehatan ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya status kesehatan ternak besar,kecil, unggas	25.85	28.37	28.76	29.14	29.5	29.89	30.28	30.28	PD Pertanian

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan ketersediaan air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	45	47	48	50	52	54	55	55	PD Pekerjaan umum dan penataan ruang
			Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	70	70	70	70	70	70	70	70	PD Pekerjaan umum dan penataan ruang
	Penyediaan bahan makan utama sehat dan terjangkau	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	85.71	85.76	85.81	85.86	85.91	85.96	86	86	PD Pangan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan pendapatan petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Koordinasi peningkatan peran kelembagaan P3A	300	300	300	300	300	300	300	1500	PD Pertanian, PD Pangan
			Cakupan bina kelompok petani	81.39	84.65	88.4	92.15	95.83	97.92	100	100	
			Peningkatan pendapatan petani	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Peningkatan pembelian hasil produksi petani dan pengembangan wilayah pemasaran	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Meningkatnya jumlah kesepakatan dagang dari pemasaran produk pertanian	0	1	1	2	2	2	2	10	PD Pertanian, PD Pangan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Prosentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.035	0.035	
	Peningkatan kerangka regulasi dalam pengendalian tata ruang dan wilayah	Program Perencanaan Tata Ruang	Tingkat ketersediaan dokumen tata ruang	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PD Fungsi Penunjang
	Pelaksanaan pertambangan dengan memperhatikan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Meningkatkan kesesuaian prosentase Ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan	Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	1	1	1	1	1	1	0	5	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PD Fungsi Penunjang
	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan ketentuan yang ada	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Ketaatan terhadap RTRW	50	50	100	100	100	100	50	500	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PD Fungsi Penunjang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Meningkatkan pengawasan sumber daya mineral	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase pengawasan pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PD Lingkungan Hidup
			Status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan ke publik	0	8264	4708	5582	3876	4649	4742	31821	
	Meningkatkan kesesuaian prosentase Ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (lokasi)	11	11	11	11	11	11	11	11	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PD Fungsi Penunjang, PD Lingkungan Hidup

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	
	Peningkatan konservasi sumberdaya air	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase Terlaksananya pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air	0	16.67	33.34	50.01	66.68	83.35	100	100	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Pengendalian penurunan kualitas lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	0	100	100	100	100	100	100	100	PD Lingkungan Hidup

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Prosentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	0	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan pelaksanaan penilaian dokumen amdal perusahaan	0	100	100	100	100	100	100	100	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kualitas keterbukaan publik tentang kinerja Penanganan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase ketersediaan data dan informasi untuk status lingkungan hidup daerah	0	75	80	85	90	95	100	100	PD Lingkungan Hidup

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Pengendalian penurunan kualitas lingkungan	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Prosentase usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	0	100	100	100	100	100	100	100	PD Lingkungan Hidup
	Penyediaan areal makam yang layak	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya pengelolaan pemakaman se-Kabupaten Sukoharjo	264	264	264	264	264	264	264	264	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Pengendalian limpasan air	Program Pengendalian Banjir	Panjang saluran yang tertangani	5	0	1	1	5	4	4	15	PD Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	Peningkatan kapasitas pencegahan bahaya	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten sukoharjo	37.77	37.77	37.77	75.54	100	100	100	100	PD Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar	36.36	36.36	36.36	60	100	100	100	100	
			Prosentase penyediaan APAR dari pemilik usaha yang memadai	52.63	52.63	60	65	80	85	100	100	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional penanganan bencana	0.64	1.07	1.28	1.5	1.7	1.9	2	2	
			Prosentase aparatur yang mengikuti pelatihan	21.8	21.8	25	28	31.25	34.37	37	37	
	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kebencanaan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah desa tangguh bencana	7	2	2	2	2	2	2	19	PD Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
			Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	0	0	1	1	1	1	1	5	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penanggulangan bencana	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	10200	
			Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana	900	1500	1500	1500	1500	1500	1500	9900	
	Meningkatkan investor baru	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Proporsi Lol dari jumlah potensi yang ditawarkan	3	3	4	4	4	4	4	4	PD Penanaman Modal
	Peningkatan iklim investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Investasi	0	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	PD Penanaman Modal

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Meningkatkan investor baru	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Peningkatan Jumlah Investor	7	8	9	10	11	12	13	13	PD Penanaman Modal
	Peningkatan kualitas kinerja IKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas IKM									PD Industri
	Peningkatan kinerja produksi dengan penggunaan teknologi	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya penggunaan iptek untuk sistem produksi									PD Industri
	Peningkatan pemasaran hasil produksi industri	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Keikutsertaan IKM dalam pameran									PD Industri

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan kinerja produksi dengan penggunaan teknologi	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya nilai penjualan produk IKM									PD Industri
	Peningkatan arus wisatawan ke obyek wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	56120	78500	79000	80000	81000	81775	82500	482775	PD Pariwisata
			Prosentase obyek wisata yang dipromosikan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Pariwisata
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	8.16	11.41	11.48	11.63	11.77	11.89	11.99	12	PD Pariwisata

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	1	1	1	1	1	1	1	1	PD Pariwisata
	Peningkatan obyek wisata baru	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata unggulan	5	5	6	6	7	7	8	8	PD Pariwisata
			Jumlah objek/destinasi yang dibangun /dikembangkan	0	0	1	0	1	0	1	3	PD Pariwisata
	Peningkatan perekonomian dari sektor wisata	Program Pengembangan Kemitraan	SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar kompetensi	367	367	370	375	380	390	400	400	PD Pariwisata

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi/memenuhi standar usaha pariwisata	367	367	370	375	380	390	400	400	PD Pariwisata
			Jumlah Pokdarwis yang aktif	6	6	7	8	9	10	0	10	PD Pariwisata
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Teknis Bidang KUMKM	250	300	350	350	400	425	450	450	PD Koperasi, dan UKM

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi aktif	82	82.5	82.7	83	83.5	84	85	85	PD Koperasi, dan UKM
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	UMKM yang dibina	125	150	200	250	275	300	350	400	PD Koperasi, dan UKM
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi aktif	82	82.5	82.7	83	83.5	84	85	85	
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi, dan UKM

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Mengurangi biaya distribusi	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terwujudnya kelancaran arus distribusi barang dan jasa									PD Perdagangan
	memberikan akses yang berkualitas untuk aktivitas perdagangan	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Terwujudnya kelancaran arus distribusi barang	5	5	5	5	5	5	5	30	PD Perdagangan
	memberikan jaminan kualitas terhadap produk	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya kualitas barang yang beredar sesuai dengan SNI	12	12	12	12	12	12	12	72	PD Perdagangan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	memperluas wilayah pemasaran	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor	5	1	1	1	1	1	1	6	PD Perdagangan
	meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang dijual	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatnya kualitas dagangan pedagang kaki lima	10	10	20	30	40	50	60	60	PD Perdagangan
	Peningkatan akses transportasi	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang dibangun (km)	1.04	2	2	13	13	2	2	34	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Panjang Jembatan yang dibangun (km)	90	0	18	18	18	18	18	90	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Terbangunnya Jalan Lingkar Barat (km)	0	0	0	13	13	0	0	26	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengendalian limpasan air di jalan	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase/ gorong-gorong	2500	500	1500	1500	1500	1500	1500	8000	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Cakupan Drainase	70	70	75	75	80	80	85	85	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan akses transportasi	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dilalui roda 4	160.96	15	20	15	20	20	20	110	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik	70	70	75	75	80	80	85	85	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengendalian limpasan air	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten	45	47	48	50	52	54	55	55	PD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	90	91	91	92	92	93	95	95	PD Perhubungan
	Peningkatan sarana prasarana perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan meningkat	100	20	20	20	20	20	20	100	PD Perhubungan
	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase Kelayakan Sarana Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Perhubungan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Penyediaan layanan transportasi publik yang berkualitas	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kelayakan angkutan umum	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Perhubungan
	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Penurunan Jumlah kasus kecelakaan	10	3	3	3	3	3	3	3	PD Perhubungan
	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase Kendaraan laik jalan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Perhubungan
4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan ibadah umat beragama	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Terlaksananya Pembangunan Masjid Agung Kab. Sukoharjo	0	0	1	1	0	0	0	1	PD Sosial,

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Pelayanan Pemberangkatan Ibadah Haji Kabupaten Sukoharjo dan Kegiatan Pembinaan Keagamaan bagi PNS dan Umum	100	100	100	100	100	100	100		PD Sosial,

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan pemahaman antar pemangku kepentingan	Program Peningkatan Komunikasi Dengan Lingkungan Masyarakat	Terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan lembaga masyarakat (lembaga)	125	125	125	125	125	125	125	125	PD Komunikasi dan informatika, PD Sosial, Ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Pemahaman wawasan Kebangsaan sebagai dasar perilaku kehidupan berbangsa	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pemahaman nilai-nilai luhur buday bangsa	1620	1140	1140	1140	1140	1140	1140	7440	PD Ketenteraman, Ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Prosentase cakupan Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pemahaman wawasan kebangsaan sebagai dasar perilaku kehidupan berbangsa	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan dan cinta tanah air bagi masyarakat	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	8628	PD Ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	Peningkatan kualitas kekayaan budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Kebudayaan

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Pelestarian nilai nilai budaya di masyarakat	Program Pengembangan Nilai Budaya	Gelar Seni Adat Tradisi	9	9	9	9	9	9	9	9	PD Kebudayaan
			Prosentase Organisasi Penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terbina	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Pelestarian nilai nilai budaya di masyarakat	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Misi Kesenian	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Kebudayaan
			Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	2	3	3	3	3	3	17	
			Jumlah grup kesenian	425	425	425	425	425	425	425	425	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan prestasi olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Prosentase cabang olahraga berprestasi	0.66	0.66	0.69	0.72	0.75	0.78	0.81	4.45	PD Kepemudaan dan Olahraga
			Prosentase prestasi olahraga	50	10	10	10	10	10	10	60	
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	21	21	21	21	21	21	21	21	PD Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	1	0	1	0	1	0	1	3	PD Kepemudaan dan Olahraga
	Jumlah dokumen data potensi kepemudaan		1	0	1	0	1	0	1	3	PD Kepemudaan dan Olahraga	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Prosentase cakupan Rehabilitasi Lapangan Olahraga tingkat Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	PD Kepemudaan dan Olahraga
			Pembangunan Sarana Olahraga	0	0	0	0	0	1	0	1	PD Kepemudaan dan Olahraga
5. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Tenram , Aman dan	Peningkatan keamanan lingkungan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	71	70	70	70	70	70	70	70	PD Ketenteraman, Ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
Dinamis			Prosentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	98.3	95	95	95	95	95	95	95	
	Peningkatan keamanan lingkungan	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1.31	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	PD Ketenteraman, Ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan lingkungan	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ kelurahan	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6	PD Ketenteraman, Ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan lingkungan	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	sosialisasi bahaya narkoba dan pekat lainnya	100	100	100	100	100	100	100	1440	PD Ketenteraman, Ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
			Prosentase penyelesain pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di kapupataen	98.3	90	90	90	90	90	90	90	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
	Peningkatan disiplin masyarakat	Program Peningkatan Ketertiban Penyelenggaraan Pemerintahan	Menurunnya jumlah pelanggaran Perda	200	200	190	180	170	160	150	150	PD Ketenteraman, Ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, PD Pemberdayaan masyarakat dan Desa
	Peningkatan komunikasi antar lembaga	Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga	Terjalinya hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah, Ormas dan LSM	420	420	420	420	420	420	420	2520	PD Fungsi Penunjang

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan terwujudnya kondusifitas daerah	0	0	0	12	12	12	0	36	
		Program Pengembangan Sumber Daya Iptek	Terciptanya produktifitas dan inovasi masyarakat									PD Fungsi Penunjang
		Program Kerjasama Pembangunan	Kerjasama Pembangunan antar daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	

Misi	Kebijakan Umum	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan	Terwujudnya pembangunan yang didasarkan pada pengembangan IPTEK									PD Fungsi Penunjang

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 terimplementasikan melalui berbagai jenis program unggulan dan program urusan pemerintah daerah yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021. Sejumlah program tersebut merupakan program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), termasuk dalam menjabaarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukoharjo, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati sesuai dengan Janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah, serta program pembangunan daerah dalam rangka kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Program-program untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang terdiri dari 186 program yang ada pada dokumen RPJMD, meliputi:

Program Prioritas Kabupaten Sukoharjo dijabarkan ke dalam tabel berikut:

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Sukoharjo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, dalam memberikan pelayanan publik yang mendasarkan prinsip – prinsip <i>good Governance</i> .	Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mendukung pemenuhan pelayanan prima	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah
			Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
			Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga
			Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
			Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi dan Informasi
			Program Pengembangan Data/Informasi
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
		Peningkatan Kapasitas kelembagaan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru
	Terwujudnyapelayanan publik yang prima	Peningkatan kinerja pelayanan kelembagaan pemerintah	Program Pelayanan Perijinan Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan
	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
			Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan
			Program Pengadaan Lahan Pemerintah
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			Program Pendidikan Kedinasan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
			Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatan Pembangunan	Terwujudnya Peningkatan	Penyelenggaraan pelayanan pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
Manusia dalam rangka untuk peningkatan Index pembangunan manusia atau kulaitas hidup manusia dan pembangunan masyarakat.	Pelayanan pendidikan yang berkualitas	yang berkualitas dan terjangkau	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Program Pendidikan Menengah
			Program Pendidikan Kesiswaan
			Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Pendidikan Non Formal
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Program Pengadaan/Perbaikan sarana & Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
			Program Peningkatan Pelayanan BLUD
			Program Pengawasan Obat dan Makanan
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
Program Pengembangan Lingkungan Sehat			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
			Program Peningkatan Kesehatan Lansia
			Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rs. Jiwa/ Rs. Paru- Paru
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatn Kualitas Anak dan Perempuan
			Program Keluarga Berencana
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Pelayanan Kontrasepsi
			Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR Yang Mandiri
			Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
			Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR
			Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
			Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
			Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU
			Program Penanganan Penduduk Miskin
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
			Program Transmigrasi Regional
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT, dan PMKS Lainnya
			Program Pembinaan Anak Terlantar
			Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
			Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
		Pengembangan Permukiman yang berkualitas	Program Pengembangan Perumahan
			Program Lingkungan Sehat Perumahan
			Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
			Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Penguatan Inovasi, dalam rangka mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan daerah	Terwujudnya kawasan ekonomi baru serta mendorong peningkatan investasi	Penguatan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Perencanaan Tenaga Kerja
	Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	Revitalisasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat	Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Terwujudnya peningkatan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
	Program Revitalisasi Pasar tingkat Kecamatan		
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan		
		Menumbuhkan industri Kreatif	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Menumbuhkan Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan hidup	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
			Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
			Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
			Program Perencanaan Tata Ruang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Program Pemanfaatan Ruang
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
			Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
			Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
			Program Pengendalian Banjir
			Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	Terwujudnya Kedaulatan Pangan di Masyarakat dan Komoditi unggulan	Menumbuhkan Ketahanan Pangan di Masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat.	1. Terwujudnya peningkatan prasarana keagamaan dan aktivitas Keagamaan di Masyarakat	Revitalisasi sarana dan prasarana keagamaan dan aktivitas pendidikan	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
	2. Terwujudnya Kelestarian Kesenian dan Budaya Daerah sebagai Identitas Daerah	Meningkatkan kecintaan terhadap Seni dan Budaya Daerah	Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kemitraan Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
			Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
			Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
		Terciptanya Ketertiban dan Ketenteraman	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
			Program Peningkatan Ketertiban Penyelenggaraan Pemerintahan
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
			Program Pendidikan Politik Masyarakat
			Program Peningkatan Komunikasi Dengan Lingkungan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Prioritas
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	Terwujudnya Sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, kademisi, dunia usaha dan masyarakat.	Membangun kemitraan dengan duniausaha, LSM dan akademika	Program Pengembangan Sumber Daya Iptek Program Penelitian dan Pengembangan

Tabel 8.2

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016-2021

No / Kode	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (OUTCOME)		Data Capaian Tahun 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PD Penanggung Jawab	
					TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG																			
1	Belanja Pegawai					1.024.665.361.000		1.070.500.000.000		1.113.320.000.000		1.180.119.200.000		1.250.926.352.000		1.325.981.933.000		6.965.512.846.000		
2	Belanja Bunga					2.780.000		-		-		-		-		-		2.780.000		
3	Belanja Hibah					20.865.145.000		20.500.000.000		21.500.000.000		21.250.000.000		21.250.000.000		21.250.000.000		126.615.145.000		
4	Belanja Bantuan Sosial					20.057.000.000		21.000.000.000		19.500.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		120.557.000.000		
5	Belanja Bagi Hasil					8.134.802.000		8.500.000.000		9.000.000.000		9.150.000.000		9.150.000.000		9.150.000.000		53.084.802.000		
6	Belanja Bantuan Keuangan					211.202.146.000		210.758.646.000		211.750.646.000		210.000.000.000		210.000.000.000		210.000.000.000		1.263.711.438.000		
7	Belanja Tidak Terduga					2.000.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000		14.000.000.000		
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG					1.286.927.234.000		1.333.758.646.000		1.377.820.646.000		1.442.769.200.000		1.513.576.352.000		1.588.631.933.000		8.543.484.011.000		
B	BELANJA LANGSUNG																			
1	Wajib																			
1.1	Pelayanan Dasar																			
1.1.1	Pendidikan					52.869.068.000		53.033.968.000		55.130.034.000		55.565.806.000		48.161.407.000		61.528.249.000		326.288.532.000		
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	42,86	42,86	587.605.000	46,8	590.000.000	50,74	600.000.000	54,68	620.000.000	58,62	700.000.000	62,56	750.000.000	62,56	3.847.605.000	Dinas Pendidikan	
16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,07	0,07	11.361.407.000	0,06	11.365.000.000	0,27	11.500.000.000	0,03	11.600.000.000	0,01	0	12.000.000.000	0	57.826.407.000	Dinas Pendidikan		
		Angka mengulang jenjang SMP/MTs (AU SMP/MTs/ Paket B	%	0,11	0,09		0,07		0,05		0,03		0,01	0		0	0	Dinas Pendidikan		
		Persentase SMP/MTs yang terakreditasi A	%	69,12	69,12		75,3		81,47		87,65		93,82	100,00		100	100	Dinas Pendidikan		
		Angka Kelulusan SMP/MTs	%	84,02	84,02		87,22		90,42		93,82		96,82	100,00		100	100	Dinas Pendidikan		
		APK SMP	%	106,9	106,9		105,52		104,14		102,76		101,38	100,00		100	100	Dinas Pendidikan		
		Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun (APS 13-15 tahun)	%	112,8														Dinas Pendidikan		
		Pemerintah kabupaten/ kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100	100		100		100		100		100	100		100	100	Dinas Pendidikan		
		Satuan pendidikan SMP/MTs menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas VII-IX : 27 jam per minggu	%	100	100		100		100		100		100	100		100	100	Dinas Pendidikan		
		Angka partisipasi murni (APM) Paket B	%	82,16	82,16		85,72		89,28		92,84		96,40	100				Dinas Pendidikan		
		Angka Melanjutkan Jenjang SMP/MTs/Paket B ke Jenjang SMA/MA/SMK/Paket C (AM SMP/MTs/Paket B)	%	112,41	112,41		109,93		107,45		104,97		102,49	100		100	100	Dinas Pendidikan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100	100	12.613.290.000	100	12.615.000.000	100	13.623.801.000	100	13.795.106.000	100	17.570.707.000	100	18.347.156.000	100	88.565.060.000	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0	0		0		0		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	95	95		96		97		98		99		100		100		Dinas Pendidikan
18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,99	97,99	374.190.000	98,39	375.000.000	98,89	390.000.000	99,39	400.000.000	99,89	425.000.000	100	450.000.000	100	2.414.190.000	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	82,16	82,16		85,72		89,28		92,84		96,40		100		100		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Paket C	%	56,46	56,46		59,26		62,06		64,86		67,66		70,46		70,46		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar jenjang SD/MI/Paket A	%	112,84	112,84		110,28		107,72		105,12		102,60		100		100		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar jenjang SMP/MTs/ Paket B	%	106,90	106,90		105,52		104,14		102,76		101,38		100		100		Dinas Pendidikan
19	Program Pendidikan Luar Biasa	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,04	0,04	93.282.000	0,04	95.000.000	0,03	680.533.000	0,02	110.000.000	0,01	120.000.000	0	133.575.000	0	1.232.390.000	Dinas Pendidikan
20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	79,38	79,38	17.460.814.000	83,50	17.465.000.000	87,62	17.600.000.000	91,74	17.900.000.000	95,86	18.000.000.000	100	18.200.000.000	100	106.625.814.000	Dinas Pendidikan
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91,56	91,56		93,25		94,94		96,63		98,32		100		100		Dinas Pendidikan
		Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,21	95,21		96,17		97,13		98,09		99,05		100		100		Dinas Pendidikan
22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah sekolah yang menerima BPP	sekolah	16	16	6.346.722.000	16	6.350.000.000	16	6.500.000.000	16	6.700.000.000	16	6.800.000.000	16	7.100.492.000	96	39.797.214.000	Dinas Pendidikan
23	Program Pendidikan Kesiswaan	Pembinaan Kepramukaan	%	100	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	31.326.000	100	131.326.000	Dinas Pendidikan
24	Program Pendidikan Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	84	84	4.006.058.000	87,22	4.148.268.000	90,42	4.200.000.000	93,82	4.400.000.000	96,82	4.500.000.000	96,82	4.500.000.000	5	25.754.326.000	Dinas Pendidikan
21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Operasional Perpustakaan Kelurahan bagi Umum	bulan	12	12	15.700.000	12	15.700.000	12	15.700.000	12	15.700.000	15700000	15.700.000	12	15.700.000	60	94.200.000	Kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo
2	Kesehatan					177.891.240.000		171.176.801.000		172.232.435.000		173.282.167.000		174.345.321.000		175.422.927.000		1.044.350.891.000	
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Puskesmas	%	100	100	5.586.140.000	100	5.600.000.000	100	5.712.000.000	100	5.826.240.000	100	5.942.765.000	100	6.061.620.000	100	34.728.765.000	Dinas Kesehatan
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Puskesmas yang terakreditasi	%	30	30	36.402.951.000	60	38.566.801.000	100	38.952.469.000	100	39.341.994.000	100	39.735.414.000	100	40.132.768.000	100	233.132.397.000	Dinas Kesehatan
		Prosentase pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai	%	30	30		40		45		50		55		60		60		Dinas Kesehatan
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Prosentase tempat pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat	%	20	20	275.000.000	21	300.000.000	22	306.000.000	23	312.120.000	24	318.362.000	25	324.730.000	25	1.836.212.000	Dinas Kesehatan
		Cakupan pendampingan akreditasi faskes primer	faskes	0 faskes	0 faskes		5 faskes		5 faskes		5 faskes		5 faskes		5 faskes		25 faskes		Dinas Kesehatan
19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase perilaku sehat (PHBS)	%	77	77	545.000.000	77,5	550.000.000	78	555.500.000	79	561.055.000	80	566.666.000	80	572.332.000	80	3.350.553.000	Dinas Kesehatan
		Prosentase kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	%	77	77		77,5		78		79		80		80		80		Dinas Kesehatan
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prosentase ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK)	%	15	15	338.000.000	14	350.000.000	13	353.500.000	12	357.035.000	11	360.605.000	10	364.211.000	10	2.123.351.000	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Prosentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah	%	90	90		90		90		90		90		90		90		Dinas Kesehatan
		Prosentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	30	30		32		33		34		35		35		35		Dinas Kesehatan
		Prosentase bayi baru lahir mendapat IMD	%	90	90		90		90		90		90		90		90		Dinas Kesehatan
		Prosentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	%	20	20		20		20		20		25		30		30		Dinas Kesehatan
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM	%	47	47	305.000.000	50	310.000.000	40	313.100.000	56	316.231.000	59	319.393.000	65	322.587.000	65	1.886.311.000	Dinas Kesehatan
		Prosentase desa ODF	%	20	20		30		45		75		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	%	73,80	73,80		73,90		74,00		74,10		74,20		74,30		74,30		Dinas Kesehatan
		Prosentase penduduk akses air minum	%	81,7	81,7		85		90		95		100		100		100		Dinas Kesehatan
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesakitan DBD <49/100.000 penduduk	/100.000 penduduk	<49 kasus /100.000 penduduk	<49 kasus /100.000 penduduk	1.223.000.000	<49 kasus /100.000 penduduk	1.225.000.000	<49 kasus /100.000 penduduk	1.237.250.000	<49 kasus /100.000 penduduk	1.249.623.000	<49 kasus /100.000 penduduk	1.262.119.000	<49 kasus /100.000 penduduk	1.274.740.000	<49 kasus /100.000 penduduk	7.471.732.000	Dinas Kesehatan
		Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif	%	>85 %	>85 %		>85 %		>85 %		>85 %		>85 %		>85 %		>85 %		Dinas Kesehatan
		Angka penemuan pneumonia balita	%	10	10		12,5		15		20		25		30		30		Dinas Kesehatan
		Prosentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan pos pelayanan terpadu (posbindu) PTM, Pemeriksaan Hipertensi, DM	%	25	25		30		35		40		45		50		50		Dinas Kesehatan
		Insedan Rate /Angka Kesalitan DBD <49/100.000 pendd, Angka kematian DBD < 1,5 %, Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (success rate) >85 % target100 %, Kasus HIV ditemukan diobati 100%, Angka penemuan pneumonia balita mencapai 30 %, Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu 50%	per 100.000 penduduk	<49	<49		<49		<49		<49		<49		<49		<49		Dinas Kesehatan
		Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	orang	31	33		36		39		42		45		48		48		RSUD Kab. Sukoharjo
		Cakupan pemeriksaan Terduga TB di Puskesmas & RSUD	orang	402	450		500		550		600		650		700		700		RSUD Kab. Sukoharjo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate)	%	85	85		85		85		85		85		85		85		RSUD Kab. Sukoharjo
23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Proporsi RS PONEK	%	100	100		100	300.000.000	100	323.991.000	100	328.064.000	100	331.345.000	100	334.658.000	1	1618058000	Rumah Sakit Umum Daerah
		Proporsi RS terakreditasi	%	0	100		100		100		100		100		100		100		
24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	orang	11004	10890	5.000.000.000	10785	5.000.000.000	10677	5.000.000.000	10570	5.000.000.000	10464	5.000.000.000	10360	5.000.000.000	5000	30.000.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
25	Program Pengadaan, Peningkatan/Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	Presentase Puskesmas/Pustu dan jaringannya yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	%	30	30	13.038.781.000	60	13.050.000.000	100	13.245.750.000	100	13.444.436.000	100	13.646.103.000	100	13.850.794.000	100	80.275.864.000	Dinas Kesehatan
		AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	hari	3,94	4,28		4,62		4,96		5,3		5,64		6		6		Rumah Sakit Umum Daerah
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rs. Jiwa/ Rs. Paru-Paru	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	hari	4	4	22.353.553.000	5	20.000.000.000	5	20.300.000.000	5	20.604.500.000	6	20.913.568.000	6	21.227.271.000	6	125.398.892.000	Rumah Sakit Umum Daerah
29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Presentase kunjungan neonatal pertama (KN) Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan	%	100	100	170.940.000	100	180.000.000	100	182.700.000	100	185.441.000	100	188.222.000	100	191.045.000	100	1.098.348.000	Dinas Kesehatan
		Presentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%	50	50		50		50		50		50		50		50		Dinas Kesehatan
30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	80	80	76.000.000	80	80.000.000	80	81.200.000	80	82.418.000	80	83.654.000	80	84.909.000	80	488.181.000	Dinas Kesehatan
31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Cakupan pemeriksaan sediaan makanan dan minuman siap produk restoran aman dikonsumsi oleh masyarakat	sampel	540 sampel	540 sampel	35.000.000	540 sampel	40.000.000	540 sampel	40.600.000	540 sampel	41.209.000	540 sampel	41.827.000	2700 sampel	42.455.000	80	241.091.000	Dinas Kesehatan
32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Presentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	100	222.000.000	100	225.000.000	100	228.375.000	100	231.801.000	100	235.278.000	100	238.807.000	100	1.381.261.000	Dinas Kesehatan
		Presentase ibu hamil yang mendapatkan Antenatal minimal 4 kali (K4)	%	90	90		90		90		90		90		90		90		Dinas Kesehatan
		Ketersediaan Dokter Obsgyn 24 jam	Hari pelayanan	240	240		240		240		240		240		240		1200		Rumah Sakit Umum Daerah
33	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	71,43	72,86	92.319.875.000	74,29	85.400.000.000	75,72	85.400.000.000	77,15	85.400.000.000	78,52	85.400.000.000	80,00	85.400.000.000	5	519.319.875.000	Rumah Sakit Umum Daerah
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				147.111.000.000		147.344.500.000		148.306.218.000		150.530.811.000		152.788.773.000		155.080.603.000		901.161.905.000		
15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang dibangun	Km	1	2	27.665.000.000	2	30.000.000.000	13	30.450.000.000	13	30.906.750.000	2	31.370.351.000	2	31.840.907.000	34	182.233.008.000	Dinas Pekerjaan Umum, Kel. Kriwen, Kel, Bulakan
		Panjang Jembatan yang dibangun	m	90	0		18		18		18		18		18		90		Dinas Pekerjaan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Terbangunnya Jalan Lingkar Barat	km	0	0		0		13		13		0		0		26		Dinas Pekerjaan Umum
16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Pembangunan Drainase/ gorong-gorong	m	2500	500	4.889.500.000	1500	4.294.000.000	1500	4.358.410.000	1500	4.423.786.000	1500	4.490.143.000	1500	4.557.495.000	8000	27.013.334.000	Dinas Pekerjaan Umum, Semua Kelurahan
		Cakupan Drainase	%	70	70		75		75		80		80		85		85		Dinas Pekerjaan Umum
17	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten	%	45	47	959.000.000	48	1.090.500.000	50	1.106.858.000	52	1.123.460.000	54	1.140.312.000	55	1.157.417.000	55	6.577.547.000	Dinas Pekerjaan Umum, Semua Kelurahan
18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	panjang jalan dilalui roda 4	Km	160,96	15	79.207.348.000	20	80.000.000.000	15	81.200.000.000	20	82.418.000.000	20	83.654.270.000	20	84.909.084.000	110	491.388.702.000	Dinas Pekerjaan Umum, Semua Kelurahan
		proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	70	70		75		75		80		80		85		85		Dinas Pekerjaan Umum
		panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	70	70		75		75		80		80		85		85		Dinas Pekerjaan Umum
19	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong	saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	45	47	130.000.000	48	130.000.000	50	131.950.000	52	133.929.000	54	135.938.000	55	137.977.000	55	799.794.000	Dinas Pekerjaan Umum, Kel Banmati, Kel Jombor
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	90	91	10.410.800.000	91	1.720.000.000	92	1.745.800.000	92	1.771.987.000	93	1.798.567.000	95	1.825.545.000	95	19.272.699.000	Dinas Pekerjaan Umum
24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	45	47	9.347.284.000	48	6.586.000.000	50	6.684.790.000	52	6.785.062.000	54	6.886.838.000	55	6.990.140.000	55	43.280.114.000	Dinas Pekerjaan Umum
		Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	DI	70	70		70		70		70		70		70		70		Dinas Pekerjaan Umum
25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	%	0	0	-	100	1.510.000.000	100	1.532.650.000	100	1.555.640.000	100	1.578.974.000	100	1.602.659.000	100	7.779.923.000	Dinas Pekerjaan Umum
26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Terlaksananya pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air	bulan	0	0	-	12	20.000.000	12	20.300.000	12	20.605.000	12	20.914.000	12	21.227.000	60	103.046.000	Dinas Pekerjaan Umum
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 5 tahun	bulan	12	12	355.000.000	12	740.000.000	12	751.100.000	12	762.367.000	12	773.802.000	12	785.409.000	60	4.167.678.000	Dinas Pekerjaan Umum
28	Program Pengendalian Banjir	Panjang saluran yang tertangani	Km	5	0	-	1	5.000.000.000	1	5.075.000.000	5	5.151.125.000	4	5.228.392.000	4	5.306.818.000	15	25.761.335.000	Dinas Pekerjaan Umum
30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan	Km	50	20	12.440.068.000	10	13.000.000.000	10	13.195.000.000	10	13.392.925.000	10	13.593.819.000	10	13.797.726.000	70	79.419.538.000	Dinas Pekerjaan Umum
		prosentase rumah tangga pengguna air bersih	%	86	87		87		88		88		89		90		90		Dinas Pekerjaan Umum
		Terwujudnya kelancaran arus distribusi barang	Pasar	5	5		5		5		5		5		5		30		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tingkat ketersediaan dokumen tata ruang	%	100	100	1.326.000.000	100	1.030.000.000	100	1.045.450.000	100	1.061.132.000	100	1.077.049.000	100	1.093.204.000		6.632.835.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penataan Ruang	Dokumen	1	1		2	1.230.000.000	2		2		1		1		9	1.230.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	lokasi	1	1	180.000.000	1	584.000.000	1	592.760.000	1	601.651.000	1	610.676.000	0	619.836.000	5	3.188.923.000	Dimas Pekerjaan Umum
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR)	50	50	201.000.000	100	410.000.000	100	416.150.000	100	422.392.000	100	428.728.000	50	435.159.000	500	2.313.429.000	Dimas Pekerjaan Umum
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					5.613.029.000		5.613.029.000		4.231.662.000		5.387.423.000		6.858.847.000		7.161.938.000		34.865.928.000	
15	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	unit/tahun	35	35	1.124.473.000	35	1.124.473.000	35	847.740.000	35	1.079.277.000	35	1.374.051.000	35	1.434.770.000	35	6.984.784.000	Dimas Pekerjaan Umum
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio permukiman layak huni	kawasan perumahan	1	1	16.000.000	1	16.000.000	1	12.062.000	1	15.357.000	1	19.551.000	0	20.415.000	5	99.385.000	Dimas Pekerjaan Umum
17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rasio rumah layak huni	RTLH	500	500	600.000.000	2000	600.000.000	2000	452.340.000	2000	575.884.000	2000	733.171.000	2000	765.569.000	10500	3.726.964.000	Dimas Pekerjaan Umum
19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten sukoharjo	%	37,77	37,77	3.390.000.000	37,77	3.390.000.000	75,54	2.555.721.000	100	3.253.745.000	100	4.142.414.000	100	4.325.467.000	100	21.057.347.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMM) dari pangkalan Damkar	%	36,36	36,36		36,36		60		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		persentase penyediaan APAR dari pemilik usaha yang memadai	%	52,63	52,63		60		65		80		85		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional penanganan bencana	%	0,64	1,07		1,28		1,50		1,7		1,9		2		2		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		persentase aparaturnya yang mengikuti pelatihan	%	21,8	21,8		25		28		31,25		34,37		37		37		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terlaksananya pengelolaan pemakaman se-Kabupaten Sukoharjo	Ha	264	264	482.556.000	264	482.556.000	264	363.799.000	264	463.160.000	264	589.660.000	264	615.717.000	264	2.997.448.000	Dimas Pekerjaan Umum
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					9.429.949.000		9.246.066.000		7.075.610.000		9.059.685.000		9.459.816.000		9.676.132.000		53.947.258.000	
15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	Rasio	71	70	3.488.449.000	70	3.420.424.000	70	2.578.658.000	70	3.282.946.000	70	3.428.035.000	70	3.579.520.000	70	19.778.032.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Semua Kelurahan,
		Petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten Sukoharjo	orang	6320	6320		6320		6320		6320		6320		6320		6320		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	98,3	95		95		95		95		95		95		95		Satuan Polisi Pamong Praja
		Cakupan patroli petugas satpol pp	kali	159	194														Satuan Polisi Pamong Praja
16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	1,31	1,30	1.860.500.000	1,30	1.824.220.000	1,30	1.375.280.000	1,30	1.750.899.000	1,30	1.828.280.000	1,30	1.909.071.000	1,30	10.548.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja
17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa	orang	1620	1140	300.000.000	1140	294.150.000	1140	221.760.000	1140	282.327.000	1140	294.805.000	1140	307.832.000	7440	1.700.874.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	%	100	100		100		100		100		100		100				
		Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama	buah	1	1		1		1		1		1		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan dan cinta tanah air bagi masyarakat	orang	1438	1438	1.348.000.000	1438	1.321.714.000	1438	996.440.000	1438	1.268.590.000	1438	1.324.655.000	1438	1.383.192.000	8628	7.642.591.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pelayanan operasional kegiatan hari kemerdekaan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Semua Kecamatan
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ kelurahan	%	19,6	19,6	95.000.000	19,6	93.148.000	19,6	70.224.000	19,6	89.404.000	19,6	93.355.000	19,6	97.480.000	19,6	538.611.000	Satuan Polisi Pamong Praja
20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	sosialisasi bahaya narkoba dan pekat lainnya	%	100	100	260.000.000	100	254.930.000	100	192.192.000	100	244.684.000	100	255.497.000	100	266.788.000	1440	1.474.091.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di kapupataan	%	98,3	90		90		90		90		90		90		90		Satuan Polisi Pamong Praja
		Pemberantasan barang kena cukai ilegal	kali	0	25		25		25		25		25		25		25		Satuan Polisi Pamong Praja
21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan Partisipasi pemilih	bulan	12	12	220.000.000	12	215.710.000	12	162.624.000	12	207.040.000	12	216.190.000	12	225.743.000	72	1.247.307.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah desa tangguh bencana	desa	7	2	1.208.000.000	2	1.184.444.000	2	892.952.000	2	1.136.837.000	2	1.187.080.000	2	1.239.537.000	19	6.848.850.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	orang	0	0		1		1		1		1		1		5		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penanggulangan bencana	orang	1200	1500		1500		1500		1500		1500		1500		10200		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana	orang	900	1500		1500		1500		1500		1500		1500		9900		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Program Peningkatan Ketertiban Penyelenggaraan Pemerintahan	Menurunnya jumlah pelanggaran Perda	kasus	200	200	445.000.000	190	436.323.000	180	328.944.000	170	418.785.000	160	437.293.000	150	456.617.000	1050	2.522.962.000	Satuan Polisi Pamong Praja
24	Program Peningkatan Komunikasi Dengan Lingkungan Masyarakat	Terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan lembaga masyarakat	orang	125	125	25.000.000	125	24.513.000	125	18.480.000	125	23.527.000	125	24.567.000	125	25.653.000	750	141.740.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
25	Program Peningkatan Hubungan Antar Lembaga	Terjalannya hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah, Ormas dan LSM	orang	420	420	180.000.000	420	176.490.000	420	133.056.000	420	169.646.000	420	176.883.000	420	184.699.000	2520	1.020.774.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Koordinasi antar lembaga	%	100	100		100		100		100		100		100		100		0 Sekretariat Daerah
26	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan terwujudnya kondusifitas daerah	kali	0	0		0		12	105.000.000	12	185.000.000	12	193.176.000	0		36	483.176.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Sosial				4.856.000.000		4.761.310.000		38.589.551.000		5.742.568.000		5.996.362.000		6.261.340.000		62.259.000.000		
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	137424000	100	171.000.000		167.666.000		126.403.000		160.926.000		168.039.000		175.464.000		969.498.000	Dinas Sosial
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.	orang	140	140	732.000.000	145	717.726.000	150	541.094.000	155	688.878.000	155	719.323.000	160	751.110.000	160	4.150.131.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		Tingkat Kemiskinan	%	0,67	0,67												3,36		0 Dinas Sosial

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Persentase PMKS skala Kab/ Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	org	1517100000	3600		3600		3600		3600		3600		3600		3600		3600	Dinas Sosial
		Persentase (%) PMKS skala kab/ kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	136	150		150		150		150		150		150		150		150	Dinas Sosial
17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibina	%	19870000	1,11	25.000.000	1,11	24.513.000	1,11	18.480.000	1,11	23.527.000	1,11	24.567.000	1,11	25.653.000	1,11	141.740.000	Dinas Sosial	
18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	414000000	2	153.000.000	2	150.017.000	2	113.097.000	2	143.987.000	2	150.350.000	2	156.994.000	2	867.445.000	Dinas Sosial	
19	Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	panti	76508000	9,15	70.000.000		68.635.000		51.744.000		65.876.000		68.788.000		71.827.000		396.870.000	Dinas Sosial	
		Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	panti	50400000	19 panti		19 panti		19 panti		19 panti		19 panti		19 panti		19 panti		19 panti	Dinas Sosial
20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan PMKS yang dibina	org	25	25	10.000.000	25	9.805.000	25	7.392.000	25	9.411.000	25	9.827.000	25	10.261.000	25	56.696.000	Dinas Sosial	
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Sosial Mandiri/ orsodes	buah	0	1	425.000.000	2	416.713.000	2	314.160.000	2	399.963.000	2	417.640.000	2	436.095.000	2	2.409.571.000	Dinas Sosial	
22	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Terlaksananya Pembangunan Masjid Agung Kab. Sukoharjo	Masjid	0	0	3.270.000.000	1	3.206.235.000	1	37.417.181.000	0	4.250.000.000	0	4.437.828.000	0	4.633.936.000	1	57.215.180.000	Dinas Pekerjaan Umum	
		Pelayanan Pemberangkatan Ibadah Haji Kabupaten Sukoharjo dan Kegiatan Pembinaan Keagamaan	%	100	100		100		100		100		100		100					
	Non Pelayanan Dasar																			
1	Tenaga Kerja			1.264.500.000			1.239.843.000		540.355.000		1.190.009.000		1.242.601.000		1.297.512.000		6.774.820.000			
15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	112	320	533.500.000	320	523.097.000	320		320	502.072.000	320	524.261.000	320	547.428.000	60	2.630.358.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	2419	3000	292.000.000	3000	286.306.000	3000	215.846.000	3000	274.798.000	3000	286.943.000	3000	299.623.000	60	1.655.516.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	9	20	396.000.000	20	388.278.000	20	292.723.000	20	372.672.000	20	389.142.000	20	406.338.000	60	2.245.153.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
18	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Ketersediaan Dokumen Ketenagakerjaan	%	100	100	43.000.000	100	42.162.000	100	31.786.000	100	40.467.000	100	42.255.000	100	44.123.000	6	243.793.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			896.220.000		878.745.000		662.485.000		843.423.000		880.698.000		919.617.000		5.081.188.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatn Kualtas Anak dan Perempuan	Jumlah kebijakan yang serasi.	Kebijakan	1	1	5.000.000	1	4.903.000	1	3.696.000	1	4.705.000	1	4.913.000	1	5.131.000	6	28.348.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan																	0	Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura
16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak					160.000.000		156.880.000		118.272.000		150.574.000		157.229.000	0	164.177.000		907.132.000	Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	
		Cakupan Program SKPD berspektif pengarusutamaan gender dan anak	SKPD	100	100		100		100		100		100		100		100		0	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan KDRT pada perempuan dan anak	kasus	27:38	27:38	115.000.000	24:35	112.758.000	21:34	85.008.000	17:31	108.225.000	14:28	113.008.000	13:24	118.002.000	10:20	652.001.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan					616.220.000		604.204.000		455.509.000		579.919.000		605.548.000		632.307.000		3.493.707.000	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
3	Pangan					19.763.225.000		19.377.842.000		14.608.955.000		18.598.982.000		19.420.962.000		20.279.174.000		112.049.140.000		
15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)					19.763.225.000		19.377.842.000		14.608.955.000		18.598.982.000		19.420.962.000	0	20.279.174.000		112.049.140.000		
		Produksi padi	ton	374546	375121		375626		376024		376328		376703		377145		377145			Dinas Pertanian
		Prodktivitas padi	kw/ ha	75,26	75,36		75,45		75,64		75,72		75,83		76,01		76,01			Dinas Pertanian
		Produksi jagung	ton	22056	22079		22113		22137		22173		22215		22270		22270			Dinas Pertanian
		Produktivitas jagung	kw/ ha	87,73	88,07		88,73		89,22		89,81		90,45		90,93		90,93			Dinas Pertanian
		Produksi kedelai	ton	3950	3966		3976		3984		3989		3996		4092		4092			Dinas Pertanian
		Prodktivitas kedelai	kw/ ha	22,81	22,38		22,58		22,79		22,97		23,18		23,86		23,86			Dinas Pertanian
		Produksi kacang tanah	ton	8177	8257		8335		8395		8445		8532		8592		8592			Dinas Pertanian
		Produksi hortikultura (bawang merah, cabe, melon, semangka)	ton	2379	2452		2506		2538		2575		2593		2649		2649			Dinas Pertanian
		Produksi biofarmaka	ton	1710	1725		1735		1750		1765		1780		1795		1795			Dinas Pertanian
		Produksi tembakau	ton	258	216		219		222		224		240		240		240			Dinas Pertanian
15		Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	91,7	91,8		92		92,40		92,8		93,3		93,7		93,7			Badan Ketahanan Pangan
		Persentase Ketersediaan pangan utama	%	250	190		192		193		196		198		200		200			Badan Ketahanan Pangan
		Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	85,71	85,76		85,81		85,86		85,91		85,96		86		86			Badan Ketahanan Pangan
		Monitoring Subsidi Pupuk	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100		86			Badan Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Pertanahan				1.908.165.000		1.870.956.000		1.410.514.000		1.795.756.000		1.875.118.000		1.957.981.000		10.818.490.000		
15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang sistem Pendaftaran				90.000.000		88.245.000		66.528.000		84.698.000		88.441.000	0	92.350.000		510.262.000	Sekretariat Daerah
16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terwujudnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				1.753.165.000		1.718.978.000		1.295.938.000		1.649.887.000		1.722.803.000	0	1.798.934.000		9.939.705.000	Sekretariat Daerah
		Aset Tanah Milik Pemda yang bersertifikat	%	74	74		76		80		82		84		85		85		0
17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terwujudnya penyelesaian konflik - konflik pertanahan				65.000.000		63.733.000		48.048.000		61.171.000		63.874.000	0	66.697.000		368.523.000	Sekretariat Daerah
19	Program Pengadaan Lahan Pemerintah														0				0
5	Lingkungan Hidup				9.498.113.000		9.312.901.000		7.020.996.000		8.938.584.000		9.333.623.000		9.746.077.000		53.850.294.000		
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan persampahan	20	20	100	5.626.991.000	25	5.517.265.000	30	4.159.466.000	35	5.295.507.000	35	5.529.542.000	40	5.773.892.000	40	31.902.663.000	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase penanganan sampah	%	0,15	0,50		1		1,5		2		2,5		3		3		Badan Lingkungan Hidup
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	0	100	1.097.040.000	100	1.075.648.000	100	810.931.000	100	1.032.414.000	100	1.078.041.000	100	1.125.680.000	100	6.219.754.000	Badan Lingkungan Hidup
		Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	%	0	100		100		100		100		100		100		100		Badan Lingkungan Hidup
		Cakupan pelaksanaan penilaian dokumen amdal perusahaan		0	100		100		100		100		100		100		100		Badan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	47,75	48,25		48,75		49,25		50,25		50,75		51,25		51,25		Badan Lingkungan Hidup
17	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Perlindungan konservasi sumber daya alam	%	100	100	817.556.000	100	801.614.000	100	604.337.000	100	769.394.000	100	803.397.000	100	838.900.000	100	4.635.198.000	Dinas Pekerjaan Umum
		status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan ke publik	hektar	0	8264		4708		5582		3876		4649		4742		31821		0
19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase ketersediaan data dan informasi untuk status lingkungan hidup daerah	%	0	75	100.500.000	80	98.540.000	85	74.289.000	90	94.580.000	95	98.760.000	100	103.124.000	100	569.793.000	Badan Lingkungan Hidup
20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	%	0	100	84.526.000	100	82.878.000	100	62.482.000	100	79.547.000	100	83.062.000	100	86.733.000	100	479.228.000	Badan Lingkungan Hidup
24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	RTH	11	11	1.771.500.000	11	1.736.956.000	11	1.309.491.000	11	1.667.142.000	11	1.740.821.000	11	1.817.748.000	11	10.043.658.000	Dinas Pekerjaan Umum
		Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	%	64,5	64,5		64,5		64,5		64,5		64,5		64,5		64,5		Badan Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Kependudukan dan Catatan Sipil				2.347.613.000		2.301.835.000		1.735.353.000		2.209.316.000		2.306.957.000		2.408.901.000		13.309.975.000		
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya sarana dan prasarana infrastruktur program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	bulan	12	12	2.347.613.000	12	2.301.835.000	12	1.735.353.000	12	2.209.316.000	12	2.306.957.000	12	2.408.901.000	72	13.309.975.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase penduduk ber KTP	%	87,86	87,86		88,00		89,00		90,00		91,00		92,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase penduduk ber akte kelahiran	%	61	63		66		69		72		75		78		80		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengurusan KTP	hari	3	3		3		3		3		3		3		3		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengurusan Akta kelahiran	hari	4	3		3		2		2		2		2		2		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengurusan Akta Kematian	hari	4	4		3		2		2		2		2		2		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				6.332.936.000		6.214.446.000		4.685.070.000		5.964.664.000		6.228.272.000		6.498.266.000		35.923.654.000		
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina	%	100	100	4.337.936.000	100	4.253.346.000	100	3.206.598.000	100	4.082.390.000	100	4.262.811.000	100	4.451.184.000	150 desa	24.594.265.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Posyandu aktif	%	100	100		100		100		1175		100		100		1175		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PKK aktif	%	100	100		100		100		100		100		100		180		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Prosentase Bintek Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	%	100	100		100		100		100		100		100		180		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Swadaya masyarakat terhadap total program pemberdayaan masyarakat	%	2	2	387.000.000	2	379.454.000	2	286.070.000	2	364.202.000	2	380.298.000	2	397.103.000	2	2.194.127.000	Sekretariat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Swadaya masyarakat terhadap total program pemberdayaan masyarakat	%	5	5	425.000.000	5	416.713.000	5	314.160.000	5	399.963.000	5	417.640.000	5	436.095.000	5	2.409.571.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	%	100	100	915.000.000	100	897.158.000	100	676.367.000	100	861.098.000	100	899.154.000	100	938.887.000		5.187.664.000	Sekretariat Daerah (Bag. Pemes), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Cakupan PKK aktif kelurahan	%	0	0		100	5.000.000	100	3.770.000	100	4.799.000	100	5.011.000	100		100	18.580.000	Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo
20	Program Penanganan Penduduk Miskin	Penurunan Angka Kemiskinan	%			253.000.000	100	248.067.000	100	187.017.000	100	238.096.000	100	248.618.000	100	259.605.000	100	1.434.403.000	Sekretariat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perdesaan	Meningkatnya peran serta Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	%	100	100	15.000.000	100	14.708.000	100	11.088.000	100	14.116.000	100	14.740.000	100	15.392.000	100	85044000	Kecamatan Polokarto
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				2.088.500.000		2.047.777.000		1.543.816.000		1.965.468.000		2.052.331.000		12.313.000		9.710.205.000		
15	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya peserta KB baru dan peserta KB aktif	%	80	80	1.485.000.000	85	1.456.043.000	85	1.097.710.000	85	1.397.519.000	90	1.459.282.000	95		100	6.895.554.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Usia nikah pertama	Tahun	19	19	35.000.000	19	34.318.000	20	25.872.000	20	32.938.000	21	34.394.000	21		21,5	162.522.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan kontrasepsi bagi peserta KB	%	75	75	37.500.000	75	36.769.000	80	27.720.000	80	35.291.000	85	36.851.000	90		100	174.131.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR Yang Mandiri	peningkatan jumlah KB Mandiri	%	35	35	17.000.000	40	16.669.000	40	12.566.000	45	15.999.000	45	16.706.000	50		50	78.940.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	Menurunnya jumlah angka kematian ibu dan balita	per 1000	120	120	12.000.000	120	11.766.000	115	8.870.000	115	11.293.000	113	11.792.000	110	12.313.000	109	68.034.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatnya jumlah kelompok PIK remaja	%	35	35	20.000.000	35	19.610.000	40	14.784.000	40	18.822.000	45	19.654.000	45		50	92.870.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Prosentase anak yang terpantau tumbuh kembangnya	%	90	90	7.000.000	90	6.864.000	90	5.174.000	90	6.588.000	95	6.879.000	95		100	32.505.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping kelompokbina keluarga yang berkualitas	orang	167	167	467.000.000	167	457.894.000	167	345.206.000	167	439.489.000	167	458.912.000	167		167	2.168.501.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU	Integrasi operasional dan pelayanan BKB-POSYANDU-PADU	Kelompok	24	24	8.000.000	24	7.844.000	24	5.914.000	24	7.529.000	24	7.861.000	24		24	37.148.000	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
9	Perhubungan					2.839.390.000		2.784.022.000		2.098.874.000		2.672.123.000		2.790.217.000		2.913.517.000		16.098.143.000	
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Sarana dan Prasarana Perhubungan meningkat	%	100	100	296.000.000	20	290.228.000	20	218.803.000	20	278.563.000	20	290.874.000	20	303.728.000	100	1.678.196.000	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kelayakan Sarana Prasarana dan Fasilitas LLAJ	%	100	100	740.000.000	100	725.570.000	100	547.007.000	100	696.407.000	100	727.185.000	100	759.319.000	100	4.195.488.000	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kelayakan angkutan umum	%	100	100	400.050.000	100	392.249.000	100	295.717.000	100	376.483.000	100	393.122.000	100	410.494.000	100	2.268.115.000	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Penurunan Jumlah kasus kecelakaan	%/ tahun	3	3	1.373.340.000	3	1.346.560.000	3	1.015.171.000	3	1.292.437.000	3	1.349.556.000	3	1.409.193.000	3	7.786.257.000	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kendaraan laik jalan	%	100	100	30.000.000	100	29.415.000	100	22.176.000	100	28.233.000	100	29.480.000	100	30.783.000	100	170.087.000	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
10	Komunikasi dan Informatika					5.254.871.000		5.152.401.000		3.884.395.000		5.972.878.000		6.236.848.000		6.512.455.000		33.013.848.000	
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Prosentase Web SKPD Aktif	%	100	100	2.564.287.000	100	2.514.283.000	100	1.895.518.000	100	3.440.795.000	100	3.592.861.000	100	3.751.629.000	100	17.759.373.000	Sekretariat Daerah
		Pendataan data sarpras dan pengelolaan manajemen pendataan dan pelaksanaan PSB	%	100	100		100		100		100		100		100		100	0	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Pemahaman Teknologi Informasi	%	80	80		80		80		90		95		100		100	0	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Peningkatan Validitas data Informasi dan Komunikasi	%	100	100	40.000.000	100	39.220.000	100	29.568.000	100	37.644.000	100	39.307.000	100	41.044.000	100	226.783.000	Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
17	Program Fasilitas Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi dan Informasi	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	%	100	100	420.000.000	100	411.810.000	100	310.464.000	100	395.258.000	100	412.726.000	100	430.965.000	100	2.381.223.000	Sekretariat Daerah (bag. PDE), Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Publikasi kebijakan dan hasil pembangunan pemerintah daerah	%	100	100	2.230.584.000	100	2.187.088.000	100	1.648.845.000	100	2.099.181.000	100	2.191.954.000	100	2.288.817.000	100	12.646.469.000	Sekretariat Daerah, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				1.223.000.000		1.199.153.000		904.041.000		1.150.954.000		1.201.819.000		1.254.928.000		6.933.895.000		
15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	UMKM yang dibina	UMKM	125	150	131.000.000	200	128.446.000	250	96.835.000	275	123.283.000	300	128.731.000	350	134.420.000	400	742.715.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM	UMKM	11125	11225	407.000.000	11337	399.064.000	11451	300.854.000	11565	383.024.000	11681	399.951.000	11798	417.625.000	11916	2.307.518.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Teknis Bidang KUMKM	Koperasi	250	300	235.000.000	350	230.418.000	350	173.712.000	400	221.156.000	425	230.930.000	450	241.135.000	450	1.332.351.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	82	82,5	450.000.000	82,7	441.225.000	83	332.640.000	83,5	423.491.000	84	442.207.000	85	461.748.000	85	2.551.311.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
12	Penanaman Modal				332.000.000		325.527.000		245.414.000		312.442.000		326.250.000		340.668.000		1.882.301.000		
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Proporsi Lol dari jumlah potensi yang ditawarkan	kali	3	3	232.000.000	4	227.476.000	4	171.494.000	4	218.333.000	4	227.982.000	4	238.057.000	0	1.315.342.000	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Investasi	% per tahun	0	0,53	45.000.000	0,53	44.123.000	0,53	33.264.000	0,53	42.349.000	0,53	44.221.000	0,53	46.175.000	0,53	255.132.000	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Peningkatan Jumlah Investor	Investor	7	8	55.000.000	9	53.928.000	10	40.656.000	11	51.760.000	12	54.047.000	13	56.436.000	13	311.827.000	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
13	Kepemudaan dan Olah Raga				2.096.771.000		2.255.884.000		1.091.329.000		2.173.252.000		12.260.459.000		12.793.410.000		32.671.105.000		
15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	1	0		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	1.000.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan, Kel. Joho
		Jumlah dokumen data potensi kepemudaan	dokumen	1	0		1		0		1		0		1		3		Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	kelompok	21	21	185.255.000	21	181.643.000	21	136.940.000	21	174.342.000	21	182.047.000	21	190.091.000	21	1.050.318.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan, Semua Kelurahan
20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah klub olahraga	kelompok	100	100	1.020.550.000	100	1.000.649.000	100	754.389.000	100	960.430.000	100	1.002.876.000	100	1.047.193.000	100	5.786.087.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan, Setda, Dinas Pendidikan dan Semua
		Jumlah organisasi olahraga	kelompok	202	202		202		202		202		202		202		202		Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	33	33		33		33		33		33		33		33		Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah cabang olahraga berprestasi	%	0,66	0,66		0,69		0,72		0,75		0,78		0,81		4,45		Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah prestasi olahraga	Penghargaan	50	10		10		10		10		10		10		60		Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	%	0,000187	0,000187		0,000187		0,000187		0,000187		0,000187		0,000187		0,000187		Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah gedung olahraga	buah	120	120		120		120		120		120		120		735		Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rehabilitasi Lapangan Olahraga tingkat Kelurahan	%	100	100	890.966.000	100	873.592.000	100		100	838.480.000	100	10.875.536.000	100	11.356.126.000		24.834.700.000	Semua Kelurahan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Pembangunan Sarana Olahraga	buah										1		0				0
14	Statistik					206.000.000		201.983.000		152.275.000		193.865.000		202.432.000		211.378.000		1.167.933.000	
15	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Tingkat ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka	%	100	100	206.000.000	100	201.983.000	100	152.275.000	100	193.865.000	100	202.432.000	100	211.378.000		1.167.933.000	Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tingkat ketersediaan Buku PDRB	%	100	100		100		100		100		100		100				
		Tingkat ketersediaan Buku Kecamatan Dalam angka	%	100	100		100		100		100		100		100				
15	Persandian					0		10.000.000		0		0		0		0		10.000.000	
15	Program Persandian	Ketersediaan SOP Persandian	%	0	0		100	10.000.000	0		0		0		0		100	10.000.000	Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16	Kebudayaan					1.100.500.000		1.079.041.000		813.488.000		1.035.670.000		1.081.441.000		1.129.230.000		6.239.370.000	
15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Gelar Seni Adat Tradisi	keg	9	9	163.000.000	9	159.822.000	9	120.489.000	9	153.398.000	9	160.177.000	9	167.255.000		924.141.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Prosentase Organisasi Penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terbina	%	100	100		100		100		100		100		100		54		DPOPK
16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan Gelar Seni dan Budaya	keg	41	11	225.000.000	21	220.613.000	21	166.320.000	21	211.745.000	21	221.103.000	21	230.874.000	116	1.275.655.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah gedung kesenian	Buah	0	0		0		1		0		0		0		1		
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Misi Kesenian	%	100	100	712.500.000	100	698.606.000	100	526.679.000	100	670.527.000	100	700.161.000	100	731.101.000	100	4.039.574.000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan, Setda, Dinas Pendidikan
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	3	2		3		3		3		3		3		17		
		Jumlah grup kesenian	Kelompok	425	425		425		425		425		425		425		425		
17	Perpustakaan					711.080.000		697.215.000		525.629.000		669.190.000		698.766.000		729.645.000		2.292.212.000	
15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	30871	33958	289.300.000	37354	283.659.000	41089	213.850.000	45198	272.257.000	49718	284.290.000	99437	296.853.000	99437	1.640.209.000	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
		Tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	24	35208		37208		39069		41022		43073		45057		45057		Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
		Jumlah perpustakaan	buah	1	1		1		1		1		1		1		1		Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	30871	16800		18480		20328		22360		24596		26822		26822		Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
		Terpeliharanya sarana dan buku perpustakaan kelurahan	%	100	100		100		100		100		100		100				Kelurahan Bulakan, Dukuh, Gayam, Combongan
15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Perbaikan Sistem Kearsipan	%	100	100	80.000.000	100	78.440.000	100	59.136.000	100	75.287.000	100	78.615.000	100	82.089.000		453.567.000	Kecamatan Nguter
16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah dokumen/ Arsip yang diselamatkan	berkas	6000	6000		6500		7000		7500		8000		8500		8500		Kelurahan(Ngadirjo, Combongan, Gayam, Kartasura)
		Jumlah dokumen/ arsip yang telah diduplikasi dalam bentuk informatika	keping	125	135		145		155		165		175		185		185		Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Arsip keuangan yang diarsipkan	%	100	100		100		100		100		100		100				Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
17	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah arsip yang terpelihara	berks	35000	36000	306.780.000	37000	300.798.000	38000	226.771.000	39000	288.708.000	40000	301.467.000	41000	314.789.000	41000		Semua Kelurahan, Semua Kecamatan dan Kantor Kecamatan Assis
18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah layanan informasi arsip/ dokumentasi	Layanan	40	45	35.000.000	50	34.318.000	55	25.872.000	60	32.938.000	65	34.394.000	70	35.914.000	70	198.436.000	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
		Jumlah SKPD/ Desa yang dibina	SKPD/ Desa	22	24		26		28		30		32		34		34		Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
	Pilihan																		
1	Kelautan dan perikanan					2.499.499.000		2.450.759.000		1.847.627.000		2.352.255.000		2.456.212.000		2.564.752.000		14.171.104.000	
	Program pengembangan budidaya perikanan	Cakupan bina kelompok perikanan	%	65,00	70,00	2.499.499.000	76,00	2.450.759.000	82,00	1.847.627.000	88,00	2.352.255.000	94,00	2.456.212.000	100	2.564.752.000	100	14171104000	Dinas Pertanian
		Produksi budidaya ikan	ton	9904,00	10338,00		10793,00		11269,00		11769,00		12293,00		12843		12843		Dinas Pertanian
2	Pariwisata					328.000.000		396.605.000		299.000.000		380.663.000		397.487.000		415.052.000		2.216.807.000	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							75.000.000		56.543.000		71.986.000		75.167.000		78.489.000		357.185.000	DPOPK
		Kunjungan wisata	Orang	56.120	78.500		79.000		80.000		81.000		81.775		82.500		482.775		
		Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100		100		100		100		100		100				DPOPK
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	8,156794983	11,4096295		11,4823023		11,6276479		11,7729935		11,8856363		11,9910119		12		DPOPK
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	1	1		1		1		1		1		1		1		DPOPK
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					127.000.000		124.524.000		93.878.000		119.518.000		124.801.000		130.316.000		720.037.000	DPOPK
		Jumlah obyek wisata unggulan	Buah	5	5		6		6		7		7		8		8		DPOPK
		Jumlah objek/destinasi yang dibangun/dikembangkan	Buah	0	0		1		0		1		0		1		3		DPOPK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Program Pengembangan Kemitraan					201.000.000		197.081.000		148.579.000		189.159.000		197.519.000		206.247.000		1.139.585.000	DPOPK	
		SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar kompetensi	Orang	367	367		370		375		380		390		400		400		-	
		Usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar usaha pariwisata	Usaha	367	367		370		375		380		390		400		400		0	DPOPK
		Jumlah Pokdarwis yang aktif	Kelompok	6	6		7		8		9		10		0		10		-	DPOPK
3	Pertanian					1.818.143.000		1.782.688.000		1.343.969.000		1.711.038.000		1.786.657.000		1.865.610.000		10.308.105.000		
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	koordinasi peningkatan peran kelembagaan P3A	orang	300	300	1.070.293.000	300	1.049.422.000	300	791.159.000	300	1.007.243.000	300	1.051.757.000	300	1.098.235.000	1500	6.068.109.000	Sekretariat Daerah	
		Cakupan bina kelompok petani	%	81,39	84,65		88,4		92,15		95,83		97,92		100		100	0	Dinas Pertanian	
		Peningkatan pendapatan petani	%	5	5		5		5		5		5		5		5		Dinas Pertanian	
17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Meningkatnya jumlah kesepakatan dagang dari pemasaran produk pertanian	dokumen	0	1	218.000.000	1	213.749.000	2	161.145.000	2	205.158.000	2	214.225.000	2	223.691.000	10	1.235.968.000	Dinas Pertanian	
		Prosentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	%	3,3 %	3,3 %		3,3 %		3,3 %		3,3 %		3,3 %		3,5 %		3,5 %		Badan Ketahanan Pangan	
19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi tebu	ton	441360	4400	80.000.000	4415	78.440.000	4415	59.136.000	4420	75.287.000	4420	78.615.000	4425	82.089.000	4425	453.567.000	Dinas Pertanian	
		Produksi kelapa	ton	587,9	588		590		590		592		593		595		595		Dinas Pertanian	
		Produksi lada	ton	0,24	0,24		0,25		0,25		0,26		0,28		0,3		0,3		Dinas Pertanian	
		Produksi mete	ton	63	63		64		65		65		68		71		71		Dinas Pertanian	
20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Meningkatnya rata-rata nilai evaluasi kinerja penyuluh	nilai	80,00	80,50	120.800.000	81,00	118.444.000	81,50	89.295.000	82,00	113.684.000	82,50	118.708.000	83,00	123.954.000	83,00	684.885.000	Dinas Pertanian	
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya status kesehatan ternak besar,kecil, unggas	%	25,85	28,37	156.500.000	28,76	153.448.000	29,14	115.685.000	29,5	147.281.000	29,89	153.790.000	30,28	160.586.000	30,28	887.290.000	Dinas Pertanian	
22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi hasil peternakan (daging)	ton	5253,75	6.634,00	110.000.000	6.688,45	107.855.000	6.751,36	81.312.000	6.833,72	103.520.000	6899,59	108.095.000	6.965,00	112.872.000	6.965,00	623.654.000	Dinas Pertanian	
		Produksi hasil peternakan (telur)	ton	8.331,70	8.415,02		8.499,17		8.584,16		8.670,00		8.756,70		8.843,00		8.843,00		Dinas Pertanian	
24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk	kelompok	0	2	62.550.000	4	61.330.000	6	46.237.000	8	58.865.000	10	61.467.000	12	64.183.000	12	354.632.000	Dinas Pertanian	
		Pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak	kelompok	0			2		4		6		8		10		10		Dinas Pertanian	
4	Kehutanan					2.061.744.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2061744000		
16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)	ha	300	300	2.061.744.000	0		0		0		0		0		0	2061744000	Dinas Pertanian	
5	Energi dan Sumberdaya Mineral					991.984.000		972.640.000		733.274.000		933.547.000		974.804.000		1.015.197.000		5.621.446.000		
15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	%	100	100	90.705.000	100	88.936.000	100	67.049.000	100	85.362.000	100	89.134.000	100	90.389.000	100	511.575.000	Dinas Pekerjaan Umum	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	100	100	861.279.000	100	844.484.000	100	636.657.000	100	810.541.000	100	846.363.000	100	883.764.000	100	4.883.088.000	Dinas Pekerjaan Umum
18	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi	Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	100	40.000.000	100	39.220.000	100	29.568.000	100	37.644.000	100	39.307.000	100	41.044.000	100	226.783.000	Dinas Pekerjaan Umum
6	Perdagangan					8.422.436.000		8.258.199.000		6.225.855.000		7.926.275.000		8.276.574.000		8.642.317.000		47.751.656.000	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya kualitas barang yang beredar sesuai dengan SNI	kecamatan	12	12	75.000.000	12	73.538.000	12	55.440.000	12	70.582.000	12	73.701.000	12	76.958.000	72	425.219.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor	%	5	1	515.000.000	1	504.958.000	1	380.687.000	1	484.662.000	1	506.081.000	1	528.445.000	6	2.919.833.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	Terwujudnya kelancaran arus distribusi barang dan jasa	kecamatan	12	12	7.832.436.000	12	7.679.703.000	12	5.789.728.000	12	7.371.031.000	12	7.696.792.000	12	8.036.914.000	72	44.406.604.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatnya kualitas dagangan pedagang kaki lima	kecamatan	0	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	6	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Perindustrian					687.000.000		673.604.000		507.829.000		646.530.000		675.103.000		704.935.000		3.895.001.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek untuk sistem produksi	Meningkatnya penggunaan iptek untuk sistem produksi	orang	55	35	32.000.000	35	31.376.000	35	23.654.000	35	30.115.000	35	31.446.000	35	32.835.000	210	181.426.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas IKM	orang	755	430	560.000.000	430	549.080.000	430	413.951.000	430	527.011.000	430	550.302.000	430	574.620.000	2580	3.174.964.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya nilai penjualan produk IKM	orang	0	20	20.000.000	20	19.610.000	20	14.784.000	20	18.822.000	20	19.654.000	20	20.522.000	120	113.392.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Keikutsertaan IKM dalam pameran	kali	8	2	75.000.000	2	73.538.000	2	55.440.000	2	70.582.000	2	73.701.000	2	76.958.000	12	425.219.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Transmigrasi					160.000.000		156.881.000		118.272.000		150.574.000		157.229.000		164.177.000		907.133.000	
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Transmigran diberangkatkan	KK	4	15	135.000.000	15	132.368.000	15	99.792.000	15	127.047.000	15	132.662.000	15	138.524.000	90	765.393.000	DISNAKERTRANS
	Program Transmigrasi Regional	Pelatihan Calon Transmigran	orang	20	60	25.000.000	60	24.513.000	60	18.480.000	60	23.527.000	60	24.567.000	60	25.653.000	60	141.740.000	DISNAKERTRANS
	Urusan Penunjang																		
1	Perencanaan Pembangunan					2.853.000.000		2.797.370.000		2.108.936.000		2.684.930.000		2.803.564.000		2.927.481.000		16.175.281.000	
15	Program Pengembangan Data/Informasi	Tingkat ketersediaan data dalam penyusunan perencanaan	%	90	90	115.000.000	95	112.758.000	100	85.008.000	100	108.225.000	100	113.008.000	100	118.002.000	100	652.001.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
16	Program Kerjasama Pembangunan	Kerjasama Pembangunan antar daerah	%	100	100	245.000.000	100	240.223.000	100	181.104.000	100	230.567.000	100	240.757.000	100	251.396.000	100	1.389.047.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Tingkat ketersediaan data penyediaan air minum drainase dan sanitasi	%	100	100	91.000.000	100	89.226.000	100	67.267.000	100	85.639.000	100	89.397.000	100	93.376.000	100	515.905.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pemahaman perencanaan aparatur perencanaan	%	100	100	79.000.000	100	77.460.000	100	58.397.000	100	74.346.000	100	77.632.000	100	81.062.000	100	447.897.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen RKPD, RPJMD dan RPJPD serta LKPJ	%	100	100	1.091.000.000	100	1.069.726.000	100	806.466.000	100	1.026.730.000	100	1.072.106.000	100	1.119.482.000	100	6.185.510.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah
22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan bidang Ekonomi	%	100	100	380.000.000	100	372.590.000	100	280.896.000	100	357.614.000	100	373.419.000	100	389.920.000	100	2.154.439.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya	%	100	100	325.000.000	100	318.663.000	100	240.240.000	100	305.854.000	100	319.372.000	100	333.485.000	100	1.842.614.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	%	100	100	527.000.000	100	516.724.000	100	389.558.000	100	495.955.000	100	517.873.000	100	540.758.000	100	2.987.868.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Litbang				640.000.000		627.521.000		473.088.000		602.297.000		628.917.000		656.709.000		3.628.532.000		
26	Program Pengembangan Sumber Daya Iptek	Terciptanya produktifitas dan inovasi masyarakat			325.000.000		318.663.000		240.240.000		305.854.000		319.372.000	0	333.485.000		1.842.614.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27	Program Penelitian dan Pengembangan	Terwujudnya pembangunan yang didasarkan pada pengembangan IPTEK			315.000.000		308.858.000		232.848.000		296.443.000		309.545.000	0	323.224.000		1.785.918.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Keuangan				9.479.522.000		9.294.671.000		7.007.253.000		8.921.087.000		9.315.354.000		9.726.999.000		53.744.886.000		
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	%	100	9.002.729.000	100	8.827.176.000	100	6.654.808.000	100	8.472.382.000	100	8.846.818.000	100	9.237.759.000	100	51.041.672.000		Sekretariat Daerah, DPU, Dinas Pertanian, Disnakertrans, DPPKAD, Inspektorat, Disperindag, Semua Kabupaten
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai amanat	%	100		100		100		100		100		100		100			
		Ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	1	100		100		100		100		100		100			
		Meningkatnya kesadaran wajib lapor LHKPN mengirinkan LHKPN	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
		Terlaksananya pembinaan dan penataan pedagang	Bulan	12	12	12		12		12		12		12		72			
		Terlaksananya Lelang Tanah Bekas Bando Desa	%	100		100		100		100		100		100		100			
		Opini BPK terhdap laporan keuangan daerah (WTP)	status	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kepada SKPD	%	100	99.519.000	100	97.578.000	100	73.564.000	100	93.656.000	100	97.796.000	100	102.117.000	100	564.230.000		Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	377.274.000	100	369.917.000	100	278.881.000	100	355.049.000	100	370.740.000	100	387.123.000	100	2.138.984.000		Semua Kecamatan
4	Sekretariat DPRD				6.226.950.000		6.105.524.000		4.602.955.000		5.860.123.000		6.119.110.000		6.389.514.000		35.304.176.000		
15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	PERDA yang ditetapkan	dok	12	31	6.226.950.000	33	6.105.524.000	33	4.602.955.000	24	5.860.123.000	28	6.119.110.000	31	6.389.514.000	32	35.304.176.000	Sekretariat DPRD
		Persentase RAPERDA yang disetujui DPRD	%	40	85		87		95		95		95		96		95		
		Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
5	Sekretariat Daerah				5.322.420.000		5.251.754.000		3.959.296.000		5.086.303.000		5.311.092.000		2.824.125.000		18.387.160.000		
16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinmas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	prosentase pemenuhan sarana pendukung pelayanan kedinmas Kepala Daerah	%	100	1.098.050.000	100	1.076.638.000	100	811.677.000	100	1.033.364.000	100	1.079.034.000	100	1.126.716.000	100	6.225.479.000		Sekretariat Daerah, Kecamatan (Sukoharjo, Bulu)
23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya pemahaman obrik tentang sistem pengawasan	kegiatan	0	0	919.370.000	1	901.442.000	1	679.597.000	1	865.210.000	1	903.448.000	1	943.372.000	5		
		Terpeliharanya fungsi website dan SMS gateway	%	100	100		100		100		100		100		100		0		Sekretariat Daerah
25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik			160.000.000		190.000.000		143.241.000		228.000.000		238.076.000	0	248.597.000		1.207.914.000		Sekretariat Daerah
26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	SK dan Peraturan Buoti menindaklanjuti peraturan yang berlaku	%	100	2.035.000.000	100	1.995.318.000	100	1.504.270.000	100	1.915.119.000	100	1.999.757.000	100	2.088.127.000	100	11.537.591.000		Semua SKPD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Raperda yang diajukan	Raperda	20	20		20		20		20		20		20		20		
27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya Fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah dan tersusunnya pedoman penataan perangkat daerah	%	100	100	475.000.000	100	465.738.000	100	351.120.000	100	447.018.000	100	466.774.000	100	487.401.000	100	2.693.051.000	Sekretariat Daerah
28	Program Pelayanan Perijinan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perizinan kategori baik	point	78,31	79	635.000.000	80	622.618.000	81	469.391.000	82	597.592.000	83	624.003.000	84		84	2.948.604.000	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
6	Pengawasan					1.650.300.000		1.618.119.000		1.219.900.000		1.552.956.000		1.621.720.000		1.693.384.000		9.356.379.000	
20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)	%	0	1	1.370.500.000	1	1.343.775.000	1	1.013.072.000	1	1.289.764.000	1	1.346.765.000	1	1.406.279.000	6	7.770.155.000	Inspektorat
		Prosentase cakupan SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan	%	100	20		40		60		80		100		100		100		Inspektorat
		Maturnitas SPIP pemerintah kabupaten Sukoharjo	Level	1	2		2		2		2		2		2		2		Inspektorat
		Terkendalanya kebijakan Kepala Daerah bidang ekonomi	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase APIP yang memiliki kompetensi	100	100	100	80.000.000	100	78.440.000	100	59.136.000	100	75.162.000	100	78.615.000	100	82.089.000	100	453.442.000	Inspektorat
22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	tahun	1	1	74.800.000	1	73.341.000	1	55.292.000	1	70.394.000	1	73.505.000	1	76.753.000	6	424.085.000	Inspektorat
			buah	1	1		1		1		1		1				1		Sekretariat Daerah
24	Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat secara lebih intensif	%	100	100	125.000.000	100	122.563.000	100	92.400.000	100	117.636.000	100	122.835.000	100	128.263.000	100	708.697.000	Inspektorat, Sekretariat Daerah
7	Kepegawaian					6.127.562.000		6.458.074.000		4.979.487.000		6.216.590.000		6.471.444.000		6.757.418.000		34.740.689.000	
29	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase aparatur PNS yang mengikuti Diklat perjenjangan struktural	orang	99	500	1.587.826.000	500	1.556.863.000	500	1.173.719.000	500	1.494.288.000	500	1.560.328.000	500	1.629.279.000	3000	9.002.303.000	Badan Kepegawaian Daerah
		Peserta SKPD yang mengikuti pelatihan	orang	600	600		600		600		600		600		600		3600		Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur	%	72	15	4.539.736.000	15	4.451.211.000	15	3.355.768.000	15	4.272.302.000	15	4.461.116.000	15	4.658.253.000	90	25.738.386.000	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi dan kompetensinya	%	430	150		150		150		150		150		150		900		Badan Kepegawaian Daerah
		Fasilitas Pengisian Perangkat Desa	%	100	100		100		100		100		100		100				
		Pemantauan Aset Desa	%	100	100		100		100		100		100		100				Sekretariat Daerah
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	%	100	100		100		100		100		100		100				Sekretariat Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program peningkatan disiplin aparatur	persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100	42		45		45		45		45		45		267		Badan Kepegawaian Daerah
	Program fasilitas pindah/ purna tugas PNS	Persentase penyelesaian proses pensiun tepat waktu	%	100	320		200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	208.838.000	1320		Badan Kepegawaian Daerah
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	%	117	352		300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	250.000.000	300	261.048.000	1852		Badan Kepegawaian Daerah
8	Lainnya (Program Rutin di Setiap Perangkat Daerah)				121.042.530.000		181.030.346.000		181.584.760.000		177.469.796.000		122.922.504.000		126.266.069.000		910.316.005.000		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	68.239.138.000	100	69.012.289.000	100	52.028.365.000	100	66.238.456.000	100	68.882.189.000	100	71.926.093.000	100	396.326.530.000	Semua PD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga	%	100	100	42.015.364.000	100	102.015.364.000	100	122.015.364.000	100	101.630.689.000	100	42.015.364.000	100	43.872.023.000	100	453.564.168.000	Semua PD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pemenuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	%	100	100	785.335.000	100		100		100		100	2.000.000.000	100		100	2.785.335.000	Semua PD
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase SDM peserta pendidikan dan pelatihan	%	100	100	7.824.809.000	100	7.824.809.000	100	5.899.124.000	100	7.510.304.000	100	7.842.221.000	100	8.188.768.000	100	45.090.035.000	Semua PD
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketersediaan dan ketepatan Pelaporan Laporan Keuangan	%	100	100	1.062.356.000	100	1.062.356.000	100	800.910.000	100	1.019.656.000	100	1.064.720.000	100	1.111.770.000	100	6.121.768.000	Semua PD
7	Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan SKPD	%	100	100	1.115.528.000	100	1.115.528.000	100	840.997.000	100	1.070.691.000	100	1.118.010.000	100	1.167.415.000	100	6.428.169.000	Semua PD
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG					625.944.260.000		676.000.000.000		684.500.000.000		677.750.000.000		635.667.091.000		656.750.000.000		3.956.611.351.000	
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN																		
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					10.692.000.000		10.692.000.000		10.692.000.000		10.692.000.000		10.692.000.000		10.692.000.000		64.152.000.000	
2	Pembayaran Pokok Utang					46.277.000		-		-		-		-		-		46.277.000	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN					10.738.277.000		10.692.000.000		10.692.000.000		10.692.000.000		10.692.000.000		10.692.000.000		64.198.277.000	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9.1. Kaidah Indikator Pengukur

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang akan berdampak kepada kinerja sosial dan ekonomi masyarakatnya. Secara alami kebijakan publik kurang dapat diukur secara langsung, namun lebih dapat diukur secara tidak langsung melalui indikator makro sosial dan ekonomi yang bersifat komposit atau integralistik dari keluaran kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya bahkan output program yang satu dengan program lainnya.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan publik berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “**SMART**” yaitu :

1. **Specific**(spesifik); dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus spesifik, yakni sifat dan tingkat sasarannya dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. **Measurable** (dapat diukur); indikator yang akan digunakan dapat dapat diukur, yakni target dan sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
3. **Achievable**(dapat dicapai); Indikator yang akan digunakan bersifat “**dapat** dicapai” yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. **Relevant** (relevan); Indikator yang digunakan harus mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan yang ingin dicapai;
5. **Time Bound**(batas waktu); Indikator yang digunakan harus **memiliki** periode pencapaian sasaran yang ditetapkan pada jangka waktu pengukuran tertentu.

9.2 Indikator Capaian Kinerja Daerah

Indikator Capaian Kinerja Daerah disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 9.1

Indikator Capaian Kinerja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD	
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
1	Ekonomi	-	Pertumbuhan Ekonomi	5,4	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,00	%	PD Urusan Penunjang
		-	NTP	100,67	101	101	102	102	103	103	103,21	%	PD Urusan Penunjang
		-	PDRB	27.775	29.596	31.468	33.350	35.212	37.084	38.956	38.956	Rp. Trilyun	PD Urusan Penunjang
		-	PDRB per Kapita	32.412	34.586	36.761	38.936	41.110	43.285	45.460	45.460	Rp. Juta	PD Urusan Penunjang
		-	Laju Inflasi	7,46	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0 % ± 1,0	%	PD Urusan Penunjang
2	Sosial Budaya	-	IPM	74,53	75,40	75,80	76,20	76,60	70,00	77,50	77,50	Point	PD Urusan Penunjang
		-	Angka Kemiskinan	9,18	8,8	8,5	8,2	8,00	7,8	7,6	7,6 %	%	PD Urusan Penunjang
		-	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,28	%	PD Urusan Penunjang
		-	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,31	79,5	80	81	82	83	84	84		PD Urusan Penunjang
3	Infrastruktur	-	Kualitas Jalan yang baik	70	72	75	77	80	82	85	85	%	PD Urusan Pekerjaan Umum

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
		- Kawasan Kumuh	7	6	5	4	3	2	1	0	%	PD Urusan Pekerjaan Umum
		- Prosentase Total Penurunan RTLH	0	5	5	5	6	6	6	33	%	PD Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial
B.	Aspek Pelayanan Umum											
1	Pendidikan	- Angka Melek Huruf	99,00	99,00	99,25	99,25	99,50	99,50	99,50	99,50	%	PD urusan Pendidikan
		- APK SMP sederajat	105,14	100	100	100	100	100	100	100	%	PD urusan Pendidikan
		- APM SMP sederajat	76,65	100	100	100	100	100	100	83,5	%	PD urusan Pendidikan
		- Lama rata-rata sekolah	8,50	8,6,	8,7	8,8	8,9	9,0	9,0	9,0	Tahun	PD urusan Pendidikan
		- APS SD	0,03	0	0	0	0	0	0	0	%	PD urusan Pendidikan
		- APS SMP	0,37	0,3	0,2	0,1	0	0	0	0	%	PD urusan Pendidikan
		- Rasio murid dan guru SD	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	Rasio	PD urusan Pendidikan
		- Rasio murid dan guru SMP	1/17	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	Rasio	PD urusan Pendidikan
		- Rasio kelas dan murid SD	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	Rasio	PD urusan Pendidikan
		- Rasio kelas dan murid SMP	1/20	1/22	1/25	1/28	1/32	1/32	1/32	1/32	Rasio	PD urusan Pendidikan
		- APK PAUD	42,86	42,86	46,80	50,74	54,68	58,62	62,56	62,56	%	PD urusan Pendidikan
		- Prosentase Guru	76,31	76,31	78,05	79,79	81,53	83,27	85	85	%	PD urusan

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
		SD Berkualifikasi S1/D4										Pendidikan
		- Prosentase Guru SMP Berkualifikasi S1/D4	91,79	91,79	93,43	95,07	96,71	98,35	100	100	%	PD urusan Pendidikan
		- Prosentase Guru SMP Berkualifikasi S1/D4	87,58	87,58	90,06	92,54	95,02	97,50	100	100	%	PD urusan Pendidikan
2	Kesehatan	- Angka Harapan Hidup	77,46	77,5	77,52	77,54	77,56	77,58	77,60	77,6	Tahun	PD urusan Kesehatan
		- Angka Kematian Ibu Melahirkan	159,05	140	130	120	110	102	102	102	Per 100.000 Kelahiran Hidup	PD urusan Kesehatan
		- Angka Kematian Bayi	9,94	9,8	9,6	9,4	9,2	9,2	9,2	9,2	Per 1.000 Kelahiran Hidup	PD urusan Kesehatan
		- Angka Kematian Balita (AKABA)	11,92	11,5	11	10,5	10	9,92	9,92	9,92	Per 1.000 Kelahiran Hidup	PD urusan Kesehatan
		- Prevalensi Penderita Gizi Buruk	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	%	PD urusan Kesehatan
		- Prevalensi Penderita Gizi Kurang	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	%	PD urusan Kesehatan
		- Desa Siaga Aktif Mandiri	30	33	36	39	42	45	48	50	%	PD urusan Kesehatan
		- Angka Kesakitan DBD	<49	<49	<49	<49	<49	<49	<49	<49	Per 100.000 Penduduk	PD urusan Kesehatan
		- Prosentase Desa ODF	20	20	30	45	75	100	100	100	%	PD urusan Kesehatan

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
		Desa/Kalurahan UCI	100	100	100	100	100	100	100	100	%	PD urusan Kesehatan
		- RGD	4.9	4,9	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4.5	%	PD urusan Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	- Prosentase Kondisi Jalan Baik	45,64	48	51	54	57	60	65	65	%	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Prosentase Kondisi Irigasi Baik	47	49	51	53	55	57	60	60	%	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Prosentase Cakupan Air Minum	75,46	78	81	84	88	93	100	100	%	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Cakupan Sistem Pengolah Air Limbah	72,38	75	82	86	90	95	100	100	%	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Cakupan Drainase	1331,26	1360	1380	1400	1440	1460	1500	1500	Km	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Cakupan Layanan Persampahan	20	22	24	28	32	36	40	40	%	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
		- Prosentase Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	11	11	11	11	11	11	11	11	%	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Cakupan Pelayanan Sanitasi	72,38	77,90	83,43	88,95	94,48	100	100	100	%	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Pembangunan Embung	11	0	1	0	0	0	0	12	Embung	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Prosentase jembatan dalam kondisi baik	94	94	95	96	97	97	97	97	%	PD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	- Rasio Kebutuhan Rumah dan Penyediaan Perumahan	72	74	76	78	80	82	84	85	%	PD yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran kabupaten	0,06	0,1	0,12	0,15	0,18	0,22	0,25	0,25	%	PD yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	- Jumlah Kasus Tindak Pidana	450	450	450	425	425	400	400	400	Kasus/Tahun	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		- Jumlah Kasus Pelanggaran PERDA	367	300	300	250	250	200	200	200	Kasus/Tahun	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		- Indeks Resiko Bencana	93	93	93	93	93	92	92	92	Indeks	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		- Rata-rata waktu respon tanggap bencana	24	22,5	21	19,5	18	16,5	15	15	menit	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		- Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengetahuan wawasan	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	6.600	Orang	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
		kebangsaan										Umum dan Perlindungan Masyarakat
		- Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	65	-	-	68	70	-	75	75	%	PD urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6	Sosial	- Prosentase Penurunan PMKS	2,02	2,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	10,08	%	PD menangani Urusan Sosial
		- Prosentase KK miskin dan rentan miskin yang terlindungi jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	%	PD menangani Urusan Sosial
		- Rasio Anak Terlantar yang ditangani dibanding Jumlah Anak terlantar	13,3	20	30	40	50	60	70	70	%	PD menangani Urusan Sosial
		- Prosentase rehabilitasi sarana prasarana keagamaan	0	30	0	0	0	0	0	30	%	PD menangani Urusan Sosial
7	Tenaga Kerja	- Prosentase Kesempatan Kerja	94	95	96	97	98	99	100	100	%	PD menangani Urusan Tenaga Kerja

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Prosentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	100	100	%	PD menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	- Skor Pola Pangan Harapan	91,7	92,3	92,6	92,9	93,2	93,5	93,7	93,7	%	PD menangani urusan Pangan
		- Konsumsi Kalori	2.079,9	2100	2120	2140	2160	2180	2200	2.200	Kkal/Kap /Hari	PD menangani urusan Pangan
		- Konsumsi Ikan	17,1	17,2	17,4	17,6	17,8	18	18,2	18,2	Kg/kap/tahun	PD menangani urusan Pangan
10	Pertanahan	- Prosentase lahan bersertifikat	80	82,5	85	87,5	90	92,5	95	95	%	PD menangani urusan pertanahan
11	Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas lingkungan Hidup	47,75	48,25	48,75	49,25	49,75	50,25	50,75	50,75	Indeks	PD menanganani urusan Lingkungan Hidup
		- Prosentase lahan kritis yang ditangani	30	40	50	60	70	80	90	100	%	PD menanganani urusan Lingkungan Hidup

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja		Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	-	Prosentase penduduk ber KTP	90	90,83	91,67	92,50	93,33	94,17	95	95	%	PD menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	Jumlah Desa Berdikari	2	3	4	5	7	8	9	10	Desa	PD menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		-	Prosentase kelompok Masyarakat yang mandiri	5,3	8,84	12,38	15,92	19,45	22,99	26,53	26,53	%	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		-	Prosentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir.	2	3	4	5	7	8	9	10	%	PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Pengendalian Penduduk dan KB	-	Tingkat Pertumbuhan Alami	0,38	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	%	PD menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
		- Total Fertility Rate	1,47	1,46	1,45	1,44	1,43	1,42	1,42	1,42	%	PD menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		- Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need dengan perhitungan baru)	12,57	12,06	11,56	11,06	10,56	10,06	9,56	9,56	%	PD menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		- Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) suatu cara	74,62	74,63	74,64	74,65	74,66	74,67	74,68	74,68	%	PD menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		- Rata-rata laju Pertumbuhan Penduduk	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	%	PD menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
15	Perhubungan	- Prosentase ruas jalan dengan kecepatan di bawah 40 km/jam	25	25	26	26	27	28	29	30	%	PD menangani Urusan Perhubungan
		- Angka fatalitas korban kecelakaan	80	90	100	110	120	130	140	140	Kasus/Tahun	PD menangani Urusan Perhubungan
16	Komunikasi dan Informasi	- Prosentase PD yg memanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100	100	%	PD menangani

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
		media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi										Urusan Komunikasi dan Informasi
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Prosentase peningkatan produksi UMKM	4,95	5,31	5,67	6,03	6,39	6,75	7,11	7,11	%	PD yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		- Prosentase Koperasi aktif	82	82	82	83	83	84	85	85	%	PD yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	Penanaman Modal	- Jumlah Investasi PMA/PMDN	5.333.562	5.569.128	5.804.693	6.040.259	6.275.825	6.511.390	6.746.956	6.746.956	Juta	PD menangani Urusan Penanaman Modal
19	Kepemudaan dan Olahraga	- Rasio Atlet Berprestasi	0	5	8	10	14	17	20	21	%	PD yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		- Prosentase Cabang Cabang Olahraga yang berprestasi	396	400	403	407	410	412	415	415	Unit	PD yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
		- Prosentase Pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancah nasional/internasional	45	45	46	47	48	49	50	50	%	PD yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
20	Statistik	- Jumlah publikasi data statistik	5	5	5	5	5	5	5	30	dokumen	PD menangani Urusan Statistik
21	Persandian	Tingkat ketersediaan SOP Persandian	100	100	100	100	100	100	100	100	%	PD menangani Urusan Persandian
22	Kebudayaan	- Cakupan benda, situs, kawasan budaya yang dilestarikan	193	193	193	193	193	193	193	193	Buah	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
		- Prosentase peningkatan pertunjukkan seni dan budaya daerah	5	5	5	5	5	5	5	5	%	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
		- Prosentase sarana pertunjukan seni dan budaya yang representatif	0	0	0	0	0	0	0	0	Buah	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
		- prosentase sanggar seni dan budaya yang aktif	30	35	40	45	50	55	60	60	%	PD yang menangani Urusan Kebudayaan
23	Perpustakaan	- Rasio perpustakaan tingkat Desa	33 : 150	33	34	35	36	37	38	38 : 150	rasio	PD menangani Urusan Perpustakaan

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja		Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
		-	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	16.800	18.159	19.519	20.878	22.237	23.597	24.956	24.596	orang	PD menangani Urusan Perpustakaan
24	Kearsipan												PD menangani Urusan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	-	Prosentase Kenaikan Produksi Perikanan	0,38	0,38	0,39	0,40	0,42	0,44	0,44	0,45	%	PD menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
26	Pariwisata	-	Nilai Produksi sektor Pariwisata	157.000	291.758,33	426.516,66	561.274,99	6960.033,33	830.791,65	965.549,98	965.550	Rp. Juta	PD menangani Urusan Pariwisata
27	Pertanian	-	Produktifitas Padi	75,26	75,36	75,46	75,56	75,66	75,76	75,86	75,89	Kw/ha	PD menangani Pertanian
		-	Jumlah Produksi Padi	374546	374863,7	375181,3	375499	375816,7	376134,3	376542	376452	Ton	PD menangani Pertanian
		-	Produktifitas Jagung	87,73	88,24	88,75	89,26	89,76	90,27	90,78	90,78	Kw/ha	PD menangani Pertanian
		-	Jumlah Produksi Jagung	22056	22082,5	22109	22135,5	22162	22188,5	22215	22215	Ton	PD menangani Pertanian
		-	Produktifitas Kedelai	22,17	22,35	22,53	22,71	22,89	23,07	23,25	23,25	Kw/ha	PD menangani Pertanian
		-	Jumlah Produksi Kedelai	3.950	3958	3965	3972	3979	3986	3996	3996	Ton	PD menangani

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD	
												Pertanian	
		-	Jumlah Produksi Daging	5.253,75	6.634	6.688,45	6.751,36	6.833,72	6.899,59	6.965	6.965	Ton	PD menangani Pertanian
		-	Kontribusi terhadap PDRB	9,84	9,86	9,90	9,92	9,94	9,96	9,98	10	%	PD menangani Pertanian
28	Kehutanan	-	Luas area Lahan Kritis	7405	7400	7340	7300	7290	7210	7200	7190	Ha	PD menangani Urusan Kehutanan
29	Perdagangan	-	Prosentase Pasar Rusak	53,84	50,64	47,43	44,23	41,02	37,82	34,61	34,61	%	PD menangani Urusan Perdagangan
		-	Peningkatan Nilai Ekspor	56,52	57,35	58,18	59,01	59,84	60,67	61,50	61,52	%	PD menangani Urusan Perdagangan
		-	Revitalisasi pasar	42,31	46,15	50	53,83	57,67	61,51	65,35	65,38	%	PD menangani Urusan Perdagangan
30	Perindustrian	-	Nilai Produksi	8.529.845,09	9.238.178,42	9.946.511,75	10.654.845,08	11.363.178,41	12.071.511,74	12.779.845,09	12.779.845,09	Rp. Juta	PD menangani Urusan Perindustrian
		-	Nilai Investasi	2,38	2,4	2,42	2,44	2,46	2,48	2,50	2,50	Trilyun Rupiah	PD menangani Urusan Perindustrian

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
		- Kontribusi PDRB industri pengolahan, makanan dan minuman	38,87	38,95	39,03	39,11	39,18	39,26	39,34	39,34	%	PD menangani Urusan Perindustrian
31	Transmigrasi	- Prosentase Transmigran yang diberangkatkan	100	100	100	100	100	100	100	100	%	PD menangani Urusan Transmigrasi
		- Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	10	15	20	25	30	40	45	50	%	PD yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
32	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral											
33	Fungsi Penunjang	- Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	C	B	B	B	B	B	B	B	Predikat	PD menangani Urusan Pemerintahan
		- Prosentase Pejabat yang selesai melaporkan LHKPN	100	100	100	100	100	100	100	100	%	PD menangani Urusan Pemerintahan
		- Penilaian Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penilaian	PD menangani Urusan

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD
												Pemerintah an
		- Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	%	PD menangani Urusan Pemerintahan
		- Waktu pengurusan Perijinan	7	4	4	3	3	3	3	3	hari	PD menangani Urusan Pemerintahan
		- Tingkat kapabilitas APIP	1.5	1.7	2	2,2	2,5	2,7	3	3		PD menangani Urusan Pemerintahan
		- Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	1	1,3	1,7	2,0	2,3	2,7	3	3 (level terkelola dan terukur)		PD menangani Urusan Pemerintahan
		- Prosentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	100	100	100	100	100	100	100	100	%	PD menangani Urusan Pemerintahan
		- Prosentase MOU pemerintah dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti	0	6	13	20	26	33	40	40	%	PD menangani Urusan Pemerintahan

No.	Nama Urusan	Indikator Kinerja	Awal RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir RPJMD	Satuan	PD	
C.	Aspek Daya Saing Daerah												
1	Ekonomi	-	Infrastuktur Kota dalam kondisi baik	60	65	70	75	80	85	90	90	%	PD Urusan Penunjang
3	Infrastruktur	-	Persentase Sarana dan Prasarana kegiatan ekonomi yang representatif	60	65	70	75	80	85	90	90	%	PD Urusan Pekerjaan Umum

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Kabupaten Sukoharjo akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (tahun 2016-2021); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Periodisasi RPJMD Kabupaten Sukoharjo ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2016-2021. RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, dan memperhatikan RPJMN Tahun 2014-2019 serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 - 2015, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo, Perencanaan Wilayah Terpadu dan KLHS Kabupaten Sukoharjo.

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra-PD Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni RKPD Kabupaten Sukoharjo, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sukoharjo untuk periode satu tahun.

10.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD mulai tahun 2017 hingga 2021. Perencanaan pembangunan untuk penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 - 2025 dan mengacu pada RKP Tahun 2022. Hal ini didasarkan

pada tahun 2022 merupakan masa transisi antara perodesasi RPJMD Tahun 2016 - 2021 dengan RPJMD periode 2021 - 2026, dimana dalam tahun 2022 masih dalam proses penyusunan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Manusia Kabupaten Sukoharjo baik dari Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakatnya;
- b. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang semakin meningkat dan merata serta menurunkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo;
- c. Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo yang diikuti dengan menurunnya indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan;
- d. Menurunkan angka pengangguran dengan jalan meningkatkan investasi di Kabupaten Sukoharjo terutama yang berhubungan dengan Investasi Padat Karya;
- e. Menurunkan Rumah Tidak Layak Huni yang didasarkan kepada peningkatan kualitas rumah dan fasilitas sanitasi lingkungan;
- f. Peningkatan Kualitas Infrastruktur terutama kualitas jalan, dan irigasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- g. Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat yang diikuti dengan menahan laju inflasi daerah sehingga peningkatan PDRB memberikan pengaruh nyata kepada daya beli masyarakat.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, berbagai program pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016- 2021 ini akan dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo periode berikutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, dalam periode lima tahun ke depan, diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat berkurang secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sukoharjo juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Program transisi tahun 2021 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sukoharjo agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 ini dengan sebaik baiknya.
- b. Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 ini selanjutnya dijabarkan dalam RKPD mulai tahun 2017 hingga 2021.
- c. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, berkewajiban menyusun Renstra-PD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.
- d. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun program, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.

BAB XI

PENUTUP

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5(lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, kebijakan, dan program kepaladaerah yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 secara terpadu, sinergi, dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat selama lima tahun mendatang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, DPRD Kabupaten Sukoharjo, dunia akademik, dunia usaha, dan masyarakat menuju Kabupaten Sukoharjo lebih sejahtera, maju, dan bermartabat.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

WARDOYO WIJAYA